PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA 1
Jalan Surabaya N0.2a, Malang 65115
Telp. (0341) 551971, Fax. (0341) 552976

RKAP
Tahun 2024
PERUM JASA TIRTA 1

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-63/MBU/01/2024 Jakarta, 30 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 Perum Jasa Tirta I

Yth. Direksi Perum Jasa Tirta I
Jl. Surabaya 2A, Malang 65145

Sehubungan dengan surat Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Nomor: 0233/UM/DRUT/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Jasa Tirta I Tahun 2024, serta memperhatikan surat Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I Nomor: S-27/DW/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perihal Tanggapan Atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 Perum Jasa Tirta I, dengan ini kami selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta I menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Jasa Tirta I Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Pengawas Tahun 2024:
   a. Asumsi Penyusunan RKAP 2024

Indikator	RKAP 2024
Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	5,2
Inflasi (%)	2,8
Suku Bunga (%)	6,7
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	15.000

   b. Laba Rugi (Rp Miliar)

Uraian	RKAP 2024
Pendapatan Usaha	777,80
Pengusahaan SDA	648,69
Pengusahaan Non SDA	129,11
Beban Usaha	698,00
Beban Usaha Pengelolaan SDA	578,01
Beban Usaha Pengelolaan Non-SDA	119,99
Laba (Rugi) Usaha	79,80
Pendapatan/(Beban) Keuangan bersih	13,66
Pendapatan (Beban) Lain-lain bersih	(3,99)
Laba Rugi Sebelum Pajak	89,47
Pajak Penghasilan	18,85
Laba Tahun Berjalan	70,62

c. Posisi…/2

c. Posisi Keuangan (Rp Miliar)

Uraian	RKAP 2024
Aset Lancar	660,29
Aset Tidak Lancar	766,27
Total Aset	1.426,55
Liabilitas Jangka Pendek	298,51
Liabilitas Jangka Panjang	83,29
Total Liabilitas	381,80
Ekuitas	1.044,75
Total Liabilitas & Ekuitas	1.426,55

d. Arus Kas (Rp Miliar)

Uraian	RKAP 2024
Arus Kas dari Akivitas Operasi	179,28
Arus Kas dari Akivitas Investasi	(274,77)
Arus Kas dari Akivitas Pendanaan	49,99
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	(45,50)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun	415,49
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	369,99

e. Investasi (Rp Miliar)

Uraian	RKAP 2024
Investasi Pengembalian/ Fungsi/Penggantian /Baru	189,43
Investasi Pengembangan	135,18
Penyertaan	87,00
Total	411,61

2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2024:
   a. Mengesahkan RKA Program TJSL yang dijalankan unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/*Community Involvement and Developme*nt (CID) di mana sumbernya dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Perum Jasa Tirta I, di luar Pendanaan UMK pada laporan RKA Perusahaan tahun 2024 sebesar Rp1.279.000.000.
   b. Mengesahkan RKA Program TJSL Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK tahun 2024 yang akan disalurkan melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp450.000.000 yang dicatatkan pada akun Aktiva Tidak Lancar.

3. Menetapkan…/3

3. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Direksi dan Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal.
4. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Pengawas yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal.
5. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Pengawas untuk melakukan perubahan dan relokasi anggaran antar program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% dari total investasi tahun 2024 tanpa mengubah nilai total investasi.
6. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Direksi dan Dewan Pengawas:
   a. Direksi agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Perusahaan Umum (Perum) yang melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Wilayah Sungai sesuai dengan pemenuhan KPI yang disusun oleh Kementerian PUPR.
   b. Target-target yang telah ditetapkan pada RKAP tahun 2024, baik target keuangan maupun manajemen risiko, agar dirinci menjadi target per Triwulan dan selanjutnya dilaporkan kepada Pemilik Modal secara berkala.
   c. Sehubungan dengan rendahnya serapan investasi pada kurun beberapa tahun terakhir, diminta kepada Direksi dengan pengawasan Dewan Pengawas lebih fokus untuk mengoptimalkan serapan investasi terutama investasi yang cepat menghasilkan *recurring income* dan *return* yang baik untuk mendukung peningkatan pendapatan non SDA dan laba perusahaan.
   d. Direksi agar meningkatkan koordinasi dengan seluruh *stakeholders* terutama Kementerian PUPR dalam rangka mempercepat penerbitan Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA) dan persetujuan usulan kenaikan tarif BJPSDA untuk industri di Jawa Timur.
   e. Direksi dan Dewan Pengawas diminta untuk memperkuat proses bisnis internal, termasuk pengembangan SDM melalui *Cluster Talent Committee* (CTC) serta perbaikan sistem teknologi dan informasi untuk mendorong peningkatan kinerja efisien.
   f. Direksi agar memperkuat fungsi Manajemen Risiko dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam rangka *early warning system.* Selanjutnya, Dewan Pengawas agar melakukan evaluasi atas efektivitas peran Manajemen Risiko dan SPI, serta melaporkan hasilnya kepada Pemilik Modal.
   g. Direksi agar meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi kinerja unit-unit bisnis non SDA serta anak perusahaan, sehingga keberadaan unit bisnis dan anak perusahaan tersebut dapat memberikan *value* maksimal bagi perusahaan.
   h. Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan serta rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal. Temuan-temuan tersebut agar tidak terulang kembali di kemudian hari.

i. Buku.../4

i. Buku RKAP 2024, Risalah Rapat Pembahasan RKA TJSL Tahun 2024 Nomor: RIS-32/DSI.MBU.B/12/2023 tanggal 18 Desember 2023, *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen dan KPI Dewan Pengawas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat ini dan agar mendapat perhatian serius serta ditindaklanjuti.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I,

Ditandatangani secara elektronik

ERICK THOHIR

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Wakil Menteri BUMN;
3. Sekretaris Kementerian BUMN;
4. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko;
5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;
6. Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I.

Lampiran I
Surat Menteri BUMN
Nomor : S-63/MBU/01/2024
Tanggal : 30 Januari 2024

KEY PERFOMANCE INDICATOR (KPI)
DIREKSI PERUM JASA TIRTA I TAHUN 2024

NO.	PARAMETER KPI		ESGC	Satuan	Target RKAP 2024	Polaritas	Bobot	
							Sub	Total
I	**NILAI EKONOMI & SOSIAL UNTUK INDONESIA**							**50**
I.1	**FINANSIAL**						22	
	1.	EBITDA	C	Rp miliar	133,9	*Maximize*	8	
	2.	*Cash From Operation* (CFO)	C	Rp miliar	179,28	*Maximize*	7	
	3.	*Net Profit Margin*	C	%	9,08	*Maximize*	7	
I.2	**OPERASIONAL**						16	
	1.	*Assessment River Basin Organization* (RBO)	G		3,8	*Maximize*	5	
	2.	Kinerja Sistem Keamanan Bendungan	G	%	91,92	*Maximize*	6	
	3.	Proses Penerbitan Jumlah Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA)	G	Jumlah	11	*Maximize*	5	
I.3	**SOSIAL**						12	
	1.	Penyaluran Air Baku untuk Irigasi	E	Juta m^3	2.759,00	*Maximize*	6	
	2.	Realisasi Biaya untuk Kegiatan Konservasi	E	Rp miliar	20,23	*Maximize*	6	
II	**INOVASI MODEL BISNIS**							**15**
	1.	Optimalisasi Aset SPAM	C	Rp miliar	2,69	*Maximize*	5	
	2.	Optimalisasi Aset Tidak Produktif	C	%	29,85	*Maximize*	5	
	3.	Implementasi *Roadmap* Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	C	%	100	*Maximize*	5	
III	**KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI**							**13**
	1.	Implementasi ERP	G	Waktu	TW IV	*Minimize*	7	
	2.	Standarisasi dan Optimalisasi *Water Meter*	G	Jumlah	5	*Minimize*	6	
IV.	**PENINGKATAN INVESTASI**							**12**
	1.	Prosentase Penyerapan Investasi	C	Rp Miliar	205,8	*Maximize*	6	
	2.	Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air	C	Waktu	TW IV	*Maximize*	6	

NO.	PARAMETER KPI		ESGC	Satuan	Target RKAP 2024	Polaritas	Bobot	
							Sub	Total
V	**PENGEMBANGAN TALENTA**							**10**
	1.	Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent*	S	%	10	*Maximize*	3	
	2.	Rasio Talenta Muda (<= 42 tahun) dalam *Nominated Talent*	S	%	10	*Maximize*	3	
	3.	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	S	%	90	*Maximize*	4	
Total Bobot								**100**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I,

Ditandatangani secara elektronik

ERICK THOHIR

Lampiran II
Surat Menteri BUMN
Nomor : S-63/MBU/01/2024
Tanggal : 30 Januari 2024

KEY PERFOMANCE INDICATOR (KPI)
DEWAN PENGAWAS PERUM JASA TIRTA I TAHUN 2024

NO	Program Kerja		KPI	Bobot
I	**Aspek Pengawasan & Pengarahan**			**55**
	1.	Menyelenggarakan Rapat Internal Dewan Pengawas.	12 kali	15
	2.	Memberi nasehat/saran dan usulan serta menyampaikan reviu/analisis kinerja perusahaan dalam rapat Gabungan Dewas-Direksi	12 kali	15
	3.	Memberikan rekomendasi/persetujuan atas Aksi Korporasi yang diusulkan oleh Direksi.	100%	5
	4.	Review terhadap hasil pelaksanaan Audit Tahun Buku 2023 oleh KAP.	1 Dok	10
	5.	Monitoring Kinerja Proyek dan Kunjungan Kerja Lapangan	4 Kali	10
II	**Aspek Pelaporan**			**35**
	6.	Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan	1 kali	13
	7.	Menyampaikan laporan/tanggapan/saran kepada Menteri BUMN selaku Pemilik Modal	3 Dok	10
	8.	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Tahun Buku 2023	1 kali	12
III	**Aspek Dinamis**			**10**
	9.	Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas	2 kali	10
		Jumlah		**100**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
SELAKU PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I,

Ditandatangani secara elektronik

ERICK THOHIR

KONTRAK MANAJEMEN TAHUNAN YANG MEMUAT KPI DIREKSI SECARA KOLEGIAL
ANTARA
MENTERI BUMN SELAKU
PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I
DAN
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERUM JASA TIRTA I
TAHUN 2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 bulan Januari tahun 2024 (30 - 01 - 2024), Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I yang menerima dan mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya terhitung sejak tanggal satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**, dan Menteri BUMN selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum Jasa Tirta I yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA selaku Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan Umum Jasa Tirta I, berkewajiban untuk mencapai target-target kinerja sebagaimana tercantum di dalam komitmen Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Jasa Tirta I untuk meningkatkan target RKAP Tahun 2024 termasuk target-target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara kolegial dengan indikator, pembobotan serta target kuantitatifnya yang telah disusun dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang ada serta berdasarkan prinsip kehati-hatian dan telah mempertimbangkan semua risiko yang terukur pada *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara kolegial Perusahaan Umum Jasa Tirta I pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Manajemen Tahunan ini.

Pasal 2

Sehubungan dengan kesanggupan **PIHAK PERTAMA** untuk mengupayakan pencapaian target-target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara kolegial Tahun 2024 tersebut di atas, maka atas pencapaian target-target KPI dimaksud **PIHAK KEDUA** akan memberikan penghargaan atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Kontrak Manajemen Tahunan ini dibuat oleh para pihak dengan penuh kesadaran dan itikad baik untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

METERAI TEMPEL
C40AKX302025893

FAHMI HIDAYAT	MILFAN RANTAWI	MUKHAMAD TAUFIQ
Direktur Utama	Direktur Operasional	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya, dan Manajemen Risiko

PIHAK KEDUA
MENTERI BUMN SELAKU PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

ERICK THOHIR
Menteri BUMN

MENGETAHUI,

DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

SUPRIANTO	MUHAMMAD MAHFUD FAOZI	ANITA ARIYANI
Ketua	Anggota	Anggota

Demikian Kontrak Manajemen Tahunan ini dibuat oleh para pihak dengan penuh kesadaran dan itikad baik untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

FAHMI HIDAYAT	MILFAN RANTAWI	MUKHAMAD TAUFIQ
Direktur Utama	Direktur Operasional	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya, dan Manajemen Risiko

PIHAK KEDUA
MENTERI BUMN SELAKU PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

METERAI TEMPEL
10000
D21CBAKX302025892

ERICK THOHIR
Menteri BUMN

MENGETAHUI,

DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

SUPRIANTO	MUHAMMAD MAHFUD FAOZI	ANITA ARIYANI
Ketua	Anggota	Anggota

Demikian Kontrak Manajemen Tahunan ini dibuat oleh para pihak dengan penuh kesadaran dan itikad baik untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

FAHMI HIDAYAT	MILFAN RANTAWI	MUKHAMAD TAUFIQ
Direktur Utama	Direktur Operasional	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya, dan Manajemen Risiko

PIHAK KEDUA
MENTERI BUMN SELAKU PEMILIK MODAL
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

ERICK THOHIR
Menteri BUMN

MENGETAHUI,

DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I

METERAI TEMPEL
C27AKX302025891

SUPRIANTO	MUHAMMAD MAHFUD FAOZI	ANITA ARIYANI
Ketua	Anggota	Anggota

Lampiran I
Kontrak Manajemen Perum Jasa Tirta I
Tahun 2024

KEY PERFORMANCE INDICATORS TAHUN 2024

PERUM JASA TIRTA I

NO.	PARAMETER KPI	ESGC	Satuan	Target RKAP 2024	Polaritas	Bobot	
						Sub	Total
I	**NILAI EKONOMI & SOSIAL UNTUK INDONESIA**						**50,0**
I.1	**FINANSIAL**						
	1. EBITDA	C	Rp miliar	133,90	*Maximize*	8,0	
	2. *Cash From Operation* (CFO)	C	Rp miliar	179,28	*Maximize*	7,0	
	3. *Net Profit Margin*	C	%	9,08	*Maximize*	7,0	
I.2	**OPERASIONAL**						
	1. *Assessment River Basin Organization* (RBO)	G		3,8	*Maximize*	5,0	
	2. Kinerja Sistem Keamanan Bendungan	G	%	91,92	*Maximize*	6,0	
	3. Proses Penerbitan Jumlah Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA)	G	Jumlah	11	*Maximize*	5,0	
I.3	**SOSIAL**						
	1. Penyaluran Air Baku untuk Irigasi	E	Juta m^3	2.759,00	*Maximize*	6,0	
	2. Realisasi Biaya untuk Kegiatan Konservasi	E	Rp miliar	20,23	*Maximize*	6,0	
II	**INOVASI MODEL BISNIS**						**15,0**
	1. Optimalisasi Aset SPAM	C	Rp miliar	2,69	*Maximize*	5,0	
	2. Optimalisasi Aset Tidak Produktif	C	%	29,85	*Maximize*	5,0	
	3. Implementasi *Roadmap* Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	C	%	100,00	*Maximize*	5,0	
III	**KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI**						**13,0**
	1. Implementasi ERP	G	Waktu	TW IV	*Minimize*	7,0	
	2. Standarisasi dan Optimalisasi *Water Meter*	G	Jumlah	5	*Minimize*	6,0	

NO.	PARAMETER KPI	ESGC	Satuan	Target RKAP 2024	Polaritas	Bobot	
						Sub	Total
IV.	**PENINGKATAN INVESTASI**						**12,0**
	1. Prosentase Penyerapan Investasi	C	Rp Miliar	205,80	*Maximize*	6,0	
	2. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air	C	Waktu	TW IV	*Maximize*	6,0	
V	**PENGEMBANGAN TALENTA**						**10,0**
	1. Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent*	S	%	10	*Maximize*	3,0	
	2. Rasio Talenta Muda (<= 42 tahun) dalam *Nominated Talent*	S	%	10	*Maximize*	3,0	
	3. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	S	%	90,0	*Maximize*	4,0	
	Total Bobot						**100,0**

Lampiran II
Kontrak Manajemen Perum Jasa Tirta I
Tahun 2024

HAL-HAL YANG PERLU MENJADI PERHATIAN DALAM PENCAPAIAN KONTRAK MANAJEMEN

A. Tabel Ringkasan Aksi Korporasi yang Membutuhkan Persetujuan Pemilik Modal

No	Aksi Korporasi	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Perkiraan Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penyertaan Modal Anak Perusahaan	40,00	Mei 2024	
2	PLTS Apung Sutami	16,00	September 2024	Penyertaan
3	PLTS Apung Kedungombo	15,00	Juli 2024	Penyertaan
4	PLTS Apung Wonogiri	15,00	Juli 2024	Penyertaan
5	Penyiapan Lahan *Data Center*	1,00	Juli 2024	Penyertaan

B. Tabel Ringkasan Capex

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
I	**INVESTASI PENGEMBALIAN FUNGSI/ PENGGANTIAN/ BARU**					
A	**Tanah, Bangunan dan Gedung**					
1	Tanah untuk Spoilbank (Kemiri II)	*Expansion*	*Land*	*General*	4,200	Fasilitas Pengerukan
2.	Pembangunan Gudang Tangki Timbun BBM	*New Project*	*Building*	*General*	0,700	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
3.	Pembangunan IPAL (Sengguruh, Sutami, Wlingi, Lodoyo)	*New Project*	*Building*	*General*	1,000	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
4.	Penggantian Karet Bendung Karet Menturus	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	9,900	Perbaikan Bendung/ Bendungan
5.	Penyusunan DED Penggantian Karet Bendung Karet Menturus	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,099	Perbaikan Bendung/ Bendungan
6.	Pengawasan Penggantian Karet Bendung Karet Menturus	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,198	Perbaikan Bendung/ Bendungan
7.	Penataan Landscaping Kantor DJA III	*New Project*	*Building*	*General*	1,101	Perbaikan Bangunan
8.	Revitalisasi Kantor Medan	*Maintenance*	*Building*	*General*	1,200	Perbaikan Bangunan

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
9.	Review DED Revitalisasi Kantor Medan	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,024	Perbaikan Bangunan
10.	Pengawasan Revitalisasi Kantor Medan	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,048	Perbaikan Bangunan
11.	Pembangunan Kantor Simangkuk Tahap I	*New Project*	*Building*	*General*	0,500	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
12.	Penyusunan DED Pembangunan Kantor Simangkuk	*New Project*	*Building*	*General*	0,300	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
13.	Pengawasan Pembangunan Kantor Simangkuk Tahap I	*New Project*	*Building*	*General*	0,048	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
14.	Pembangunan LKA Parapat Tahap II	*New Project*	*Building*	*General*	6,515	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
15.	Pengawasan Pembangunan LKA Parapat Tahap II	*New Project*	*Building*	*General*	0,572	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
16.	Perbaikan Kantor DJA I (luncuran 2023)	*Maintenance*	*Building*	*General*	2,556	Perbaikan Bangunan
17.	Penggantian Karet Bendung Karet Gubeng	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	12,417	Perbaikan Bendung/ Bendungan
18.	Review DED Penggantian Karet Bendung Karet Gubeng	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,124	Perbaikan Bendung/ Bendungan
19.	Pengawasan Penggantian Karet Bendung Karet Gubeng	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,248	Perbaikan Bendung/ Bendungan
20.	Pembangunan Pos Security Kantor Parapat (Luncuran 2023)	*New Project*	*Building*	*General*	0,065	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
21.	Perbaikan Ruang Kerja Level 1 Include furniture (Luncuran 2023)	*Maintenance*	*Building*	*General*	1,100	Perbaikan Bangunan

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
22.	Pembangunan Kantor Cilacap	*New Project*	*Building*	*General*	7,000	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
23.	Review DED Pembangunan Kantor Cilacap	*New Project*	*Building*	*General*	0,140	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
24.	Pengawasan Pembangunan Kantor Cilacap	*New Project*	*Building*	*General*	0,280	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
25.	Perbaikan Ruang Kerja DAK, DPK, dan DPKU	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,500	Perbaikan Bangunan
26.	Refurbishment Hall Tirta Loka Wonorejo (Luncuran 2023)	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,614	Perbaikan Bangunan
27.	Renovasi Cottage dan Penggantian Furniture Cottage Wonorejo (Luncuran 2023)	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,434	Perbaikan Bangunan
28.	Pembuatan Loket Wisata & Gapura Pintu Masuk Taman Wisata Selorejo (luncuran 2023)	*New Project*	*Building*	*General*	0,054	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
29.	Pembuatan Gapura Kambal Taman Wisata Selorejo	*New Project*	*Building*	*General*	0,397	Pembangunan fasilitas dalam rangka meingkatkan pelayanan
30.	Renovasi Gedung Transito Pariwisata Sutami-Lahor	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,700	Perbaikan Bangunan
31.	Renovasi gedung Serba Guna Karangkates	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,594	Perbaikan Bangunan
32.	Renovasi Restoran Teratai Taman Wisata Sutami	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,645	Perbaikan Bangunan
33.	Renovasi Bangunan Kantor Pariwisata Waduk Bening (Luncuran 2023)	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,429	Perbaikan Bangunan

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
B	**Prasarana & Sarana SDA**					
1.	Pengadaan Monorail Stop Log PA Bendo	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,500	Perbaikan Bendung/ Bendungan
2.	Penyusunan DED Pengadaan Monorail Stop Log PA Bendo	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,030	Perbaikan Bendung/ Bendungan
3.	Pengawasan Pengadaan Monorail Stop Log PA Bendo	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,020	Perbaikan Bendung/ Bendungan
4.	Pengadaan Penangkal Petir Wonorejo, Genset,	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,100	Penunjang Operasional
5.	Pengadaan AWLR Kali Kuncir Kanan dan Kiri	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,250	Peralatan Telemetri
6.	Pengadaan AWLR Kali Kedung Soko	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,125	Peralatan Telemetri
7.	Pengadaan ARR Hulu Kali Kedurus	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,100	Peralatan Telemetri
8.	Pengadaan AWLR Kali Tengah	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,125	Peralatan Telemetri
9.	Pengadaan AWLR Kepajaran	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,125	Peralatan Telemetri
10.	Sensor WQMS	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,250	Peralatan Telemetri
11.	Pengadaan AWLR Kali Srinjing	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,125	Peralatan Telemetri
12.	Pengadaan ARR Kali Srinjing	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,100	Peralatan Telemetri
13.	AWLR WS Serayu Bogowonto (S Sawangan, S Gede, S Kracak)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,390	Peralatan Telemetri
14.	ARR WS Serayu Bogowonto	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,380	Peralatan Telemetri
15.	ARR WS Jratun Seluna	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,250	Peralatan Telemetri
16.	Stasiun ARR Hulu Mandosi dan Bolon	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,150	Peralatan Telemetri

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
17.	Stasiun AWLR Sungai Mandosi	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,150	Peralatan Telemetri
18.	Peremajaan AWLR WS Brantas (Sensor Radar + Internet Based)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,300	Peralatan Telemetri
19.	Peremajaan ARR WS Brantas (Sensor Radar + Internet Based)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,260	Peralatan Telemetri
20.	Turbidity Meter Portable	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,060	Peralatan Telemetri
21.	Stasiun Pemantauan Kualitas Air Online WQMS (Luncuran 2023)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,878	Peralatan Telemetri
22.	Upgrade Water Quality Monitoring System/WQMS Sutami dan Selorejo (Luncuran 2023)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,868	Peralatan Telemetri
23.	AWLR WS Jratunseluna (Luncuran 2023)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,605	Peralatan Telemetri
24.	Upgrade Peralatan Telemetri AWLR Berbasis Layanan Data (Luncuran 2023)	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,336	Peralatan Telemetri
25.	Upgrade Peralatan Telemetri ARR Berbasis Layanan Data (Luncuran 2023)	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,254	Peralatan Telemetri
26.	Refurbishment Bendung Colo (Penggantian Pintu Irigasi Colo Barat dan Colo Timur serta Pengecatan Pintu Scouring dan Canopy Bendung Colo)	*Maintenance*	*Building*	*General*	2,800	Perbaikan Bendung/ Bendungan
27.	Penyusunan DED Refurbishment Bendung Colo (Penggantian	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,065	Perbaikan Bendung/ Bendungan

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
	Pintu Irigasi Colo Barat dan Colo Timur serta Pengecatan Pintu Scouring dan Canopy Bendung Colo)					
28.	Pengawasan Refurbishment Bendung Colo (Penggantian Pintu Irigasi Colo Barat dan Colo Timur serta Pengecatan Pintu Scouring dan Canopy Bendung Colo)	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,084	Perbaikan Bendung/ Bendungan
29.	Refurbishment BG Bojonegoro (Pengecatan Pintu dan Prasarana Pendukung, Perbaikan Sistem Control Remote dan Kalibrasi Bukaan Pintu, Perbaikan Rel Gantry Crane BG Bojonegoro)	*Maintenance*	*Building*	*General*	1,250	Perbaikan Bendung/ Bendungan
30.	Penyusunan DED Refurbishment BG Bojonegoro (Pengecatan Pintu dan Prasarana Pendukung, Perbaikan Sistem Control Remote dan Kalibrasi Bukaan Pintu, Perbaikan Rel Gantry Crane BG Bojonegoro)	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,025	Perbaikan Bendung/ Bendungan
31.	Pengawasan Refurbishment BG Bojonegoro (Pengecatan Pintu dan Prasarana Pendukung, Perbaikan Sistem Control Remote dan Kalibrasi	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,037	Perbaikan Bendung/ Bendungan

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
	Bukaan Pintu, Perbaikan Rel Gantry Crane BG Bojonegoro)					
32.	Refurbishment BG Babat (Pengecatan Pintu dan Prasarana Pendukung serta Perbaikan Control House BG Babat)	*Maintenance*	*Building*	*General*	1,250	Perbaikan Bendung/ Bendungan
33.	Penyusunan DED Refurbishment BG Babat (Pengecatan Pintu dan Prasarana Pendukung serta Perbaikan Control House BG Babat)	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,025	Perbaikan Bendung/ Bendungan
34.	Pengawasan Refurbishment BG Babat (Pengecatan Pintu dan Prasarana Pendukung serta Perbaikan Control House BG Babat)	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,037	Perbaikan Bendung/ Bendungan
35.	Refurbishment BG Sembayat (Pengecatan Pintu dan Prasarana Pendukung serta Perbaikan Gearbox Pintu BG Sembayat)	*Maintenance*	*Building*	*General*	1,100	Perbaikan Bendung/ Bendungan
36.	Penyusunan DED Refurbishment BG Sembayat (Pengecatan Pintu dan Prasarana Pendukung serta Perbaikan Gearbox Pintu BG Sembayat)	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,022	Perbaikan Bendung/ Bendungan
37.	Pengawasan Refurbishment BG Sembayat (Pengecatan Pintu dan Prasarana	*Maintenance*	*Building*	*General*	0,033	Perbaikan Bendung/ Bendungan

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
	Pendukung serta Perbaikan Gearbox Pintu BG Sembayat)					
38.	Penggantian Lifting Beam dan Cabin monorail Bendung Lodoyo	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,500	Perbaikan Bendung/ Bendungan
C	**Peralatan Mesin**					
1.	Cutter Suction Dredger (Luncuran 2023)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	43,245	Peralatan Pengerukan
2.	Review DED Cutter Suction Dredger	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,216	Peralatan Pengerukan
3.	Pengawasan Cutter Suction Dredger	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	1,730	Peralatan Pengerukan
4.	Sepeda Motor Roda Tiga	*New Project*	*Vehicles*	*General*	0,035	Penunjang Operasional
5.	Motor Trail	*New Project*	*Vehicles*	*General*	0,040	Penunjang Operasional
6.	Perbaikan Set Dredger SKK 12	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	1,500	Peralatan Pengerukan
7.	Penyusunan Desain Perbaikan Set Dredger SKK 12	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,030	Peralatan Pengerukan
8.	Pengawasan Perbaikan Set Dredger SKK 12	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,045	Peralatan Pengerukan
9.	Genset SPAM Brondong	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,400	Penunjang Operasional
10.	Kendaraan Roda 3 SPAM Sekaran	*New Project*	*Vehicles*	*General*	0,035	Penunjang Operasional
11.	Pompa Intake SPAM Sekaran	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,075	Penunjang Operasional
12.	Mesin Pencuci Galon	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,200	Penunjang Operasional
13.	Mesin Bottle Filing AMDK	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	1,000	Penunjang Operasional
14.	Shuttle Bus Mini Pariwisata	*New Project*	*Vehicles*	*General*	0,300	Penunjang Operasional
15.	Peralatan Laboratorium Malang Udara (Luncuran 2023 100%)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	1,050	Penunjang Operasional

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
16.	Peralatan Laboratorium Malang (Luncuran 2023 100%)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,946	Penunjang Operasional
17.	Peralatan Laboratorium Mojokerto (Luncuran 2023 80%)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	1,171	Penunjang Operasional
18.	Perbaikan Alat TOC Analyser	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,200	Penunjang Operasional
19.	Perbaikan Alat Laboratorium Malang	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,200	Penunjang Operasional
20.	Perbaikan Alat Laboratorium Mojokerto	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,200	Penunjang Operasional
21.	Perbaikan Alat Laboratorium Solo	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,200	Penunjang Operasional
22.	Peralatan Autoclave Laboratorium Lingkungan Malang	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,150	Penunjang Operasional
23.	Peralatan Autoclave Laboratorium Lingkungan Mojokerto	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,150	Penunjang Operasional
24.	Peralatan Mikrobiologi Laboratorium Lingkungan Solo	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,550	Penunjang Operasional
25.	Genset Kantor Pusat	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,400	Penunjang Operasional
26.	Steel Sheet Pile	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	1,434	Penunjang Operasional
27.	Pompa Filing Penstock - Div Energi	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,250	Peralatan PLTM
28.	Trafo Auxilary - DIV Energi	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,250	Peralatan PLTM
29.	Replating Side Pontoon SKK 06 (Luncuran 2023)	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,530	Peralatan Pengerukan
30.	Main Engine SKK 04 Waterman (Incl. Pemasangan)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	3,000	Peralatan Pengerukan

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
31.	Pontoon SKK 04 Waterman (Luncuran 2023 100%)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	1,610	Peralatan Pengerukan
32.	Mobil Operasional	*New Project*	*Vehicles*	*General*	0,700	Penunjang Operasional
33.	Alat Survei Topografi	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,400	Penunjang Operasional
34.	Perahu PE & engine 40 PK	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,400	Peralatan Pengerukan
35.	Pengadaan AUTOMATIC TRANSFER SWITCH (ATS)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,100	Penunjang Operasional
36.	Self Loader (Luncuran 2023 Loader Crane 5 T)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	2,300	Peralatan Pengerukan
37.	Doozer D53 (Luncuran 2023 100%)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	4,000	Peralatan Pengerukan
38.	Pipa HDPE 6 meter Flange joint + Floater Pipe (Luncuran 2023)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	5,257	Peralatan Pengerukan
39.	Conveyor Eceng Gondok Kanal Tuntang WS Jratun Seluna (Luncuran 2023)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,400	Penunjang Operasional
40.	Mobil Crane Kapasitas 3 Ton BG Klambu (Luncuran 2023)	*New Project*	*Vehicles*	*General*	1,300	Penunjang Operasional
41.	Mini Amphibious Excavator (Luncuran 2023)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	4,626	Peralatan Pengerukan
42.	Truk Tangki Kapasitas 5000 liter (Luncuran 2023)	*New Project*	*Vehicles*	*General*	0,703	Peralatan Pengerukan
43.	Perahu HDPE + mesin 8 PK	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,250	Peralatan Pengerukan
44.	Genset BK Sedayu Lawas	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,035	Penunjang Operasional
45.	Roll Plat (luncuran 2023)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,165	Penunjang Operasional

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
46.	Amphibious PC70 (luncuran)	New Project	Machinery, Plants & Equipment	General	4,761	Peralatan Pengerukan
47.	Perbaikan Engine SKK 04 (luncuran)	Maintenance	Machinery, Plants & Equipment	General	0,219	Peralatan Pengerukan
48.	Gearbox Kapal keruk SKK 06	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,806	Peralatan Pengerukan
49.	Perbaikan HCE 30 (Bendung Klambu)	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,090	Peralatan Pengerukan
D	**Peralatan Kantor**					
1.	Laptop	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,369	Penunjang Operasional
2.	PC Desktop	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,138	Penunjang Operasional
3.	Upgrading Fasilitas Ruang Rapat Sub DJA III/1 (Video Conference Equipment Set, Sound System,	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,150	Penunjang Operasional
4.	UPS Command Center	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,150	Penunjang Operasional
5.	Printer A3	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,030	Penunjang Operasional
6.	TV Set TCL 65 Inch w hanging bracket	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,048	Penunjang Operasional
7.	Videotron Ruang Rapat I dan Perbaikan Interior	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,800	Penunjang Operasional
E	**Peralatan Umum**					
1.	Pengadaan Camera Drone	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,040	Peralatan Pengukuran
2.	GPS RTK	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,700	Peralatan Pengukuran
3.	Grease Pump Pneumatic Compressor	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,080	Peralatan Pengukuran
4.	Flowmeter Ultrasonic Portable	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,150	Peralatan Pengukuran
5.	Flowmeter Ultrasonic portable (WS	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,200	Peralatan Pengukuran

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
	Serayu Bogowonto)					
6.	Flowmeter Ultrasonic (Luncuran)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,500	Peralatan Pengukuran
7.	CCTV	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,505	Penunjang Operasional
8.	Current Meter	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,050	Penunjang Operasional
9.	Flowmeter Ultrasonic (SDJA IV/2)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,900	Peralatan Pengukuran
10.	PLTS on Grid Workshop Peralatan	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,249	Penunjang Operasional
11.	PLTS on Grid Lainnya	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,250	Penunjang Operasional
12.	Digital Signage	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,040	Penunjang Operasional
F	**Pengembangan IT**					
1.	ERP System					
a.	Principle ATS SAP Infrastructure/SAP on Cloud	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	4,559	Pengembangan IT
b.	Perencanaan SAP on Cloud	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	0,350	Pengembangan IT
c.	Pengadaan Lisensi User ID SAP 8 User (Luncuran 2023 100%)	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	0,600	Pengembangan IT
d.	Principle ATS hardware (Luncuran 2023 100%)	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	3,491	Pengembangan IT
2.	Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi Perusahaan					
a.	Upgrading SWMS	*Maintenance*	*IT Equipments*	*General*	0,300	Pengembangan IT
b.	Aplikasi Pendukung Proses Bisnis	*Maintenance*	*IT Equipments*	*General*	0,150	Pengembangan IT
c.	Firewall DRC	*Maintenance*	*IT Equipments*	*General*	0,500	Pengembangan IT
d.	Upgrading E-Water (Smart Water	*Maintenance*	*IT Equipments*	*General*	0,080	Pengembangan IT

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
	Management System/SWMS) (Luncuran 2023)					
3.	DRC non SAP	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	3,000	Pengembangan IT
4.	Aplikasi AKNOP	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	0,500	Pengembangan IT
5.	Pengembangan E GRC	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	0,300	Pengembangan IT
6.	Security Information and Event Management SIEM/Analytic Tool (Luncuran 2023 100%)	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	0,248	Pengembangan IT
7.	IT Infrastructure					
	- Oracle Standard R2 (Luncuran 2023)	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	2,365	Pengembangan IT
	- Server DRC (Luncuran 2023)	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	0,497	Pengembangan IT
8	Aplikasi SCADA	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	0,619	Pengembangan IT
G	**Peralatan Keamanan Bendungan**					
1.	Benchmark CORS System DAS Brantas	*New Project*	*IT Equipments*	*General*	2,000	Aplikasi Keamanan Bendungan
2.	Pengadaan instalasi EPM - Piezometer	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,150	Peralatan Keamanan Bendungan
3.	Pengadaan instalasi Panel & MotorHJV	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,200	Peralatan Keamanan Bendungan
4.	Pengadaan Racking Upgrade Pintu Siphon Elektrik	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,200	Peralatan Keamanan Bendungan
5.	Penggantian Pore Pressure Meter Bend. Wlingi	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	2,000	Peralatan Keamanan Bendungan
6.	Telemetri Pemantauan Tekanan Air Pori Wonogiri (Luncuran 2023)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,350	Peralatan Keamanan Bendungan
7.	Telemeteri Rembesan Bendungan Wlingi (VS,RG)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,400	Peralatan Keamanan Bendungan
8.	Alat Ukur Multi Parameter Test	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,100	Peralatan Keamanan Bendungan

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
9.	Telemeteri Rembesan Bendungan Jatibarang (SM 1,2)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,400	Peralatan Keamanan Bendungan
10.	Telemeteri Rembesan Bendungan Kedungombo (W 2)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,200	Peralatan Keamanan Bendungan
11.	Telemeteri Rembesan Bendungan Bening (Rembesan A, B, C)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,600	Peralatan Keamanan Bendungan
12.	Telemeteri Rembesan Bendungan Selorejo (RA, Toe dam)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,400	Peralatan Keamanan Bendungan
13.	Telemeteri Rembesan Bendungan Lahor (Toe dam)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,200	Peralatan Keamanan Bendungan
14.	Penggantian PPM Bendungan Lahor (Luncuran 2023)	*Maintenance*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	1,745	Peralatan Keamanan Bendungan
15.	Inklinometer Wonogiri (luncuran 2023)	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,500	Peralatan Keamanan Bendungan
16.	Telemetri Rembesan Bendungan Wlingi (OPR,OPL) luncuran 2023	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,230	Peralatan Keamanan Bendungan
17.	Telemetri Pemantau Rembesan Inspection Gallery Wonorejo	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,600	Peralatan Keamanan Bendungan
18.	Telemetri Peralatan Klimatologi Waduk Wonorejo	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,200	Peralatan Keamanan Bendungan
19.	Telemetri Pemantau GWL Bendungan Wonorejo	*New Project*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,600	Peralatan Keamanan Bendungan
II	**INVESTASI PENGEMBANGAN**					
A	**Pengembangan Jasa Air/ SPAM**					
1.	Pengembangan SPAM Karangbinangun	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	5,000	Pengembangan SPAM

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
2.	Pembangunan Jembatan SPAM Malang	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	4,500	Pengembangan SPAM
3.	Pembangunan SPAM Kota Malang Tahap II	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	2,000	Pengembangan SPAM
4.	Perencanaan Pengawasan Pembangunan SPAM Kota Malang Tahap II	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,700	Pengembangan SPAM
5.	Pembangunan SPAM Kota Malang (Luncuran 2023)	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	15,411	Pengembangan SPAM
6.	Perencanaan dan Pengawasan MK EPC SPAM Kota Malang (luncuran)	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,358	Pengembangan SPAM
7.	Penyusunan AMDAL SPAM Kota Malang (luncuran)	*Expansion*	*Other Tangible Asset*	*General*	0,291	Pengembangan SPAM
B	**Pengembangan Jasa Non Air**					
1.	Penanaman Kaliandra untuk Wood Pellet	*Expansion*	*Other Tangible Asset*	*General*	0,650	Pengembangan EBT
2.	Pengembangan Lanjutan Taman Wisata Waruturi	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	1,000	Peningkatan Pelayanan & Fasilitas
3.	Pembangunan Joglo Wisata Waruturi	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,800	Peningkatan Pelayanan & Fasilitas
4.	Pengembangan Taman Wisata Selorejo	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	1,600	Peningkatan Pelayanan & Fasilitas
5.	Renovasi Gedung Gardu Pandang Taman Wisata bendungan Bening	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,582	Peningkatan Pelayanan & Fasilitas
6.	Pengembangan Laboratorium Mojokerto (IPAL & TPS Limbah B3) (Luncuran 2023 50%)	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	0,498	Peningkatan Pelayanan & Fasilitas
7.	Peralatan Laboratorium Lingkungan Solo	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General*	1,969	Peningkatan Pelayanan & Fasilitas
8.	PLTS Koba 10 MW (SPC PT SENEKO)	*Expansion*	*Machinery, Plants & Equipment*	*General dan Project Funding*	99,816	Pembangkitan baru

No	Nama Capex	Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan	Perkiraan Nominal (Rp Miliar)	Keterangan
III	**PENYERTAAN**					
1.	PLTS Apung Sutami	*Expansion*	*Other Intangible Asset*	*General*	16,000	Penyertaan Modal
2.	PLTS Apung Kedungombo	*Expansion*	*Other Intangible Asset*	*General*	15,000	Penyertaan Modal
3.	PLTS Apung Wonogiri	*Expansion*	*Other Intangible Asset*	*General*	15,000	Penyertaan Modal
4.	Penyertaan Modal Anak Perusahaan	*Expansion*	*Other Intangible Asset*	*General*	40,000	Penyertaan Modal
5.	Penyiapan Lahan Data Center	*Expansion*	*Other Intangible Asset*	*General*	1,000	Penyertaan Modal

Panduan Pengisian Kolom Capex

Karakteristik Capex	Tipe Aset	Sumber Pendanaan
1. New Project	1. Land	1. General
2. Maintenance	2. Building	2. Project Funding
3. Expansion	3. Factory	
	4. Machinery, Plants & Equipment	
	5. Vehicles	
	6. IT Equipments	
	7. Other Tangible Asset	
	8. Concession	
	9. Mining, Oil, & Gas Asset	
	10. Other Intangible Asset	

Lampiran III
Kontrak Manajemen Perum Jasa Tirta I
Tahun 2024

GLOSSARY KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
PERUM JASA TIRTA I TAHUN 2024

I. Perspektif Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia

I.1. Aspek Financial / 1. EBITDA	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
Nama KPI	**EBITDA**			
Definisi KPI	Indikator yang menggambarkan kemampuan laba dari aktivitas operasional Perusahaan berikut dengan memperhitungkan beban depresiasi / amortisasi / deplesi /keuntungan (rugi) transaksi forex/pendapatan dari entitas asosiasi dan JV			
Tujuan KPI	Tercapainya target Nilai EBITDA yang lebih baik dari tahun sebelumnya			
Satuan yang Digunakan	Rp miliar			
Formula Penilaian	EBITDA: *Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses +Gain/ (Loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture* *Operating Income=(revenue – Cost of Goods Sold – Operating Expenses=* (Pendapatan Usaha – Beban Usaha)			
Target	**133.90**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	71.95	87.63	81.18	133.90
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Keuangan Triwulanann dan Audited Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

I.1. Aspek Financial / 2. Cash From Operation	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
Nama KPI	**Cash From Operation**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional perusahaan			
Tujuann KPI	Tercapainya target Nilai CFO yang lebih baik dari tahun sebelumnya.			
Satuan yang Digunakan	Rp Miliar			
Formula Penilaian	CFO: Total Penerimaan Kas dan Setara Kas dari kegiatan operasi - Total Pengeluaran Kas dan Setara Kas dari kegiatan operasi			
Target	**179,28**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	117,61	131,64	158,62	179,28

Polaritas	*Maximize*
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko
Sumber Data	Laporan Keuangan Triwulanann dan Audited Tahunan
Jenis Pengukuran	Take Last Known

I.1. Aspek Financial/ 3. Net Profit Margin	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
Nama KPI	***Net Profit Margin***			
Definisi KPI	Indikator yang mengukur profitabilitas perusahaan dari pendapatan operasi dan non-operasi setelah memperhitungkan seluruh biaya dan pajak pada tahun berjalan			
Tujuan KPI	Mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam rangka mencapai laba yang ditargetkan			
Satuan yang Digunakan	%			
Formula Penilaian	Net Profit Margin = Laba Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan Usaha			
	• Laba Bersih Tahun Berjalan = Total pendapatan dikurangi *cost of good sold*, pendapatan dan biaya operasi, pendapatan dan biaya non-operasi, serta pajak, pada tahun berjalan			
	• Pendapatan Usaha = Pendapatan SDA + Pendapatan Non SDA			
Target	**9,08**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	25,55	13.86	6.54	9,08
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Keuangan Triwulanann dan Audited Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

I.2. Aspek Operasional/ 1. Assessment River Basin Organization (RBO)	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA
Nama KPI	**Assessment River Basin Organization (RBO)**
Definisi KPI	Indikator untuk mengukur kinerja RBO (BBWS, BWS, BPSDA, PJT) yang digunakan oleh Kementerian PUPR untuk menggambarkan kinerja dalam penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di wilayah sungai yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, keterpaduan pengelolaan SDA, serta berupaya dalam melaksanakan kinerja berbasis hasil (output) untuk terwujudnya manfaat (outcome) yang bisa dirasakan oleh pengguna SDA.

Tujuan KPI	Mengetahui pencapaian kinerja *River Basin Oganization Performance Benchmarking* (RBO-PB) yang mencerminkan upaya perwujudan pelayanan pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan melalui perolehan capaian skor RBO-PB			
Satuan yang Digunakan	Skor			
Formula Penilaian	Capaian Skor Akhir RBO Indeks			
	Bidang penilain kinerja kritis dalam RBO-PB			
	1. Misi dan Strategi			
	2. Pemilik Kepentingan			
	3. Pembelajaran dan Pertumbuhan			
	4. Tata Kelola Internal Organisasi			
	5. Keuangan			
	Capaian:			
	1. Nilai RBO indeks = > 100% : Baik, Skor 110			
	2. Nilai RBO indeks = 90% < x < 100% : Baik (100%)			
	3. Nilai RBO indeks = 80% < x < 90% : Cukup (90%)			
	4. Nilai RBO indeks = 60% < x < 80% : Kurang (80%)			
	5. Nilai RBO indeks = < 60% : Buruk (60%)			
Target	**3.80**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	-	-	-	3.80
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Skor Pelaksanaan Assessment RBO-PB dari Kementerian PUPR			
Jenis Pengukuran	Take Last Known			

I.2. Aspek Operasional/ 2. Kinerja Sistem Keamanan Bendungan	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA
Nama KPI	**Kinerja Sistem Keamanan Bendungan**
Definisi KPI	Indikator yang menggambarkan kinerja sistem keamanan bendungan dari hasil monitoring terhadap instrumentasi bendungan, pelaksanaan inspeksi dan kondisi waduk. Bendungan yang dinilai adalah 8 (delapan) bendungan besar di Wilayah Sungai Kali Brantas dan Wilayah Sungai Bengawan Solo.
Tujuan KPI	Mengukur kinerja bendungan dari parameter penilaian yang telah ditetapkan
Satuan yang Digunakan	Skor
Formula Penilaian	Formula : Average hasil penilaian kinerja sistem keamanan bendungan
	Komponen penilain kinerja keamanan bendungan:

	1. Hasil Pengamatan Instrumentasi, terdiri dari parameter kecukupan jumlah, kondisi alat, hasil pengamatan dan pelaporan			
	2. Inspeksi, terdiri dari pelaksanaan, pelaporan dan monitoring tindak lanjut			
	3. Kondisi Waduk, terdiri dari kualitas air waduk (pengukuran dan pelaporan) dan kebersihan waduk (vegetasi dan sampah waduk)			
	Capaian:			
	1. rerata penilaian kinerja bendungan = 80% ≤ x < 100 %: Baik, Skor 110			
	2. rerata penilaian kinerja bendungan = 70% ≤ x < 80 % : Cukup, Skor 100			
	3. rerata penilaian kinerja bendungan = 55% ≤ x < 70 %: Kurang, Skor 80			
	4. rerata penilaian kinerja bendungan = x < 55% : Buruk, Skor 60			
Target	**91,92**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	91,78	91,84	91,88	91,92
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Keamanan Bendungan			
Jenis Pengukuran	Sum			

I.2. Aspek Operasional/ 3. Proses Penerbitan Jumlah Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA)	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA
Nama KPI	**Proses Penerbitan Jumlah Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA)**
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan potensi penambahan pemanfaat yang memiliki SIPSDA (termasuk pemanfaat yang memperpanjang atau memperbaharui SIPSDA) di wilayah kerja PJT I
Tujuan KPI	Penambahan jumlah pemanfaat yang memiliki SIPSDA hidup
Satuan yang Digunakan	Jumlah
Formula Penilaian	Formula : Realisasi jumlah pemanfaat yang memiliki SIPSDA hidup terhadap target pemanfaat yang memiliki SIPSDA hidup
	Capaian:
	1. Realisasi % capaian = > 100% : Baik sekali (110%)
	2. Realisasi % capaian = 90% ≤ x ≤ 100% : Baik (100%)
	3. Realisasi % capaian = 80% ≤ x < 90% : Cukup (90%)
	4. Realisasi % capaian = 60% ≤ x < 80% : Kurang (80%)

	5. Realisasi % capaian = < 60% : Buruk (60%)			
Target	**11**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
		1	6	11
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

I.3. Aspek Sosial / 1. Penyaluran Air Baku Irigasi	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
Nama KPI	**Penyaluran Air Baku Irigasi**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan volume layanan alokasi air baku untuk irigasi pada Wilayah Sungai Brantas dan Wilayah Sungai Bengawan Solo			
Tujuan KPI	Tercapainya pelayanan air irigasi teknis pada Wilayah Sungai Brantas dan Wilayah Sungai Bengawan Solo minimal sesuai yang ditargetkan			
Satuan yang Digunakan	Juta m^3			
Formula Penilaian	(Realisasi volume alokasi air irigasi tahunan) / (Target volume alokasi air irigasi tahunan) x 100%			
	Capaian:			
	1. Realisasi % capaian = > 100% : Baik sekali (110%)			
	2. Realisasi % capaian = 90% $\leq$ x $\leq$ 100% : Baik (100%)			
	3. Realisasi % capaian = 80% $\leq$ x < 90% : Cukup (90%)			
	4. Realisasi % capaian = 60% $\leq$ x < 80% : Kurang (80%)			
	5. Realisasi % capaian = < 60% : Buruk (60%)			
Target	**2.759**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	0.807	1.676	2.325	2.759
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Layanan Irigasi dan Laporan Manajemen Bulanan			
Jenis Pengukuran	Sum			

I.3. Aspek Sosial / 2. Realisasi Biaya untuk Kegiatan Konservasi	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
Nama KPI	**Realisasi Biaya untuk Kegiatan Konservasi**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan kinerja Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan konservasi SDA (penghijauan, sipil teknis & sosialisasi)			
Tujuan KPI	Ketercapaian pelaksanaan konservasi minimal sesuai yang telah ditargetkan			
Satuan yang Digunakan	Rp Miliar			
Formula Penilaian	Formula = Realisasi Biaya Kegiatan Konservasi mencapai 90% dari total anggaran kegiatan konservasi			
	Capaian =			
	1. realisasi = 90% ≤ x < 100% target: Skor 110%			
	2. realisasi = 80% ≤ x < 90% target: Skor 100%			
	3. realisasi = 70% ≤ x < 80% target: Skor 90%			
	4. realisasi = 60% ≤ x < 70% target: Skor 80%			
	5. realisasi = < 60% target: Skor 60%			
Target	**20.23**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	3.57	7.91	12.59	20.23
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen Perusahaan dan Laporan Kegiatan Konservasi			
Jenis Pengukuran	Sum			

II. Perspektif Inovasi Model Bisnis

1. Optimalisasi Aset SPAM	INOVASI MODEL BISNIS
Nama KPI	**Optimalisasi Aset SPAM**
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan peningkatan laba SPAM dengan pengoptimalan pengusahaan SPAM
Tujuan KPI	Pencapaian laba SPAM sesuai target yang lebih baik dari tahun sebelumnya
Satuan yang Digunakan	Rp Miliar
Formula Penilaian	Formula : realisasi pencapaian laba SPAM terhadap target
	Capaian:
	1. realisasi > 100% target: Skor 110%
	2. realisasi = 90% < x <= 100 target: Skor 100%
	3. realisasi = 80% < x <= 90% target: Skor 90%
	4. realisasi = 60% < x <= 80% target: Skor 80%

	5. realisasi = < 60% target: Skor 60%			
Target	**2.69**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	0.08	0.50	1.11	2.69
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Direktorat Operasional			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

2. Optimalisasi Aset Tidak Produktif	INOVASI MODEL BISNIS			
Nama KPI	**Optimalisasi Aset Tidak Produktif**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan kinerja peningkatan pendapatan dari pengusahaan aset yang dimiliki atau dikelola oleh Perusahaan (pendapatan dari pemanfaatan lahan dan bangunan, pendapatan penyediaan data, dan pendapatan sewa peralatan). Pendapatan pemanfaatan lahan/bangunan/sewa peralatan yang digunakan yaitu pendapatan atas masa sewa selama tahun berjalan.			
Tujuan KPI	Pertumbuhan pendapatan dari pengusahaan aset yang lebih baik dari tahun sebelumnya			
Satuan yang Digunakan	%			
Formula Penilaian	% pertumbuhan pendapatan dari periode tahun sebelumnya			
	Capaian:			
	1. realisasi > 100% target: Skor 110%			
	2. realisasi = 90% < x <= 100 target: Skor 100%			
	3. realisasi = 80% < x <= 90% target: Skor 90%			
	4. realisasi = 60% < x <= 80% target: Skor 80%			
	5. realisasi = < 60% target: Skor 60%			
Target	**29,85**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	75.08	188.96	3.50	29,85
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

3. Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	INOVASI MODEL BISNIS			
Nama KPI	**Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan kinerja pemenuhan gap (kesenjangan) penerapan manajemen risiko berdasarkan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penilaian indeks kematangan risiko (risk maturity index) yang dilaksanakan tahun 2023			
Tujuan KPI	Perbaikan penerapan manajemen risiko			
Satuan yang Digunakan	%			
Formula	(Jumlah program yang dilaksanakan tahun 2024 / Total program roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko) x 100%			
	Capaian:			
	1. realisasi = 100% target: Skor 110%			
	2. realisasi = 90% < x < 100 target: Skor 100%			
	3. realisasi = 80% < x <= 90% target: Skor 90%			
	4. realisasi = 60% < x <= 80% target: Skor 80%			
	5. realisasi = < 60% target: Skor 60%			
Target	**100**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	-	-	100	100
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Tahunan, Laporan Hasil RMI dan Laporan Manajemen Risiko			
Jenis Pengukuran	Take Last Known			

III. Perspektif Kepemimpinan Teknologi

1. Implementasi ERP Danareksa	KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI
Nama KPI	**Implementasi ERP**
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan implementasi konfigurasi sistem ERP pada environment *Quality Assurance System* (QAS) yang mendukung restrukturisasi PJT I sebagai Mitra Instansi Pengelola (MIP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Tujuan KPI	Memastikan kesiapan sistem ERP terhadap restrukturisasi perusahaan sebagai MIP PNBP
Satuan yang Digunakan	Waktu
Formula Penilaian	Konfigurasi baru telah terimplementasi di Environment QAS: 1. Realisasi lebih cepat dari target, pencapaian = 110% 2. Realisasi sama dengan target, pencapaian = 100% 3. Realisasi lebih lambat dari target, pencapaian = 90%

Target	Triwulan IV			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Tahunan
	-	-	-	1
Frekuensi	Tahunan			
Polaritas	*Minimize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelola Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen			
Jenis Pengukuran	Sum			

2. Standardisasi dan Optimalisasi Water Meter	KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI			
Nama KPI	**Standardisasi dan Optimalisasi Water Meter**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan pengembangan integrasi pemasangan intake water meter yang terhubung dengan dashboard Smart Water Management System (SWMS)			
Tujuan KPI	Memantau jumlah konsumsi air secara akurat guna mendukung proses bisnis Perusahaan			
Satuan yang Digunakan	Jumlah			
Formula Penilaian	Realisasi jumlah water meter terhadap target jumlah water meter			
Target	5			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Tahunan
	-	-	2	5
Frekuensi	Tahunan			
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelola Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen			
Jenis Pengukuran	Sum			

IV. Perspektif Peningkatan Investasi

1. Prosentase Penyerapan Investasi	PENINGKATAN INVESTASI
Nama KPI	**Prosentase Penyerapan Investasi**
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan penyerapan investasi dalam upaya peningkatan pendapatan dan penunjang operasional perusahaan, serta pelayanan kepada Pengguna Sumber Daya Air
Tujuan KPI	Meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur dan aset investasi dalam upaya peningkatan pendapatan dan penunjang operasional perusahaan, serta pelayanan kepada Pengguna Sumber Daya Air

Satuan yang Digunakan	Rp Miliar			
Formula Penilaian	Realisasi progress/penyerapan fisik investasi mencapai 50% dari total anggaran investasi			
	Capaian:			
	1. realisasi > 100% dari target: Baik sekali (110%)			
	2. realisasi = 90% ≤ x ≤ 100% target: Baik (100%)			
	3. realisasi = 80% ≤ x < 90% target: Cukup (90%)			
	4. realisasi = 60% ≤ x < 80% target: Kurang (80%)			
	5. realisasi = < 60% target: Buruk (60%)			
Target	**205.80**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	32,97	83,39	152,96	205.80
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelola Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

2. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air	PENINGKATAN INVESTASI			
Nama KPI	**Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan pengembangan (integrasi) aplikasi/sistem informasi otomatisasi operasional pintu air (1 pilot project)			
Tujuan KPI	Memantau operasi pintu air secara jarak jauh			
Satuan yang Digunakan	Waktu			
Formula Penilaian	Go Live Aplikasi/Sistem Informasi			
	1. Realisasi lebih cepat dari target, pencapaian = 110%			
	2. Realisasi sama dengan target, pencapaian = 100%			
	3. Realisasi lebih lambat dari target, pencapaian = 90%			
Target	**Triwulan IV**			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				1
Frekuensi	Tahunan			
Polaritas	*Minimize*			
Penanggung Jawab KPI	Direktorat Keuangan, Pengelola Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Pengolah Data KPI	Direktorat Keuangan, Pengelola Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

V. Perspektif Pengembangan Talenta

1. Rasio Perempuan dalam Nominated Talent	PENGEMBANGAN TALENTA			
Nama KPI	**Rasio Talenta Perempuan dalam Nominated Talent**			
Definisi KPI	Jumlah talenta perempuan yang masuk dalam nominasi talenta untuk mendorong adanya talent perempuan dalam manajemen. Talenta perempuan yang dimaksud adalah BOD-1 perempuan dalam Nominated Talent BUMN yang diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Cluster Talent Commitee			
Tujuan KPI	Mempersiapkan talenta-talenta terbaik dari perusahaan dalam menciptakan SDM unggul dan professional, termasuk ketersediaan talenta Perempuan dalam nominasi talenta			
Satuan yang digunakan	%			
Formula Penilaian	(Jumlah Nominasi Talenta Wanita/Jumlah Nominasi Talenta) x 100%			
Target	**10**			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				10
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Talent pool			
Jenis Pengukuran	Take last known			

2. Rasio Top Talenta Muda (<= 42 tahun) dalam Nominated Talent	PENGEMBANGAN TALENTA			
Nama KPI	**Rasio Talenta Muda (<= 42 tahun) dalam Nominated Talent**			
Definisi KPI	Jumlah talenta muda yang masuk dalam nominasi talenta untuk mendorong talenta muda dalam manajemen. Talenta muda yang dimaksud adalah BOD-1 usia ≤ 42 tahun dalam Nominated Talent BUMN yang diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Cluster Talent Commitee			
Tujuan KPI	Mempersiapkan talenta-talenta terbaik dari perusahaan dalam menciptakan SDM unggul dan professional, termasuk ketersediaan talenta Muda (≤42 tahun) dalam nominasi talenta			
Satuan yang digunakan	%			
Formula Penilaian	(Jumlah Nominasi Talenta Muda / Jumlah Nominasi Talenta) x 100%			
Target	**10**			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				10
Polaritas	*Maximize*			
Penangguna Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			

Sumber Data	Talent Pool
Jenis Pengukuran	Take last known

3. Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko	PENGEMBANGAN TALENTA			
Nama KPI	**Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko meliputi: Dewan Pengawas, Direksi, Anggota Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Kepala dan seluruh anggota Unit Manajemen Risiko, Kepala dan seluruh anggota SPI			
Tujuan KPI	Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko, sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023			
Satuan yang digunakan	%			
Formula Penilaian	Pengukuran Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi) menggunakan formulasi di bawah ini:			
	(Jumlah personil organ pengelola risiko yang memenuhi kualifikasi/Total jumlah personil organ pengelola risiko) X 100%			
	Capaian:			
	1. Realisasi : =100% : Baik sekali (110%)			
	2. Realisasi : 90% <= x < 100% : Baik (100%)			
	3. Realisasi : 80% <= x < 90% : Cukup (90%)			
	4. Realisasi : 60% <= x < 80% : Kurang (80%)			
	5. Realisasi : < 60% : Buruk (60%)			
Target	**90**			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	15	40	75	90
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Direktorat Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Pengolah Data KPI	Direktorat Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen			
Jenis Pengukuran	Sum			

Nomor : 0040/UM/DRUT/I/2024 Malang, 30 Januari 2024

Lampiran : 1 Lembar

Kepada Yth.

Bapak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
cq. Wakil Menteri BUMN II
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta Pusat

Perihal : Revisi Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Jasa Tirta I Tahun 2024

Sehubungan Surat kami Nomor 0233/UM/DRUT/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Jasa Tirta I (PJT I) Tahun 2024 serta hasil review bersama Kementerian BUMN tanggal 21 November 2023, kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak, Revisi Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PJT I Tahun 2024 yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas PJT I. Adapun pokok-pokok RKAP PJT I Tahun 2024 secara ringkas adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 777,80 miliar atau 110,90% dari RKAP 2023, 126,54% dari realisasi audited 2022 dan 130,89% dari prognosa 2023.
b. Beban usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 698,00 miliar atau 111,56% dari RKAP 2023, 134,65% dari realisasi audited 2022 dan 128,32% dari prognosa 2023.
c. Laba bersih tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 70,62 miliar atau 110,26% dari RKAP 2023, 94,37% dari realisasi audited 2022 dan 140,10% dari prognosa 2023.
d. Kegiatan investasi dan penyertaan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 411,60 miliar atau 81,95% dari RKAP 2023 dan 260,43% dari prognosa 2023.

Selanjutnya, kiranya Bapak berkenan memberi persetujuan terhadap revisi usulan RKAP PJT I Tahun 2024 setelah dilakukan pembahasan dan penyesuaian sebagaimana peraturan dan mekanisme pengesahan yang berlaku.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Utama

Ditandatangani secara elektronik

Fahmi Hidayat

Tembusan Yth.:

1. Assisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media
2. Direktur Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat
3. Direktur Pelaksana Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Utama Danareksa (Persero)
5. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Jasa Tirta I

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (**RKAP**) Perum Jasa Tirta I (**PJT I**) Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (PP 46/2010). Adapun sistematika naskah RKAP PJT I Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Penyusunan RKAP PJT I Tahun 2024 mengikuti Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 sesuai surat Menteri BUMN nomor S-491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023.

Secara ringkas RKAP PJT I Tahun 2024 konsolidasian adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.777,80 miliar atau 110,90% dari RKAP 2023, 126,54% dari realisasi audited 2022 dan 130,89% dari prognosa 2023.
b. Beban usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 698,00 miliar atau 111,56% dari RKAP 2023, 134,65% dari realisasi audited 2022 dan 128,32% dari prognosa 2023.
c. Laba bersih tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 70,62 miliar atau 110,26% dari RKAP 2023, 94,37% dari realisasi audited 2022 dan 140,10% dari prognosa 2023.
d. Kegiatan investasi dan penyertaan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 411,605 miliar atau 81,95% dari RKAP 2023 dan 260,43% dari prognosa 2023.

Malang, Januari 2024

Dewan Pengawas
Ketua

Suprianto

Direksi
Direktur Utama

Fahmi Hidayat

Anggota

Anita Ariyani

Direktur Operasional

Milfan Rantawi

Anggota

Muhammad Mahfud Faozi

Direktur Keuangan, Pengelolaan
Sumber Daya dan Manajemen Risiko

Mukhamad Taufiq

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum 1
B. Visi dan Misi Perusahaan 2
C. Maksud dan Tujuan Perusahaan 2
D. Kegiatan Perusahaan 2
E. Kebijakan Umum Perusahaan 2
F. Struktur Organisasi Perusahaan 3
G. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan 3
1. Dewan Pengawas 3
2. Direksi 4
H. Entitas Anak 4

BAB II KINERJA DAN PROGNOSA RKAP TAHUN BERJALAN

A. Umum 6
B. Pencapaian Kinerja Perusahaan 7
C. Hal-hal Penting 8

BAB III RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024

A. Asumsi-asumsi Penyusunan RKAP 9
B. Sasaran Usaha dan Strategi Perusahaan 12
1. Sasaran Usaha 12
2. Strategi Perusahaan 12
C. Program Kerja Perusahaan dari Masing-masing Direktorat 18
D. Sasaran Program Kerja dan Strategi PT JTE 19

BAB IV ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2024

A. Anggaran Pendapatan Usaha 21
1. Layanan Air Baku (LAB) 21
2. Layanan Air Baku 23
B. Anggaran Biaya Usaha 24
C. Anggaran Pendapatan dan Beban Keuangan 28
D. Anggaran Pendapatan dan Beban Lain - Lain 28
E. Anggaran Pengadaan 28
F. Anggaran Investasi 29
G. Anggaran SDM 29
H. Anggaran Teknologi Informasi 29
I. Anggaran Penelitian dan Pengembangan 29

BAB V PROYEKSI KEUANGAN PERUSAHAAN

A. Proyeksi Neraca (konsolidasi) 30
B. Proyeksi Laba/Rugi (konsolidasi) 31
1. Layanan (dalam jutaan) 31
2. Pendapatan Usaha (dalam jutaan rupiah) 31
3. Beban Usaha (dalam jutaan rupiah) 32
C. Proyeksi Arus Kas (Konsolidasi) 34
D. Sumber dan Penggunaan Dana 34
E. PT Jasa Tirta Energi (JTE) 34
1. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan 34
2. Proyeksi Laba/Rugi 35

BAB VI MANAJEMEN RISIKO

A. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023 36
B. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Tahun 2024 52
C. Evaluasi Risiko dan Perbaikan Berkelanjutan 58
D. Rencana Penerapan *Enterprise Risk Manajemen* (ERM) 58
E. Risk Register Utama PJT I Tahun 2024 60
F. Pelaksanaan dan Monitoring Risiko 80
G. Perencanaan Audit Intern Oleh SPI Sebagai Lini Ketiga Yang Berfungsi Sebagai Independent Assurance 82

BAB VII ASPIRASI PEMEGANG SAHAM

A. *Key Perfomance Indicators* 86
B. Peninjauan Pemenuhan Prasyarat Administrasi APS 100
1. Fungsi Sumber Daya Manusia 104
2. Fungsi Hukum 105
3. Fungsi Teknologi Informasi 111
4. Fungsi Keuangan 119
5. Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan 129

BAB VIII RENCANA KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

A. Pendahuluan 130
B. Tugas Kewenangan dan Kewajiban Dewan Pengawas 131
C. Struktur Organisasi 133
D. Program Kerja Dewan Pengawas 133
1. Pembagian Kerja Dewan Pengawas 133
2. Rencana Kerja Dewan Pengawas 134
E. Rencana Anggaran Dewan Pengawas 139
F. Program Kerja Dewas 141
G. Rencana Anggaran Biaya Dewas 141
H. *Key Perfomance Indicator* Dewan Pengawas 142

BAB IX PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

A. Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 150
B. Program TJSL 152
C. Kondisi Umum 154
D. Kinerja Program TJSL sampai dengan Prognosa Tahun 2023 179
E. Proyeksi Kinerja Program TJSL Tahun 2024 195
F. Dokumentasi Kegiatan Program Prioritas TJSL Prognosa Tahun 2023 210
G. Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) 215
H. UMK Binaan PJT I 217
I. Pembinaan dan Monitoring UMK 217
J. Progres Hapus Buku dan Hapus Tagih Atas Pendanaan UMK Bermasalah 218
K. Target KPI Program TJSL Tahun 2024 219

BAB X PENUTUP

A. Pencapaian Prognosa 2023 224
B. Sasaran RKAP Tahun 2024 224
C. Hal-hal Lain yang Memerlukan Perhatian 224
D. Hal-hal Lain yang Perlu Mendapatkan Keputusan 225

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

1. Nama Perusahaan adalah Perusahaan Umum Jasa Tirta I dan disebut Perum Jasa Tirta I atau disingkat PJT I, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur (**Jatim**) dengan kepemilikan saham 100% oleh Pemerintah Republik Indonesia (**Pemerintah**).
2. PJT I berawal dari rencana Pemerintah untuk membentuk badan pengelola yang menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun. Pasca penyelesaian pembangunan Bendungan Sutami dan Selorejo di Wilayah Sungai (**WS**) Brantas pada akhir tahun 1970-an, Pemerintah merencanakan lebih lanjut pembentukan badan usaha yang memiliki tugas pokok mengelola WS Brantas beserta prasarana pengairan yang telah dibangun, termasuk memenuhi kebutuhan air dan mengendalikan banjir.
3. Kajian pendirian badan usaha tersebut dibantu oleh PT Indoconsult dan lembaga pengelolaan serupa di Indonesia setelah studi banding pada awal tahun 1980 dilakukan ke beberapa badan pengelola air dan prasarana pengairan, baik di Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang maupun Perancis.
4. Pendirian Perum Jasa Tirta sebagai perwujudan dari rencana Pemerintah tersebut dilaksanakan pada 5 Februari 1990 dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 5 Tahun 1990. Selanjutnya dalam perkembangan, Perum Jasa Tirta bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Jasa Tirta I (PJT I) yang berperan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola Sumber Daya Air (SDA) di dalam WS yang menjadi penugasannya.
5. Saat ini, wilayah kerja PJT I ada di 5 (lima) WS yaitu WS Brantas, Bengawan Solo, Jratunseluna, Serayu Bogowonto dan Toba Asahan. Keberhasilan pengelolaan SDA oleh PJT I antara lain dapat terlihat dari pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) sarana dan prasarana pengairan yang ada.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (**RKAP**) PJT I Tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 76 PP No 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (PP 46/2010). Adapun sistematika naskah RKAP PJT I Tahun 2024 ini disusun dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: KEP-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Penyusunan RKAP PJT I Tahun 2024 mengikuti Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan Tahun 2024 sesuai surat Menteri BUMN nomor S-491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi PJT I adalah Menjadi Perusahaan SDA Nasional Kelas Dunia.
2. Adapun Misi PJT I adalah sebagai berikut:
   a. Mengelola SDA secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah.
   b. Berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada Pelanggan.
   c. Meningkatkan nilai tambah SDA dan sumber daya lainnya.
   d. Mengelola Perusahaan secara profesional, inovatif dan berkinerja unggul sesuai prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.

C. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan pendirian PJT I sesuai ketentuan Pasal 14 PP 46/2010 antara lain adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama di bidang Pengusahaan SDA dan Pengelolaan SDA, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

D. Kegiatan Perusahaan

PJT I melaksanakan kegiatan usaha utama yang terdiri dari kegiatan SDA dan Non SDA.

1. Kegiatan SDA, meliputi:
   a. Layanan Air Baku (PLTA, PDAM, Industri)
   b. Pengendalian banjir, pemantauan kualitas air, penggelontoran dan pemenuhan kebutuhan air lainnya.
2. Kegiatan Non SDA yang meliputi PLTM, air minum, usaha jasa konsultansi di bidang teknologi SDA, konstruksi dan penyewaan alat berat, jasa laboratorium kualitas air, Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pariwisata dan pemanfaatan lahan.

E. Kebijakan Umum Perusahaan

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, beberapa kebijakan yang ditempuh Perusahaan antara lain di bidang:

1. Pengelolaan Perusahaan
2. Pengelolaan SDA
3. Sistem Manajemen Mutu
4. Sumber Daya Manusia

5. Keuangan
6. Sistem Informasi Manajemen

F. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Perusahaan tertuang dalam:

1. Peraturan Direksi (Perdir) Nomor 0006/PRT/DRUT/IX/2022 tentang Struktur Organisasi Perusahaan serta Penetapan Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I.
2. Perdir Nomor 0007/PRT/DRUT/IX/2022 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural Tingkat Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Manajer Utama di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.
3. Perdir Nomor 0008/PRT/DRUT/IX/2022 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural Tingkat Kepala Divisi di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.
4. Perdir Nomor 0009/PRT/DRUT/IX/2022 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural Tingkat Kepala Sub Divisi di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

G. Susunan Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi

1. Dewas
   a. Susunan Dewas PJT I per November 2022 berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN selaku wakil Pemerintah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	No. SK	Tanggal SK
Suprianto	Ketua	SK-229/MBU/10/2022	13 Oktober 2022
Muhammad Mahfud Faozi	Anggota	SK-250/MBU/07/2020	21 Juli 2020
Anita Ariyani	Anggota	SK-171/MBU/08/2022	09 Agustus 2022

   b. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Perusahaan, Dewas sesuai ketentuan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dibantu oleh 2 (dua) orang Anggota Komite Audit dan 2 (dua) orang Anggota Komite Manajemen Risiko sebagai perangkat organ Dewas. Sedangkan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas yang bersifat administratif, Dewas dibantu oleh Sekretaris Dewas dan Staf Dewas.

2. Direksi

Susunan Direksi per Juni 2023 berdasarkan Kepmen BUMN dan Dewan Pengawas, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, yaitu:

Nama	Jabatan	No. SK	Tanggal SK
Fahmi Hidayat	Direktur Utama	SK-114/MBU/06/2023	6 Juni 2023
Milfan Rantawi	Direktur Operasional	SK-419/MBU/12/2021	29 Desember 2021
Mukhamad Taufiq	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko	SK-419/MBU/12/2021	29 Desember 2021

H. Entitas Anak

Berdasarkan surat Menteri BUMN Nomor: S-885/MBU/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, PJT I telah mendirikan anak perusahaan bernama PT. Jasa Tirta Energi (PT JTE) dengan kedudukan di Jakarta dan bergerak dalam bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Energi Baru Terbarukan, Aktivitas Penunjang Kelistrikan, Konstruksi Bangunan Elektrikal, Konstruksi Bangunan Prasarana SDA, Konstruksi Umum dan Pengerukan.

PT JTE telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: AHU-000145.AH.01.01 tahun 2019 berdasarkan Akta Pendirian oleh Notaris Resnizar Nomor: 125 tanggal 31 Desember 2018.

Perubahan susunan Pengurus terakhir sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SR-1/MBU/01/2024 tentang Persetujuan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jasa Tirta Energi (Anak Perusahaan Perum Jasa Tirta I) sehingga susunan Direksi dan Komisaris PT JTE adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan
Viari Djajasinga	Direktur
Didi Muhammad Rosidi	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Wahyu Dutonoto	Anggota

PT JTE dan PT Surya Energi Indotama (PT SEI) membentuk Konsorsium untuk kepentingan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang berupa PT Surya Energi Kobatama (PT SENEKO) yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan komposisi saham 85 % PT JTE dan 15 % PT SEI.

BAB II

KINERJA DAN PROGNOSA RKAP TAHUN BERJALAN

A. Umum

1. Pemerintah Indonesia telah mengakhiri status pandemi Covid-19 pada bulan Juni 2023 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia no 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) di Inodonesia. PJT I telah mengambil langkah kebijakan untuk mengoptimalkan kembali peluang pendapatan serta efektivitas dan efisiensi pembiayaan.

2. Kondisi eksternal yang dihadapi PJT I selama tahun 2023 dalam melaksanakan kegiatan operasional pengusahaan SDA mengalami dampak El Nino dan Non SDA masih peralihan dari kondisi pandemi Covid-19.

3. Penurunan pendapatan pengelolaan SDA diantaranya karena beberapa PLTA beroperasi di bawah program yang disebabkan karena perbaikan maupun penyesuaian pola operasi sesuai kebutuhan air irigasi, penurunan volume pengambilan air baku PDAM pada pelanggan tertentu seperti PDAM Surabaya yang memiliki alternatif pengambilan air permukaan di luar wilayah PJT I dan penurunan produksi beberapa industri pemanfaat utama yaitu PT KPI serta pabrik gula di wilayah kerja PJT I.

4. Ketidaktercapaian pendapatan pengelolaan Non SDA diantaranya karena penurunan pendapatan EBT akibat belum adanya kontrak pelanggan baru sesuai dengan yang telah diprogramkan. Selain itu pekerjaan pembangunan PLTS dan Tower Telekomunikasi di beberapa Kabupaten di Papua Barat tahap kedua dari PT Surya Energi Indotama (SEI) dan pembangunan PLTS dan Tower Telekomunikasi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tahap kedua dari PT *Fiberhome* (FH) masih belum dapat diakui pendapatan dikarenakan proses penyusunan kelengkapan dokumen penyelesaian pekerjaan untuk pengajuan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kepada pemberi kerja (FH dan SEI). Pendapatan PLTM masih di bawah target dikarenakan adanya kegiatan *Preventive Maintenance Generator* dan *Swicthgear* yang menyebabkan seluruh unit PLTM Lodagung harus berhenti beroperasi dari tanggal 10-16 Agustus 2023. Kegiatan *Preventive Maintenance Generator* dan *Switchgear* merupakan kegiatan inspeksi dan perawatan rutin 6 bulanan PLTM Lodagung terhadap fungsi-fungsi peralatan pembangkit, termasuk turbin, generator dan komponen-komponen yang ada pada peralatan *switchgear*. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendeteksi kondisi

yang mungkin menyebabkan produksi terhenti sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kegagalan.

B. Pencapaian Kinerja Perusahaan

1. Pencapaian laba PJT I tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Uraian	Target RKAP 2023	Realisasi s.d Nov 2023	Prognosa tahun 2023		
				Prognosa Des	Total	%thd RKAP
1	2	3	4	5	6	7 = 6/3
I.	Kegiatan Usaha					
a.	Pendapatan Usaha	701.355,94	485.483,00	108.736,56	594.219,57	84,72
b.	Beban Usaha	(625.690,63)	(417.115,74)	(126.847,85)	(543.963,59)	86,94
c.	Laba/Rugi Usaha	75.665,31	68.357,26	(18.111,28)	50.255,98	66,42
II.	Pendapatan/(Beban) Keuangan Bersih	6.798,51	17.832,65	936,82	18.769,47	276,08
III.	Pendapatan/(Beban) Lain-lain Bersih	(3.488,02)	(12.497,31)	8.158,01	(4.339,30)	124,41
IV.	Laba/Rugi sebelum Pajak	78.975,80	73.702,61	(9.016,45)	64.686,15	81,91

2. Kegiatan Usaha:

   a. Pendapatan usaha tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp594,22 miliar atau 84,72% terhadap RKAP tahun 2023.
   b. Beban usaha tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp543,96 miliar atau 86,94% terhadap RKAP tahun 2023.
   c. Laba usaha tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp50,25 miliar atau 66,42% terhadap RKAP tahun 2023.
   d. Pendapatan keuangan bersih tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp18,77 miliar atau 276,08% terhadap RKAP tahun 2023.
   e. Beban Lain-lain Bersih tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp4,34 miliar atau 124,41% terhadap RKAP tahun 2023
   f. Laba sebelum pajak tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp64,69 miliar atau 81,91% terhadap RKAP tahun 2023.

3. Pencapaian kinerja keuangan tahun 2023

No	Parameter	RKAP 2023/ Target	Prognosa 2023
1	2	3	4
1.	*ROIC*	6,31 %	5,16 %
2.	*WACC*	5,32 %	3,56 %
3.	*EVA (%) (ROIC-WACC)*	0,99 %	1,59 %
4.	EBITDA (Juta Rp)	125.104	100.102,09
5.	*Interest bearing debt to invested capital* (x)	13,7 %	3,0 %
6.	*Interest bearing* debt to EBITDA (%)	1,3 kali	0,30 kali

C. Hal-Hal Penting

Beberapa hal penting yang saat ini masih dalam progres antara lain:

a. Usulan penyesuaian tarif BJPSDA bagi Industri pada WS Brantas dan WS Bengawan Solo di Provinsi Jawa Timur akan segera disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan harapan dapat ditetapkan pada tahun 2024 dan diterapkan pada triwulan IV 2024.

b. Perusahaan sebagai Mitra Instansi Pengelola (MIP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 5 April 2023. Pelaksanaan skema BPJSDA sebagai PNBP dibseri batas waktu maksimal pelaksanaannya 2 tahun setelah PP tersebut terbit atau Agustus 2025.

c. Rencana pengembangan wilayah di WS Bali Penida, WS Pompengan Larona dan WS Batam-Bintan di tahun 2024 adalah penyusunan konsep tarif BJPSDA dan berkoordinasi serta meminta dukungan Kementerian PUPR Hal tersebut melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 yaitu melakukan kajian pengembangan di 3 Wilayah Sungai tersebut.

d. Penguatan tata kelola Sumber Daya Air melalui pembuatan aplikasi AKNOP sebagai *tools* untuk *update* kondisi sarana dan prasarana SDA di tahun 2023 telah dilakukan kajian di WS Brantas, WS Bengawan Solo dan WS Toba Asahan. Rencana di tahun 2024 akan dilakukan pengembangan aplikasi AKNOP.

BAB III

RENCANA KERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024

A. Asumsi-asumsi dan Dasar Penyusunan RKAP

1. Asumsi yang dipergunakan dalam penyusunan RKAP PJT I tahun 2024 antara lain:

   a. Asumsi ekonomi makro :
      - Pertumbuhan ekonomi 5,2 %
      - Inflasi 2,8%
      - Nilai tukar rupiah Rp15.000,- per USD
      - Suku bunga 6,7%

   b. Arahan taktis untuk RKAP 2024 diantaranya :
      - Memastikan penugasan pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Air berjalan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian;
      - memberikan dukungan dalam percepatan pemerataan layanan air bersih ke masyarakat melalui Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dimiliki atau membangun SPAM baru;
      - Optimalisasi bisnis Non SDA sehingga mampu mendukung kinerja pengelolaan SDA secara umum;
      - Menyusun *roadmap* pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya melalui optimalisasi aset.

   c. Tarif BJPSDA diasumsi sebagai berikut:

Obyek	Lokasi	Prognosa 2023	RKAP 2024	Keterangan
Listrik	WS Brantas	Rp167,00 / kWh	Rp167,00 / kWh	Sejak th. 2014
	WS Bengawan Solo	Rp222,00 / kWh	Rp222,00 / kWh	Sejak th. 2014
	WS Serayu Bogowonto	Rp50,06 / kWh	Rp50,06 / kWh	
	WS Jratunseluna	Rp49,82 / kWh	Rp49,82 / kWh	
	WS Toba Asahan	Rp27,00 / kWh	Rp27,00 / kWh	Sejak th. 2015
PDAM	WS Brantas	Rp133,00 / m3	Rp133,00 / m3	Sejak th. 2014
	WS Bengawan Solo			
	- Provinsi Jawa Timur	Rp133,00 / m3	Rp133,00 / m3	
	- Provinsi Jawa Tengah	Rp140,50 / m3	Rp140,50 / m3	
	WS Serayu Bogowonto	Rp97,00 / m3	Rp97,00 / m3	
	WS Jratunseluna	Rp98,00 / m3	Rp98,00 / m3	
	WS Toba Asahan	Rp10,63 / m3	Rp10,63 / m3	
INDUSTRI	WS Brantas	Rp278,00 / m3	Rp356,00 / m3	Tahun 2024
	WS Bengawan Solo			
	- Provinsi Jawa Timur	Rp278,00 / m3	Rp356,00 / m3	
	- Provinsi Jawa Tengah	Rp246,00 / m3	Rp292,00 / m3	Sejak th. 2023
	WS Serayu Bogowonto	Rp121,00 / m3	Rp152,00 / m3	Sejak th. 2023
	WS Jratunseluna	Rp122,00 / m3	Rp152,00 / m3	Sejak th. 2023
	WS Toba Asahan	Rp156,64 / m3	Rp156,64 / m3	

d. Prakiraan Musim[1]

1) Musim Hujan

No	Daerah/ Kabupaten	Awal Musim	Puncak Musim	S*)	Sifat**)
1	Asahan bagian tengah, Simalungun bagian tenggara	Sudah MH	Nov	-1	AN
2	Asahan bagian tenggara, sebagian kecil Labuhanbatu, Labuhan batu Utara bagian tengah	Sudah MH	Okt	0	N
3	Asahan bagian timur, Kota Tanjung Balai, Labuhanbatu bagian hilir, Labuhanbatu Utara bagian hilir	Sudah MH	SEP	+1	N
4	Asahan bagian barat daya, Simalungun atas, Toba bagian darat laut	Sudah MH	NOV	-1	N
5	Humbang Hasundutan bagian tengah, Pakpak Bharat bagian timur, sebagian kecil Samosir	Sudah MH	NOV	0	N
6	Asahan bagian barat laut, Batu Bara, Deli Serdang bagian timur, Kota Medan bagian tenggara, Kota Tebing Tinggi	AGT III	SEP	-1	AN
7	Dairi tepi danau, Humbang Hasundutan tepi danau, Karo tepi danau, Pakpak Barat bagian timur, Samosir bagian tengah, Simalungun tepi danau, Tapanuli Utara bagian utara, Toba Samosir tepi danau	Sudah MH	MAR	-1	BN
8	Cilacap bagian barat laut dan barat	NOV I	FEB	-2	AN
9	Banyumas bagian barat daya, Cilacap bagian timur	OKT III	FEB	-2	N
10	Banjanegara bagian barat daya, Banyumas bagian selatan, Cilacap bagian timur, Kebumen bagian barat	OKT III	JAN	-1	N
11	Kendal bagian tenggara, Kota Seamrang bagian barat daya, Semarang bagian barat laut, Temanggung sebagian kecil timur laut	NOV I	FEB	-1	N
12	Wonogiri bagian tengah	NOV III	FEB	0	N
13	Kota Surakarta, sebagian besar Sragen, sebagian wilayah utara Sukoharjo sebagian kecil wilayah tenggara Boyolali	NOV II	FEB	0	N
14	Sebagian Trenggalek dan bagian barat Tulungagung	DES II	FEB	<-3	N
15	Sebagian besar Ponoogo, bagian barat daya Kabupaten/Kota Madiun dan bagian selatan Magetan	DES I	FEB	-3	N
16	Bagian barat Lamongan dan bagian timur Tuban-Bojonegoro	DES II	FEB	-3	N
17	Sebagian Blitar-Kediri-Tulungagung	DES III	FEB	<-3	N
18	Bagian barat daya Malang dan sebagian Blitar	NOV III	FEB	-2	N
19	Sebagian besar Kota Surabaya dan bagian utara Sidoarjo	DES I	FEB	-1	N
20	Bagian selatan Jombang dan Mojokerto	NOV III	FEB	-2	N
21	Seluruh Kota Batu dan sebagian Malang	NOV III	FEB	-2	N

[1] Sumber: BMKG, September 2023

2) Musim Kemarau

No	Daerah/ Kabupaten	Awal Musim	Puncak Musim	S*)	Sifat**)
1	Asahan bagian tengah, Simalungun bagian tenggara	FEB I	MAR	-1	BN
2	Asahan bagian tenggara, sebagian kecil Labuhanbatu, Labuhan batu Utara bagian tengah	FEB II	MAR	-1	N
3	Asahan bagian timur, Kota Tanjung Balai, Labuhanbatu bagian hilir, Labuhanbatu Utara bagian hilir	MEI II	JUN	0	N
4	Asahan bagian barat daya, Simalungun atas, Toba bagian darat laut	JUN III	JUL	0	N
5	Humbang Hasundutan bagian tengah, Pakpak Bharat bagian timur, sebagian kecil Samosir	JUN I	JUL	-1	N
6	Asahan bagian barat laut, Batu Bara, Deli Serdang bagian timur, Kota Medan bagian tenggara, Kota Tebing Tinggi	JUNI	JUN	0	N
7	Dairi tepi danau, Humbang Hasundutan tepi danau, Karo tepi danau, Pakpak Barat bagian timur, Samosir bagian tengah, Simalungun tepi danau, Tapanuli Utara bagian utara, Toba Samosir tepi danau	MEI II	JUL	0	BN
8	Cilacap bagian barat laut dan barat	MEI II	AGT	0	BN
9	Banyumas bagian barat daya, Cilacap bagian timur	MEI III	AGT	0	N
10	Banjanegara bagian barat daya, Banyumas bagian selatan, Cilacap bagian timur, Kebumen bagian barat	MEI III	AGT	0	N
11	Kendal bagian tenggara, Kota Seamrang bagian barat daya, Semarang bagian barat laut, Temanggung sebagian kecil timur laut	MEI II	AGT	0	BN
12	Wonogiri bagian tengah	MEI I	AGT	0	BN
13	Kota Surakarta, sebagian besar Sragen, sebagian wilayah utara Sukoharjo sebagian kecil wilayah tenggara Boyolali	MEI I	AGT	0	BN
14	Sebagian Trenggalek dan bagian barat Tulungagung	MEI I	AGT	0	BN
15	Sebagian besar Ponoogo, bagian barat daya Kabupaten/Kota Madiun dan bagian selatan Magetan	MEI I	AGT	0	N
16	Bagian barat Lamongan dan bagian timur Tuban-Bojonegoro	APR III	AGT	0	N
17	Sebagian Blitar-Kediri-Tulungagung	APR III	AGT	0	BN
18	Bagian barat daya Malang dan sebagian Blitar	APR II	AGT	0	N
19	Sebagian besar Kota Surabaya dan bagian utara Sidoarjo	APR II	SEP	0	BN
20	Bagian selatan Jombang dan Mojokerto	MEI I	AGT	0	BN
21	Seluruh Kota Batu dan sebagian Malang	MEI I	SEP	-1	AN

Keterangan : *)

0 : Awal Musim Hujan sama dengan rata-ratanya
-1 : Awal Musim Hujan maju 1 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
-2 : Awal Musim Hujan maju 2 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
-3 : Awal Musim Hujan maju 3 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
<-3 : Awal Musim Hujan maju lebih besar dari 3 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
+1 : Awal Musim Hujan mundur 1 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
+2 : Awal Musim Hujan mundur 2 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya

+3 : Awal Musim Hujan mundur 3 dasarian (10 hari) dari rata-ratanya
**)
AN : Atas Normal
N : Normal
BN : Bawah Normal

e. Tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi ruang lingkup usaha PJT I anak perusahaan dan/ atau perusahaan terafiliasi.

f. Tidak terjadi Bencana Alam di wilayah kerja PJT, anak perusahaan dan/ atau perusahaan terafiliasi yang berpengaruh besar terhadap pendapatan usaha dan beban usaha.

B. Sasaran Usaha dan Strategi Perusahaan

1. Sasaran Usaha
   a. Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi:
      1) Pendapatan usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 777,80 miliar atau 110,90% dari RKAP 2023, 126,54% dari realisasi audited 2022 dan 130,89% dari prognosa 2023.
      2) Beban usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 698,00 miliar atau 111,56% dari RKAP 2023, 134,65% dari realisasi audited 2022 dan 128,32% dari prognosa 2023.
      3) Laba bersih tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 70,62 miliar atau 110,26% dari RKAP 2023, 94,37% dari realisasi audited 2022 dan 140,10% dari prognosa 2023.
      4) Kegiatan investasi dan penyertaan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 411,605 miliar atau 81,95% dari RKAP 2023 dan 260,43% dari prognosa 2023.
   b. Target Pencapaian Kinerja Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) adalah Nilai Prestasi 100.
   c. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengelolaan infrastruktur tertentu yang diberikan penugasannnya secara khusus atas kebijakan dari PUPR.
   d. Melakukan pembinaan atas pemanfaatan air yang berizin dan pemungutan BJPSDA di seluruh wilayah kerja Perusahaan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan perizinan pemakaian air yang berlaku.
   e. Peningkatan pendapatan dan profitabilitas bisnis Non SDA diantaranya penguatan kapabilitas korporasi dalam penyediaan air minum melalui bisnis SPAM.

2. Strategi Perusahaan
   Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran usaha, antara lain:

No	Sasaran	Strategi	Program Kerja
1	**Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi:** a. Pendapatan usaha tahun 2024	a. Menjaga arus kas (CFO) perusahaan, EBITDA dan *Net Profit Margin* (NPM).	1. Meningkatkan tingkat kolektibilitas sehingga piutang usaha menjadi kas yang mendukung keberlanjutan (*sustainability*) Perusahaan.

No	Sasaran	Strategi	Program Kerja
	direncanakan sebesar Rp 777,80 miliar. b. Beban usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 698,00 miliar. c. Laba bersih tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 70,62 miliar. d. Kegiatan investasi dan penyertaan tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 411,605 miliar.		2. Penarikan BJPSDA dari pengguna air yang belum membayar BJPSDA di wilayah sungai yang dikelola termasuk PLTA aset Non PUPR diantaranya PLTA Timo, Garung, Mrica, Tulis, Ketenger.
			3. Optimalisasi pengusahaan SDA melalui penjaringan pemanfaat baru melalui OP yang memadai.
			4. Melakukan penagihan secara rutin pada seluruh pemanfaat air permukaan (AP) dan melakukan komunikasi/ kunjungan Pelanggan.
		b. Melakukan belanja operasional (OPEX) dan kegiatan investasi (CAPEX) dengan lebih selektif dan seksama berdasarkan skala prioritas.	1. Mengoptimalkan pembelanjaan CAPEX sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
			2. Mengutamakan sinergi dalam pembelanjaan CAPEX dengan holding Danareksa sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
			3. Pengoptimalan penyelesaian PJPSDA dengan Prime User.
			4. Pelaksanaan pekerjaan *Disbursement* (piutang PJPSDA 2016-2020 dan sisa tagihan 2021-2022) PT. Inalum dapat tercapai sesuai target.
			5. Penguatan tata kelola Sumber Daya Air melalui pembuatan aplikasi AKNOP sebagai *tools* untuk *update*

No	Sasaran	Strategi	Program Kerja
			kondisi sarana dan prasarana SDA.
			6. Pengembangan PLTS.
		c. Melakukan penyesuaian tarif Industri di WS Brantas dan WS Bengawan Solo di Provinsi Jawa Timur dan koordinasi serta meminta dukungan Kementerian BUMN dan PT Danareksa (Persero) turut berperan dalam upaya penyesuaian tarif yang berlaku dan penetapan tarif untuk kelompok pengguna baru. (Sesuai strategi RJPP 2023-2027).	1. Memberikan dukungan terhadap penyusunan peraturan terkait perhitungan tarif BJPSDA.
			2. Usulan penyesuaian tarif BJPSDA bagi Industri pada WS Brantas dan WS Bengawan Solo di Provinsi Jawa Timur.
		d. Peningkatan dana investasi dari sumber dana internal Perusahaan melalui perolehan laba.	Menyampaikan rencana pelaksanaan kebijakan/ ketentuan yang akan ditetapkan *Holding* Danareksa khususnya mengenai koordinasi rencana investasi Anggota *Holding*.
		e. *Strengthening* perusahaan dalam bidang Jasa Air melalui pengembangan wilayah kerja.	1. Melakukan Koordinasi dan meminta dukungan Kementerian PUPR untuk rencana pengembangan wilayah kerja.
			2. Penyusunan konsep tarif BJPSDA untuk WS Bali Penida, WS Pompengan Larona dan WS Batam-Bintan.
2	**Target Pencapaian Kinerja Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) adalah Nilai Prestasi 100.**	a. Pengawasan dan pengendalian tata kelola Perusahaan.	1. Penerapan sistem Manajemen Mutu, Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh di semua Direktorat.
			2. Penguatan pengendalian internal dengan kajian

No	Sasaran	Strategi	Program Kerja
			rencana penerapan *Internal Control Over Financial Report* (ICOFR).
		b. Penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen risiko, serta peningkatan kinerja usaha pada seluruh wilayah kerja Perusahaan.	1. Alokasi sumberdaya, organisasi dan dana untuk mengembangkan kesatuan sistem manajemen mutu, sistem tata kelola perusahaan dan peningkatan kinerja usaha secara menyeluruh pada seluruh wilayah kerja Perusahaan.
			2. Penyiapan sumber daya (alat dan tenaga) yang menunjang sistem teknologi informasi Perusahaan yang tepat guna.
3	**Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengelolaan infrastruktur tertentu yang diberikan penugasannnya secara khusus atas kebijakan dari PUPR.**	a. Mempertahankan kinerja sistem keamanan bendungan dalam kondisi baik.	1. Melakukan kegiatan OP, pemantauan dan evaluasi keamanan bendungan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.
			2. Perencanaan tindakan rehabilitasi Bendungan Sutami.
			3. Penambahan peralatan monitoring keamanan bendungan.
		b. Adaptasi perusahaan terhadap mekanisme BJPSDA sebagai PNBP sesuai PP nomor 21 Tahun 2023 Perihal Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	1. Melakukan koordinasi aktif kepada *stakeholder* terkait serta memberikan masukan terhadap rencana penerbitan peraturan pendukungnya.
			2. Melakukan penyesuaian prosedur dan alur proses operasional terhadap ketentuan yang ada.
		c. Penguatan sinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan SDA melalui penyusunan pembagian peran dan tugas	1. Melaksanakan identifikasi kondisi sarana prasarana sungai (*walkthrough*) bersama instansi terkait

No	Sasaran	Strategi	Program Kerja
		(*Clear Cut*) dengan BBWS/BWS terkait.	untuk optimalisasi kegiatan O&P.
			2. Koordinasi intensif secara berkala sesuai kebutuhan untuk perkuatan *decission support* masing-masing instansi.
			3. *Sharing* data/ informasi telemetri dalam upaya mendukung kesiapsiagaan siaga banjir dan musim kemarau.
		d. Konservasi SDA guna peningkatan keseimbangan hidrologi di wilayah kerja Perusahaan. (Sesuai strategi RJPP 2023-2027).	Melaksanakan kegiatan konservasi SDA di wilayah kerja Perusahaan berupa konservasi vegetatif maupun penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat untuk penguatan sumberdaya manusia yang berbasis lingkungan.
		e. Melakukan tata kelola air yang mengutamakan kelestarian lingkungan.	1. Menginisiasi pengelolaan *Waste Water Treatment Plan* (WWTP) secara terintegrasi untuk pengembangan bidang sanitasi khususnya pengelolaan limbah.
			2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pengelolaan limbah.
			3. Melaksanakan kegiatan patroli air dengan instansi terkait.
4	**Pembinaan atas pemanfaatan air yang berizin dan pemungutan BJPSDA di seluruh wilayah kerja Perusahaan sesuai amanah peraturan**	a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada pemanfaat utama, dalam rangka memahami kewajiban pembayaran BJPSDA atas pemanfaatan air permukaan yang telah diperoleh.	1. Meningkatkan peran tim pembinaan pelanggan melalui kunjungan / komunikasi dengan pelanggan.
			2. Mendorong pemanfaat untuk memiliki SIPSDA melalui

No	Sasaran	Strategi	Program Kerja
	perundangan yang berlaku dengan memperhatikan perizinan pemakaian air yang berlaku.		kegiatan sosialisasi dan/ *helpdesk* bersinergi dengan BBWS/BWS setempat.
		b. Melakukan koordinasi dengan meminta dukungan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN dalam menyelesaikan masalah pembayaran kewajiban BJPSDA.	Melakukan komunikasi intensif ke Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN.
		c. Melakukan pemantauan volume pemanfaatan air sesuai dengan izin yang ditetapkan.	Mengintegrasikan *water meter* yang ada di intake pemanfaat ke SWMS.
5	**Peningkatan pendapatan dan profitabilitas bisnis Non SDA.**	a. Pengusahaan atas optimasi sumber daya non sumber daya air sehingga ada pertumbuhan portofolio bisnis yang telah ada dan penambahan portofolio.	1. Melakukan sinergi penggunaan *advisory* Danareksa untuk penguatan lini bisnis.
			2. Pengembangan bisnis perusahaan melalui inisiasi bisnis *Data Center.*
			3. Mencari partner sinergi dengan pihak lain dalam kerangka *business to business* dalam usaha kemitraan serta dalam pengembangan usaha.
			4. Pengembangan bisnis di bidang SPAM secara terseleksi melalui mekanisme yang sesuai peraturan perundangan & pendanaan.
			5. Peningkatan pendapatan Non SDA melalui optimasi aset perusahaan berupa sewa lahan, alat berat, aset tak berwujud, dll.
		b. Penguatan kapabilitas korporasi dalam penyediaan air minum melalui bisnis SPAM . (Sesuai strategi RJPP	1. Meningkatkan utilisasi pendanaan alternatif melalui *Indonesia Water Fund* (IWF) untuk pelaksanaan

No	Sasaran	Strategi	Program Kerja
		2023-2027).	pengembangan SPAM Kota Malang Tahap II.
			2. Optimasi operasional SPAM Kota Malang.
		c. Peningkatkan pendapatan Non SDA melalui pengembangan bisnis. (Sesuai strategi RJPP 2023-2027)	1. Pengembangan PLTS di waduk yang dikelola Perusahaan melalui mekanisme penyediaan listrik yang berlaku di Republik Indonesia.
			2. Kemitraan dengan investor dan relasi teknologi dalam perluasan bisnis EBT di dalam wilayah kerja Perusahaan.
			3. Meningkatkan kapabilitas korporasi dalam pengelolaan proyek.
			4. Melakukan Kajian *Right Issue* terkait rencana akuisisi dan pengembangan bisnis anak Perusahaan JTE.
		d. Pengelolaan dan pengembangan WWTP sebagai bisnis Non SDA serta untuk memenuhi kelas baku mutu air baku.	1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan bisnis bidang pengelolaan limbah.
			2. Membuat *business plan* terkait pengembangan WWTP.
		e. Diperlukan *roadmap* pengembangan EBT PJT I . (Sesuai strategi RJPP 2023-2027).	Menyusun *roadmap* pengembangan energi baru terbarukan (EBT) khusnya melalui optimalisasi aset di Wilayah Kerja PJT I.

C. Program Kerja Perusahaan dari masing-masing Direktorat

Program Kerja Perusahaan dari masing-masing Direktorat terangkum dalam **Lampiran XV**.

D. Sasaran Program Kerja dan Strategi PT JTE

1. Sasaran Program Kerja
   a. Sasaran Program kerja di bidang energi terdiri dari :
      - Menjadi *Independent Power Producer* (IPP) untuk PLTM atau PLTS
      - Menjadi Kontraktor EBT serta bangunan Elektrikal atas proyek PLTM atau PLTS.
   b. Penyediaan tenaga listrik kepada PT PLN dari pengoperasian PLTM Lodagung yang sudah berjalan.
   c. Melaksanakan pengembangan pembangkit listrik tenaga EBT, baik pengembangan dari awal maupun berpartisipasi/ akuisisi pembangkit yang telah memiliki Perjanjian Jual Beli Listrik / *Power Purchase Agreement (PPA)* dengan PT PLN (Persero) dengan melakukan *due diligence* terlebih dahculu untuk menilai kelayakan teknis, hukum dan finansial.
   d. Melaksanakan kegiatan konstruksi EBT dan bangunan Elektrikal, antara lain PLTS *Rooftop* (untuk pemakaian di perumahan, perkantoran, sekolah, dan industri), PLTS *Power Tower* untuk *BTS* komunikasi, dan pekerjaan instalasi Penerangan Jalan Toll atau Jalan Umum.
   e. Memperkuat kegiatan usaha konstruksi yang sudah berjalan yakni pancang cabut *Steel Sheet Pile/ Concrete sheet pile* dengan investasi SSP baru.
   f. Mengembangkan diri dengan ikut serta dalam pemeliharaan sumberdaya air di induk perusahaan. Menjadi kontraktor umum pekerjaan dari eksternal, misal jalan, jembatan, bandara, gedung dan lain-lain.
   g. Memperkuat SDM Konstruksi terutama pada bagian marketing, keuangan dan pelaksana lapangan.
   h. Terus meningkatkan kualitas SDM konstruksi dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi.

2. Strategi
   a. Menjaga arus kas perusahaan.
   b. Melakukan belanja operasional (OPEX) dan kegiatan investasi (CAPEX) dengan lebih selektif dan seksama berdasarkan skala prioritas, tingkat kelayakan, potensi pasar dan termasuk mempertimbangkan tingkat kolektibilitas.
   c. Melakukan penagihan piutang dengan lebih intensif
   d. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharan pembangkit listrik sesuai dengan SOP.
   e. Pengembangan pembangkit listrik baru sebagai IPP untuk proyek PLTS Koba, ataupun potensi proyek IPP lainnya baik dengan *offtaker* PLN ataupun untuk industri.
   f. Melakukan percepatan pengembangan pembangkit listrik dengan melakukan penjajagan kemungkinan akuisisi terhadap proyek pembangkit listrik yang telah memiliki Perjanjian Jual Beli Listrik dengan PT PLN atau bahkan telah operasional.
   g. Mengoptimalkan aset yang dikelola oleh induk (waduk atau bangunan air lainnya) untuk dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau mini hidro.

h. Menambah alat produksi di bidang konstruksi secara bertahap antara lain pembelian SSP (*Steel Sheet Pile*).
i. Bekerjasama dengan partner strategis di dalam maupun luar negeri, baik dalam bidang energi maupun konstruksi di sisi teknis maupun pendanaan.

BAB IV
ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2024

A. Anggaran Pendapatan Usaha

Kegiatan usaha Perusahaan di tahun 2024 diperkirakan akan memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp777,80 miliar atau 110,90% dari RKAP 2023 dan 130,89% dari Prognosa tahun 2023, dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam **Lampiran III**.

1. Layanan Air Baku (LAB)
   a. LAB Pengusahaan SDA tahun 2024 secara umum adalah sebagai berikut:
      1) Pembangkitan tenaga listrik: sebesar 7.162,91 juta kWh (103,11% terhadap RKAP 2023 & 111,91% terhadap prognosa 2023).
      2) Penyaluran air untuk PDAM: sebesar 630,32 juta m^3 (105,11% terhadap RKAP 2023 & 108,94% terhadap prognosa 2023).
      3) Penyaluran air untuk industri: sebesar 491,04 juta m^3 (94,57% terhadap RKAP 2023 & 105,06% terhadap prognosa 2023).
   b. Rencana LAB tahun 2024
      1) Rincian LAB untuk produksi listrik tahun 2024, diproyeksikan sebesar 7.162,91 juta kWh, dengan rincian untuk masing-masing WS sebagai berikut :

No.	Wilayah Sungai	RKAP 2023 (juta kWh)	Prognosa 2023 (juta kWh)	RKAP 2024 (juta kWh)	Keterangan
1	Brantas	1.250,00	1.137,31	1.288,85	Unit PLTA: Sengguruh, Sutami, Wlingi, Lodoyo, Selorejo, Mendalan, Siman, Wonorejo, Tulungagung
2	Bengawan Solo	85,00	81,14	87,39	Unit PLTA: Wonogiri, Giringan, Golang, Ngebel, Jamus (PLTM)
3	Serayu Bogowonto	114,00	104,45	548,69	Unit PLTA: Sempor, Wadaslintang, Pejengkolan, Garung, Mrica, Tulis, KTH Ketenger
4	Jratunseluna	208,01	168,62	227,64	Unit PLTA: Kedungombo, Sidorejo, Klambu, Jelok, Timo
5	Toba Asahan	5.290,00	4.909,16	5.010,3 3	Unit PLTA: Siruar, Sigura-gura, Tangga
	Total	**6.947,01**	**6.400,67**	**7.162,91**	

2) Untuk WS Brantas dan WS Bengawan Solo menggunakan realisasi tahun sebelumnya dan proyeksi Num.XL (*Average*) dan *Minitab* (ARIMA) berdasar data historis, dimana diharapkan produksi listrik mendekati prognosa 2023 dengan asumsi terjadi potensi anomali cuaca lebih basah.

3) Asumsi yang digunakan untuk WS Serayu Bogowonto menggunakan rerata 5 tahun terakhir, ditambah asumsi produksi dari PLTA Non PUPR.

4) Asumsi yang digunakan di WS Jratunseluna, berasal PLTA Kementerian PUPR yang menggunakan pendekatan realisasi/ prognosa tahun 2023 dan non PUPR berdasarkan kapasitas produksi masing-masing PLTA.

5) Untuk WS Toba Asahan, berasal dari PLTA Siruar, milik PT Bajradaya Sentranusa (PT. BDSN) dan PLTA Sigura Gura, PLTA Tangga milik PT. Inalum menggunakan pendekatan realisasi tahun 2023 dengan optimasi produksi.

6) LAB untuk produksi PDAM tahun 2024 diproyeksikan sebesar 630,32 juta m^3, dengan rincian untuk masing-masing WS:

No.	WS	RKAP 2023 (juta m^3)	Prognosa 2023 (juta m^3)	RKAP 2024 (juta m^3)
1	Brantas	457,19	432,18	463,12
2	Bengawan Solo	70,66	74,11	73,31
3	Serayu Bogowonto	9,71	10,50	9,70
4	Jratunseluna	59,99	61,83	83,47
5	Toba Asahan	2,16	-	0,73
	Total	**599,72**	**578,62**	**630,32**

7) Asumsi yang digunakan menggunakan pendekatan prognosa 2023 berdasarkan optimasi potensi PDAM yang ada.

8) LAB untuk produksi industri tahun 2024 diproyeksikan sebesar 491,04 juta m^3, dengan rincian sebagai berikut:

No.	WS	RKAP 2023 (juta m^3)	Prognosa 2023 (juta m^3)	RKAP 2024 (juta m^3)
1	Brantas	157,19	154,45	164,13
2	Bengawan Solo	55,12	48,55	48,46
3	Serayu Bogowonto	288,70	246,88	261,06
4	Jratunseluna	5.42	5,34	4,92
5	Toba Asahan	12,80	12,14	12,45
	Total	**519,23**	**467,36**	**491,03**

9) Asumsi yang digunakan menggunakan pendekatan prognosa 2023 berdasarkan optimasi potensi Industri yang ada.

2. Layanan Air Baku

a. Usaa Pengelolaan SDA

1) LAB untuk PLTA

Dengan asumsi tarif BJPSDA PLTA sebesar Rp167.00 untuk WS Brantas, Rp222,00 untuk WS Bengawan Solo, Rp50.06/kWh untuk WS Serayu Bogowonto, Rp49,82/kWh untuk WS Jratunseluna dan Rp27.00/kWh untuk WS Toba Asahan maka pendapatan dari LAB untuk PLTA pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 464,08 miliar atau 117,41% terhadap RKAP tahun 2023 dan 134,49% terhadap prognosa tahun 2023.

2) LAB untuk PDAM

Dengan tarif air baku untuk PDAM Rp133,00/m^3 untuk wilayah Jatim (WS Brantas, WS Bengawan Solo), Rp140.50/m^3 untuk wilayah Jateng (WS Bengawan Solo), Rp97.00/m^3 untuk wilayah Jateng (WS Serayu Bogowonto), Rp98.00/m^3 untuk wilayah Jateng (WS Jratunseluna), dan Rp10,63/m^3 untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut) (WS Toba Asahan), maka LAB untuk PDAM direncanakan sebesar Rp79,35 miliar atau 102,81% terhadap RKAP tahun 2023 dan 106,42% terhadap prognosa tahun 2023.

3) LAB untuk industri

Dengan tarif air baku untuk industri Rp356.00/m^3 untuk wilayah Jatim (WS Brantas, WS Bengawan Solo), Rp292.00/m^3 untuk wilayah Jateng (WS Bengawan Solo), Rp152.00/m^3 untuk wilayah Jateng (WS Serayu Bogowonto dan WS Jratunseluna) serta Rp 156,64/m^3 untuk wilayah Sumut (WS Toba Asahan), maka LAB untuk industri direncanakan sebesar Rp105.26 miliar atau 109,02% terhadap RKAP tahun 2023 dan 115,42% terhadap prognosa tahun 2023.

b. Usaha Pengelolaan Non SDA

1) Pengembangan energi terbarukan dan PLTA/ PLTM pada tahun 2024 diproyeksikan memperoleh pendapatan sebesar Rp28,32 miliar atau 75,49% terhadap RKAP tahun 2023 dan 154,33% terhadap prognosa tahun 2023.

2) Pelayanan Air Minum berupa pelayanan SPAM Sekaran, SPAM Brondong Paciran Kabupaten Lamongan dan SPAM Kota Malang, pelayanan air minum masyarakat sekitar Bendungan Karangkates, Bendungan Wonorejo (Kedungcangkring) dan Bendungan Selorejo tahun 2024, diproyeksikan memperoleh pendapatan sebesar Rp13,85 miliar atau 328,76% terhadap RKAP tahun 2023 dan 317,56% terhadap prognosa tahun 2023.

3) Pengembangan usaha AMDK dalam RKAP tahun 2024, diproyeksikan memperoleh pendapatan Rp6,71 miliar atau 101,57% terhadap RKAP tahun 2023 dan 158,47% terhadap prognosa tahun 2023.

4) Pendapatan pariwisata diproyeksikan sebesar Rp16,20 miliar atau 102,02% terhadap RKAP tahun 2023 dan 115,39% terhadap prognosa tahun 2023 yang meliputi pariwisata Wlingi, Lodoyo, Bening, Selorejo, Sutami, Wonorejo dan Mrican.

5) Pendapatan Konsultasi dan Pendidikan / Pelatihan diproyeksikan sebesar Rp0,28 miliar atau 112,00% terhadap RKAP tahun 2023 dan 113,87% terhadap prognosa tahun 2023.

6) Pendapatan dari pemanfaatan/ jasa peralatan & konstruksi diproyeksikan sebesar Rp47,74 miliar atau 93,84% terhadap RKAP tahun 2023 dan 189,72% terhadap prognosa tahun 2023.

7) Laboratorium Lingkungan berupa penyediaan tenaga serta alat untuk pengujian kualitas air dengan laboratorium yang terakreditasi diproyeksikan sebesar Rp10,99 miliar atau 75,57% terhadap RKAP tahun 2023 dan 116,79% terhadap prognosa tahun 2023.

8) Pemanfaatan lahan berupa pendapatan sewa lahan, kerjasama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sewa bangunan yang dimiliki/ dikelola Perusahaan kepada pihak ketiga, diproyeksikan pendapatan memperoleh sebesar Rp4,69 miliar atau 188,56% terhadap RKAP tahun 2023 dan 60,85% terhadap prognosa tahun 2023.

9) Pendapatan dari SWMS diproyeksikan sebesar 0,32 miliar, di RKAP 2023 dan prognosa 2023 belum diproyeksikan.

B. Anggaran Beban Usaha

1. Beban usaha direncanakan sebesar Rp698,00 miliar atau 111,56% terhadap RKAP tahun 2023 dan 128,32% terhadap prognosa tahun 2023, dengan rincian sebagaimana diuraikan dengan **Lampiran IV**.

2. Secara umum Beban Usaha Pengelolaan SDA direncanakan sebesar Rp578,01 miliar atau 114,69% terhadap RKAP tahun 2023 dan 126,66% terhadap prognosa tahun 2023 dengan rincian:

   a. Beban Pengelolaan

   1) Beban pengelolaan direncanakan sebesar Rp378,96 miliar atau 120,00% terhadap RKAP tahun 2023 dan 137,92% terhadap prognosa tahun 2023.

2) Beban pengelolaan tersebut pada angka 1) di atas digunakan mempertahankan layanan air kepada seluruh pemangku kepentingan dan merupakan pembiayaan yang diperoleh dari penarikan BJPSDA (PLTA, PDAM dan Industri). PP 46/2010 menjadi acuan dalam rangka penyusunan biaya tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

   a) Biaya Perencanaan dengan alokasi biaya sebesar Rp43,68 miliar atau 138,44% terhadap RKAP tahun 2023 dan 173,05% terhadap prognosa tahun 2023, yang merupakan pembiayaan dalam kegiatan perencanaan kegiatan pengelolaan SDA terutama O&P (preventif dan pemeliharaan darurat) serta pembangunan sarana dan prasarana SDA.

   b) Biaya konservasi SDA dengan alokasi biaya sebesar Rp22,47 miliar atau 158,27% terhadap RKAP tahun 2023 dan 346,89% terhadap prognosa tahun 2023, yang merupakan upsaya Perusahaan dalam mempertahankan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi WS Brantas, WS Bengawan Solo, WS Serayu Bogowonto, WS Jratunseluna dan WS Toba Asahan melalui kegiatan penghijauan lahan *green belt* dan daerah tangkapan hujan.

   c) Biaya pembangunan sarana dan prasarana SDA yang direncanakan sebesar Rp9,75 miliar atau 609,38% terhadap RKAP tahun 2023 dan 3.206,44% terhadap prognosa tahun 2023. Biaya tersebut diperuntukan untuk kegiatan konstruksi sarana dan prasarana, antara lain manfaat langsung ataupun dalam menjamin terhadap pelayanan air kepada pemanfaat baik yang bersifat pengusahaan maupun pemanfaatan umum. Sebagai contoh, pembuatan *trash boom* waduk harian/ sungai/ *intake* irigasi, pembuatan *check dam* sebagai pengendali sedimen waduk dan sebagainya.

   d) Biaya O&P sumber air sarana dan prasarana SDA direncanakan sebesar Rp252,57 miliar atau 112,32% terhadap RKAP tahun 2023 dan 128,46% terhadap prognosa tahun 2023. Biaya tersebut diperuntukan sebagai kegiatan O&P serta perbaikan sarana dan prasarana sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PJT I, antara lain kegiatan untuk operasi pintu air, pemeliharaan waduk (pengerukan sedimen waduk, kegiatan *hauling*/ pembuatan *spoil bank*, dan lain-lain) pembuatan dam penahan/*gully plug*, jaga sarana tanggul (jogo tanggul) dan perbaikan lindungan tebing, pemeliharaan darurat sungai yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.

   e) Biaya sistem informasi, monitoring evaluasi dan pemberdayaan masyarakat, direncanakan sebesar Rp9,56 miliar atau 144,82% terhadap RKAP tahun 2023 dan 124,27% terhadap prognosa tahun 2023. Biaya ini antara lain untuk pelaksanaan kegiatan O&P sarana dan prasarana operasional yang berkaitan dengan kegiatan

pengelolaan SDA bidang sistem informasi (*Flood Forecasting and Warning System* (FFWS), *Early Warning System* (EWS), *Automatic Water Level Recorder* (AWLR), dan lain-lain) serta pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi baik yang bersifat pengusahaan maupun pemanfaatan umum. Sedangkan untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain terkait dengan peran serta masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan sarana prasarana melalui pelatihan masyarakat dalam program jaga sarana tanggul (jogo tanggul), kegiatan penyuluhan sebagai pelestarian lingkungan yang berbasis masyarakat.

f) Biaya penyusutan dialokasikan sebesar Rp40,93 miliar atau 110,67% terhadap RKAP tahun 2023 dan 106,49% terhadap prognosa tahun 2023. Biaya ini merupakan beban penyusutan sarana atau peralatan yang dipergunakan untuk kegiatan berkaitan dengan usaha pengelolaan SDA dan beban penyusutan sarana atau peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan operasional Kantor Pusat berkaitan dengan kegiatan usaha pengelolaan SDA.

b. Beban *Overhead* Pengelolaan

1) Beban *overhead* pengelolaan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 193,84 miliar atau 106,35% terhadap RKAP tahun 2023 dan 108,87% terhadap prognosa tahun 2023, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran IV**.

2) Secara umum, beban *overhead* tersebut pada angka 1) direncanakan memuat pokok-pokok sebagai berikut:

a) Biaya pegawai sebesar Rp 141,20 miliar atau 107,31% terhadap RKAP tahun 2023 dan 110,09% terhadap prognosa tahun 2023 yang digunakan untuk gaji pegawai, program pensiun, pemeliharaan kesehatan dan pengembangan SDM dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran X**.

b) Biaya Direksi, Dewas, Komite Dewas sebesar Rp13,96 miliar atau 107,33% terhadap RKAP tahun 2023 dan 111,84% terhadap prognosa tahun 2023 untuk gaji, tunjangan dan pemeliharaan kesehatan.

c) Biaya jasa produksi/bonus karyawan sebesar Rp10,90 miliar atau 103,81% terhadap RKAP tahun 2023 dan 103,98% terhadap prognosa tahun 2023.

d) Biaya tantiem sebesar Rp3,80 miliar atau 126,67% terhadap RKAP 2023 dan 100,00% terhadap prognosa tahun 2023.

e) Biaya perjalanan dinas sebesar Rp8,64 miliar atau 132,92% terhadap RKAP tahun 2023 dan 110,54% terhadap prognosa tahun 2023

f) Biaya umum sebesar Rp8,21 miliar atau 103,93% terhadap RKAP tahun 2023 dan 103,84% terhadap prognosa tahun 2023.

g) Biaya pemasaran sebesar Rp3,19 miliar atau 222,78% terhadap RKAP tahun 2023 dan 134,17% terhadap prognosa tahun 2023.

h) Biaya penelitian dan pengembangan sebesar Rp3,94 miliar atau 47,19% terhadap RKAP tahun 2023 dan 80,13% terhadap prognosa tahun 2023.

c. Biaya Lainnya

Beban Lainnya tahun 2024 direncanakan sebesar Rp5,21 miliar atau 88,31% terhadap RKAP tahun 2023 dan 146,84% terhadap prognosa tahun 2023 untuk biaya pendampingan hukum, audit KAP, pengurusan aset, jasa professional, dan *shared service fee.*

1) Beban pendampingan hukum sebesar Rp2,66 miliar atau 177,33% terhadap RKAP tahun 2023 dan 169,69% terhadap prognosa tahun 2023,
2) Beban audit KAP (termasuk biaya *Audit Upon Procedure*) sebesar Rp0,75 miliar atau 100,00% terhadap RKAP tahun 2023 dan 100,00% terhadap prognosa tahun 2023,
3) Beban pengurusan aset sebesar Rp0,90 miliar atau 30,00% terhadap RKAP tahun 2023 dan prognosa tahun 2023 tidak memproyeksikan beban tersebut.
4) Beban Jasa Profesional sebesar Rp0,45 miliar atau 221,76% terhadap RKAP tahun 2023 dan 36,95% terhadap prognosa tahun 2023,
5) Beban *Shared Service Fee* sebesar Rp0,44 miliar atau 100,00% terhadap RKAP tahun 2023 dan prognosa tahun 2023 tidak memproyeksikan beban tersebut,

3. Biaya Pengelolaan non SDA direncanakan sebesar Rp119,99 miliar atau 98,58% terhadap RKAP tahun 2023 dan 136,96% terhadap prognosa tahun 2023 dengan rincian:

a. Beban Pengelolaan

Beban pengelolaan Non SDA sebesar Rp96,21 miliar atau 94,68% terhadap RKAP tahun 2023 dan 140,37% terhadap prognosa tahun 2023, yang terdiri dari pembiayaan sebagai berikut:

1) Biaya operasional sebesar Rp83,16 miliar atau 93,26% terhadap RKAP tahun 2023 dan 145,56% terhadap prognosa tahun 2023 yang merupakan pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Non SDA antara lain pariwisata, konstruksi dan peralatan, konsultansi, laboratorium lingkungan, layanan air minum/SPAM, PLTA/PLTM, AMDK.

2) Biaya penyusutan sebesar Rp13,06 miliar atau 104,80% terhadap RKAP tahun 2023 dan 114,40% terhadap prognosa tahun 2023 merupakan penyusutan sarana dan peralatan yang berkaitan langsung dengan usaha Pengelolaan non SDA.

b. Beban *Overhead* pengelolaan non SDA

Beban *overhead* pengelolaan non SDA sebesar Rp23,04 miliar atau 115,84% terhadap RKAP tahun 2023 dan 123,79% terhadap prognosa tahun 2023 yang terdiri dari pembiayaan sebagai berikut:

1) Biaya pegawai sebesar Rp19,07 miliar atau 118,95% terhadap RKAP tahun 2023 dan 124,02% terhadap prognosa tahun 2023, yang digunakan untuk gaji pegawai, program pensiun, pemeliharaan kesehatan dan pengembangan SDM.

2) Biaya jasa produksi/ bonus karyawan sebesar Rp0,83 miliar atau 110,23% terhadap RKAP tahun 2023 dan 122,79% terhadap prognosa tahun 2023.

3) Biaya tantiem entitas anak sebesar Rp0,26 miliar atau 87,13% terhadap RKAP tahun 2023 dan dalam prognosa 2023 tidak dianggarkan.

4) Biaya perjalanan dinas sebesar Rp1,21 miliar atau 97,83% terhadap RKAP tahun 2023 dan 143,34% terhadap prognosa tahun 2023.

5) Biaya umum sebesar Rp1,17 miliar atau 127,40% terhadap RKAP tahun 2023 dan 95,79% terhadap prognosa tahun 2023.

6) Biaya pemasaran sebesar Rp0,50 miliar atau 76,98% terhadap RKAP tahun 2023 dan 100,84% terhadap prognosa tahun 2023.

c. Biaya Lainnya

Beban Lainnya tahun 2024 direncanakan sebesar Rp0,74 miliar atau 353,59% terhadap RKAP tahun 2023 dan 161,27% terhadap prognosa tahun 2023 untuk biaya audit KAP dan Lainnya.

1) Beban audit KAP sebesar Rp0,50 miliar atau 238,28% terhadap RKAP tahun 2023 dan 145,44% terhadap prognosa tahun 2023,
2) Beban lainnya sebesar Rp0,24 miliar atau 203,94% terhadap prognosa tahun 2023.

C. Anggaran Pendapatan dan Beban Keuangan

Pendapatan Keuangan Bersih direncanakan sebesar Rp13,66 miliar atau 200,88% terhadap RKAP tahun 2023 dan 72,76% terhadap prognosa tahun 2023.

D. Anggaran Pendapatan dan Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Bersih direncanakan sebesar Rp 3,99 miliar atau 114,33% terhadap RKAP tahun 2023 dan 91,90% terhadap prognosa tahun 2023.

E. Anggaran Pengadaan

1. Rencana Umum Pengadaan (RUP) PJT I tahun 2024, disusun berdasarkan Perdir PJT I Nomor 008/PRT/DRUT/XI/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

2. Dalam rangka mensukseskan Program Peningkatan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri BUMN Nomor

SE-02/MBU/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, PJT I melakukan Pengadaan Barang dan Jasa di tahun 2024 dengan mengedepankan penggunaan produk dalam negeri dan sinergi dengan BUMN sesuai bidangnya. Sesuai Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN No: S-113/S.MBU/02/2023 tanggal 10 Februari 2023, monitoring penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) disampaikan secara rutin kepada Kementerian BUMN. Realisasi penggunaan PDN tahun 2023 sebesar 91,95%. Target belanja PDN terhadap total Belanja di tahun 2023 sebesar 76,46% dan tahun 2024 sebesar 77,00%.

F. Anggaran Investasi

1. PJT I berencana melaksanakan investasi sebesar Rp411,60 miliar atau 81,95% terhadap RKAP tahun 2023 dan 260,43% terhadap prognosa tahun 2023 melalui dana internal Perusahaan dan eksternal (pinjaman pihak ketiga).
2. Program Kegiatan Investasi dan Penyertaan Tahun 2024 diuraikan sebagaimana **Lampiran XIII**.

G. Anggaran SDM

Pada anggaran biaya usaha pos *overhead* pengelolaan SDA diantaranya terdapat anggaran untuk peningkatan pengembangan SDM tahun 2024 sebesar Rp2,74 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kemampuan manajerial sebesar Rp0,86 miliar;
2. Keterampilan sebesar Rp0,68 miliar;
3. Jenjang pendidikan sebesar Rp0,35 miliar;
4. Wawasan, seminar, rekrutmen dan lain-lain sebesar Rp0,85 miliar.

H. Anggaran Teknologi Informasi

Biaya sistem informasi, monitoring evaluasi dan pemberdayaan masyarakat tahun 2024 direncanakan sebesar Rp9,56 miliar atau 144,82% terhadap RKAP tahun 2023 dan 124,27% terhadap prognosa tahun 2023.

Perusahaan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,203 miliar dalam rencana kegiatan investasi tahun 2024.

I. Anggaran Penelitian dan Pengembangan

Biaya litbang direncanakan sebesar Rp3,94 miliar atau 47,19% terhadap RKAP tahun 2023 dan 80,13% terhadap prognosa tahun 2023.

Biaya ini untuk melaksanakan kegiatan penelitian/ kajian yang terencana untuk tujuan pengembangan Perusahaan.

BAB V

PROYEKSI KEUANGAN PERUSAHAAN

A. Proyeksi Neraca (Konsolidasi)

Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian RKAP per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	RKAP 2023 (Rp. 10^6)	Prognosa 2023 (Rp. 10^6)	RKAP 2024 (Rp. 10^6)	Naik/ Turun RKAP 2024 thd	
				RKAP 2023 (Rp. 10^6)	Prog 2023 (Rp. 10^6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-2)	(6=4-3)
ASET					
a. Aset Lancar	326,670,73	714.404,14	660.287,54	333.616,82	(54.116,60)
b. Investasi pada Entitas Asosiasi	0	2,529.94	570,08	570,08	(1.959,85)
c.Investasi Jangka Panjang Lainnya	65.000,00	16,500.00	57.000,00	(8.000,00)	40.500,00
d. Aset Hak Guna Bersih	11.664,32	447,439.59	1.664,92	(9.999,40)	(389,92)
e. Aset Tetap Bersih	800.183,14	2,054.84	668.850,87	(131.332,27)	221.411,28
f. Aset Tak Berwujud	10.948,92	8.413,70	18,527.38	7.578.46	10,113.68
g. Properti Investasi	42,16	844.04	802.04	759.88	(42.00)
h. Aset Pajak Tangguhan	13.984,8	25,452.47	17,874.17	3,889.89	(7,578.30)
i. Aset Lain-lain	193,16	1,017.80	977.80	784.64	(40.00)
Jumlah Aset	**1.228.686,71**	**1.218.656,52**	**1.426.554,81**	**197.868,10**	**207.898,29**
LIABILITAS & EKUITAS					
a. Liabilitas Jangka Pendek	136.723,94	234.148,72	298.509,86	161.785,92	64.361,15
b. Liabilitas Jangka Panjang	57.948,35	10,289.97	83,291.16	25,342.81	73,001.19
c. Ekuitas	1.034.014,42	974,217.83	1,044,753.79	10,739.37	70,535.96
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	**1.228.686,71**	**1.218.656,52**	**1.426.554,81**	**197.868,10**	**207.898,29**

a. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian RKAP per 31 Desember 2024 lebih rinci adalah sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran V**.

b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian RKAP 31 Desember 2024 diproyeksikan dengan jumlah Aset dan Liabilitas & Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.426,55 miliar atau naik sebesar Rp207,90 miliar terhadap prognosa tahun 2023.

B. Proyeksi Laba/ Rugi (Konsolidasi)

1. Layanan (dalam jutaan)

NO	Uraian	Sat	RKAP 2023	PROG 2023	RKAP 2024	Deviasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5)
	Air baku untuk:					
1.	Pembangkitan Listrik	kWh	6.947,01	6.400,68	7.162,91	111,9
2.	PDAM	m^3	599,71	578,62	630,32	108,9
3.	Industri	m^3	519,23	467,36	491,04	105,1

2. Pendapatan Usaha (dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	RKAP 2023	Prognosa 2023	RKAP 2024	Deviasi (%)	
					RKAP 2023	Prog 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)	(7=5/4)
I	**PENDAPATAN USAHA**	**701.355,94**	**594.219,57**	**777.798,53**	**110,9**	**130,9**
a.	**Usaha Pengelolaan SDA**	**568.981,45**	**510.836,20**	**648.691,27**	**114,0**	**127,0**
	Listrik	395.253,78	345.075,77	464.083,09	117,4	134,5
	PDAM	77.182,92	74.563,25	79.351,96	102,8	106,4
	Industri	96.544,75	91.197,18	105.256,25	109,0	115,4
b.	**Usaha Pengelolaan NonSDA**	**132.374,49**	**83.383,37**	**129.107,26**	**97,5**	**154,8**
	PLTM	7.828,20	5.380,12	7.503,56	95,8	139,5
	Pengembangan EBT	29.688,18	12.971,30	20.819,80	70,1	160,5
	SPAM	4.212,04	4.359,68	13.847,34	328,8	317,6
	AMDK	6.607,50	4.234,94	6.711,00	101,6	158,5
	Pariwisata	15.880,00	14.039,52	16.200,00	102,0	115,4
	Konstruksi dan Peralatan	50.877,03	25.214,38	47.740,55	93,8	189,3
	Konsultasi dan Diklat	250,00	245,90	280,00	112,0	113,9
	Laboratorium Lingkungan	14.541,37	9.410.00	10.989,57	75,6	116,8
	Pemanfaatan Lahan	2.490,17	7.527,53	4.695,44	188,6	62,4
	SWMS	-	-	320,00	-	-

3. Beban Usaha (dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	RKAP 2023	Prognosa 2023	RKAP 2024	Deviasi (%)	
					RKAP 2023	Prog 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)	(7=5/4)
I	**BEBAN USAHA**	**(625.690,63)**	**(543.963,59)**	**(698.000,85)**	**111,6**	**128,3**
A	**USAHA PENGELOLAAN SDA**	**(503.968,69)**	**(456.349,96)**	**(578.008,35)**	**114,7**	**126,7**
1	**Beban Pengelolaan**	**(315.802,46)**	**(274.756,27)**	**(378.956,15)**	**120,0**	**137,9**
a.	Biaya Perencanaan	(31.550,00)	(25.239,49)	(43.677,22)	138.4	173,1
b.	Biaya Konservasi	(14.200,00)	(6.478,67)	(22.473,87)	158,3	346,9
c.	Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana SDA	(1.600,00)	(304,08)	(9.750,00)	609,4	3.206,4
d.	Biaya OP Sarana dan Prasarana SDA	(224.872,14)	(196.609,83)	(252.570,19)	112,3	128,5
e.	Biaya Sistem Informasi, Monitoring, Evaluasi & Pemberdayaan Masyarakat	(6.600,00)	(7.691,46)	(9.558,04)	144,8	124,3
f.	Biaya Penyusutan	(36.980,32)	(38.432,74)	(40.926.83)	110,7	106,5
2	**Biaya Overhead**	**(182.267,23)**	**(178.110,58)**	**(193.843,13)**	**106,3**	**108,9**
a.	Biaya Pegawai	(131.575,85)	(128.260,84)	(141.199,64)	107,3	110,1
b.	Biaya Direksi/ Dewas/ Komite	(13.009,09)	(12.484,09)	(13.962,36)	107,3	111,8
c.	Biaya Jasa Produksi	(10.500,00)	(10.483,00)	(10.900,00)	103,8	104,0
d.	Biaya Tantiem	(3.000,00)	(3.800,00)	(3.800,00)	126,7	100,0
e.	Biaya Perjalanan Dinas	(6.500,00)	(7.815,83)	(8.639,48)	132,9	110,5
f.	Biaya Umum	(7.900,20)	(7.906,81)	(8.210,74)	103,9	103,8
g.	Biaya Pemasaran	(1.432,09)	(2.377,85)	(3.190,40)	222,8	134,2
h.	Biaya Penelitian dan Pengembangan	(8.350,00)	(4.917,36)	(3.940,51)	47,2	80,1
3	**Biaya Lainnya**	**(5.899,00)**	**(3.547,92)**	**(5.209,60)**	**88,3**	**146,8**
a.	Biaya Pendampingan Hukum	(1.500,00)	(1.567.58)	(2.660,00)	177,3	169,7
b.	Biaya Audit KAP	(750,00)	(750,00)	(750,00)	100,0	100,0
c.	Biaya Pengurusan Aset	(3.000,00)	-	(900,00)	30,0	0
d.	Beban Jasa Profesional	(205,00)	(1.230,34)	(454,60)	221,8	36,9
e.	Beban *Shared Service Fee*	(444,00)	-	(445,00)	100,2	0
B	**BIAYA PENGELOLAAN NONSDA**	**(121.721,94)**	**(87.613,62)**	**(119.991,57)**	**98,6**	**136,9**
1	**Biaya Pengelolaan Non SDA**	**(101.624,34)**	**(68.544,48)**	**(96.213,86)**	**94,7**	**140,4**
a.	Biaya Operasional	(89.165,98)	(57.131,13)	(83.157,53)	93,3	145,6
b.	Biaya Penyusutan	(12.458,36)	(11.413,36)	(13.056,32)	104,8	114,4
2	**Biaya Overhead Non SDA**	**(19.888,60)**	**(18.610,90)**	**(23.038,70)**	**115,8**	**123,8**
a.	Biaya Pegawai (termasuk Direksi dan Dekom)	(16.029,97)	(15.374,80)	(19.067,96)	118,9	124,0
b.	Biaya Jasa Produksi	(752,07)	(675,15)	(829,00)	110,2	122,8
c.	Biaya Tantiem (Entitas Anak)	(300,00)	(0)	(261,38)	87,1	0
d.	Biaya Perjalanan Dinas	(1.238,68)	(845,43)	(1.211,85)	97,8	143,3

No.	Uraian	RKAP 2023	Prognosa 2023	RKAP 2024	Deviasi (%)	
					RKAP 2023	Prog 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)	(7=5/4)
e.	Biaya Umum	(915,40)	(1.217,46)	(1.166,26)	127,4	95,8
f.	Biaya Pemasaran	(652,48)	(498,06)	(502,26)	77,0	100,8
3.	**Beban Lainnya**	**(209,00)**	**(458,24)**	**(739,00)**	**353,6**	**161,3**
4	**Pendapatan/ (Beban) Keuangan – Bersih**	**6.798,51**	**18.769,47**	**13.657,11**	**200,9**	**72,8**
5	**Pendapatan / (Beban) Lain-lain – Bersih**	**(3.488,02)**	**(4.339,3)**	**(3.987,82)**	**114,3**	**91,9**

a. Proyeksi Laba/Rugi Perusahaan (dalam jutaan rupiah) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	RKAP 2023	Prog 2023	RKAP 2024	Deviasi (%)	
					RKAP 23	Prog 23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)	(7=5/4)
a.	Pendapatan Usaha	701.355,94	594.219,57	777.798,53	110,9	130,9
b.	Beban Usaha	(625.690,64)	(543.963,59)	(698.000,45)	111,6	128,3
c.	Laba/ Rugi Usaha	75.665,30	50.255,98	79.798,08	105,5	158,8
d.	Pendapatan Keuangan	12.317,50	19.136,40	15.632,40	126,9	81,7
e.	Beban Keuangan	(5.518,99)	(366,93)	(1.975,29)	35,8	538,3
f.	Pendapatan Lain – lain	2.180,00	1.964,83	2.152,00	98,7	109,5
g.	Beban Lain – lain	(5.668,02)	(6.304,12)	(6.139,82)	108,3	97,4
h.	Laba/ Rugi Sebelum Pajak	78.975,80	64.686,15	89.467,37	113,3	138,3
i.	Pajak Penghasilan	(14.930,00)	(14.280,00)	(18.850,00)	126,3	132,0
j.	Laba/ Rugi Tahun Berjalan	64.045,80	50.406,15	70.617,37	110,3	140,1

b. Proyeksi Perhitungan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain RKAP tahun 2024 lebih rinci adalah sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran II**.

c. Laba bersih RKAP tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp70,62 miliar atau 110,3% dari RKAP 2023 dan 140,1% dari prognosa 2023..

d. Sampai dengan saat ini PJT I tidak/ belum mendapatkan *Public Service Obligation* (**PSO**), sehingga tidak tampak dalam tampilan laporan keuangan.

C. Proyeksi Arus Kas (Konsolidasi)

1. Proyeksi Arus Kas RKAP tahun 2024 (dalam jutaan rupiah) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	RKAP 2023	Prognosa 2023	RKAP 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a.	Kas Bersih dari aktivitas operasi	74.271,26	3.931,56	179.283,69
b.	Kas Bersih dari aktivitas investasi	(453.450,03)	(134.095,95)	(274.770,62)
c.	Kas Bersih dari aktivitas pendanaan	128.919,26	7.245,01	49.989,34
d.	Kenaikan/ (penurunan) Kas	(250.259,51)	(122,919.38)	(45.497,59)
e.	Saldo Awal Kas dan setara Kas	474.508,65	538.408,28	415.488,90
f.	Saldo Akhir Kas dan setara Kas	224.249,14	415.488,90	369.991,31

2. Proyeksi Arus Kas RKAP tahun 2024 lebih rinci adalah sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran VI**.

D. Sumber dan Penggunaan Dana

Dikarenakan PJT I tidak memiliki dana *Public Servise Obligation* (PSO), sehingga hanya menggunakan anggaran internal dan pinjaman pihak ketiga dalam merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

E. PT Jasa Tirta Energi (JTE)

1. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

   a. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian untuk PT JTE sesuai RKAP per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	RKAP 2023 (Rp. 10^6)	Prog 2023 (Rp. 10^6)	RKAP 2024 (Rp. 10^6)	Naik/ Turun RKAP 20234	
				RKAP 2023	Prognosa 2023
ASET					
a. Aset Lancar	95.983,67	83.267,50	85.974,64	(10,009.03)	2,707.14
b. Investasi pada Entitas Asosiasi	-	2.529,94	570,08	570.08	(1,959.85)
c. Investasi Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
d. Aset Hak Guna Bersih	443,79	240,38	0,82	(507.42)	(304.01)
e. Aset Tetap Bersih	217.215,55	57.824,72	154.153,64	40.901,67	96.393,37
f. Aset Tak Berwujud	1.116,58	23,06	687,98	(428,60)	664,92
g. Properti Investasi	-	-	-	-	-
h. Aset Pajak Tangguhan	3.209,36	3.079,54	2.069,54	(1.139,82)	(1.010,00)
i. Aset Lain-lain	8,00	461,08	421,08	413,08	(40,00)
Jumlah Aset	**295.881,16**	**147.426,23**	**243.877,79**	**(52.003,37)**	**96.451,56**
LIABILITAS & EKUITAS					
a. Liabilitas Jangka Pendek	32.573,12	45.452,24	32.334,24	(238,88)	(13.117,99)
b. Liabilitas Jangka Panjang	116.585,36	7.820,59	73.669,37	(42.915,99)	65.848,78
c. Ekuitas	146.722,68	94.153,40	137.874,17	(8.848,50)	43.720,78
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	**295.881,16**	**147.426,23**	**243.877,79**	**(52.003,37)**	**96.451,56**

Laporan Posisi Keuangan PT. JTE RKAP 31 Desember 2024 diproyeksikan dengan jumlah Aset dan Liabilitas dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp243.877,79 miliar atau turun sebesar Rp52.003,37 miliar dari RKAP 2023, dan naik sebesar Rp96.451,56 miliar dari prognosa 2023.

2. Proyeksi Laba/ Rugi

Proyeksi Laba/ Rugi PT. JTE (dalam jutaan rupiah) adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	RKAP 2023	Prog 2023	RKAP 2024	Deviasi (%)	
					RKAP 2023	Prog 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)	(7=5/4)
I	**PENDAPATAN USAHA**	**97,093.41**	**73.899,14**	**84.863,91**	**87,40**	**114,84**
a.	**Pendapatan Non SDA**	**97,093.41**	**73.899,14**	**84.863,91**	**87,40**	**114,84**
a	PLTA/ PLTM	7,828.20	5.380,12	7.503,56	95,85	139,47
b	Pengembangan EBT	29,688.18	13.468,27	20.819,80	70,12	154,58
c	Konstruksi dan Peralatan	59,577.03	55.050,75	56.540,55	94,90	102,71
II	**BEBAN USAHA**	**(81,370.68)**	**(72.063,15)**	**(78.768,62)**	**96,80**	**109,30**
a.	**Biaya Pengelolaan NonSDA**	**(71,537.73)**	**(63.743,38)**	**(68.665,13)**	**95,98**	**107,72**
1.	Biaya Operasional	(64,847.77)	(57.562,22)	(62.395,65)	96,22	108,40
2.	Biaya Penyusutan	(6,689.96)	((6.181,19)	((6.269,48)	93,71	101,43
b.	**Biaya Overhead NonSDA**	**(9,073.95)**	**(7.861,52))**	**(8.824,50)**	**97,25**	**112,25**
1.	Biaya Pegawai (Direksi & Dekom)	(7,037.49)1	(6.442,68)	(7.032,31)	99,93	109,15
3.	Biaya Jasa Produksi	(76.92)	0,00	(129,00)	167,71	0
4.	Tantiem	(300.00)	0,00	(261,38)	87,13	0
5.	Biaya Perjalanan Dinas	(788.68)	(571,60)	(790,27)	100,20	138,26
6.	Biaya Umum	(616.38)	(681,44)	(420,992)	68,30	61,78
7.	Biaya Pemasaran	(254.48)	(165,80)	(190,55)	74,88	114,92
c.	**Biaya lainnya**	**(759)**	**(458,24)**	**(1.279,00)**	**168,51**	**279,11**
III	**LABA/RUGI USAHA**	**15,722.73**	**1.835,97**	**6.095,29**	**38,77**	**331,99**
IV	**PENDAPATAN/(BEBAN) KEUANGAN BERSIH**	**(4,304.34)**	**(1.176,18)**	**(1.445,72)**	**33,59**	**122,92**
1.	Pendapatan Keuangan	1,178.58	305,17	493,50	41,87	161,71
2.	Beban Keuangan	(5,482.92)	(1.481,35)	(1.939,22)	35,37	130,91
V	**PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN - LAIN BERSIH**	**(313.70)**	**(312,90)**	**(559,50)**	**178,36**	**178,80**
1.	Pendapatan Lain-lain	-	1.100,83	970,00	0	88,12
2.	Beban Lain-lain	(313.70)	(1.413,75)	(1.529,50)	487,57	108,19
VI	**LABA/RUGI SEBELUM PAJAK**	**11,104.69**	**346,87**	**4.090,07**	**36,83**	**1.179,14**
VII	**PAJAK PENGHASILAN**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0**
VIII	**LABA/RUGI BERSIH**	**11,104.69**	**346,87**	**4.090,07**	**36,83**	**1.179,14**

BAB VI
MANAJEMEN RISIKO

A. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023

1. Implementasi Manajemen Risiko

Perusahaan telah dan terus berupaya untu melakukan perbaikan dalam implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Perusahaan dan menyesuaikan dengan dinamika proses bisnis perusahaan dan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Risiko Utama Perusahaan tahun 2023.

- Terdapat 7 (tujuh) risiko utama yang terdiri dari 1 (satu) risiko pada level risiko Very High dan 6 (enam) risiko pada level risiko High. Profil risiko utama tahun 2023 tercantum dalam Buku RKAP tahun 2023.
- Dilakukan evaluasi atas risiko utama sesuai dengan perkembangan kondisi Perusahaan dan pemantauan penerapan manajemen risiko tahun 2023 dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- Laporan Manajemen Risiko dan Audit Intern disampaikan sebagai bagian dari Laporan Manajemen Perusahaan.
- Penetapan pernyataan selera risiko perusahaan (*Risk Appetite*), toleransi risiko (*Risk Tolerance*) dan limit risiko (*Risk Limit*) manajemen risiko tahun 2023 PJT I oleh Dewan Pengawas dan Direksi yang berisi
- Melakukan pendampingan kepada Risk Owner/RTU dalam implementasi Manajemen Risiko sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah diperbaharui.

b. Pedoman/Kebijakan Manajemen Risiko

- Menerbitkan kajian hukum tentang Pedoman Manajemen Risiko di llingkungan PJT I sehubungan dengan terbitnya PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Reviu pedoman manajemen risiko dilakukan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan diterbitkan (Maret 2024).

2. Pemenuhan Kualifikasi Pelatihan dan Kualifikasi Sertifikasi Organ Pengelola Risiko

a. Mengikuti workshop, sosialisasi dan rapat koordinasi/pembahasan

- Mengikuti sosialisasi *Risk Strategy* yang diselenggarakan oleh Holding Danareksa pada tanggal 8 Februari 2023.
- Mengikuti workshop Persiapan Implementasi Tata Kelola Keamanan Siber dan Penyusunan Profil Risiko sektor ESDA Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara pada tanggal 21 – 23 Februari 2023.

- Mengikuti pembahasan *Risk Register* Utama dan *Risk Appetite Statement* PJT I tahun 2023 secara *one on one* dengan Divisi Risk Manajemen Holding Danareksa pada tanggal 27 Maret 2023.
- Mengikuti Sosialisasi, Penyuluhan, dan Pelatihan Program Kepatuhan Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (**KPPU**) pada tanggal 25 – 26 Mei 2023.
- Mengikuti Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko oleh Keasdepan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN pada tanggal 13 Juni 2023.
- Mengikuti pelatihan GRC Masterclass Program 2023 dengan topik Audit Teknologi Informasi yang diselenggarakan oleh Keasdepan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN pada tanggal 27 Juni 2023.
- Mengikuti pelatihan GRC Masterclass Program 2023 dengan topik ESG for Auditor diselenggarakan oleh Keasdepan Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN pada tanggal 13 Juli 2023. Peserta pelatihan dari PJT I sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari Komite Audit, SPI, dan Divisi Manajemen Risiko & Kinerja.
- Mengikuti pelatihan Penyusunan Key Risk Indicator (KRI) yang diselenggarakan oleh CRMS Indonesia pada tanggal 24 - 25 Agustus 2023. Peserta pelatihan dari PJT I sebanyak 3 (tujuh) orang.
- Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) sub klaster Pengelolaan Air (PJT I dan PJT II) pada tanggal 7 – 8 September 2023 dengan narasumber Asisten Deputi Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN, Direktur Utama PT SIER dan Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero). FGD selain diikuti oleh seluruh organ risiko di lingkungan PJT I juga diikuti oleh organ risiko dari PJT II.
- Mengikuti Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN bekerjasama dengan Pemeringkat Efek Infonesia (PEFINDO) pada tanggal 14 September 2023.
- Mengikuti *ESG for Boards – Governance of ESG* yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN bekerjasama dengan *International Finance Corporation* (IFC) pada tanggal 27 September 2023.
- Mengikuti GRC Integrated Information for Supervisionary Board pada tanggal 5 Oktober 2023 yang diselenggarakan oleh BUMN School of Excellence.
- Mengikuti Sosialisasi Penyusunan RKAP Berbasis Manajemen Risiko sesuai Draft APS 2024 pada tanggal 6, 9, dan 11 Oktober 2023.
- Mengikuti Sosialisasi Aspirasi Pemegang Saham untuk RKAP Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN pada tanggal 20 Oktober 2023.

- Mengikuti *Workshop* Pengisian *Template* RKAP 2024 Berbasis Manajemen Risiko pada tanggal 24 Oktober 2023 yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN.

b. Forum Discussion Group (FGD) Sub Klaster Pengelolaan Air oleh PT Danareksa (Persero)

- FGD Subklaster Pengelolaan Air Triwulan I 2023 pada tanggal 16 – 17 Maret 2023.
- FGD Subklaster Pengelolaan Air Triwulan II 2023 pada tanggal 7 – 8 September 2023

c. Sertifikasi

1) Mengikuti *sertifikasi Qualified Risk Management Officer (QRMO)* pada tanggal 4 – 6 April 2023 oleh lembaga PPM Manajemen yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

2) Sertifikasi Skema Analis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi (ANAMROT-BNSP) / Certified Risk Management Officer (CRMO-GIRMA) oleh BNSP dan LSPMR pada tanggal 14 – 19 Juni 2023.

3) Sertifikasi Qualified Chief Risk Officer (QCRO) yang diikuti oleh Manajer Utama Perencanaan, Manajemen Risiko dan Teknologi yang diselenggarakan oleh Center of Risk Management Sustainability (CRMS) Indonesia pada tanggal 14 – 16 Agustus 2023.

4) Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QGRP) yang diikuti oleh Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko, Ketua Komite Audit & GCG/Anggota Dewas, dan Ketua Komite Risiko/ Anggota Dewas yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan (PPA&K) bekerjasama dengan LSPMR pada tanggal 21 – 25 Agustus 2023

5) Mengikuti Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan (PPA&K) bekerjasama dengan LSPMR pada tanggal 4 – 7 September 2023.

6) Mengikuti Sertifikasi Qualified Risk Management Officer (QRMO) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan (PPA&K) bekerjasama dengan LSPMR pada tanggal 18 – 22 September 2023.

7) Sertifikasi *Certified Risk Governance Professional* (CRGP) yang diikuti oleh 2 (dua) orang Direksi PJT I dan 2 (dua) orang Direksi PT Jasa Tirta Energi. Sertifikasi diselenggarakan oleh Danareksa Learning Institut bekerjasama dengan LSPMR pada tanggal 18 – 20 Oktober 2023

3. Profil Risiko Utama Tahun 2023

Profil Risiko Utama Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Direksi (PERDIR) No. 0005/PRT/DRUT/VI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I. Terhadap top risk yang teridentifikasi, telah dilakukan Penanganan Risiko yang bertujuan untuk menurunkan Level Kemungkinan dan/atau level Dampak. Pemantauan atas penanganan risiko tersebut berjalan sepanjang tahun 2023 sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Summary Top Risk Utama Tahun 2023

No	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Penjelasan Dampak Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	Level Risiko Residual Current (30 Sept 2023)	Penjelasan Dampak Risiko Current Residual (30 Sept 2023)	Rencana Penanganan Risiko (akhir tahun)			
								Rencana Penanganan Risiko	PIC Penanganan Risiko	Penjelasan Dampak Risiko	Level Risiko Residual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ketidakoptimalan penanganan masalah hukum	- Administrasi kepemilikan asset belum teridentifikasi dengan baik	- Adanya tuntutan ganti rugi kepada perusahaan, kehilangan aset bangunan, dan tidak terbayarnya kredit macet nasabah TJSL senilai Rp 21,35 miliar	Very High (D5, K3)	- Melakukan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyelesaian permasalahan hukum	Very High (D5, K3)	- Adanya tuntutan ganti rugi kepada perusahaan, kehilangan aset bangunan, dan tidak terbayarnya kredit macet nasabah TJSL senilai Rp 21,35 miliar	- Mempersiapan data dan dokumen yang diperlukan dalam menghadapi kemungkinan adanya gugatan kembali dari pihak lawan	- Direksi - BOD-1 (Sekper dan BOD-1 terkait) - Divisi Hukum dan Divisi terkait	- Tidak ada pembayaran ganti rugi	Very Low (D1, K1)
		- Lokasi dan posisi asset baik berupa lahan dan bangunan masih belum teridentifikasi dengan baik	- Semakin tingginya biaya penanganan hukum		- Koordinasi dengan penegak hukum terkait		- Semakin tingginya biaya penanganan hukum	- Membangun komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, advokat dan pihak2 terkait (stakeholder dan instansi terkait)		- Tidak kehilangan aset	
		- Penyusunan dokumen perjanjian kerja dengan pihak eksternal kurang tepat/menimbulkan multi tafsir	- Menghambat operasional perusahaan		- Penunjukkan penyedia jasa hukum (advokat)		- Menghambat operasional perusahaan	- Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas unit dan karyawan penangan hukum			
		- Sosialisasi pengenaan BJPSDA belum maksimal	- Perusahaan salah dalam mengambil langkah/tindakan hukum		- Melakukan mediasi awal dengan para pihak (mediasi gagal)		- Perusahaan salah dalam mengambil langkah/tindakan hukum	- Melaksanakan sosialisasi hukum kepada karyawan PJT I dan/atau stakeholder terkait		- sisa kredit macet	
					- Staf hukum mengikuti ujian Profesi Advokat, Sertifikasi Kontrak Manajemen Spesialis dan Sertifikasi Auditor Hukum						

No	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Penjelasan Dampak Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	Level Risiko Residual Current (30 Sept 2023)	Penjelasan Dampak Risiko Current Residual (30 Sept 2023)	Rencana Penanganan Risiko (akhir tahun)			
								Rencana Penanganan Risiko	PIC Penanganan Risiko	Penjelasan Dampak Risiko	Level Risiko Residual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Perubahan kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak mendukung proses bisnis dan eksistensi Perum Jasa Tirta I (PJT I)	- Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan perusahaan (al penurunan besaran tarif BJPSDA perusahaan)	- sebesar Rp 5,69 miliar disetorkan kepada negara sebagai PNBP (asumsi 1% dari nilai pendapatan BJPSDA)	High (D5, K1)	- Terlibat aktif dalam penyusunan dan/atau review Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan proses bisnis perusahaan	Moderat (D3, K3)	- sebesar Rp 0,55 miliar disetorkan kepada negara sebagai PNBP(Asumsi PNBP sebesar 1% laba BJPSDA Rp 55,76 miliar (RKAP sd TW III 2023))	- Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan berperan aktif dalam pembahasan mengenai penyusunan dan/atau reviu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan konsep kebijakan pengelolaan SDA dan kebijakan yang mendukung bisnis perusahaan dan layanan publik	- Direksi - BOD-1 - Divisi Hukum	- PJT I dapat melaksanakan penugasan pemerintah di bidang pengelolaan SDA	Very Low (D1, K1)
		- Perubahan kebijakan pemerintah yang tidak sejalan (al Terbitnya PP PNBP. perubahan pedoman pengadaan barang dan jasa, perubahan pedoman kerjasama sesuai dengan Per-02/MBU/03/2023)	- Terbatasnya gerak dan kinerja PJT I dalam melaksanakan penugasan pemerintah di bidang pengelolaan SDA		- Rapat dengan Ditjen Bina OP terkait rencana perubahan formulasi tarif BJPSDA		- Terbatasnya gerak dan kinerja PJT I dalam melaksanakan penugasan pemerintah di bidang pengelolaan SDA	- Bersama dengan pemerintah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan terkait BJPSDA kepada pemangku kepentingan dan pelanggan		- Perubahan mekanisme/pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang PJT I sesuai peraturan perundangan yang berlaku	

No	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Penjelasan Dampak Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	Level Risiko Residual Current (30 Sept 2023)	Penjelasan Dampak Risiko Current Residual (30 Sept 2023)	Rencana Penanganan Risiko (akhir tahun)			
								Rencana Penanganan Risiko	PIC Penanganan Risiko	Penjelasan Dampak Risiko	Level Risiko Residual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Perbedaan kepentingan antar stakeholder	- Perubahan mekanisme/pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang PJT I (al mekanisme bisnis proses pendapatan perusahaan melalui BJPSDA. penggunaan lahan serah operasi pasca PP PNBP, perubahan pedoman PBJ dan Kerjasama) - Peran PJT I sebagai BUMN Pengelola SDA berkurang		- Koordinasi antara PJT I dengan PJT II (Perum Pengelola SDA) untuk membahas hal-hal yang diharapkan dalam rancangan Permen MIP BJPSDA		- Perubahan mekanisme/pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang PJT I (al mekanisme bisnis proses pendapatan perusahaan melalui BJPSDA. penggunaan lahan serah operasi pasca PP PNBP, perubahan pedoman PBJ dan Kerjasama) - Peran PJT I sebagai BUMN Pengelola SDA berkurang	- Melakukan penyesuaian/antisipasi kebijakan pemerintah di internal perusahaan (update data) - Menyusun Kajian Hukum terkait - Koordinasi Eksternal dan Penyiapan Internal terkait BJPSDA menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		- Peran PJT I sebagai BUMN Pengelola SDA semakin optimal	
3	Keterbatasan cashflow untuk menjalankan operasional Perusahaan karena tidak tercapainya target pendapatan Jasa Air	- Pemanfaat belum melaksanakan rekomendasi hasil reviu BPKP atas Pembayaran BJPSDA tahun 2016 – 2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku	- Likuiditas dan operasional Perusahaan terganggu dengan adanya potensi kehilangan penerimaan sebesar Rp114,56 miliar	High (D3, K4)	- Rapat Koordinasi dengan pihak-pihak terkait (PJT I+BPKP+Prime User) dan pembentukan Tim Pokja EPC	Very High	- potensi tidak terealisasi cashflow sebesar Rp170,25 miliar dari pendapatan prime user	- Penyelesaian pekerjaan PJPSDA disburstment tahun 2016 - 2020 yang sudah disepakati dan penerbitan BA progres PJPSDA untuk pekerjaan yang sudah diselesaikan serta intensifikasi koordinasi untuk kesepakatan PJPSDA tahun 2021 - 2022	- DOPS - DKPM - BOD-1 - Divisi Jasa Asa, DAK	- potensi tidak terealisasi cashflow sebesar Rp109,90 miliar dari pendapatan prime user	Very High (D4, K4)

No	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Penjelasan Dampak Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	Level Risiko Residual Current (30 Sept 2023)	Penjelasan Dampak Risiko Current Residual (30 Sept 2023)	Rencana Penanganan Risiko (akhir tahun)			
								Rencana Penanganan Risiko	PIC Penanganan Risiko	Penjelasan Dampak Risiko	Level Risiko Residual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Penyetoran pajak atas PPN Prime user yang tidak bersedia membayar pungutan PPN (piutang PPN BJPSDA PDAM)	- Ketersediaan pendanaan Perusahaan untuk Operasi dan Pemeliharaan (O&P), investasi dan pembelian alat menjadi terbatas.		- Penyampaian dokumen penagihan atas piutang PPN PJPSDA PDAM KS dan koordinasi dengan BPK untuk permintaan arahan dan Pusda Prov Jatim sebagai fasilitator antara PJT I dengan PDAM KS		- Likuiditas dan operasional Perusahaan terganggu.	- Melakukkan penagihan ulang atas piutang PPN PJPSDA PDAM KS		- Likuiditas dan operasional Perusahaan hanya sedikit terganggu.	
		- Parameter Ketercapaian Pekerjaan Disbursement terkait erat dengan Pihak Eksternal dan Unit Lain di Internal	- Piutang dan Pendapatan Yang Akan Diterima (PYAD) meningkat		- Melakukan penanganan produk tidak sesuai (PTSKP) dan keluhan pelanggan		- Ketersediaan pendanaan Perusahaan untuk Operasi dan Pemeliharaan (O&P), investasi dan pembelian alat menjadi terbatas.	- Intensifikasi koordinasi dengan pihak terkait ketercapaian pekerjaan disbursment		- Operasi dan Pemeliharaan (O&P), investasi dan pembelian alat tidak mengalami hambaratan berarti.	
		- Belum ditandatanganinya BA progress PJPSDA tahun 2023 oleh prime user	- Pembayaran kewajiban kepada penyedia barang dan/atau jasa tersendat.		- Penyampaian dokumen BA progres PJPSDA tahun 2023 kepada Prime User		- Piutang dan Pendapatan Yang Akan Diterima (PYAD) meningkat	- Penyampaian revisi BA progres PJPSDA untuk selanjutnya ditandatangani oleh Prime User sebagai dasar penerbitan dokumen penagihan BJPSDA tahun 2023		- Piutang dan Pendapatan Yang Akan Diterima (PYAD) tidak mengalami peningkatan.	

No	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Penjelasan Dampak Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	Level Risiko Residual Current (30 Sept 2023)	Penjelasan Dampak Risiko Current Residual (30 Sept 2023)	Rencana Penanganan Risiko (akhir tahun)			
								Rencana Penanganan Risiko	PIC Penanganan Risiko	Penjelasan Dampak Risiko	Level Risiko Residual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Terdapat Prime User yang tidak membayar dan atau menunda pembayaran BJPSDA sesuai dengan peraturan (regulasi). - Pemanfaatan Air Permukaan yang SIPSDA habis masa berlaku/ mati sehingga tidak dapat dilakukan penarikan BJPSDA			- Sosialisasi penerapan BJPSDA dan berkoordinasi dengan Stakeholder dan Pelanggan - Penerapan Perda terkait BJPSDA, apabila volume pengambilan 120% dari ijin		- Pembayaran kewajiban kepada penyedia barang dan/atau jasa tersendat.	- Memberikan pemahaman melalui sosialisasi terus menerus kepada pemanfaat bahwa pambayaran BJPSDA merupakan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, menjalin kerjasama dengan regulator dan penegak hukum untuk mendorong pemanfaat memenuhi kewajibannya membayar BJPSDA dan melakukan penagihan piutang secara lebih intensif - Menjalin kerjasama dengan regulator untuk melakukan sosialisasi terkait SIPSDA guna mendorong pemanfaat memenuhi kewajibannya melengkapi dokumen SIPSDA sebagai dasar penarikan BJPSDA		- Pembayaran kewajiban kepada penyedia barang dan/atau jasa tidak terhambat.	
4	Kegagalan pelaksanaan kegiatan investasi	- Pengumuman Tender / Seleksi melalui E-Proc Website tidak diketahui oleh Calon Penyedia	- Terdapat idle cash dengan tidak terserapni investasi senilai Rp326,53 miliar	High (D3, K4)	- Penyusunan dokumen investasi tepat waktu	Moderat (D3, K3)	- Investasi tidak terealisasi sebesar Rp 324,06 miliar atau 15,89% dari keseluruhan target investasi (tanpa penyertaan)	- Pelaksanaan pengadaan dengan metode Konsolidasi Paket Pengadaan Sejenis.	- Direksi - BOD-1 - Seluruh Divisi - Tim Investasi	- Investasi tidak terealisasi sebesar Rp 192,64 miliar dari keseluruhan target investasi (tanpa penyertaan)	Very High (D5, K3)

No	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Penjelasan Dampak Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	Level Risiko Residual Current (30 Sept 2023)	Penjelasan Dampak Risiko Current Residual (30 Sept 2023)	Rencana Penanganan Risiko (akhir tahun)			
								Rencana Penanganan Risiko	PIC Penanganan Risiko	Penjelasan Dampak Risiko	Level Risiko Residual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Paket Pekerjaan/Pengadaan bersifat tertentu/ spesifik dengan risiko tinggi bagi Calon Penyedia	- Realisasi investasi tidak memenuhi target yang ditetapkan.		- Bersinergi dengan pihak terkait dalam pengadaan investasi		- Terdapat idle cash	- Pengembangan aplikasi MONEV untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan tepat waktu sejak awal tahun berjalan pada tahap proses kegiatan investasi"		- Proses pengadaan tidak mengalami keterlambatan.	
		- Keterbatasan penyedia jasa yang memiliki kompetensi dan ruang lingkup usaha yang diminta dalam persyaratan pengadaan	- Investasi untuk pengembangan bisnis menjadi terlambat		- Melakukan pengadaan ulang, apabila tender/lelang gagal, dapat dilakukan penunjukan langsung		- Realisasi investasi tidak memenuhi target yang ditetapkan.	- FGD Penerapan Pedoman PBJ		- Realisasi investasi dapat memenuhi target yang ditetapkan.	
		- Gagal Lelang	Investasi yang berupa alat berat untuk pekerjaan O&P tahun mendatang belum dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi / efektifitas pengelolaan SDA		- Pengadaan dengan referensi harga E-Katalog LKPP		- Investasi untuk pengembangan bisnis menjadi terlambat	- Pengadaan jasa perencanaan investasi			
		- Penyelesaian pekerjaan dan/ atau penyediaan barang dan/ atau jasa terlambat.			- Proses penyusunan revisi Pedoman PBJ		- Investasi yang berupa alat berat untuk pekerjaan O&P tahun mendatang belum dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi / efektifitas pengelolaan SDA	- Perkuatan Pokja Pengadaan			

No	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Penjelasan Dampak Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	Level Risiko Residual Current (30 Sept 2023)	Penjelasan Dampak Risiko Current Residual (30 Sept 2023)	Rencana Penanganan Risiko (akhir tahun)			
								Rencana Penanganan Risiko	PIC Penanganan Risiko	Penjelasan Dampak Risiko	Level Risiko Residual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Harga HSP yang ditetapkan perusahaan terlalu rendah dari harga pasar karena keterbatasan jumlah referensi harga yang di dapat			- Pengumuman Tender / Seleksi tidak hanya melalui E-Proc Website PJT I saja, tetapi juga melalui E-Proc Website Lainnya dan/atau Media Lainnya (Media cetak, media elektronik dan media sosial) - Proses pembuatan aplikasi Monev Melakukan evaluasi kinerja penyedia secara berkala			-			
5	Kegagalan pencapaian profil sedimen sesuai kesepakatan dalam kontrak	- Program penanganan sedimentasi tidak terealisasi dengan baik	- potensi sanksi profil sedimen senilai Rp43,15 miliar	High (D4, K3)	- Melaksanakan kegiatan pengerukan sedimen pada bendungan Sengguruh (97% dari target RKAP 2023), bendungan Wlingi (78% dari target RKAP 2023)	Moderat (D3,K2)	sanksi profil sedimen senilai 1-91 miliar (Rp 991juta + Rp 923 juta (perhitungan sanksi sedimen berdasarkan kondisi sd September 2023)) -----> Rp 844 juta adalah nilai sanksi profil sedimen Semester 1	- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengerukan, baik bendungan/bendung untuk mencapai target profil sedimen sebagai dasar penentuan sanksi profil Semeseter II pada akhir Oktober 2023 antara PJT I dengan prime user	-DOPS -DKPM -BOD-1 (MUR I, MUPMRT, SEKPER, MUBS)	- sanksiprofil sedimen dapat dikendalian sampa dengan Rp1,60 miliar	Low (D2,K2)
		- Laju sedimentasi yang tinggi karena perubahan tata guna lahan dan kerusakan DAS	- Layanan air ke pemanfaat terganggu		- Melaksanakan kegiatan flushing/penggelontoran sedimen pada bendungan Sengguruh dan bendungan Wlingi		Tidak terjadi derating	- Pelaksanaan program konservasi (vegetasi dan teknis)		- Operasional PLTA tidak terlalu terganggu (penurunan produksi kecil)	

No	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Penjelasan Dampak Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	Level Risiko Residual Current (30 Sept 2023)	Penjelasan Dampak Risiko Current Residual (30 Sept 2023)	Rencana Penanganan Risiko (akhir tahun)			
								Rencana Penanganan Risiko	PIC Penanganan Risiko	Penjelasan Dampak Risiko	Level Risiko Residual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Kapasitas penanganan (volume hasil pengerukan) tidak sebanding dengan laju sedimentasi - Kondisi cuaca dan medan kerja memiliki kesulitan tinggi - Keterbatasan ketersediaan lahan untuk spoilbank	- Terjadi derating sehingga PLTA stop operasi menyebabkan Operasional PLTA tidak kontinyu (penurunan produksi) - Laju sedimen yang masuk waduk tidak terkendali - Kehilangan potensi pembangkitan PLTA akibat sedimentasi waduk - Fungsi pengendalian banjir berkurang.		- Melaksanakan pemantauan kapasitas tampungan waduk / pengukuran echosounding secara rutin - Melaksanakan kegiatan konservasi (penghijauan/bantuan bibit/pemeliharaan tanaman, Pembuatan Dam Penahan/Gully plug dan RAPES (Resapan Air Pengendali Erosi & Sedimen) dan sosialisasi kepada masyarakat) - Memastikan Pedoman/SOP terkait tetap update -		Pengendalian laju sedimen melalui pengerukan	- Melaksanakan Studi Penanganan Sedimentasi Waduk terkait pemantauan tampungan waduk - Melaksanakan hauling spoilbank - Pengerukan sabodam/ ChekDam yang sudah penuh		- Produksi dipengaruhi oleh kondisi hydrologi	
6	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan O&P	- Parameter Ketercapaian Pekerjaan Disbursement terkait erat dengan Pihak Eksternal dan Unit Lain di Internal	- Pendapatan Jasa Usaha Pengelolaan SDA dari Disbursement tidak tercapai sesuai target (Potensi penundaan pembayaran BJPSDA oleh Prime User senilai Rp 51,60 miliar)	High (D4, K3)	- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai proses perencanan, perizinan dll	High (D4, K2)	- Pendapatan Jasa Usaha Pengelolaan SDA dari Disbursement tidak tercapai sesuai target senilai Rp42,40(Potensi penundaan pembayaran BJPSDA oleh Prime User)	- Pengembangan aplikasi MONEV melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan tepat waktu sejak awal tahun berjalan pada tahap proses kegiatan investasi"	- Direksi - BOD-1 - Divisi Jasa Air, DPK, DPKU, DMRK	- Pelaksanaan Pekerjaan OP dan atau PJPSDA mendekati target yang ditentukan dengan potensi tidak terserap senilai Rp25,80 miliar	Vey Low (D1, K1)

No	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Penjelasan Dampak Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	Level Risiko Residual Current (30 Sept 2023)	Penjelasan Dampak Risiko Current Residual (30 Sept 2023)	Rencana Penanganan Risiko (akhir tahun)			
								Rencana Penanganan Risiko	PIC Penanganan Risiko	Penjelasan Dampak Risiko	Level Risiko Residual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Keterlambatan atau gagalnya proses pengadaan barang/jasa pekerjaan kontraktual	- Ketidakpuasan stakeholder		- Koordinasi internal dan eksternal dalam pemantauan dan upaya percepatan pelaksanaan OP		- Ketidakpuasan stakeholder	- Pembahasan Pedoman PBJ		- Pendapatan Jasa Usaha Pengelolaan SDA dari Disbursement mendekati target yang ditentukan	
		- Kurangnya sumber daya (peralatan dan SDM) sesuai kebutuhan operasional seperti fungsi pengawasan pekerjaan dan administrasi tidak berjalan optimal.	- Penurunan kuantitas air permukaan yang dapat disuplai ke Pemanfaat		- Proses penyusunan revisi Pedoman PBJ		- Penurunan kuantitas air permukaan yang dapat disuplai ke Pemanfaat	- Rapat monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sejak awal tahun		- Peningkatan kuantitas air permukaan yang dapat disuplai ke Pemanfaat	
		- Keterbatasan ketersediaan lahan dan terhambatnya proses perizinan terkait pelaksanaan pekerjaan O&P	- Kerusakan infrastruktur SDA berpotensi meningkat.		- Terdapat SOP/Prosedut terkait pelaksanaan pekerjaan OP		- Kerusakan infrastruktur SDA berpotensi meningkat.	- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh unit baik user, unit perencana mupun unit pengadaan		- Kerusakan infrastruktur SDA berpotensi menurun.	
		- Pelaksanaan pekerjaan (konstruksi/studi) Disbursement tidak tercapai sesuai target	- Kesulitan dalam penanganan bencana akibat daya rusak air meningkat		Proses pembuatan aplikasi monev		- Kesulitan dalam penanganan bencana akibat daya rusak air meningkat	- Proses pengesahan dokumen perencanaan secara digital (dochub google)		- Sebagian kecil kerusakan akibat daya rusak air tidak tertangani	
		- Kondisi cuaca dan medan kerja memiliki kesulitan tinggi	- Terkena deduksi dari pemanfaat SDA		Rapat monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sejak awal tahun		- Terkena deduksi dari pemanfaat SDA			- Kemungkinan pengenaan deduksi dari pemanfaat SDA menurun	

No	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Penjelasan Dampak Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	Level Risiko Residual Current (30 Sept 2023)	Penjelasan Dampak Risiko Current Residual (30 Sept 2023)	Rencana Penanganan Risiko (akhir tahun)			
								Rencana Penanganan Risiko	PIC Penanganan Risiko	Penjelasan Dampak Risiko	Level Risiko Residual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Tidak tercapainya pendapatan Non SDA karena kegagalan pengembangan bisnis eksisting dan bisnis baru	- Jumlah pesaing produk air mineral yang beraneka ragam	- Tidak tercapainya target EBITDA dengan potensi ketidaktercapaian pendapatan senilai Rp12,50 miliar	High (D3, K4)	- Meningkatkan dan menjaga mutu produk sesuai dengan standar SNI, BPPOM dan Sertifikat Halal serta melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 17025 : 2017	High (D3, K4)	Tidak tercapainya target EBITDA dengan potensi ketidaktercapaian pendapatan senilai Rp37,19 miliar	- Mengoptimalkan pelaksanaan program kerja kunjungan pelanggan	- Direksi - BOD-1 (MUBS)	- EBITDA tercapai meskipun ada potensi pendapatan yang tidak terealisasi senilai Rp 2,08 miliar	Very High (D4,K4)
		- Keterbatasan sarana prasarana serta jumlah personil dan kompetensi tenaga UB AMDK	- Pendapatan konsolidasian PJT I dan PT. JTE tidak tercapai sesuai RKAP		- Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah / swasta (penjualan produk ASA / Co Branding) dan penjaringan sistem keagenan - Pelaksanaan kunjungan pelangan			- Review dan evaluasi tarif analisa laboratorium Usulan penyertaan modal ke Induk		- Pendapatan terealisasi sesuai atau di atas target	
		- Pesaing telah menerapkan pola produksi dengan sistem dan alat produksi yang canggih	- Likuiditas dan operasional Perusahaan terganggu.		- Melakukan kerjasama penjualan air curah ke PDAM			- Menggunakan dana pinjaman dari pihak ketiga atau shareholder loan		- Likuiditas dan operasional usaha hanya sedikit terganggu	
		- Keterbatasan kapasitas, metode dan personil pemasaran	- Ketersediaan pendanaan Perusahaan untuk Operasi dan Pemeliharaan (O&P), investasi dan pembelian alat menjadi terbatas.		- Meningkatkan kegiatan pemasaran (sales calls, sales visit dan temu pelanggan) dan mengevaluasi metode pemasaran			- Pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai kebutuhan		- Kegiatan pengembangan dan pembelian atau investasi peralatan tidak mengalami hamabatan	

No	Peristiwa Risiko	Penyebab Risiko	Penjelasan Dampak Risiko Inherent	Level Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	Level Risiko Residual Current (30 Sept 2023)	Penjelasan Dampak Risiko Current Residual (30 Sept 2023)	Rencana Penanganan Risiko (akhir tahun)			
								Rencana Penanganan Risiko	PIC Penanganan Risiko	Penjelasan Dampak Risiko	Level Risiko Residual
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Area jaringan distribusi pelanggan SPAM terbatas pada area eksisting - Keterbatasan kompetensi dan jumlah tenaga personil dalam melaksanakan SMM ISO 17025 : 2017 - Penetapan tarif jasa analisa laboratorium pesaing lebih rendah terutama laboratorium pemerintahan - Kondisi dan usia fasilitas wisata dibandingkan dengan Sarana Prasarana kompetitor lebih modern & up to date - Kompetitor lain yang berpengalaman tertarik dalam pengembangan EBT	- Piutang dan Pendapatan Yang Akan Diterima (PYAD) meningkat - Pembayaran kewajiban kepada penyedia barang dan/atau jasa tersendat.		- Perbaikan /penambahan sarana prasarana penginapan dan wisata serta menjalankan operasional taman wisata dengan tetap mematuhi protokol kesehatan - Monitoring tindak lanjut keluhan pelanggan - Pemeliharaan rutin pada unit turbin dan peralatan pendukung PLTMH lainnya dan perbaikan jika ada kerusakan - Penyusunan dokumen penawaran lelang PLTS - Koordinasi dengan stakeholders terkait pengembangan PLTM			- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai proses perizinan kegiatan		- Piutang dan Pendapatan Yang Akan Diterima (PYAD) tidak mengalami peningkatan - Pembayaran kewajiban kepada penyedia barang dan/atau jasa tidak terhambat	

Risk Heat Map Profil Risiko Utama Tahun 2023

		Dampak				
		1 Sangat Rendah	2 Rendah	3 Menengah	4 Tinggi	5 Sangat Tinggi
Kemungkinan	5 Hampir Selalu Terjadi	Moderat	High	High	Very High	Very High
	4 Sering Terjadi	Low	Moderat	7 4 3 High 7	3 7 Very High 3	Very High
	3 Mungkin Terjadi	Low	Low	2 4 Moderat	6 5 High	4 1 Very High 1
	2 Jarang Terjadi	Very Low	5 Low	5 Moderat	6 High	High
	1 Hampir Tidak Pernah Terjadi	1 6 Very Low 2	Very Low	Low	Moderat	2 High

Keterangan:

- Risiko Inherent
- Risiko Residual Saat Ini
- Risiko Residual Target

Terhadap risiko-risiko signifikan yang teridentifikasi, telah dan sedang dilakukan penanganan risiko yang bertujuan untuk menurunkan level risiko dan penanganannya masih berjalan sampai dengan akhir tahun 2023.

Ikhtisar Perubahan Risiko Utama Tahun 2023

No	Kategori Risiko	Peristiwa Risiko	Level Risiko Inherent	Level Risiko Residual Q1	Level Risiko Residual Q2	Level Risiko Residual Q3	Level Risiko Residual Prognosa	Level Risiko Residual Target RKAP	Kuantifikasi Dampak Risiko Current Q1 (Rp Miliar)	Kuantifikasi Dampak Risiko Current Q2 (Rp Miliar)	Kuantifikasi Dampak Risiko Current Q3 (Rp Miliar)	Kuantifikasi Dampak Risiko Residual Prognosa (Rp Miliar)	Kuantifikasi Dampak Risiko Residual Target RKAP (Rp Miliar)
1	Hukum & Kepatuhan	Ketidakoptimalan penanganan masalah hukum	Very High (D5, K3)	Very High (D5, K3)	Very High (D5, K3)	Very High (D5, K3)	Very Low (D1, K1)	Very Low (D1, K1)	-	21,35	21,35	0,16	0,16
2	Strategis	Perubahan kebijakan pemerintah yang berpotensi tidak mendukung proses bisnis dan eksistensi Perum Jasa Tirta I (PJT I)	High (D5, K1)	High (D5, K1)	Moderat (D3, K3)	Moderat (D3, K3)	Very Low (D1, K1)	Low (D3, K1)	-	0,74	0,55	-	-
3	Keuangan	Keterbatasan cashflow untuk menjalankan operasional Perusahaan karena tidak tercapainya target pendapatan Jasa Air	High (D3, K4)	High (D3, K4)	High (D3, K4)	Very High (D4, K4)	Very High (D4, K4)	Low (D2, K3)	-	164,43	170,25	176,66	109,90
4	Strategis	Kegagalan pelaksanaan kegiatan investasi	High (D3, K4)	High (D3, K4)	Moderat (D3, K3)	Moderat (D3, K3)	Very High (D5, K3)	Low (D2, K2)	-	276,83	324,06	203,18	192,64
5	Operasional	Kegagalan pencapaian profil sedimen sesuai kesepakatan dalam kontrak	High (D4, K3)	High (D4, K3)	Moderat (D3,K2)	Moderat (D3,K2)	Low (D2,K2)	Low (D2,K2)	-	2,53	1,91	0,72	1,60
6	Operasional	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan O&P	High (D4, K3)	High (D4, K3)	High (D4, K3)	High (D4, K2)	Very Low (D1, K1)	Low (D2, K2)	-	64,51	42,40	9,85	25,80
7	Strategis	Tidak tercapainya pendapatan Non SDA karena kegagalan pengembangan bisnis eksisting dan bisnis baru	High (D3, K4)	High (D3, K4)	Moderat (D3,K3)	High (D3, K4)	Very High (D4, K4)	Low (D2,K3)	-	25,10	37,19	39,81	2,08

B. Kebijakan Umum Manajemen Risiko Tahun 2024

1. Pedoman Manajemen Risiko

Perum Jasa Tirta I (PJT I) telah menerapan manajemen risiko sejak tahun 2010 berdasarkan Keputusan Direksi PJT I Nomor KP. 052/KPTS/DU/2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Perum Jasa Tirta I. Direksi menetapan pedoman manajemen risiko sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi PJT I Nomor: 0005/PRT/DRUT/VI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan PJT I untuk menjadi acuan dalam penerapan manajemen risiko bagi seluruh unit kerja di lingkungan Perusahaan.

Sehubungan dengan terbitnya kebijakan Kementerian BUMN melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023, Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor: SK-6/DKU.MBU/10/2023, Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor: SK-7/DKU.MBU/10/2023, Perusahaan akan melakukan pembaharuan pada kebijakan manajemen risiko yang berlaku saat ini untuk menyesuaikan dengan dinamika proses bisnis perusahaan dan kebijakan Pemerintah. Sampai dengan saat penyusunan Buku RKAP 2024 ini disusun, revisi pedoman manajemen risiko PJT I masih dalam proses penyusunan untuk penerapan manajemen risiko tahun 2024. Komitmen penerapan manajemen risiko dituangkan dalam suatu Piagam Manajemen Risiko yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas dan Direktur Utama PJT I.

2. Kebijakan Taksonomi Risiko

Perusahaan menyusun taksonomi risiko dengan merujuk pada taksonomi yang telah diterbitkan oleh Kementerian BUMN. Penetapan kriteria risiko (Kemungkinan dan Dampak) dalam Penyusunan Risk Register Utama Tahun 2024 PJT I berdasarkan pada Pedoman Manajemen Risiko Nomor: 0005/PRT/DRUT/VI/2022 perihal Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan PJT I.

Kategori dan Sub Kategori Risiko adalah sebagai berikut:

Tema Risiko (T1)		Kategori Risiko (T2)		Peristiwa Risiko (T3)					
1	Tema Risiko Portofolio BUMN	1.1	Kategori Risiko Fiskal	1.1.1	Peristiwa Risiko terkait Dividen	1.1.2	Peristiwa Risiko terkait PMN	1.1.3	Peristiwa Risiko terkait Subsidi dan Kompensasi
		1.2	Kategori Risiko Kebijakan	1.2.4	Peristiwa Risiko terkait Kebijakan SDM	1.2.5	Peristiwa Risiko terkait Kebijakan Sektoral		
		1.3	Kategori Risiko Komposisi	1.3.6	Peristiwa Risiko terkait Konsentrasi Portofolio				
2	Tema Risiko Struktur Korporasi dan Organisasi	2.4	Kategori Risiko Struktur	2.4.7	Peristiwa Risiko terkait Struktur Korporasi				
		2.5	Kategori Risiko Restrukturisasi dan Reorganisasi	2.5.8	Peristiwa Risiko terkait Penggabungan, Pengambilalihan, Pelaburan, Pemisahan, Pembubaran, Likuidasi, Kemitraan dan Restrukturisasi				

Tema Risiko (T1)		Kategori Risiko (T2)		Peristiwa Risiko (T3)					
3	Tema Risiko Bisnis Perusahaan	3.6	Kategori Risiko Industri Umum	3.6.9	Peristiwa Risiko terkait Formulasi Strategis	3.6.10	Peristiwa Risiko terkait Pasar dan Makroekonomi	3.6.11	Peristiwa Risiko terkait Keuangan
				3.6.12	Peristiwa Risiko terkait Hukum, Reputasi & Kepatuhan	3.6.13	Peristiwa Risiko terkait Proyek	3.6.14	Peristiwa Risiko terkait Teknologi Informasi & Kemanan Siber
				3.6.15	Peristiwa Risiko terkait Sosial & Lingkungan	3.6.16	Peristiwa Risiko terkait Operasional		

3. Kebijakan Selera Risiko dan Toleransi Risiko

Kebijakan terkait selera risiko dan toleransi risiko Perusahaan saat ini mengacu pada kebijakan Risk Appetite Kementerian BUMN sebagaimana tertuang dalam surat Menteri BUMN nomor: S-491/MBU/09/2023 perihal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024. Perusahaan menetapkan pernyataan selera risiko (Risk Appetite Statement) dan pernyataan toleransi risiko (Risk Tolerance) sebagai berikut:

Sikap Terhadap Risiko*)	Pernyataan Selera Risiko (Risk Appetite Statement) Perum Jasa Tirta I
Tidak Toleran	1. Perusahaan tidak memberikan ruang dalam melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh insan perusahaan, termasuk perusakan terhadap lingkungan dan Perusahaan berupaya meminimalkan disrupsi dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kinerja Perusahaan serta kelalaian terhadap keamanan siber, kehandalan infrastruktur IT, kesiapan teknologi *cyber* yang harus dijalankan Perusahaan dan perlindungan data pribadi. 2. Perusahaan menjalankan bisnis dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terintegrasi, melengkapi dan menjalankan organ pengelola risiko secara aktif dan *prudent* serta menjunjung tinggi *core value* AKHLAK. 3. Perusahaan berkomitmen memenuhi target pembayaran dividen BUMN kepada negara sesuai dengan target yang ditetapkan dalam UU APBN.
Konservatif	1. Perusahaan mengerjakan penugasan pemerintah dalam bentuk proyek strategis nasional atau untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (ditetapkan dalam PP Pendirian Perusahaan). 2. Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan. 3. Perusahaan berfokus menjalankan kegiatan bisnis utamanya secara tepat waktu, tepat sasaran dan menjalankan dengan itikad baik.
Moderat	Perusahaan melakukan optimalisasi pengelolaan volatilitas pasar dan makroekonomi dengan menerima konsekuensi beban secara terukur.
Strategis	1. Perusahaan secara aktif dan dengan mempertimbangkan kalkulasi risiko yang matang untuk menciptakan nilai melalui inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio, dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek *environmental*, *social* dan *governance* (ESG) dengan

	menerima konsekuensi peningkatan penambahan biaya modal (CAPEX) dengan risiko yang wajar dan terukur serta sepadan dengan kemalian investasi. 2. Perusahaan mengoptimalkan sumber daya *idle* atau yang belum memenuhi kapasitas usaha melalui berbagai upaya organik dan anorganik dengan menerima risiko bisnis yang wajar dan terukur.

RAS yang telah mendapat pengesahan Direksi dan Dewan pengawas disampaikan sebagai bagian dalam buku RKAP 2024.

4. Kebijakan Kriteria Kemungkinan Risiko dan Dampak Risiko

Kebijakan yang saat ini mengatur kriteria Kemungkinan Risiko dan Dampak Risiko adalah mengacu pada Peraturan Direksi PJT I Nomor: 0005/PRT/DRUT/VI/2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan PJT I. Namun demikian, unutk penerapan manajemen risiko di tahun 2024, Kemungkinan Risiko dan Dampak Risiko akan mengacu pada revisi Pedoman Manajemen Risiko sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 dan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor: SK-6/DKU.MBU/10/2023.

Pada tabel di bawah ini ditunjukkan kriteria Kemungkinan Risiko dan Dampak Risiko yang digunakan dalan Analisa Risiko di tahun 2024.

Kriteria Kemungkinan yang digunakan untuk Analisis Risiko tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Parameter	Skala				
	1 Sangat Jarang Terjadi	2 Jarang Terjadi	3 Bisa Terjadi	4 Sangat Mungkin Terjadi	5 Hampir Pasti Terjadi
Kemungkinan terjadi	Risiko mungkin terjadi sangat jarang, paling banyak satu kali dalam setahun	Risiko mungkin terjadi hanya sekali dalam 6 bulan	Risiko pernah terjadi namun tidak sering, sekali dalam 4 bulan	Risiko pernah terjadi sekali dalam 2 bulan	Risiko pernah terjadi sekali dalam 1 bulan
Frekuensi kejadian	< 1 permil dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Dari 1 permil s/d 1% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Diatas 1% s/d 5% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Diatas 5 s/d 10% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	> 10% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi
Persentase	Probabilitas kejadian Risiko di bawah 20%	Probabilitas kejadian Risiko dari 20% sampai dengan 40%	Probabilitas kejadian Risiko antara 40% sampai dengan 60%	Probabilitas kejadian Risiko antara 60% sampai dengan 80%	Probabilitas kejadian Risiko antara 80% sampai dengan 100%

Kriteria Dampak Risiko yang digunakan untuk Analisis Risiko tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Dampak Kuantitatif

Skala	Kriteria Dampak	*Range* Dampak Finansial	Deskripsi Dampak
1	Sangat Rendah	X ≤ 20% dari Batasan Risiko	Dampak sangat rendah yang dapat mengakibatkan kerusakan/ kerugian/ penurunan kurang dari 20% dari nilai Batasan Risiko
2	Rendah	20% < X ≤ 40 dari Batasan Risiko	Dampak rendah yang dapat mengakibatkan kerusakan/kerugian/penurunan 20%-40% dari nilai Batasan Risiko
3	Moderat	40% < X ≤ 60 dari Batasan Risiko	Dampak kritis yang dapat mengakibatkan kerusakan/kerugian/penurunan 40%-60% dari nilai Batasan Risiko
4	Tinggi	60% < X ≤ 80 dari Batasan Risiko	Dampak disruptif yang dapat mengakibatkan kerusakan/ kerugian/ penurunan 60%-80% dari nilai Batasan Risiko
5	Sangat Tinggi	X > 80 dari Batasan Risiko	Dampak katastrofe yang dapat mengakibatkan kerusakan/ kerugian/ penurunan > 80% dari nilai Batasan Risiko

Keterangan:

Nilai Batasan Risiko merupakan nilai Risk Limit di level enterprise sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Strategi Risiko BUMN.

b. Kriteria Dampak Kualitatif

Risiko Kualitatif	Skala				
	1 Sangat Rendah	2 Rendah	3 Moderat	4 Tinggi	5 Sangat Tinggi
Risiko Strategis					
Dampak keterlambatan pencapaian program strategis	Minimal 1 parameter target strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda kurang dari 1 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda antara 2 - 3 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda antara 3 - 6 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda antara 6 - 9 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis yang harus selesai pada tahun ini tertunda lebih dari 9 bulan
Risiko Hukum					
Pelanggaran hukum	Tidak ada somasi/ tuntutan hukum	Perusahaan mendapat somasi.	Perusahaan mendapat tuntutan hukum.	Perusahaan diputuskan kalah di pengadilan tingkat pertama.	Perusahaan diputuskan kalah di pengadilan tingkat selanjutnya.
Risiko Kepatuhan					
Pelanggaran ketentuan kepatuhan	Teguran informal / verbal.	Diminta bertemu dengan pihak Regulator (misalkan OJK, Bank Indonesia, IDX, Kementerian terkait, Dirjen Pajak, dan lain-lain)	Peringatan tertulis / formal, terkena denda.	Regulator memberlaku-kan pembatasan dan / atau pembekuan terhadap aktivitas operasional / produk / jasa tertentu.	Regulator memberlaku-kan sanksi signifikan (misalkan *delisting* saham, tidak diperkenan-kan mengikuti kliring, menarik produk yang beredar, dan lain-lain)

Risiko Kualitatif	Skala				
	1 Sangat Rendah	2 Rendah	3 Moderat	4 Tinggi	5 Sangat Tinggi
Risiko Reputasi					
Keluhan pelanggan / nasabah / pembeli / *supplier*	Keluhan yang terisolasi dan dapat ditangani dalam 1 hari kerja	Keluhan yang terisolasi dan dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja	Keluhan yang menyebar ke skala sektoral dan / atau diajukan secara kolektif yang dapat diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja dan masih berada dalam kewenangan Pimpinan Cabang / Wilayah	Keluhan yang menyebar ke skala nasional dan / atau diajukan secara kolektif yang dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat	Keluhan yang menyebar ke skala nasional / internasional dan / atau diajukan secara kolektif yang diselesaikan melebihi 10 hari kerja dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat
Pemberitaan negatif di media	Publikasi negatif yg terisolasi di wilayah sektoral melalui media konvensional (misalkan Radio lokal, TV lokal, Surat Kabar daerah)	Publikasi negatif yang lintas sektoral / wilayah / provinsi namun masih tersebar media konvensional.	Publikasi negatif skala nasional yang tersebar di media konvensional	Publikasi negatif mencapai skala nasional yang tersebar di sosial media dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat	Publikasi negatif mencapai skala internasional yang tersebar di sosial media dan / atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat
Kehilangan daya saing	Penurunan pangsa pasar sampai dengan 5%	Penurunan pangsa pasar antara 5% sampai dengan 10%	Penurunan pangsa pasar antara 10% sampai dengan 15%	Penurunan pangsa pasar antara 15% sampai dengan 20%	Penurunan pangsa pasar lebih dari 20%
Risiko Sumber Daya Manusia					
Keluhan karyawan	Terdapat keluhan karyawan yang disalurkan sampai tingkat SP Unit namun dapat diisolir dan diselesaikan oleh Pemimpin Unit	Terdapat keluhan karyawan yang perlu diselesaikan oleh Penyelia Pemimpin Unit	Terdapat keluhan yang disalurkan mencapai tingkat sektoral / wilayah / provinsi.	Unjuk rasa karyawan yang mengganggu aktivitas perusahaan dan / atau disertai terjadinya cedera serius / cacat permanen	Demonstrasi terkoordinasi, terjadinya kematian karyawan saat kerja
Turn over karyawan bertalenta *(regretted turnover)*	*Turn over* pegawai bertalenta kurang dari 1% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta dari 1% sampai dengan 5% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta antara 5% sampai dengan 10% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta antara 10% sampai dengan 15% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta >15% setahun
Risiko Sistem Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Siber					
Gangguan aplikasi infrastruktur pendukung	Aplikasi & Infrastruktur pendukung yang kurang penting tidak berfungsi selama 1 hari	Aplikasi dan Infrastruktur pendukung yang kurang penting tidak berfungsi selama lebih dari 1 hari s/d 3 hari	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama < 1 jam (misalkan Listrik, air, jaringan komunikasi & *online system*)	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama 2 s/d 6 jam (misalkan Listrik, air, jaringan komunikasi & *online system*)	Infrastruktur vital yang penting tidak berfungsi selama lebih dari 6 jam (misalkan Listrik, air, jaringan komunikasi & *online system*)

Risiko Kualitatif	Skala				
	1 Sangat Rendah	2 Rendah	3 Moderat	4 Tinggi	5 Sangat Tinggi
Serangan siber	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu di bawah 50 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu 50-99 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu 100-199 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu 200-500 kali	Jumlah rata-rata serangan siber per minggu lebih dari 500 kali
Penurunan hasil penilaian *platform security*	X > 90%	90% ≥ X > 80%	80 % ≥ X > 70%	70% ≥ X > 60%	X ≤ 60%
Risiko Operasional					
Pelampauan pemenuhan SLA (*Service Level Agreement*)	< 1% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksedia-an layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	Dari 1% s/d 2,5% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksedia-an layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	Antara 2,5% s/d 10% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksedia-an layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	Antara 10% s/d 20% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksedia-an layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)	>20% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksedia-an layanan produk atau tambahan biaya / ongkos)
Risiko *Health, Safety, Security and Environmental* (HSSE) dan Sosial					
Fatality	Kasus Pertolongan Pertama	Kasus Perawatan Medis	Cacat tidak tetap / Ketidakhadir-an kerja yang terbatas	Kasus kematian tunggal / Cacat tetap / Ketidakhadir-an kerja yang lama	Kasus kematian jamak
	Tidak berpengaruh pada Kinerja Kerja	Efek kesehatan minor dan reversibel (tanpa rawat inap)	Efek ireversibel tanpa kehilangan nyawa tetapi dengan cacat serius dan rawat inap berkepanjangan	Efek ireversibel yang menyebabkan kematian	Wabah ke lingkungan Potensi menyebabkan banyak kematian misalnya bahan kimia beracun berbahaya
Kerusakan Lingkungan	Kerusakan terbatas pada area minimal dengan signifikansi rendah	Efek minor pada lingkungan biologis atau fisik	Efek jangka pendek (1-2 tahun) tetapi tidak mempenga-ruhi fungsi ekosistem	Efek lingkungan jangka menengah (3-5 tahun) yang serius	Sangat serius Kerusakan lingkungan jangka panjang (>5 tahun) dari fungsi ekosistem
Penurunan ESG rating Sustainalytic	X > 90% atau memperleh rating "0-10 (*negligible*)"	90% ≥ X > 80% atau memperleh rating "10-20 (*low*)"	80 % ≥ X > 70% atau memperleh rating "20-30 (*medium*)"	70% ≥ X > 60% atau memperleh rating "30-40 (*high*)"	X ≤ 60% atau memperleh rating "40+ (*severe*)"

C. Evaluasi Risiko dan Perbaikan Berkelanjutan

1. Penilaian/ Assessment Risk Maturity Index (RMI) Tahun 2024

Pengukuran RMI dilakukan dengan maksud untuk menilai efektivitas implementasi Manajemen Risiko di perusahaan berdasarkan sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki dalam pencapaian strategi dan sasaran perusahaan. Adapaun tujuan dari pengukuran RMI adalah untuk:

a. Memastikan progress pengelolaan Manajemen Risiko telah berjalan secara efektif dan efisien

b. Mendeteksi perubahan internal dan eksternal guna merevisi dan mereviu penanganan risiko dan priorotasnya

c. Mendeteksi risiko baru

d. Menganalisa perubahan atau deviasi yang terjadi

e. Mendapatkan rekomendasi utnuk perbaikan proses manajemen risiko

Pada tahun 2024 akan dilaksanakan penilaian indeks kematangan risiko (*risk maturity index*/RMI) atas tahun buku 2023 setelah angka audited tahun 2023 diterbitkan oleh KAP. Hasil penilaian RMI disampaikan kepada Kementerian BUMN paling lambat pada triwulan III tahun 2024 dan pelaksanaan rekomendasi hasil penilaian RMI tahun 2024 tersebut dijadikan sebagai bagian dari *roadmap* perbaikan penerapan manajemen risiko yang dijalankan pada RKAP tahun berikutnya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian RMI, perusahaan akan terus meningkatkan efektivitas proses pengelolaan manajemen risiko dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan perusahaan secara aktif pada semua tingkatan perusahaan.

2. Penyesuaian Roadmap Manajemen Risiko Tahun 2024 – 2027

PJT I akan menyusun roadmap perbaikan manajemen risiko berkelanjutan atas pelaksanaan manajemen risiko tahun 2024 s.d 2027 berdasarkan gap analysis hasil penilaian RMI. Roadmap tersebut merupakan peta atau panduan dari program kerja yang akan dilakukan dan memiliki peran penting bagi keberhasilan implementasi manajemen risiko di perusahaan.

D. Rencana Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM)

Implementasi *Enterprise Risk Management* (ERM) pada tahun 2024 akan dilaksanakan melalui reviu terhadap Pedoman Manajemen Risiko menyesuaikan dengan kondisi perusahaan terkini dan mempertimbangkan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelolda Dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Selain itu akan dilakukan penetapan *risk appetite* dan *Key Risk Indicator* (KRI) serta pelaporan profil risiko dan progres penanganan risiko setiap triwulan.

Program implementasi ERM tertuang dalam *Roadmap* Pengembangan Manajemen Risiko PJT sebagaimana Keputusan Direksi Nomor: 0031/KPTS/DRUT/XII/2021 tentang Peta Jalan Pengembangan Manajemen Risiko Perum Jasa Tirta I Tahun 2021 - 2024.

ERM yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk penguatan implementasi manajemen risiko di lingkungan perusahaan adalah sebagaimana berikut:

No	Uraian	Tindak Lanjut	Keterangan
1	Penguatan Fungsi dan Implementasi Manajemen Risiko di Seluruh Tingkatan Korporat	- Pemenuhan Aspirasi Pemegang Saham terkait MR	Tindak lanjut APS 2024 PER-2/MBU/03/2023
		Implementasi Manajemen Risiko - Laporan MR, Tatakelola Terintegrasi dan Audit Intern - Pendampingan dan *feedback* atas monitoring risiko, baik risiko utama maupun risiko unit	ERM Existing dan tindal lanjut PER-2/MBU/03/2023
		Pengembangan kabapilitas - Pemenuhan Kualifikasi Pelatihan dan Kualifikasi Sertifikasi Organ Pengelola Risiko	ERM Existing dan tindal lanjut PER-2/MBU/03/2023
		Program Budaya Risiko - Benchmark implementasi manajemen risiko - Laporan pelaksanaan program budaya risiko	ERM Existing dan tindal lanjut PER-2/MBU/03/2023
		Pengendalian Internal - Pelaksanaan Internal Control Testing - Pelaksanaan Stress Testing	Tindak lanjut APS 2024
2	Reviu Kebijakan Manajemen Risiko	Klasifikasi Risiko Anak Perusahaan - Penetapan Klasifikasi Risiko Anak Perusahaan - Penetapan organ pengelola risiko pada anak perusahaan	Tindak lanjut PER-2/MBU/03/2023
		Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko - Pernyataan Risk Appetite dan Risk Tolerance - Pedoman manajemen risiko dan sistem pengendalian internal - Piagam Direksi - Piagam Manajemen Risiko	Pedoman/SOP Existing dan tindak lanjut PER-2/MBU/03/2023 dan APS 2024

No	Uraian	Tindak Lanjut	Keterangan
		- Prosedur Manajemen Risiko	
3	Penilaian RMI Tahun 2024	- Laporan Penilaian RMI - Rekomendasi Perbaikan MR - Reviu Roadmap Implementasi MR	Pedoman/SOP Existing dan tindak lanjut PER-2/MBU/03/2023 dan APS 2024

E. Risk Register Utama PJT I Tahun 2024

PJT I dalam menetapkan profil Risiko Utama tahun 2024 yang tertuang pada Risk Register dilakukan secara terstruktur berdasarkan tahapan/proses kegiatan pada Pedoman Manajemen Risiko yang berlaku. Pedoman manajemen risiko telah mengatur proses evaluasi risiko yang menghasilkan opsi rencana perlakuan yaitu strategi untuk mengurangi, menghindari, mentransfer, atau menerima risiko dan telah mempertimbangkan kemungkinan dan dampak dari *secondary risks* yang muncul akibat pemilihan penanganan risiko. Manajemen PJT I telah menetapkan antisipasi terhadap perubahan internal dan eksternal Perusahaan yang berpengaruh pada pencapaian sasaran Perusahaan. Proses pengelolaan risiko PJT I telah selaras dengan tujuan Perusahaan, dan telah mendukung ketahanan dan pertumbuhan Perusahaan, melindungi *value* Perusahaan serta menciptakan nilai tambah. Identifikasi terhadap risiko signifikan serta rencana penanganannya akan dimonitor dan menjadi bagian penting dalam penerapan Manajemen Risiko di perusahaan yang disampaikan melalu Laporan Manajemen Perusahaan (Bulanan, Triwulan dan Tahunan).

Beberapa faktor atau kondisi lingkungan yang menjadi pertimbangan dalam melakukan identifikasi risiko untuk tahun 2024 diantaranya meliputi:

No.	Faktor Eksternal	Faktor Internal
1.	Kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam	Permasalahan dan optimalisasi perusahaan
2.	Kesepakatan dengan pemanfaat	Perkembangan bisnis anak perusahaan
3.	Permasalahan sosial masyarakat	Digitalisasi dan implementasi sistem
4.	Peningkatan inflasi, suku bunga dan perkiraan resesi	
5.	Kenaikan harga	
6.	Tahun politik (Pemilu 2024)	
7.	Penerapan ESG (Environment, Social & Governance)	

RISK APPETITE STATEMENT
PERUM JASA TIRTA I

2024

Jl. Surabaya No. 2A Malang, 65115 PO. BOX 39
Telp. 0341-551971, Faks. 0341-551976
mlg@jasatirta1.go.id

RISK APPETITE STATEMENT
TAHUN 2024
PERUM JASA TIRTA I

I. TUJUAN

1. Untuk menjamin ketercapaian target dalam RKAP tahun 2024.
2. Untuk menyelaraskan *Risk Appetite Statement* (**RAS**) Perum Jasa Tirta I dengan RAS Kementerian BUMN.

II. LATAR BELAKANG

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
2. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023, Nomor: SK-6/DKU.MBU/10/2023, Nomor: SK-7/DKU.MBU/10/2023 dan Nomor: SK-8/DKU.MBU/12/2023.
3. Surat Menteri BUMN Nomor S-491/MBU/09/2023 perihal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024.
4. Surat Direksi Perum Jasa Tirta I Nomor: 0219/UM/DRUT/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Penyampaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan Umum Jasa Tirta I Tahun 2023 – 2027.

III. RISK APPETITE STATEMENT PERUM JASA TIRTA I

Risk Appetite Statement PJT I Tahun 2024 ditetapkan pada Tabel di bawah ini:

No.	Kategori Risiko	*Risk Appetite Statement* (RAS)	Sikap Terhadap Risiko
1.	Strategis	1. Perusahaan berfokus menjalankan kegiatan bisnis utama eksisting secara tepat waktu, tepat sasaran dan menjalankan dengan itikad baik untuk menjaga ketercapaian RKAP 100%.	Konservatif
		2. Untuk meningkatkan pendapatan, Perusahaan melaksanakan kegiatan pengelolaan SDA pada PLTA Aset Non PUPR	Strategis
		3. Perusahaan secara aktif dan dengan mempertimbangkan kalkulasi risiko yang matang untuk menciptakan nilai melalui inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimalisasi penataan	Strategis

No.	Kategori Risiko	*Risk Appetite Statement* (RAS)	Sikap Terhadap Risiko
		portofolio, dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek *environmental*, *social* dan *governance* (ESG) dengan menerima konsekuensi peningkatan penambahan biaya modal (CAPEX) dengan risiko yang wajar dan terukur serta sepadan dengan pengembalian investasi. untuk menjaga penyerapan investasi minimal 50% dari target investasi, sebagaimana tertuang dalam KPI RKAP 2024, melalui pengembangan SPAM, EBT, dan Wood Pellet.	
		4. Perusahaan mengoptimalkan sumber daya *idle* atau yang belum memenuhi kapasitas usaha melalui berbagai upaya organik dan anorganik dengan menerima risiko bisnis yang wajar dan terukur.	Strategis
		5. Perusahaan/Anak Perusahaan melakukan pengambilan keputusan strategis yang diperlukan untuk mencapai manfaat jangka panjang, termasuk untuk mengantisipasi setiap perubahan dalam kegiatan usaha, meskipun terdapat potensi risiko moderat terhadap kinerja jangka pendek (1 tahun) yang dapat dikelola secara penuh	Strategis
2.	Keuangan	1. Perusahaan meningkatkan perolehan pembayaran dari pelanggan dengan mengintensifkan penagihan piutang agar piutang usaha BJPSDA tertagihkan secara optimal dan diarahkan untuk mempertahankan posisi likuiditas;	Konservatif
		2. Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan serta menjaga agar total biaya operasional tidak melebihi dari anggaran, apabila melebihi anggaran RKAP 2024 dapat diterima sepanjang proporsi kenaikan biaya operasional tidak lebih tinggi dari proporsi kenaikan pendapatan yang diterima, dengan tetap memperhatikan pencapaian laba.	Strategis
3.	Operasional	1. Untuk mempertahankan nilai kontribusi kepada negara dengan mengerjakan penugasan pemerintah atau untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum sebagaimana ditetapkan dalam PP/46/2010, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah kerja serta menyelenggarakan kemanfaatan umum atas Sumber Daya Air	Konservatif

No.	Kategori Risiko	*Risk Appetite Statement* (RAS)	Sikap Terhadap Risiko
		yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum, maka Perusahaan menjaga kinerja operasional dengan penyerapan biaya OP Prasarana SDA sebesar minimal 90% dari target.	
		2. Tidak ada perusakan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan dan berupaya meminimalkan disrupsi dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kinerja. Guna mendukung tercapainya tujuan dalam menjaga Daerah Aliran Sungai, Perusahaan mengutamakan kegiatan konservasi di seluruh wilayah kerja Perusahaan sebesar minimal 90% dari target RKAP 2024.	Tidak Toleran
		3. Tidak terjadi kecelakaan kerja (*zero accident*) di lingkungan Perusahaan;	Tidak Toleran
4.	Hukum & Kepatuhan	1. Tidak ada tuntutan / pelanggaran Peraturan / perundang-undangan dan peraturan internal oleh Perusahaan maupun insan Perusahaan. Perusahaan mengutamakan kepatuhan (*full compliance*) terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;	Tidak Toleran
		2. Tidak ada gugatan hukum kepada Perusahaan yang dapat mengganggu reputasi dan kinerja Perusahaan. Perusahaan berusaha memenuhi semua kewajiban dan menghindari tuntutan hukum dari pihak lain.	Tidak Toleran
		3. Perusahaan menempatkan prioritas utama terhadap penerapan tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terintregasi, melengkapi dan menjalankan organ pengelola risiko secara aktif dan *prudent* serta menjunjung tinggi *core value* AKHLAK.	Tidak Toleran
		4. Perusahaan mentaati penerapan PP/21/2023 sebagai Mitra Instansi Pengelola	Tidak Toleran
5.	Reputasi Keberlanjutan	Tidak ada ancaman reputasi yang dapat mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan kegiatan bisnis Perusahaan	Tidak Toleran
6.	Teknologi Informasi	Perusahaan menempatkan prioritas utama atas keamanan informasi, kehandalan infrastruktur IT, dan kesiapan teknologi *cyber* yang harus	Tidak Toleran

No.	Kategori Risiko	*Risk Appetite Statement* (RAS)	Sikap Terhadap Risiko
		dijalankan oleh Perusahaan dengan gangguan pada sistem IT secara umum maksimal 1X24 jam dan harus diselesaikan	
7.	Organisasi & SDM	1. Kekosongan jabatan dapat ditoleransi sampai dengan maksimal 10% dalam satu waktu	Strategis
		2. Perusahaan mengurangi kesenjangan dalam pemenuhan talenta	Strategis
8	Makro Geopolitik Pasar	Ketidakpastian kondisi perekonomian, politik dan pasar dapat diterima dengan tetap berusaha menekan dampaknya hingga ke tingkat rendah	Tidak Toleran

Demikian *Risk Appetite Statement* ini dibuat oleh para pihak dengan penuh kesadaran dan itikad baik untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Malang, Januari 2024

DEWAN PENGAWAS,

1. Suprianto
Ketua Dewan Pengawas

2. Anita Ariyani
Anggota Dewan Pengawas

3. Mohammad Mahfud Faozi
Anggota Dewan Pengawas

DIREKSI,

1. Fahmi Hidayat
Direktur Utama

2. Milfan Rantawi
Direktur Operasional

3. Mukhamad Taufiq
Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya & Manajemen Risiko

SUMMARY RISIKO UTAMA TAHUN 2024
PERUM JASA TIRTA I

No.	Inheren		Penjelasan		Rencana Perlakuan Risiko		Residual	
	Dmp	Prob					Dmp	Prob
1	4	4	Peristiwa Risiko	Kegagalan perolehan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	Rencana Perlakuan Risiko	1. Melakukan koordinasi dan pembahasan perjanjian JPSDA antara PJT I dan PLN IP serta berkoorinasi dengan Regulator (KPUPR, KBUMN, dan/atau lainnya) 2. Koordinasi lebih intensif dengan prime user untuk terwujudnya kesepakatan PJPSDA lebih cepat atau pada akhir periode tahun anggaran sebelumnya	3	3
			Penyebab	Tidak tercapai kesepakatan dengan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	KRI	Kesepakatan perjanjian PJPSDA % Pekerjaan Manafaat Langsung (PML) terhadap BJPSDA		
			Dampak (Rp Miliar)	5,289	Formula	Waktu penandatanganan kesepakatan perjanjian PJPSDA dilakukan pada Januari 2024 % Pekerjaan Manafaat Langsung (PML) < 85% BJPSDA		
			Perhitungan Dampak	Berdasarkan perkembangan koordinasi antara para pihak, terdapat potensi penurunan pendapatan yang berpengaruh pada perolehan laba sebesar Rp5,29 miliar (50%) dari target awal Rp10.73 miliar.				
			Limit	Penurunan pendapatan PLTA Non PUPR sebesar Rp1,94 miliar				
2	5	5	Peristiwa Risiko	Kegagalan penyelesaian pekerjaan PJPSDA PT Inalum	Rencana Perlakuan Risiko	1. Melaksanakan kegiatan melalui Project Management Consulting (PMC) mulai dari pekerjaan desain, pendapingan proses tender dan pengawasan pekerjaan	2	4
			Penyebab	Jumlah paket pekerjaan yang bertambah		2. Percepatan proses tender PMC		
			Dampak (Rp Miliar)	15,60	KRI	Proses pengadaan		
			Perhitungan Dampak	Berdasarkan perkembangan koordinasi antara para pihak, terdapat potensi penurunan pendapatan yang berpengaruh pada perolehan laba sebesar Rp15,60 miliar (44%) dari target awal Rp10.73 miliar.	Formula	Pengadaan konstruksi selesai sebelum Juni		
			Limit	Penurunan pendapatan dari PT Inalum sebesar Rp13,24 miliar				
3	5	3	Peristiwa Risiko	Kegagalan kegiatan investasi	Rencana Perlakuan Risiko	1. Penerbitan Rencana Umum Pengadaan 2024 di TW IV tahun 2023 berdasarkan Usulan RKAP 2024 sebagai dasar Pengadaan Dini	1	3
			Penyebab	1. Pelaksanaan beberapa investasi terkait dengan kesepakatan PJPSDA dan terbatasnya waktu pelaksanaan proses Pengadaan setelah terbitnya RKAPT 2. Belum adanya kesepakatan PJBL 3. Kendala Teknis pada E-Proc saat Tender/ Seleksi. 4. Keterlambatan atau wanprestasi vendor dalam pelaksanaan pekerjaan		2. Koordinasi dengan pihak terkait lebih intensif 3. Upgrading E-proc dan penerapan aplikasi E-Proc untuk Tender/ Seleksi 4. Penerapan dan pengembangan E-Monev		
					KRI	Progres Investasi		
			Dampak (Rp Miliar)	1,33	Formula	Progres investasi >90% Terhadap Program		
			Perhitungan Dampak	Adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan investasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan investasi dan mundurnya kegiatan operasional sehingga timbul potensi kehilangan laba senilai Rp1,33 miliar				
			Limit	Penurunan laba dari kegiatan investasi sebesar Rp1,64 miliar				
4	4	4	Peristiwa Risiko	Ketidakoptimalan pengelolaan BJPSDA sebagai PNBP	Rencana Perlakuan Risiko	1. Melakukan pembahasan kajian internal kesiapan PJT I sebagai MIP dengan manajemen	2	4
			Penyebab	Perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BJPSDA oleh PJT I menjadi PNBP (PP 21/2023)		2. Penyampaian dan pembahasan usulan rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang PNBP yang berasal dari BJPSDA yang dikelola BUMN/PJT I secara formal kepada KPUPR		
			Dampak (Rp Miliar)	32,40		3. Melakukan koordinasi dengan KPUPR, KBUMN, Direktur PNBP, Direktur Jenderal Anggaran, BKF, PJT I, dan PJT II terkait dampak BJPSDA menjadi PNBP		
			Perhitungan Dampak	PJT I sebagai PNBP berkewajiban untuk menyetorkan pendapatan BJPSDA kepada negara, sehingga terdapat potensi penurunan pendapatan sebesar Rp6,48 miliar (asumsi sebesar 1% dari pendapatan PJPSDA)	KRI	% besaran BJPSDA yang disetorkan ke kas negara		
			Limit	Penurunan pendapatan BJPSDA sebesar Rp6,48 miliar untuk disetorkan kepada negara sebagai PNBP	Formula	Besaran BJPSDA yang disetorkan ke kas negara sebesar 1% dari pendapatan BJPSDA		
5	5	3	Peristiwa Risiko	Kegagalan Layanan Manfaat Ekonomi Bendungan Sutami	Rencana Perlakuan Risiko	1. Pelatihan/refreshment kepada petugas OP Bendungan terkait Pedoman OP yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan monitoring dan pemantauan berjalan dengan optimal 2. Studi penanganan kejadian Piping (kebocoran) dan pelaksanaan penganggulangan Piping (kebocoran) yang sudah terjadi bekerjasama dengan tenaga ahli eksternal dengan berkoordinasi dengan regulator	1	3
			Penyebab	1. Adanya keruntuhan bendungan akibat retakan di puncak bendungan dan kerusakan infrastruktur yang dipicu adanya kebocoran waterway PLTA Sutami atau kejadian gempa	KRI	Adanya retakan dan kebocoran/ leakage di tubuh bendungan Nilai seepage > 192 lt/menit dan secara visual berwarna keruh		

No.	Inheren		Penjelasan		Rencana Perlakuan Risiko			Residual	
	Dmp	Prob						Dmp	Prob
			2.	Piping (kebocoran) yaitu terjadinya rekahan di tubuh bendungan atau tumpuan bendungan yang menyebabkan mengalirnya air dari rekahan tersebut dalam jumlah besar	Formula	Tidak ada retakan di puncak bendungan dan bocoran (leakage)	Tidak ada anomali data pembacaan seepage pada periode 3x berurutan dan nilai seepage < 192 lt/menit		
			Dampak (Rp Miliar)	137,17					
			Perhitungan Dampak	Adanya kegagalan infrastruktur bendungan menyebabkan terganggunya operasional bendungan dalam memberikan layanan jasa air kepada pemanfaat, sehingga jika terjadi keruntuhan maka bendungan tidak dapat beroperasi dan berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp137,17 miliar					
			Limit	Tidak terjadi kegagalan infrastruktur bendungan					
6	5	2	Peristiwa Risiko	Terhambatnya Layanan Penyediaan Air SPAM	Rencana Perlakuan Risiko	1. Koordinasi secara intens dengan Kejaksaan, Perumda dan Pemkot	2. Pemantauan tindak lanjut atas BA show cause meeting	2	1
			Penyebab	1. Belum terpenuhinya dokumen perijinan sehingga menghambat penyelesaian proyek	KRI	Ijin terbit	Operasi WTP sesuai kontrak		
				2. Belum terpenuhinya kontrak kinerja WTP	Formula	Dokumen perijinan terbit M3 Januari	WTP200lps beroperasi sejak M1 April		
			Dampak (Rp Miliar)	0,454					
			Perhitungan Dampak	Adanya keterlambatan dalam proses peneribitan perijinan menyebabkan penyelesain proyek terhambat dan operasionall SPAM mundur dari jadwal sehingga terdpapat potensi kehilangan laba sebesar Rp0,45 miliar atau 25% dari target yang direncanakan					
			Limit	Penuruan laba SPAM Bangi sebesar Rp1,66 miliar					

PENERIMAAN RISIKO LEVEL ENTITAS/CORPORATE
TAHUN 2024
PERUM JASA TIRTA I

Nilai Kapasitas Risiko Perusahaan (Rp Miliar)	Nilai Selera Risiko Perusahaan (Rp Miliar)	Nilai Toleransi Risiko Perusahaan (Rp Miliar)	Nilai Batasan Risiko (Rp Miliar)
361,78	162,80	198,98	36,18

METRIK STRATEGI RISIKO
TAHUN 2024
PERUM JASA TIRTA I

No.	Nama BUMN	Kode BUMN	Kategori Risiko BUMN	Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko	Parameter	Satuan Ukuran	Nilai Batasan/Limit	Penjelasan
1	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	Perusahaan berfokus menjalankan kegiatan bisnis utama eksisting secara tepat waktu, tepat sasaran dan menjalankan dengan itikad baik untuk menjaga ketercapaian RKAP 100%.	Konservatif	Deviasi capaian pendapatan BJPSDA	%	5,54%	berdasarkan analisis historis data deviasi 6th (tanpa memperhitungkan tahun 2020-2021), rerata deviasi sebesar -5,54% (th 2020 - 2021 merupakan anomali krn kondisi covid)
2	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	Untuk meningkatkan pendapatan, Perusahaan melaksanakan kegiatan pengelolaan SDA pada PLTA Aset Non PUPR	Strategis	Deviasi Capaian pendapatan BJPSDA PLTA Non PUPR	%	50,00%	
3	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	Perusahaan secara aktif dan dengan mempertimbangkan kalkulasi risiko yang matang untuk menciptakan nilai melalui inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio, dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek environmental, social dan governance (ESG) dengan menerima konsekuensi peningkatan penambahan biaya modal (CAPEX) dengan risiko yang wajar dan terukur serta sepadan dengan pengembalian investasi. untuk menjaga penyerapan investasi minimal 50% dari target investasi, sebagaimana tertuang dalam KPI	Strategis	Deviasi laba BJPSDA dari aktivitas investasi	%	20,00%	Historis ketidaktercapaian laba dari kegiatan investasi
4	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	Perusahaan secara aktif dan dengan mempertimbangkan kalkulasi risiko yang matang untuk menciptakan nilai melalui inovasi model bisnis, eksplorasi dan pengembangan, optimalisasi penataan portofolio, dan pertumbuhan anorganik yang mempertimbangkan aspek environmental, social dan governance (ESG) dengan menerima konsekuensi peningkatan penambahan biaya modal (CAPEX) dengan risiko yang wajar dan terukur serta sepadan dengan pengembalian investasi. untuk menjaga penyerapan investasi minimal 50% dari target investasi, sebagaimana tertuang dalam KPI	Strategis	Deviasi capaian laba SPAM	%	24,59%	
5	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	Perusahaan mengoptimalkan sumber daya idle atau yang belum memenuhi kapasitas usaha melalui berbagai upaya organik dan anorganik dengan menerima risiko bisnis yang wajar dan terukur	Strategis	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan	%	30,00%	Pertumbuhan pendapatan aset tidak produktif 30% lebih baik dari tahun sebelumnya
6	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	Perusahaan/Anak Perusahaan melakukan pengambilan keputusan strategis yang diperlukan untuk mencapai manfaat jangka panjang, termasuk untuk mengantisipasi setiap perubahan dalam kegiatan usaha, meskipun terdapat potensi risiko moderat terhadap kinerja jangka pendek (1 tahun)	Strategis	Perubahan Kebijakan	Jumlah	1	Terdapat 1 perubahan kebijakan terkait akuisisi JTE
7	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Keuangan	11. Risiko Industri Umum - Keuangan	Perusahaan meningkatkan perolehan pembayaran dari pelanggan dengan mengintensifkan penagihan piutang agar piutang usaha BJPSDA tertagihkan secara optimal dan diarahkan untuk	Konservatif	Rasio Perputaran Piutang/Receivable Turnover (Pendapatan / Piutang Rata2 (average piutang awal+akhir))	kali	0,00	berdasarkan analisis historis data Receivable Turnover 2th (2022-2023), rerata RT adalah 5,98 kali
8	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Keuangan	11. Risiko Industri Umum - Keuangan	Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan struktur keuangan yang sehat dan menjaga keberlangsungan usaha secara berkesinambungan serta menjaga agar total biaya operasional tidak melebihi dari anggaran, apabila melebihi anggaran RKAP 2024 dapat diterima sepanjang proporsi kenaikan biaya operasional tidak lebih tinggi dari proporsi kenaikan pendapatan yang diterima, dengan tetap memperhatikan pencapaian laba.	Strategis	Rasio biaya operasional (Biaya Operasional / Pendapatan)	%	87,94%	berdasarkan analisis historis data BOPO 2th (2022-2023), rerata BOPO adalah 87,94%
9	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Operasional	16. Risiko Industri Umum - Operasional	Untuk mempertahankan nilai kontribusi kepada negara dengan mengerjakan penugasan pemerintah atau untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum sebagaimana ditetapkan dalam PP/46/2010, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah kerja serta menyelenggarakan kemanfaatan umum atas Sumber Daya Air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak untuk pelayanan sosial, kesejahteraan, dan keselamatan umum, maka Perusahaan menjaga kinerja operasional dengan penyerapan biaya OP Prasarana SDA sebesar minimal 90% dari target	Konservatif	Deviasi serapan biaya OP SDA	%	10,00%	

No.	Nama BUMN	Kode BUMN	Kategori Risiko BUMN	Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	Risk Appetite Statement	Sikap Terhadap Risiko	Parameter	Satuan Ukuran	Nilai Batasan/Limit	Penjelasan
10	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Operasional	16. Risiko Industri Umum - Operasional	Tidak ada perusakan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan dan berupaya meminimalkan disrupsi dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kinerja. Guna mendukung tercapainya tujuan dalam menjaga Daerah Aliran Sungai, Perusahaan mengutamakan kegiatan konservasi di seluruh wilayah kerja Perusahaan sebesar minimal 90% dari target RKAP 2024.	Tidak toleran	Jumlah perusakan lingkungan	kali	0	Tidak ada perusakan lingkungan
11	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Operasional	16. Risiko Industri Umum - Operasional	Tidak terjadi kecelakaan kerja (*zero accident*) di lingkungan Perusahaan	Tidak toleran	Tingkat Fatality	kali	0	Tidak ada kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian
12	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Hukum dan Kepatuhan	12. Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan	Tidak ada tuntutan / pelanggaran Peraturan / perundang-undangan dan peraturan internal oleh Perusahaan maupun insan Perusahaan. Perusahaan mengutamakan kepatuhan (full compliance) terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang	Tidak toleran	Jumlah tuntutan/ pelanggaran	kali	1	Tidak ada tuntutan/Tuntutan tertangani dengan optimal/tidak ada pelanggaran
13	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Hukum dan Kepatuhan	12. Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan	Tidak ada gugatan hukum kepada Perusahaan yang dapat mengganggu reputasi dan kinerja Perusahaan. Perusahaan berusaha memenuhi semua kewajiban dan menghindari tuntutan hukum dari pihak lain.	Tidak toleran	Jumlah gugatan	kali	1	Tidak ada gugatan/Gugatan tertangani dengan optimal
14			Hukum dan Kepatuhan	12. Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan	Perusahaan menempatkan prioritas utama terhadap penerapan tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang terintregasi, melengkapi dan menjalankan organ pengelola risiko secara aktif dan prudent serta menjunjung tinggi core value AKHLAK	Tidak toleran	Tingkat Fraud	kali	1	Tidak ada kejadian kecurangan/gratifikasi dll
15			Hukum dan Kepatuhan	12. Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan	Perusahaan mentaati penerapan PP/21/2023 sebagai Mitra Instansi Pengelola	Tidak toleran	Tingkat PNBP	%	1,00%	Nilai PNBP maksimal yang dapat disetorkan kepada negara
16	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Reputasi dan Keberlanjutan	12. Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan	Tidak ada ancaman reputasi yang dapat mempengaruhi secara signifikan pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan	Tidak toleran	Jumlah pencemaran nama baik perusahaan	kali	0	Tidak ada pencemaran nama baik
17	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Teknologi Informasi	14. Risiko Industri Umum - Teknologi & Keamanan Siber	Perusahaan menempatkan prioritas utama atas keamanan informasi, kehandalan infrastruktur IT, dan kesiapan teknologi cyber yang harus dijalankan oleh Perusahaan dengan gangguan pada sistem IT secara umum maksimal 1X24 jam dan harus	Tidak toleran	Jumlah gangguan cyber security system	kali	1	Gangguang IT tertangani secara optimal
18	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Organisasi dan SDM	4. Risiko Kebijakan - SDM	Kekosongan jabatan dapat ditoleransi sampai dengan maksimal 10% dalam satu waktu	Strategis	Tingkat kekosongan jabatan (Jumlah Pejabat / Jumlah Jabatan)	%	10,00%	Jumlah jabatan yang kosong tidak melebihi 10% dari total jabatan yang ada
19			Organisasi dan SDM	4. Risiko Kebijakan - SDM	Perusahaan mengurangi kesenjangan dalam pemenuhan talenta	Strategis	Penambahan talenta	Jumlah	1,00	1 orang talenta muda/perempuan
20	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Makro Geopolitik Pasar	10. Risiko Industri Umum - Pasar & Makroekonomi	Ketidakpastian kondisi perekonomian, politik dan pasar dapat diterima dengan tetap berusaha menekan dampaknya hingga ke tingkat rendah	Tidak toleran	Tingkat kepuasan pelanggan	%	100,00%	100% terhadap target kepuasan pelanggan tahun 2024 sebesar 81,50%

PILIHAN SASARAN & STRATEGI BISNIS
TAHUN 2024
PERUM JASA TIRTA I

No	Pilihan Sasaran		Pilihan Strategi	Hasil yang diharapkan dapat diterima perusahaan	Nilai Risiko Yang Akan Timbul		Nilai limit risiko sesuai dengan parameter risiko dalam Metrik Strategi Risiko		Keputusan Penetapan
1	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi (Pencapaian produksi layanan jasa air kepada pemanfaat baru untuk PLTA Non PUPR di WS Jratunseluna dan WS Serayu Bogowonto sebesar 100% dengan pendapatan Rp35,78 miliar)	1	Menjaga arus kas (CFO) perusahaan, EBITDA dan Net Profit Margin (NPM) (Percepatan penandatanganan kesepakatan dengan pemanfaat baru dari PLTA Non PUPR,yaitu PLTA Timo, Mrica, Tulis, Ketenger, Garung)	Laba dari PLTA Non PUPR sebesar Rp10,73 miliar	Penurunan laba sebesar Rp0,53 miliar	12,1	Penurunan pendapatan PLTA Non PUPR sebesar Rp1,94 miliar	1,94	Accept
2	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi (Perolehan pendapatan BJPSDA dengan PT Inalum tahun 2024 sebesar 100%)	2	Melakukan belanja operasional (OPEX) dan kegiatan investasi (CAPEX) dengan lebih selektif dan seksama berdasarkan skala prioritas (Optimalisasi penyelesaian pekerjaan OP sesuai kesepakatan PJPSDA antara PJT I dengan PT Inalum)	Margin dari PT Inalum sebesar Rp35,85 miliar	Penurunan margin sebesar Rp1,83 miliar	nilai risiko = 108*40% (40% adalah avarage dari tidak tercapainya pekerjaan OP dalam 3 tahun 50% 2021, 50% 2022 dan 20% 2023)	Penurunan pendapatan dari PT Inalum sebesar Rp13,24 miliar	13,24	Accept
3	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi (Penyerapan investasi PJPSDA 100%)	3	Melakukan belanja operasional (OPEX) dan kegiatan investasi (CAPEX) dengan lebih selektif dan seksama berdasarkan skala prioritas (Mengoptimalkan pembelanjaan CAPEX sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku)	Kegiatan investasi menghasilkan laba sebesar Rp8,18 miliar	Penurunan laba dari kegiatan investasi sebesar Rp0,41 miliar	114,44538	Penurunan laba dari kegiatan investasi sebesar Rp1,64 miliar	1,64	Accept
4	Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengelolaan infrastruktur tertentu yang diberikan penugasannnya secara khusus atas kebijakan dari PUPR (Pemenuhan PP. 21 Tahun 2024 Perihal Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	4	Adaptasi perusahaan terhadap mekanisme BJPSDA sebagai PNBP sesuai PP. 21 Tahun 2023 Perihal Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Pendapatan BJPSDA RKAP 2024 senilai Rp648,7 miliar dapat dikelola seluruhnya oleh PJT I (setor Rp.0 ke kas negara)	Penurunan pendapatan untuk disetorkan ke negara Rp6,48 miliar (1%) dari pendapatan BJPSDA	1% dari pendapatan BJPSDA	Penurunan pendapatan BJPSDA sebesar Rp6,48 miliar untuk disetorkan kepada negara sebagai PNBP	6,48	Accept
5	Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengelolaan infrastruktur tertentu yang diberikan penugasannnya secara khusus atas kebijakan dari PUPR (Tidak terjadinya kerusakan/gangguan fungsi pada objek vital infrastruktur SDA/keruntuhan bendungan)	5	Mempertahankan kinerja sistem keamanan bendungan dalam kondisi baik	Penerimaan dari pembayaran pendapatan BJPSDA Bendungan Sutami, Wlingi dan Lodoyo Rp137,17 miliar	Tidak terdapat kerugian / risiko yang timbul akibat kegagalan infrastruktur bendungan	BJPSDA Juli - Des 2024	Tidak terjadi kegagalan infrastruktur bendungan		Avoid
6	Peningkatan pendapatan dan profitabilitas bisnis Non SDA) (Peningkatan profitabilitas bisnis SPAM 100% target)	6	Penguatan kapabilitas korporasi dalam penyediaan air minum melalui bisnis SPAM	Pencapaian laba sebesar Rp2,70 miliar	Penurunan pendapatan sebesar Rp0,15 miliar	pendapatan TW I	Penuruan laba SPAM Bangi sebesar Rp1,66 miliar	1,66	Accept

PROFIL RISIKO UTAMA
TAHUN 2024
PERUM JASA TIRT I

No.	Nama BUMN	Kode BUMN	Sasaran BUMN	Sasaran KBUMN	Kategori Risiko BUMN	Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	No. Risiko	Peristiwa Risiko	Deskripsi Peristiwa risiko	No. Penyebab Risiko	Kode Penyebab risiko	Penyebab risiko
1	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi (Pencapaian produksi layanan jasa air kepada pemanfaat baru untuk PLTA Non PUPR di WS Jratunseluna dan WS Serayu Bogowonto sebesar 100% dengan pendapatan Rp35,78	1. Nilai ekonomi dan sosial	Risiko Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	1	Kegagalan perolehan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	Kegagalan perolehan pemanfaat baru mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan penagihan BJPSDA atas pemanfaatan air permukaan oleh PLTA Non PUPR	a	PJT11a	Tidak tercapai kesepakatan dengan pemanfaat baru PLTA Non PUPR
2	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi (Pencapaian produksi layanan jasa air kepada pemanfaat baru untuk PLTA Non PUPR di WS Jratunseluna dan WS Serayu Bogowonto sebesar 100% dengan pendapatan Rp35,78	1. Nilai ekonomi dan sosial	Risiko Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	1	Kegagalan perolehan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	Kegagalan perolehan pemanfaat baru mengakibatkan perusahaan tidak dapat melakukan penagihan BJPSDA atas pemanfaatan air permukaan oleh PLTA Non PUPR	b	PJT11b	Tidak tercapai kesepakatan dengan pemanfaat baru PLTA Non PUPR
3	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi (Perolehan pendapatan BJPSDA dengan PT Inalum tahun 2024 sebesar 100%)	1. Nilai ekonomi dan sosial	Risiko Operasional	16. Risiko Industri Umum - Operasional	2	Kegagalan penyelesaian pekerjaan PJPSDA PT Inalum	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan PJPSDA sehingga kehilangan potensi laba sesuai program BJPSDA tahun 2024	a	PJT12a	Jumlah paket pekerjaan yang bertambah
4	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi (Penyerapan investasi PJPSDA 100%)	4. Peningkatan investasi	Risiko Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	3	Kegagalan kegiatan investasi	Terdapat kegiatan investasi yang tidak dilaksanakan	a	PJT13a	Pelaksanaan beberapa investasi terkait dengan kesepakatan PJPSDA dan terbatasnya waktu pelaksanaan proses Pengadaan setelah terbitnya RKAPT
5	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi (Penyerapan investasi PJPSDA 100%)	4. Peningkatan investasi	Risiko Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	3	Kegagalan kegiatan investasi	Terdapat kegiatan investasi yang tidak dilaksanakan	b	PJT13b	Belum adanya kesepakatan PJBL
6	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi (Penyerapan investasi PJPSDA 100%)	4. Peningkatan investasi	Risiko Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	3	Kegagalan kegiatan investasi	Terdapat kegiatan investasi yang tidak dilaksanakan	c	PJT13c	Kendala Teknis pada E-Proc saat Tender/ Seleksi.
7	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi (Penyerapan investasi PJPSDA 100%)	4. Peningkatan investasi	Risiko Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	3	Kegagalan kegiatan investasi	Terdapat kegiatan investasi yang tidak dilaksanakan	d	PJT13d	Keterlambatan atau wanprestasi vendor dalam pelaksanaan pekerjaan
8	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengelolaan infrastruktur tertentu yang diberikan penugasannnya secara khusus atas kebijakan dari PUPR (Pemenuhan PP. 21 Tahun 2024 Perihal Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	1. Nilai ekonomi dan sosial	Risiko Hukum & Kepatuhan	12. Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan	4	Ketidakoptimalan pengelolaan BJPSDA sebagai PNBP	Adanya % BJPSDA yang harus disetor ke kas negara sehingga tidak dapat digunakan seluruhnya untuk pengelolaan SDA	a	PJT14a	Perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BJPSDA oleh PJT I menjadi PNBP (PP 21/2023)
9	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengelolaan infrastruktur tertentu yang diberikan penugasannnya secara khusus atas kebijakan dari PUPR (Pemenuhan PP. 21 Tahun 2024 Perihal Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	1. Nilai ekonomi dan sosial	Risiko Hukum & Kepatuhan	12. Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan	4	Ketidakoptimalan pengelolaan BJPSDA sebagai PNBP	Adanya % BJPSDA yang harus disetor ke kas negara sehingga tidak dapat digunakan seluruhnya untuk pengelolaan SDA	a	PJT14a	Perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BJPSDA oleh PJT I menjadi PNBP (PP 21/2023)
10	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengelolaan infrastruktur tertentu yang diberikan penugasannnya secara khusus atas kebijakan dari PUPR (Pemenuhan PP. 21 Tahun 2024 Perihal Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).	1. Nilai ekonomi dan sosial	Risiko Hukum & Kepatuhan	12. Risiko Industri Umum - Reputasi & Kepatuhan	4	Ketidakoptimalan pengelolaan BJPSDA sebagai PNBP	Adanya % BJPSDA yang harus disetor ke kas negara sehingga tidak dapat digunakan seluruhnya untuk pengelolaan SDA	a	PJT14a	Perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BJPSDA oleh PJT I menjadi PNBP (PP 21/2023)
11	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengelolaan infrastruktur tertentu yang diberikan penugasannnya secara khusus atas kebijakan dari PUPR (Tidak terjadinya kerusakan/gangguan fungsi pada objek vital infrastruktur SDA/keruntuhan bendungan)	1. Nilai ekonomi dan sosial	Risiko Operasional	16. Risiko Industri Umum - Operasional	5	Kegagalan Layanan Manfaat Ekonomi Bendungan Sutami	Runtuhnya tubuh Bendungan Sutami sehingga menyebabkan banjir bandang yang mengakibatkan kerugian di hilir bendungan	a	PJT15a	Adanya keruntuhan bendungan akibat retakan di puncak bendungan dan kerusakan infrastruktur yang dipicu adanya kebocoran waterway PLTA Sutami atau kejadian gempa
12	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengelolaan infrastruktur tertentu yang diberikan penugasannnya secara khusus atas kebijakan dari PUPR (Tidak terjadinya kerusakan/gangguan fungsi pada objek vital infrastruktur SDA/keruntuhan bendungan)	1. Nilai ekonomi dan sosial	Risiko Operasional	16. Risiko Industri Umum - Operasional	5	Kegagalan Layanan Manfaat Ekonomi Bendungan Sutami	Runtuhnya tubuh Bendungan Sutami sehingga menyebabkan banjir bandang yang mengakibatkan kerugian di hilir bendungan	b	PJT15b	Piping (kebocoran) yaitu terjadinya rekahan di tubuh bendungan atau tumpuan bendungan yang menyebabkan mengalirnya air dari rekahan tersebut dalam jumlah besar
13	Perum Jasa Tirta I	PJT1	Peningkatan pendapatan dan profitabilitas bisnis Non SDA) (Peningkatan profitabilitas bisnis SPAM 100% target)	2. Inovasi bisnis model	Risiko Strategis	9. Risiko Industri Umum - Formulasi Strategis	6	Terhambatnya Layanan Penyediaan Air SPAM	Terdapat keterlambatan pemberian layanan penyediaan air sehingga pengusahaan SPAM tidak terlaksana dengan optimal	a	PJT16a	Belum terpenuhinya dokumen perijinan sehingga menghambat penyelesaian proyek

PROFIL RISIKO UTAMA
TAHUN 2024
PERUM JASA TIRTA I

No. Risiko	Peristiwa Risiko	Key Risk Indicators	Unit Satuan KRI	Kategori Threshold KRI			Jenis *Existing Control*	*Existing Control*	Penilaian Efektivitas Kontrol	Kategori Dampak	Deskripsi Dampak	Perkiraan Waktu Terpapar Risiko
				Aman	Hati-Hati	Bahaya						
1	Kegagalan perolehan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	Kesepakatan perjanjian PJPSDA	Waktu	Sebelum Januari 2024	TW I 2024	Lebih dari TW I 2024	Kontrol kepatuhan (compliance) - level entitas/kantor pusat	1. PP 21 / 2023	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kuantitatif	Target laba PLTA Non PUPR tidak tercapai	Jan - Maret
1	Kegagalan perolehan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	% Pekerjaan Manafaat Langsung (PML) terhadap BJPSDA	%	< 85%	= 85%	> 85%	Kontrol kepatuhan (compliance) - level entitas/kantor pusat	2. Koordinasi dengan para pihak	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kuantitatif	Target laba PLTA Non PUPR tidak tercapai	April
2	Kegagalan penyelesaian pekerjaan PJPSDA PT Inalum	Proses pengadaan	Waktu	Pengadaan konstruksi selesai sebelum Juni	Pengadaan konstruksi selesai pada Juni	Pengadaan konstruksi selesai pada lebih dari Juni	Kontrol operasi - level operasi	Pedoman Pengadaan Barang & Jasa dan QP PJT 27	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kuantitatif	Target laba dari BJPSDA PT Inalum tidak tercapai	Juni
3	Kegagalan proses penyerapan investasi	Progres Investasi	%	Progres investasi >90% Terhadap Program	Progres investasi 80%<X<90% Terhadap Program	Progres investasi <80%Terhadap Program	Kontrol operasi - level operasi	Koordinasi dengan unit yang terkait dengan penetapan kesepakatan PJPSDA	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kualitatif	Pelaksanaan Investasi terlambat dan tidak memenuhi target yang ditetapkan	Des
3	Kegagalan proses penyerapan investasi	Progres Investasi	%	Progres investasi >90% Terhadap Program	Progres investasi 80%<X<90% Terhadap Program	Progres investasi <80%Terhadap Program	Kontrol operasi - level operasi	QP/PJT/75 dan PRT 0005/2022 Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan PJT I	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kualitatif	Pelaksanaan Investasi terlambat dan tidak memenuhi target yang	Des
3	Kegagalan proses penyerapan investasi	Progres Investasi	%	Progres investasi >90% Terhadap Program	Progres investasi 80%<X<90% Terhadap Program	Progres investasi <80%Terhadap Program	Kontrol operasi - level operasi	Koordinasi antara POKJA PBJ dengan Divisi TI dan pemeliharaan rutin	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kualitatif	Pelaksanaan Investasi terlambat dan tidak memenuhi target yang	Des
3	Kegagalan proses penyerapan investasi	Progres Investasi	%	Progres investasi >90% Terhadap Program	Progres investasi 80%<X<90% Terhadap Program	Progres investasi <80%Terhadap Program	Kontrol operasi - level operasi	Teguran, denda dan atau blacklist atas keterlambatasn	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kualitatif	Pelaksanaan Investasi terlambat dan tidak memenuhi target yang	Des
4	Ketidakoptimalan pengelolaan BJPSDA sebagai PNBP	% besaran BJPSDA yang disetorkan ke kas negara	%	<1% pendapatan BJPSDA (neto/bruto) disetor ke kas negara	1% pendapatan BJPSDA (neto/bruto) disetor ke kas negara	>1% pendapatan BJPSDA (neto/bruto) disetor ke kas negara	Kontrol operasi - level entitas/kantor pusat	Mengikuti sosialiasi PP No. 21 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di KPUPR	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kuantitatif	Adanya % BJPSDA yang harus disetor ke kas negara sehingga tidak dapat digunakan seluruhnya untuk pengelolaan SDA	Des
4	Ketidakoptimalan pengelolaan BJPSDA sebagai PNBP	% besaran BJPSDA yang disetorkan ke kas negara	%	<1% pendapatan BJPSDA (neto/bruto) disetor ke kas negara	1% pendapatan BJPSDA (neto/bruto) disetor ke kas negara	>1% pendapatan BJPSDA (neto/bruto) disetor ke kas negara	Kontrol operasi - level entitas/kantor pusat	Menyusun masukan untuk rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang PNBP yang berasal dari BJPSDA yang dikelola BUMN/PJT I	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kuantitatif	Adanya % BJPSDA yang harus disetor ke kas negara sehingga tidak dapat digunakan seluruhnya untuk pengelolaan SDA	Des
4	Ketidakoptimalan pengelolaan BJPSDA sebagai PNBP	% besaran BJPSDA yang disetorkan ke kas negara	%	<1% pendapatan BJPSDA (neto/bruto) disetor ke kas negara	1% pendapatan BJPSDA (neto/bruto) disetor ke kas negara	>1% pendapatan BJPSDA (neto/bruto) disetor ke kas negara	Kontrol kepatuhan (compliance) - level entitas/kantor pusat	Menyusun kajian internal terkait kesiapan penerapan PJT I sebagai MIP	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kuantitatif	Adanya % BJPSDA yang harus disetor ke kas negara sehingga tidak dapat digunakan seluruhnya untuk pengelolaan SDA	Des
5	Kegagalan/ Keruntuhan Bendungan Sutami	Adanya retakan dan kebocoran/ leakage di tubuh bendungan	Kejadian	Tidak ada retakan di puncak bendungan dan bocoran (*leakage*)	Ada retakan di puncak bendungan dan/atau bocoran (*leakage*) namun telah dilakukan pemantauan	Ada retakan di puncak bendungan dan/atau bocoran (leakage) tidak terpantau	Kontrol operasi - level operasi	Pemantauan/pengukuran rutin dan insidentil	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kuantitatif	Adanya tambahan retakan dan meningkatnya debit bocoran	Jan - Des
5	Kegagalan/ Keruntuhan Bendungan Sutami	Nilai seepage > 192 lt/menit dan secara visual berwarna keruh	Kejadian	Tidak ada anomali data pembacaan seepage pada periode 3x berurutan dan nilai seepage < 192 lt/menit	Adanya anomali data pembacaan seepage pada periode 3x berurutan dan nilai seepage < 192 lt/menit	Adanya anomali data pembacaan seepage pada periode 3x berurutan dan nilai seepage < 192 lt/menit namun secara visual membawa butiran (keruh)	Kontrol operasi - level operasi	2. Penyusunan rencana penanganan/ rehabilitasi terhadap retakan dan bocoran	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kuantitatif	Adanya tambahan retakan dan meningkatnya debit bocoran	Jan - Des
6	Terhambatnya Layanan Penyediaan Air SPAM	Ijin terbit	Waktu	M3 Januari	M1 Februari	M2 Februari	Kontrol operasi - level entitas/kantor pusat	Koordinasi dengan instansi terkait, antara lain Pemkot, Perumda	Cukup dan Efektif Sebagian	Dampak Kuantitatif	Laba tidak mencapai target	April - Des

RISIKO INHEREN KUANTITATIF RISIKO UTAMA
TAHUN 2024
PERUM JASA TIRTA I

No.	BUMN	Kode BUMN	No. Risiko	Peristiwa risiko	Risiko Inheren											
					Asumsi Perhitungan Dampak	Nilai Dampak (Rp Miliar)	Skala Dampak		Nilai Probabilitas	Skala Probabilitas		Eksposur Risiko (%)	Skala Risiko		Level Risiko	
							BUMN	KBUMN		BUMN	KBUMN		BUMN	KBUMN	BUMN	KBUMN
1	Perum Jasa Tirta I	PJT1	1	Kegagalan perolehan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	penurunan laba 50% dari target akibat tidak terealisasinya pendapatan dari pemanfaat baru	5,29	4		50%	3		2,64	18		Moderate to High	
2	Perum Jasa Tirta I	PJT1	2	Kegagalan penyelesaian pekerjaan PJPSDA PT Inalum	penurunan margin BJPSDA sebesar 44% berdasarkan hasil kesepakatan progres pelaksanaan pekerjaan	15,6	5		80%	5		12,48	25		High	
3	Perum Jasa Tirta I	PJT1	3	Kegagalan kegiatan investasi	penurunan laba dari kegiatan investasi PJPSDA sebesar 16% karena tidak terealisasinya investasi	1,33	5		70%	3		0,93	23		High	
4	Perum Jasa Tirta I	PJT1	4	Ketidakoptimalan pengelolaan BJPSDA sebagai PNBP	penurunan pendapatan BJPSDA sebesar Rp 32,40 miliar (5% pendapatan BJPSDA) untuk penyetoran kepada negara	32,40	2		50%	5		16,20	12		Moderate	
5	Perum Jasa Tirta I	PJT1	5	Kegagalan Layanan Manfaat Ekonomi Bendungan Sutami	Kerugian akibat keruntuhan bendungan kaskade Brantas Hulu	137,17	5		10%	2		13,72	16		Moderate to High	
6	Perum Jasa Tirta I	PJT1	6	Terhambatnya Layanan Penyediaan Air SPAM	penurunan laba SPAM sebesar 40%	0,45	5		25%	2		0,11	21		High	

RISIKO RESIDUAL KUANTITATIF RISIKO UTAMA
TAHUN 2024
PERUM JASA TIRTA I

No.	BUMN	Kode BUMN	No. Risiko	Peristiwa risiko	Target Risiko Residual																							
					Nilai Dampak (Rp Miliar)				Skala Dampak								Nilai Probabilitas				Skala Probabilitas							
									BUMN				KBUMN								BUMN				KBUMN			
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Perum Jasa Tirta I	PJT1	1	Kegagalan perolehan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	5,29	5,29	4,38	3,47	4	4	4	3					75%	75%	75%	75%	4	4	3	3				
2	Perum Jasa Tirta I	PJT1	2	Kegagalan penyelesaian pekerjaan PJPSDA PT Inalum	15,60	15,60	14,04	12,17	5	4	3	2					100%	80%	80%	80%	5	4	4	4				
3	Perum Jasa Tirta I	PJT1	3	Kegagalan kegiatan investasi	1,33	1,19	0,99	0,82	5	4	4	1					100%	90%	90%	90%	3	3	3	3				
4	Perum Jasa Tirta I	PJT1	4	Ketidakoptimalan pengelolaan BJPSDA sebagai PNBP	32,40	32,40	32,40	6,48	4	4	3	2					100%	100%	100%	100%	4	4	4	4				
5	Perum Jasa Tirta I	PJT1	5	Kegagalan Layanan Manfaat Ekonomi Bendungan Sutami	137,17	137,17	137,17	-	5	5	3	1					10%	10%	10%	10%	3	3	3	3				
6	Perum Jasa Tirta I	PJT1	6	Terhambatnya Layanan Penyediaan Air SPAM	0,45	0,45	0,45	0,45	5	4	2	2					75%	75%	75%	75%	2	2	1	1				

RISIKO RESIDUAL KUANTITATIF
TAHUN 2024
PERUM JASA TIRTA I

No. Risiko	Peristiwa risiko					Target Risiko Residual															
		Eksposur Risiko (Rp Miliar)				Skala Risiko								Level Risiko							
						BUMN				KBUMN				BUMN				KBUMN			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Kegagalan perolehan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	3,97	3,97	3,29	2,60	19	19	18	13	No Data	No Data	No Data	No Data	Moderate to High	Moderate to High	Moderate to High	Moderate	No Data	No Data	No Data	No Data
2	Kegagalan penyelesaian pekerjaan PJPSDA PT Inalum	15,60	12,48	11,23	9,73	25	19	14	8					High	Moderate to High	Moderate	Low to Modearet				
3	Kegagalan kegiatan investasi	1,33	1,07	0,90	0,74	23	18	18	3					High	Moderate to High	Moderate to High	Low				
4	Ketidakoptimalan pengelolaan BJPSDA sebagai PNBP	32,40	32,40	32,40	6,48	19	19	14	9					Moderate to High	Moderate to High	Moderate	Low to Modearet				
5	Kegagalan Layanan Manfaat Ekonomi Bendungan Sutami	13,72	13,72	13,72	-	23	23	13	3					High	High	Moderate	Low				
6	Terhambatnya Layanan Penyediaan Air SPAM	0,34	0,34	0,34	0,34	21	16	5	5					High	Moderate to High	Low	Low				

RISK HEATMAP RISIKO UTAMA
TAHUN 2024
PERUM JASA TIRTA I

TINGKAT KEMUNGKINAN							
	Hampir Pasti Terjadi	**E**	Low to Moderate 7	Moderate 12	Moderate to High 17	High 22	2 2 High 25
	Sangat Mungkin Terjadi	**D**	Low 4	4 Low to Moderate 9	2 4 Moderate 14	1 2 4 4 1 1 4 Moderate to High 19	High 24
	Bisa Terjadi	**C**	3 5 Low 3	2 Low to Moderate 8	5 Moderate 13 1	1 3 3 Moderate to High 18	3 3 5 5 5 High 23
	Jarang Terjadi	**B**	Low 2	Low to Moderate 6	Low to Moderate 11	16 Moderate to High 16	6 6 High 21
	Sangat Jarang Terjadi	**A**	Low 1	6 6 Low 5	Low to Moderate 10	Moderate 15	High 20
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
			Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
			TINGKAT DAMPAK				

Keterangan:

- Level Risiko Inherent
- Level Risiko Q1
- Level Risiko Q2
- Level Risiko Q3
- Level Risiko Residual (Q4)

RENCANA PERLAKUAN RISIKO UTAMA
TAHUN 2024
PERUM JASA TIRTA I

No.	BUMN	Kode BUMN	No. Risiko	No. Penyebab Risiko	Penyebab risiko	Opsi Perlakuan Risiko	Jenis Rencana Perlakuan Risiko	Rencana Perlakuan Risiko
1	Perum Jasa Tirta I	PJT1	1	a	Tidak tercapai kesepakatan dengan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	Transfer/sharing	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kontrol dan dan Perbaikan Melalui Breakthrough Project	Melakukan koordinasi dan pembahasan perjanjian JPSDA antara PJT I dan PLN IP serta berkoordinasi dengan Regulator (KPUPR, KBUMN, dan/atau lainnya)
2	Perum Jasa Tirta I	PJT1	1	b	Tidak tercapai kesepakatan dengan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	Reduce/mitigate	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kontrol	Koordinasi lebih intensif dengan prime user untuk terwujudnya kesepakatan PJPSDA lebih cepat atau pada akhir periode tahun anggaran sebelumnya
3	Perum Jasa Tirta I	PJT1	2	a	Jumlah paket pekerjaan yang bertambah	Reduce/mitigate	Perbaikan Melalui Breakthrough Project	Melaksanakan kegiatan melalui Project Management Consulting (PMC) mulai dari pekerjaan desain, pendapingan proses tender dan pengawasan pekerjaan
4	Perum Jasa Tirta I	PJT1	2	a	Jumlah paket pekerjaan yang bertambah	Reduce/mitigate	Perbaikan Melalui Breakthrough Project	Percepatan proses tender PMC
5	Perum Jasa Tirta I	PJT1	3	a	Pelaksanaan beberapa investasi terkait dengan kesepakatan PJPSDA dan terbatasnya waktu pelaksanaan proses Pengadaan setelah terbitnya RKAPT	Reduce/mitigate	Perbaikan Melalui Breakthrough Project	Penerbitan Rencana Umum Pengadaan 2024 di TW IV tahun 2023 berdasarkan Usulan RKAP 2024 sebagai dasar Pengadaan Dini
6	Perum Jasa Tirta I	PJT1	3	b	Belum adanya kesepakatan PJBL	Reduce/mitigate	Perbaikan Melalui Breakthrough Project	Koordinasi dengan pihak terkait lebih intensif
7	Perum Jasa Tirta I	PJT1	3	c	Kendala Teknis pada E-Proc saat Tender/ Seleksi.	Avoid/hindari	Peningkatan Kecukupan Desain Kontrol	Upgrading E-proc dan penerapan aplikasi E-Proc untuk Tender/ Seleksi
8	Perum Jasa Tirta I	PJT1	3	d	Keterlambatan atau wanprestasi vendor dalam pelaksanaan pekerjaan	Accept/monitor	Peningkatan Kecukupan Desain Kontrol dan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kontrol	Penerapan dan pengembangan E-Monev
9	Perum Jasa Tirta I	PJT1	4	a	Perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BJPSDA oleh PJT I menjadi PNBP (PP 21/2023)	Accept/monitor	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kontrol	Melakukan pembahasan kajian internal kesiapan PJT I sebagai MIP dengan manajemen
10	Perum Jasa Tirta I	PJT1	4	a	Perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BJPSDA oleh PJT I menjadi PNBP (PP 21/2023)	Accept/monitor	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kontrol	Penyampaian dan pembahasan usulan rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang PNBP yang berasal dari BJPSDA yang dikelola BUMN/PJT I secara formal kepada KPUPR
11	Perum Jasa Tirta I	PJT1	4	a	Perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BJPSDA oleh PJT I menjadi PNBP (PP 21/2023)	Accept/monitor	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kontrol	Melakukan koordinasi dengan KPUPR, KBUMN, Direktur PNBP, Direktur Jenderal Anggaran, BKF, PJT I, dan PJT II terkait dampak BJPSDA menjadi PNBP
12	Perum Jasa Tirta I	PJT1	5	a	Adanya keruntuhan bendungan akibat retakan di puncak bendungan dan kerusakan infrastruktur yang dipicu adanya kebocoran waterway PLTA Sutami atau kejadian gempa	Accept/monitor	Peningkatan Kecukupan Desain Kontrol, Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kontrol, dan Pebaikan Melalui Breakthrough Project	Pelatihan/*refreshment* kepada petugas OP Bendungan terkait Pedoman OP yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan monitoring dan pemantauan berjalan dengan optimal
13	Perum Jasa Tirta I	PJT1	5	b	Piping (kebocoran) yaitu terjadinya rekahan di tubuh bendungan atau tumpuan bendungan yang menyebabkan mengalirnya air dari rekahan tersebut dalam jumlah besar	Accept/monitor	Peningkatan Kecukupan Desain Kontrol, Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kontrol, dan Pebaikan Melalui Breakthrough Project	Studi penanganan kejadian Piping (kebocoran) dan pelaksanaan penganggulangan Piping (kebocoran) yang sudah terjadi bekerjasama dengan tenaga ahli eksternal dengan berkoordinasi dengan regulator
14	Perum Jasa Tirta I	PJT1	6	a	Belum terpenuhinya dokumen perijinan sehingga menghambat penyelesaian proyek	Reduce/mitigate	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kontrol	Koordinasi secara intens dengan Kejaksaan, Perumda dan Pemkot

No. Risiko	No. Penyebab Risiko	Penyebab risiko	Output Perlakuan Risiko	Biaya Perlakuan Risiko (Rp miliar)	Jenis Program Dalam RKAP	PIC	Timeline (Bulan)											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	a	Tidak tercapai kesepakatan dengan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	Penambahan ruang lingkup disepakati dan kebijakan baru yang dapat meningkatkan willingness to pay PLN IP	Rp 0,03	Lainnya	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1	1	1	1	1						
1	b	Tidak tercapai kesepakatan dengan pemanfaat baru PLTA Non PUPR	Kesepakatan PJPSDA Prime User Paling Lambat Awal 2024	Rp 0,02	Lainnya	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1										
2	a	Jumlah paket pekerjaan yang bertambah	Diperoleh pemenang penyedia jasa dan pelaksanaan pekerjaan sesuai target	Rp 0,10	Lainnya	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	a	Jumlah paket pekerjaan yang bertambah	Diperoleh pemenang penyedia jasa dan pelaksanaan pekerjaan sesuai target	Rp -	Lainnya	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1	1									
3	a	Pelaksanaan beberapa investasi terkait dengan kesepakatan PJPSDA dan terbatasnya waktu pelaksanaan proses Pengadaan setelah terbitnya RKAPT	Pengadaan Dini dapat dilaksanakan mulai awal tahun berjalan	Rp -	Lainnya	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	c	Belum adanya kesepakatan PJBL	Efektifitas waktu Proses Pengadaan	Rp 0,02	Pengadaan	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1	1	1	1	1						
3	d	Kendala Teknis pada E-Proc saat Tender/ Seleksi.	Penerapan aplikasi E-Proc yang mencakup proses Penagadan dari awal sampai akhir (end to end system)	Rp 0,10	Penelitian dan Pengembangan	BOD, BOD-1, BOD-2				1	1	1						
3	e	Keterlambatan atau wanprestasi vendor dalam pelaksanaan pekerjaan	System Monitoring (E-Monev) dapat menginformasikan proses tahapan dan penyerapan anggaran Investasi.	Rp 0,10	Penelitian dan Pengembangan	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1	1									
4	a	Perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BJPSDA oleh PJT I menjadi PNBP (PP 21/2023)	Laporan hasil pembahasan kajian	Rp -	Lainnya	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1										
4	a	Perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BJPSDA oleh PJT I menjadi PNBP (PP 21/2023)	Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang PNBP yang berasal dari BJPSDA yang dikelola BUMN/PJT I diterima secara formal oleh KPUPR	Rp -	Lainnya	BOD, BOD-1, BOD-2			1	1	1	1	1	1				
4	a	Perubahan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan BJPSDA oleh PJT I menjadi PNBP (PP 21/2023)	Hasil koordinasi dengan stakeholders terkait	Rp 0,30	Lainnya	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	a	Adanya keruntuhan bendungan akibat retakan di puncak bendungan dan kerusakan infrastruktur yang dipicu adanya kebocoran waterway PLTA Sutami atau kejadian gempa	Tidak terjadi keruntuhan bendungan	Rp 0,15	Penelitian dan Pengembangan	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1	1									
5	b	Piping (kebocoran) yaitu terjadinya rekahan di tubuh bendungan atau tumpuan bendungan yang menyebabkan mengalirnya air dari rekahan tersebut dalam jumlah besar	Tidak terjadi kebocoran dan kebocoran yang terjadi dapat diperbaiki/ditanggulangi	Rp 2,50	Penelitian dan Pengembangan	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1	1	1	1							
6	a	Belum terpenuhinya dokumen perijinan sehingga menghambat penyelesaian proyek	Perbaikan telaksana	Rp 0,03	Keuangan dan Akuntansi	BOD, BOD-1, BOD-2	1	1										

E. Pelaksanaan dan Monitoring Risiko

1. Struktur Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko melibatkan seluruh jajaran Perusahaan, mulai dari Dewan Pengawas, Direksi sampai unit-unit yang menjalankan kegiatan operasional. Divisi yang mempunyai fungsi manajemen risiko yaitu Divisi Manajemen Risiko (DMRK) sebagai koordinator penerapan manajemen risiko bertugas memetakan pembagian wewenang dan tanggung jawab kepada para pelaksana tersebut. Kedudukan dan struktur organisasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

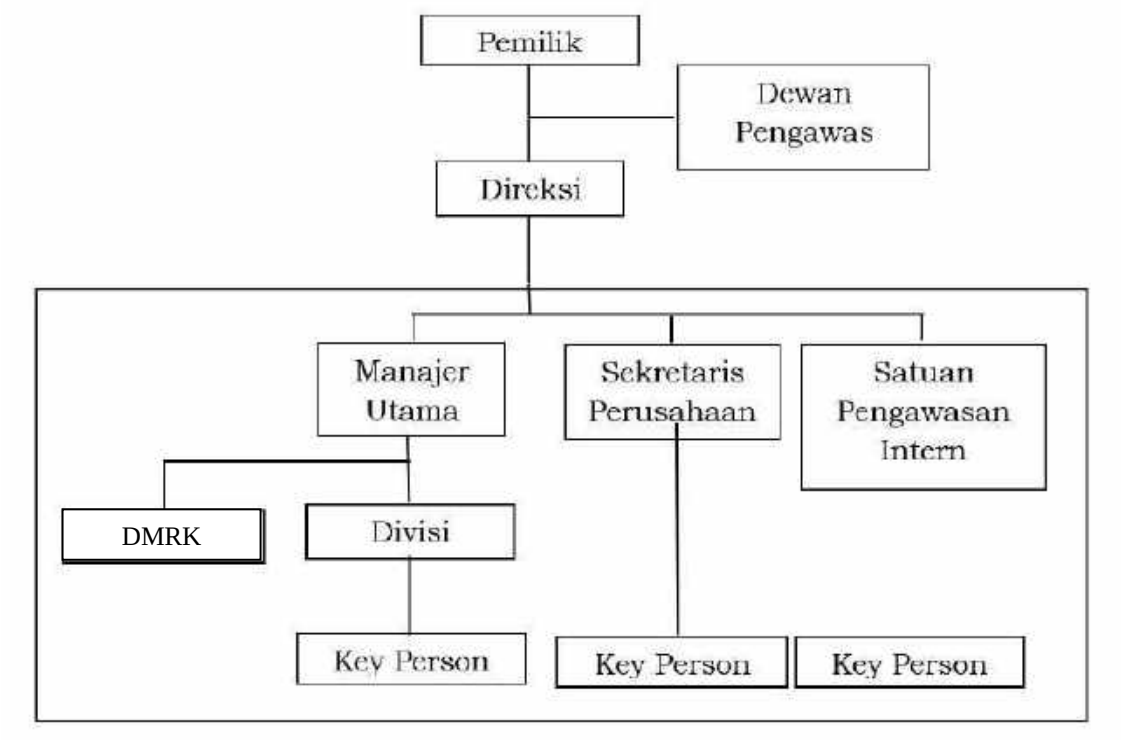

2. Klasifikasi Risiko Perusahaan

Sesuai surat Menteri BUMN nomor: S=491/MBU/09/2023 Tentang perihal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024 maka PJT I termasuk dalam BUMN Individu Sistemik B.

Nama Anak Perusahaan	Kriteria			
	Jumlah pendapatan dari Anak Perusahaan BUMN terkonsolidasi lebih besar atau sama dengan 20% dari pendapatan BUMN konglomerasi;	Memiliki investasi pada Anak Perusahaan BUMN dengan total investasi lebih besar atau sama dengan 5% dari modal BUMN konglomerasi;	Memiliki Anak Perusahaan BUMN dengan saham seri A; dan/atau	Dikategorikan sebagai BUMN konglomerasi oleh Menteri, otoritas dan/atau regulator terkait
Perum Jasa Tirta I	X	X	X	X
PT Jasa Tirta Energi	X	X	X	X

Pemetaan Klasifikasi Risiko BUMN berdasarkan Intensitas Risiko PJT I sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Ukuran BUMN	Kriteria Kompleksitas Tinggi					Kompleksitas BUMN	Klasifikasi
		Memiliki Peran dalam menjalankan kewajiban pelayanan umum (public service/obligasi)?	Memiliki hubungan kelembangaan strategis dengan kementerian teknis yang didefinisikan sebagai hubungan dimana kementerian teknis terlibat secara langsung maupun tidak langsung	Memiliki pangsa pasar dan potensi substitusi dari sector swasta dalam jangka pendek dan menengah sulit tergantikan	Memiliki struktur korporasi yang kompleks	Memiliki interkoneksi dengan BUMN dan/atau anak perusahaan lain		
PJT I	Kecil	√	√	√	X	√	Tinggi	Sistemik B
PT JTE	Kecil	X	X	X	X	X	Rendah	Netral

Hasil pementaan menunjukkan bahwa PJT I termasuk dalam kuadran klasifikasi **Sistemik B** (memiliki ukuran tidak besar dan kompleksitas tinggi), sedangkan untuk Anak Perusahaan masuk dalam kuadran **Netral** (ukuran tidak besar dan kompleksitas tidak tinggi).

Pemenuhan Kepatuhan Organ Pengelola Risiko PJT I sebagai BUMN Individu Sistemenik B dan PT JTE sebagai BUMN Individual Netral sebagai berikut:

Dalam penerapan Manajemen Risiko, PJT 1 telah mengadopsi model tata kelola risiko tiga lini (*three lines model*). Hal ini didukung oleh kelengkapan fungsi dan peran masing-masing lini yaitu:

a. Lini pertama sebagai unit pemilik risiko (Divisi Jasa Air dan Non Air)

b. Lini kedua sebagai fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan independent (Divisi Manajemen Risiko dan Kinerja)

c. Lini ketiga sebagai fungsi *independent assurance* (Satuan Pengawasan Intern)

3. Internal *Control Testing* dan *Stress Testing* Pencapaian Target RKAP

Perusahaan akan melakukan *internal control testing* dan *stress testing* untuk menguji kehandalan pengendalian internal dan sensitivitas pencapaian target RKAP sesuai dengan asumsi yang terdampak terhadap kecepatan perkembangan lingkungan bisnis.

4. Monitoring dan Penyesuaian Risiko Utama atas Internal Control Testing dan Stress Testing

Berdasarkan hasil pengujian *internal control testing* dan *stress testing* maupun faktor perubahan lainnya maka apabila diperlukan Perusahaan akan melakukan penyesuaian terhadap risiko utama perusahaan (*top risk*).

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko dan *Loss Event Database*

Perusahaan secara bertahap akan membangun sistem informasi manajemen risiko, dan *loss event database* termasuk melalui holding Danareksa, serta mengelola catatan kejadian kerugian.

6. Pelaporan Manajemen Risiko

Pelaporan manajemen risiko disusun berdasarkan ketentuan pada Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor: SK-7/DKU.MBU/10/2023.

F. Perencanaan Audit Intern Oleh SPI Sebagai Lini Ketiga Yang Berfungsi Sebagai *Independent Assurance*

1. Perencanaan audit atau Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) disusun berdasarkan risiko (risk based audit) yang dilakukan secara terintegrasi dalam tata kelola tiga lini (three lines model dan telah melalui pengumpulan serta analisis input yang berasal dari:

   a. Arahan Dari Direksi dan Komite Audit dan GCG selaku organ Dewan Pengawas;

      Yaitu arahan yang di peroleh dari Direksi dan Komite Audit dan GCG selaku organ Dewan Dewan Pengawas terkait dengan Rencana Pelaksanaan Audit Tahun 2024. Arahan-arahan tersebut adalah sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam kegiatan assurance dan consulting yang dilaksanakan oleh SPI.

   b. Sasaran dan strategi dalam rancangan RKAP;

      Yaitu melakukan pengisian tentang summary informasi sasaran dan strategi pada RKAP Perum Jasa Tirta I Tahun 2024.

   c. Daftar Peraturan (Regulasi) dan Ketentuan Sektoral

      Yaitu melakukan pengisian daftar peraturan atau regulasi yang harus dipenuhi oleh Perum Jasa Tirta I.

d. Temuan audit tahun sebelumnya;

Yaitu melakukan pengisian tentang temuan tahun sebelumnya (2022 - Okt 2023) dan tindak lanjut rekomendasi baik audit internal (SPI) maupun audit eksternal (BPK dan KAP).

e. Profil risiko BUMN;

Yaitu melakukan pengisian tentang profil risiko perusahaan dan anak perusahaan.

f. Data lain yang relevan.

Yaitu melakukan pengisian data lain yang relevan.

2. PKPT memuat informasi paling sedikit:

a. Jenis penugasan (audit operasional, audit kepatuhan, audit mandatory oleh Direktur Utama dan regulator (bila ada), audit anak perusahaan atas izin Direktur Utama selaku Perwakilan Pemilik Saham);

b. Subjek audit;

Yang menjadi subyek audit adalah unit kerja yang malaksanakan kegiatan operasional yang berpengaruh atas pencapaian tujuan perusahaan.

- Divisi Jasa Air & Sumber Air I sampai dengan V
- Divisi Akuntansi dan Keuangan
- Divisi Manajemen Risiko dan Kinerja
- Sekretaris Perusahaan
- Divisi Sumber Daya Manusia
- Divisi Pengadaan, Kearsipan, dan Umum
- Divisi Perencanaan Korporat
- Divisi Operasional Bisnis
- Divisi Pengembangan Bisnis
- Divisi Teknologi Informasi
- PT Jasa Tirta Energi (bila ada penugasan dari Direktur Utama)

c. Objek audit,

Yang menjadi obyek audit adalah rangkaian kegiatan yang dikelola oleh unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

- Obyek audit dalam audit operasional adalah audit pada proses kegiatan yang sistematis untuk menilai efektivitas unit kerja, efisiensi dan ekonomi operasi di bawah pengendalian unit kerja. Kemudian laporan audit disampaikan kepada kepala unit kerja untuk disepakati bersama dengan disertai rekomendasi untuk perbaikan.

- Obyek audit dalam audit keuangan adalah audit pada proses penyusun laporan keuangan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja apakah sesuai dengan aturan dan standar akuntansi yang berlaku.
- Obyek audit dalam audit kepatuhan adalah audit yang menentukan apakah unit-unit kerja telah mengikuti prosedur dan aturan tertentu yang telah ditetapkan baik oleh perusahaan maupun aturan sektoral.
- Obyek Audit dalam audit dengan metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko yang ada pada seluruh unit kerja sudah dikelola dengan baik serta ada batasan yang telah ditetapkan manajemen yang tidak berdampak terhadap tujuan perusahaan.

d. Ruang lingkup audit;

Yaitu audit keuangan, operasional, kapatuhan atas pengelolaan mitigasi risiko dan audit khsus (bila ada).

e. Sumber daya yang digunakan;

Yaitu biaya yang dibutuhkan, SDM atau auditor yang dibutuhkan, dan waktu yang tersedia untuk audit.

- Jumlah auditor yang dibutuhkan berjumlah 4 (empat) orang dengan kualifikasi berlatar pendidikan teknis dan keuangan;
- Untuk melaksanakan audit di seluruh unit kerja membutuhkan waktu selama 9 bulan.

f. Jadwal audit.

Jadwal yang diperlukan untuk pelaksanaan audit adalah selama 12 (dua belas) bulan termasuk di dalamnya adalah penguatan SDM, pendampingan audit eksternal dan kegiatan-kegiatan lain atas permintaan Direksi atau regulator.

1) Audit Operasional, keuangan, kepatuhan dan risiko

- Unit yang melaksanakan kegiatan operasional yang terkait dengan perencanaan, monitoring, evaluasi, pengembangan SDM dan pengadaan barang dan jasa dalam hal ini Divisi Perencanaan Korporat, Divisi Risiko dan Manajemen Kinerja, Divisi Pengembangan Bisnis, Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi Pengadaan, Kearsipan, dan Umum direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April 2024. Sebagai tambahan informasi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2024 SPI juga melaksanakan pendampingan audit laporan keuangan tahun buku 2023 oleh KAP.
- Unit yang melaksanakan kegiatan operasional yang terkait dengan pendapatan baik Jasa Air dan Non Air, pengembangan IT dan pengelolaan keuangan dalam hal ini Divisi Operasional Bisnis, Divisi Jasa Air dan Sumber Air I s.d V, Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Akuntansi dan Keuangan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2024.

2) Kegiatan Pendampingan KAP, penguatan Sumber Daya Manusia dan Audit Khusus (bila ada) serta Audit Anak Perusahaan (bila ada permintaan dari Direktur Utama) direncanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2024.

3. Perencanaan audit terintegrasi adalah audit mencakup penyelarasan dengan perencanaan audit anak perusahaan secara terintegrasi yang tidak terbatas pada penentuan strategi pelaksanaan audit dan perumusan prinsip audit serta metodologi langkah pelaksanaan pengendalian mutu audit. Adapun pelaksanaan audit anak perusahaan dilakukan atas dasar permintaan atas seizin dari pemilik saham.

4. Hal-hal tersebut di atas telah dituangkan dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum Jasa Tirta I Nomor: 0003/PRT/DRUT/III/2020 Tentang Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) Di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I.

BAB VII
ASPIRASI PEMEGANG SAHAM

A. *Key Performance Indicators*

Key Performance Indicators (KPI) disusun dengan tujuan untuk memastikan pencapaian sasaran-sasaran strategi Perusahaan, meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja, memastikan Perusahaan beroperasi pada batas koridor toleransi risiko yang ditetapkan sebelumnya, mengoptimalkan upaya kapitalisasi potensi Perusahaan, mengakselerasi pertumbuhan kinerja Perusahaan dan menilai kinerja Direksi Perusahaan secara adil (fair). Penentuan variabel KPI yang sudah teridentifikasi dikelompokkan ke dalam 5 (lima) perspektif penilaian kinerja dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan berdasarkan surat Aspirasi Pemegang Saham (APS) Nomor: S-491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023 perihal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP Tahun 2024, KPI terpilih Perum Jasa Tirta I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	PARAMETER KPI	ESGC	Satuan	Target RKAP 2024	Polaritas	Bobot	
						Sub	Total
I	**NILAI EKONOMI & SOSIAL UNTUK INDONESIA**						**50,0**
I.1	**FINANSIAL**						
	1. EBITDA	C	Rp miliar	133,90	*Maximize*	8,0	
	2. *Cash From Operation* (CFO)	C	Rp miliar	179,28	*Maximize*	7,0	
	3. *Net Profit Margin*	C	%	9,08	*Maximize*	7,0	
I.2	**OPERASIONAL**						
	1. *Assessment River Basin Organization* (RBO)	G		3,8	*Maximize*	5,0	
	2. Kinerja Sistem Keamanan Bendungan	G	%	91,92	*Maximize*	6,0	
	3. Proses Penerbitan Jumlah Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA)	G	Jumlah	11	*Maximize*	5,0	
I.3	**SOSIAL**						
	1. Penyaluran Air Baku untuk Irigasi	E	Juta m^3	2.759,00	*Maximize*	6,0	
	2. Realisasi Biaya untuk Kegiatan Konservasi	E	Rp miliar	20,23	*Maximize*	6,0	
II	**INOVASI MODEL BISNIS**						**15,0**
	1. Optimalisasi Aset SPAM	C	Rp miliar	2,69	*Maximize*	5,0	
	2. Optimalisasi Aset Tidak Produktif	C	%	29,85	*Maximize*	5,0	
	3. Implementasi *Roadmap* Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	C	%	100,00	*Maximize*	5,0	

NO.	PARAMETER KPI	ESGC	Satuan	Target RKAP 2024	Polaritas	Bobot	
						Sub	Total
III	**KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI**						**13,0**
	1. Implementasi ERP	G	Waktu	TW IV	*Minimize*	7,0	
	2. Standarisasi dan Optimalisasi *Water Meter*	G	Jumlah	5	*Minimize*	6,0	
IV.	**PENINGKATAN INVESTASI**						**12,0**
	1. Prosentase Penyerapan Investasi	C	Rp Miliar	205,80	*Maximize*	6,0	
	2. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air	C	Waktu	TW IV	*Maximize*	6,0	
V	**PENGEMBANGAN TALENTA**						**10,0**
	1. Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent*	S	%	10	*Maximize*	3,0	
	2. Rasio Talenta Muda (<= 42 tahun) dalam *Nominated Talent*	S	%	10	*Maximize*	3,0	
	3. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	S	%	90,0	*Maximize*	4,0	
Total Bobot							**100,0**

Skor penilaian KPI tahun 2024 diproyeksikan sebagai berikut:

a. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia= 50,0

b. Inovasi Model Bisnis = 15,0

c. Kepemimpinan Teknologi = 13,0

d. Peningkatan Investasi = 12,0

e. Pengembangan Talenta = 10,0

Total 100,0

Glossary KPI Perum Jasa Tirta I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

I. Perspektif Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia

I.1. Aspek Financial / 1. EBITDA	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
Nama KPI	**EBITDA**			
Definisi KPI	Indikator yang menggambarkan kemampuan laba dari aktivitas operasional Perusahaan berikut dengan memperhitungkan beban depresiasi / amortisasi / deplesi /keuntungan (rugi) transaksi forex/pendapatan dari entitas asosiasi dan JV			
Tujuan KPI	Tercapainya target Nilai EBITDA yang lebih baik dari tahun sebelumnya			
Satuan yang Digunakan	Rp miliar			
Formula Penilaian	EBITDA: *Operating Income + Depreciation Expenses + Amortization Expenses +Gain/ (Loss) on Forex + Income from Associated Entities and Joint Venture* *Operating Income=(revenue – Cost of Goods Sold – Operating Expenses=* (Pendapatan Usaha – Beban Usaha)			
Target	**133.90**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	70,74	85,66	79,56	133.90
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Keuangan Triwulanann dan Audited Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

I.1. Aspek Financial / 2. Cash From Operation	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
Nama KPI	**Cash From Operation**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional perusahaan			
Tujuann KPI	Tercapainya target Nilai CFO yang lebih baik dari tahun sebelumnya.			
Satuan yang Digunakan	Rp Miliar			
Formula Penilaian	CFO : Total Penerimaan Kas dan Setara Kas dari kegiatan operasi - Total Pengeluaran Kas dan Setara Kas dari kegiatan operasi			
Target	**179,28**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	69,80	89,49	111,75	179,28
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Keuangan Triwulanann dan Audited Tahunan			
Jenis Pengukuran	Take Last Known			

I.1. Aspek Financial/ 3. Net Profit Margin	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
Nama KPI	***Net Profit Margin***			
Definisi KPI	Indikator yang mengukur profitabilitas perusahaan dari pendapatan operasi dan non-operasi setelah memperhitungkan seluruh biaya dan pajak pada tahun berjalan			
Tujuan KPI	Mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam rangka mencapai laba yang ditargetkan			
Satuan yang Digunakan	%			
Formula Penilaian	Net Profit Margin = Laba Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan Usaha • Laba Bersih Tahun Berjalan = Total pendapatan dikurangi *cost of good sold*, pendapatan dan biaya operasi, pendapatan dan biaya non-operasi, serta pajak, pada tahun berjalan • Pendapatan Usaha = Pendapatan SDA + Pendapatan Non SDA			
Target	**9,08**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	26,17	13,77	7,11	9,08
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Keuangan Triwulanann dan Audited Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

I.2. Aspek Operasional/ 1. Assessment River Basin Organization (RBO)	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA
Nama KPI	**Assessment River Basin Organization (RBO)**
Definisi KPI	Indikator untuk mengukur kinerja RBO (BBWS, BWS, BPSDA, PJT) yang digunakan oleh Kementerian PUPR untuk menggambarkan kinerja dalam penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di wilayah sungai yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, keterpaduan pengelolaan SDA, serta berupaya dalam melaksanakan kinerja berbasis hasil (output) untuk terwujudnya manfaat (outcome) yang bisa dirasakan oleh pengguna SDA.
Tujuan KPI	Mengetahui pencapaian kinerja *River Basin Oganization Performance Benchmarking* (RBO-PB) yang mencerminkan upaya perwujudan pelayanan pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan melalui perolehan capaian skor RBO-PB
Satuan yang Digunakan	Skor

I.2. Aspek Operasional/ 1. Assessment River Basin Organization (RBO)	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
Formula Penilaian	Capaian Skor Akhir RBO Indeks Bidang penilain kinerja kritis dalam RBO-PB 1. Misi dan Strategi			
	2. Pemilik Kepentingan 3. Pembelajaran dan Pertumbuhan 4. Tata Kelola Internal Organisasi 5. Keuangan Capaian: 1. Nilai RBO indeks = > 100% : Baik, Skor 110 2. Nilai RBO indeks = 90% < x < 100% : Baik (100%) 3. Nilai RBO indeks = 80% < x < 90% : Cukup (90%) 4. Nilai RBO indeks = 60% < x < 80% : Kurang (80%) 5. Nilai RBO indeks = < 60% : Buruk (60%)			
Target	**3.80**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	-	-	-	3.80
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Skor Pelaksanaan Assessment RBO-PB dari Kementerian PUPR			
Jenis Pengukuran	Take Last Known			

I.2. Aspek Operasional/ 2. Kinerja Sistem Keamanan Bendungan	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA
Nama KPI	**Kinerja Sistem Keamanan Bendungan**
Definisi KPI	Indikator yang menggambarkan kinerja sistem keamanan bendungan dari hasil monitoring terhadap instrumentasi bendungan, pelaksanaan inspeksi dan kondisi waduk. Bendungan yang dinilai adalah 8 (delapan) bendungan besar di Wilayah Sungai Kali Brantas dan Wilayah Sungai Bengawan Solo.
Tujuan KPI	Mengukur kinerja bendungan dari parameter penilaian yang telah ditetapkan
Satuan yang Digunakan	Skor
Formula Penilaian	Formula : Average hasil penilaian kinerja sistem keamanan bendungan Komponen penilain kinerja keamanan bendungan:

I.2. Aspek Operasional/ 2. Kinerja Sistem Keamanan Bendungan	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
	1. Hasil Pengamatan Instrumentasi, terdiri dari parameter kecukupan jumlah, kondisi alat, hasil pengamatan dan pelaporan 2. Inspeksi, terdiri dari pelaksanaan, pelaporan dan monitoring tindak lanjut			
	3. Kondisi Waduk, terdiri dari kualitas air waduk (pengukuran dan pelaporan) dan kebersihan waduk (vegetasi dan sampah waduk) Capaian: 1. rerata penilaian kinerja bendungan = 80% ≤ x < 100 %: Baik, Skor 110 2. rerata penilaian kinerja bendungan = 70% ≤ x < 80 % : Cukup, Skor 100 3. rerata penilaian kinerja bendungan = 55% ≤ x < 70 %: Kurang, Skor 80 4. rerata penilaian kinerja bendungan = x < 55% : Buruk, Skor 60			
Target	**91,92**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	91,78	91,84	91,88	91,92
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Keamanan Bendungan			
Jenis Pengukuran	Sum			

I.2. Aspek Operasional/ 3. Proses Penerbitan Jumlah Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA)	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA
Nama KPI	**Proses Penerbitan Jumlah Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA)**
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan potensi penambahan pemanfaat yang memiliki SIPSDA (termasuk pemanfaat yang memperpanjang atau memperbaharui SIPSDA) di wilayah kerja PJT I
Tujuan KPI	Penambahan jumlah pemanfaat yang memiliki SIPSDA hidup
Satuan yang Digunakan	Jumlah
Formula Penilaian	Formula : Realisasi jumlah pemanfaat yang memiliki SIPSDA hidup terhadap target pemanfaat yang memiliki SIPSDA hidup Capaian: 1. Realisasi % capaian = > 100% : Baik sekali (110%) 2. Realisasi % capaian = 90% ≤ x ≤ 100% : Baik (100%)

I.2. Aspek Operasional/ 3. Proses Penerbitan Jumlah Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA)	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
	3. Realisasi % capaian = 80% ≤ x < 90% : Cukup (90%) 4. Realisasi % capaian = 60% ≤ x < 80% : Kurang (80%)			
	5. Realisasi % capaian = < 60% : Buruk (60%)			
Target	**11**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
		1	6	11
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

I.3. Aspek Sosial / 1. Penyaluran Air Baku Irigasi	NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA			
Nama KPI	**Penyaluran Air Baku Irigasi**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan volume layanan alokasi air baku untuk irigasi pada Wilayah Sungai Brantas dan Wilayah Sungai Bengawan Solo			
Tujuan KPI	Tercapainya pelayanan air irigasi teknis pada Wilayah Sungai Brantas dan Wilayah Sungai Bengawan Solo minimal sesuai yang ditargetkan			
Satuan yang Digunakan	Juta m^3			
Formula Penilaian	(Realisasi volume alokasi air irigasi tahunan) / (Target volume alokasi air irigasi tahunan) x 100% Capaian: 1. Realisasi % capaian = > 100% : Baik sekali (110%) 2. Realisasi % capaian = 90% ≤ x ≤ 100% : Baik (100%) 3. Realisasi % capaian = 80% ≤ x < 90% : Cukup (90%) 4. Realisasi % capaian = 60% ≤ x < 80% : Kurang (80%) 5. Realisasi % capaian = < 60% : Buruk (60%)			
Target	**2.759**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	0.807	1.676	2.325	2.759
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			

Sumber Data	Laporan Layanan Irigasi dan Laporan Manajemen Bulanan
Jenis Pengukuran	Sum

I.3. Aspek Sosial / 2. Realisasi Biaya untuk Kegiatan Konservasi	**NILAI EKONOMI DAN SOSIAL UNTUK INDONESIA**			
Nama KPI	**Realisasi Biaya untuk Kegiatan Konservasi**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan kinerja Perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan konservasi SDA (penghijauan, sipil teknis & sosialisasi)			
Tujuan KPI	Ketercapaian pelaksanaan konservasi minimal sesuai yang telah ditargetkan			
Satuan yang Digunakan	Rp Miliar			
Formula Penilaian	Formula = Realisasi Biaya Kegiatan Konservasi mencapai 90% dari total anggaran kegiatan konservasi Capaian = 1. realisasi = 90% ≤ x < 100% target: Skor 110% 2. realisasi = 80% ≤ x < 90% target: Skor 100% 3. realisasi = 70% ≤ x < 80% target: Skor 90% 4. realisasi = 60% ≤ x < 70% target: Skor 80% 5. realisasi = < 60% target: Skor 60%			
Target	**20.23**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	3.57	7.91	12.59	20.23
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen Perusahaan dan Laporan Kegiatan Konservasi			
Jenis Pengukuran	Sum			

II. Perspektif Inovasi Model Bisnis

1. Optimalisasi Aset SPAM	**INOVASI MODEL BISNIS**
Nama KPI	**Optimalisasi Aset SPAM**
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan peningkatan laba SPAM dengan pengoptimalan pengusahaan SPAM
Tujuan KPI	Pencapaian laba SPAM sesuai target yang lebih baik dari tahun sebelumnya
Satuan yang Digunakan	Rp Miliar
Formula Penilaian	Formula : realisasi pencapaian laba SPAM terhadap target Capaian: 1. realisasi > 100% target: Skor 110%

1. Optimalisasi Aset SPAM	INOVASI MODEL BISNIS			
	2. realisasi = 90% < x <= 100 target: Skor 100% 3. realisasi = 80% < x <= 90% target: Skor 90%			
	4. realisasi = 60% < x <= 80% target: Skor 80% 5. realisasi = < 60% target: Skor 60%			
Target	**2.69**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	0.08	0.50	1.11	2.69
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Direktorat Operasional			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

2. Optimalisasi Aset Tidak Produktif	INOVASI MODEL BISNIS			
Nama KPI	**Optimalisasi Aset Tidak Produktif**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan kinerja peningkatan pendapatan dari pengusahaan aset yang dimiliki atau dikelola oleh Perusahaan (pendapatan dari pemanfaatan lahan dan bangunan, pendapatan penyediaan data, dan pendapatan sewa peralatan). Pendapatan pemanfaatan lahan/bangunan/sewa peralatan yang digunakan yaitu pendapatan atas masa sewa selama tahun berjalan.			
Tujuan KPI	Pertumbuhan pendapatan dari pengusahaan aset yang lebih baik dari tahun sebelumnya			
Satuan yang Digunakan	%			
Formula Penilaian	% pertumbuhan pendapatan dari periode tahun sebelumnya Capaian: 1. realisasi > 100% target: Skor 110% 2. realisasi = 90% < x <= 100 target: Skor 100% 3. realisasi = 80% < x <= 90% target: Skor 90% 4. realisasi = 60% < x <= 80% target: Skor 80% 5. realisasi = < 60% target: Skor 60%			
Target	**29,85**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	75.08	188.96	3.50	29.85
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			

2. Optimalisasi Aset Tidak Produktif	INOVASI MODEL BISNIS
Sumber Data	Laporan Tahunan
Jenis Pengukuran	Sum

3. Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	INOVASI MODEL BISNIS			
Nama KPI	**Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan kinerja pemenuhan gap (kesenjangan) penerapan manajemen risiko berdasarkan rekomendasi yang diperoleh dari hasil penilaian indeks kematangan risiko (risk maturity index) yang dilaksanakan tahun 2023			
Tujuan KPI	Perbaikan penerapan manajemen risiko			
Satuan yang Digunakan	%			
Formula	(Jumlah program yang dilaksanakan tahun 2024 / Total program roadmap perbaikan penerapan manajemen risiko) x 100% Capaian: 1. realisasi = 100% target: Skor 110% 2. realisasi = 90% < x < 100 target: Skor 100% 3. realisasi = 80% < x <= 90% target: Skor 90% 4. realisasi = 60% < x <= 80% target: Skor 80% 5. realisasi = < 60% target: Skor 60%			
Target	**100**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	-	-	100	100
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Tahunan, Laporan Hasil RMI dan Laporan Manajemen Risiko			
Jenis Pengukuran	Take Last Known			

III. Perspektif Kepemimpinan Teknologi

1. Implementasi ERP Danareksa	KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI
Nama KPI	**Implementasi ERP**
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan implementasi konfigurasi sistem ERP pada environment *Quality Assurance System* (QAS) yang mendukung restrukturisasi PJT I sebagai Mitra Instansi Pengelola (MIP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

1. Implementasi ERP Danareksa	KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI			
Tujuan KPI	Memastikan kesiapan sistem ERP terhadap restrukturisasi perusahaan sebagai MIP PNBP			
Satuan yang Digunakan	Waktu			
Formula Penilaian	Konfigurasi baru telah terimplementasi di Environment QAS: 1. Realisasi lebih cepat dari target, pencapaian = 110% 2. Realisasi sama dengan target, pencapaian = 100% 3. Realisasi lebih lambat dari target, pencapaian = 90%			
Target	**Triwulan IV**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	-	-	-	1
Frekuensi	Tahunan			
Polaritas	*Minimize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelola Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen			
Jenis Pengukuran	Sum			

2. Standardisasi dan Optimalisasi Water Meter	KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI			
Nama KPI	**Standardisasi dan Optimalisasi Water Meter**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan pengembangan integrasi pemasangan intake water meter yang terhubung dengan dashboard Smart Water Management System (SWMS)			
Tujuan KPI	Memantau jumlah konsumsi air secara akurat guna mendukung proses bisnis Perusahaan			
Satuan yang Digunakan	Jumlah			
Formula Penilaian	Realisasi jumlah water meter terhadap target jumlah water meter			
Target	**5**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	-	-	2	5
Frekuensi	Tahunan			
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelola Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen			
Jenis Pengukuran	Sum			

IV. Perspektif Peningkatan Investasi

1.Prosentase Penyerapan Investasi	PENINGKATAN INVESTASI			
Nama KPI	**Prosentase Penyerapan Investasi**			
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan penyerapan investasi dalam upaya peningkatan pendapatan dan penunjang operasional perusahaan, serta pelayanan kepada Pengguna Sumber Daya Air			
Tujuan KPI	Meningkatkan perbaikan sarana dan prasarana serta infrastruktur dan aset investasi dalam upaya peningkatan pendapatan dan penunjang operasional perusahaan, serta pelayanan kepada Pengguna Sumber Daya Air			
Satuan yang Digunakan	Rp Miliar			
Formula Penilaian	Realisasi progress/penyerapan fisik investasi mencapai 50% dari total anggaran investasi Capaian: 1. realisasi > 100% dari target: Baik sekali (110%) 2. realisasi = 90% ≤ x ≤ 100% target: Baik (100%) 3. realisasi = 80% ≤ x < 90% target: Cukup (90%) 4. realisasi = 60% ≤ x < 80% target: Kurang (80%) 5. realisasi = < 60% target: Buruk (60%)			
Target	**205.80**			
	Triwulan I	**Triwulan II**	**Triwulan III**	**Tahunan**
	55,97	101,39	169,09	205.80
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktur Keuangan, Pengelola Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

2. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air	PENINGKATAN INVESTASI
Nama KPI	**Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air**
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan pengembangan (integrasi) aplikasi/sistem informasi otomatisasi operasional pintu air (1 pilot project)
Tujuan KPI	Memantau operasi pintu air secara jarak jauh
Satuan yang Digunakan	Waktu
Formula Penilaian	Go Live Aplikasi/Sistem Informasi 1. Realisasi lebih cepat dari target, pencapaian = 110% 2. Realisasi sama dengan target, pencapaian = 100% 3. Realisasi lebih lambat dari target, pencapaian = 90%

2. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air	PENINGKATAN INVESTASI			
Target	**Triwulan IV**			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				1
Frekuensi	Tahunan			
Polaritas	*Minimize*			
Penanggung Jawab KPI	Direktorat Keuangan, Pengelola Sumber Daya dan Manajemen RIsiko			
Pengolah Data KPI	Direktorat Keuangan, Pengelola Sumber Daya dan Manajemen RIsiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen Tahunan			
Jenis Pengukuran	Sum			

V. Perspektif Pengembangan Talenta

1. Rasio Perempuan dalam Nominated Talent	PENGEMBANGAN TALENTA			
Nama KPI	**Rasio Talenta Perempuan dalam Nominated Talent**			
Definisi KPI	Jumlah talenta perempuan yang masuk dalam nominasi talenta untuk mendorong adanya talent perempuan dalam manajemen. Talenta perempuan yang dimaksud adalah BOD-1 perempuan dalam Nominated Talent BUMN yang diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Cluster Talent Commitee			
Tujuan KPI	Mempersiapkan talenta-talenta terbaik dari perusahaan dalam menciptakan SDM unggul dan professional, termasuk ketersediaan talenta Perempuan dalam nominasi talenta			
Satuan yang digunakan	%			
Formula Penilaian	(Jumlah Nominasi Talenta Wanita/Jumlah Nominasi Talenta) x 100%			
Target	**10**			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				10
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Talent pool			
Jenis Pengukuran	Take last known			

2. Rasio Top Talenta Muda (<= 42 tahun) dalam Nominated Talent	PENGEMBANGAN TALENTA
Nama KPI	**Rasio Talenta Muda (<= 42 tahun) dalam Nominated Talent**

2. Rasio Top Talenta Muda (<= 42 tahun) dalam Nominated Talent	PENGEMBANGAN TALENTA			
Definisi KPI	Jumlah talenta muda yang masuk dalam nominasi talenta untuk mendorong talenta muda dalam manajemen. Talenta muda yang dimaksud adalah BOD-1 usia ≤ 42 tahun dalam Nominated Talent BUMN yang diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Cluster Talent Commitee			
Tujuan KPI	Mempersiapkan talenta-talenta terbaik dari perusahaan dalam menciptakan SDM unggul dan professional, termasuk ketersediaan talenta Muda (≤42 tahun) dalam nominasi talenta			
Satuan yang digunakan	%			
Formula Penilaian	(Jumlah Nominasi Talenta Muda / Jumlah Nominasi Talenta) x 100%			
Target	**10**			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
				10
Polaritas	*Maximize*			
Penangguna Jawab KPI	Seluruh Direktorat			
Pengolah Data KPI	Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Talent Pool			
Jenis Pengukuran	Take last known			

3. Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko	PENGEMBANGAN TALENTA
Nama KPI	**Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko**
Definisi KPI	Indikator yang menunjukkan Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko meliputi: Dewan Pengawas, Direksi, Anggota Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko, Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, Kepala dan seluruh anggota Unit Manajemen Risiko, Kepala dan seluruh anggota SPI
Tujuan KPI	Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko, sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023
Satuan yang digunakan	%
Formula Penilaian	Pengukuran Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi) menggunakan formulasi di bawah ini: (Jumlah personil organ pengelola risiko yang memenuhi kualifikasi/Total jumlah personil organ pengelola risiko) X 100% Capaian: 1. Realisasi : =100% : Baik sekali (110%) 2. Realisasi : 90% <= x < 100% : Baik (100%)

3. Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko	PENGEMBANGAN TALENTA			
	3. Realisasi : 80% <= x < 90% : Cukup (90%) 4. Realisasi : 60% <= x < 80% : Kurang (80%) 5. Realisasi : < 60% : Buruk (60%)			
Target	**90**			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	15	40	75	90
Polaritas	*Maximize*			
Penanggung Jawab KPI	Direktorat Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Pengolah Data KPI	Direktorat Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko			
Sumber Data	Laporan Manajemen			
Jenis Pengukuran	Sum			

B. Peninjauan Pemenuhan Prasyarat Administrasi APS

Arahan taktis yang tertuang dalam APS untuk klaster pengelolaan sumber daya air antara lain:

1. Meningkatkan kapabilitas korporasi dalam pengelolaan proyek
2. Meningkatkan utilisasi pendanaan alternatif melalui IWF untuk percepatan perluasan cakupan SPAM
3. Meningkatkan pendapatan Non SDA melalui pengembangan bisnis kepada anak perusahaan PT JTE.
4. Penyusunan *roadmap* pengembangan Energi baru Terbarukan (EBT) dengan penjelasan sebagai berikut.

   Roadmap pengembangan EBT khususnya melalui optimalisasi aset di Wilayah Kerja PJT I diantaranya pada PLTS Apung Waduk Wonogiri, Kedungombo dan Sutami. Proyek PLTS Apung Waduk dilakukan sebagai dukungan PJT I terhadap komitmen Pemerintah dalam program *Clean Energy* yang dirupakan dalam bentuk transformasi energi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Terdapat tiga lokasi kegiatan yaitu Waduk Wonogiri Jawa Tengah, Waduk Kedungombo Jawa Tengah dan Waduk Sutami Jawa Timur.

   Proyek PLTS Apung masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Rencana kapasitas masing-masing sebesar 100MWac. Pelaksanaan proyek PLTS Apung Wonogiri dan Kedungombo menggunakan skema *Independent Power Producers* (IPP) dari PLN IP dengan pembentukan *Special Purpose Company* (SPC). PJT I sebagai pengelola Waduk akan menjadi *Mandatory Partner.*

Proyek ini terdiri dari tahap Pra-Konstruksi dan Konstruksi. Tahap Pra-Konstruksi meliputi kegiatan persiapan Studi Kelayakan, persiapan AMDAL/ESIA, negosiasi dan penandatanganan PPA, tender EPC, keuangan hingga financial close. Sedangkan tahap Konstruksi meliputi pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh kontraktor EPC untuk keseluruhan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) termasuk pekerjaan perluasan gardu induk berdasarkan perjanjian fasilitas khusus dengan PLN.

Bagi PJT I, pengembangan PLTS Apung di waduk dapat menjadi portofolio bisnis perusahaan dalam bidang bisnis non SDA khususnya EBT, Menjadi pengembangan bisnis yang dapat menambah pendapatan perusahaan, Mendukung komitmen pemerintah dalam program *Clean Energy* yang dirupakan dalam bentuk transformasi energi Indonesia menuju energi baru dan terbarukan.

Kelayakan finansial proyek ditampilkan sebagai berikut:

	SUTAMI	WONOGIRI	KEDUNGOMBO
Project Cost	USD 111.166.787	USD 90.990.000	USD 96.500.000
Equity IRR	12%	11%	11%
Capital Structure	DER 80%:20%	DER 70%:30%	DER 70%:30%
% Ownership PJT I	up to 5%	up to 5%	up to 5%
Investment Period	PPA 25 years	30 years	25 years
Annual Energy	222 GWH	238.2 GWH	219,9 GWH

Skema Investasi proyek disampaikan sebagaimana berikut:

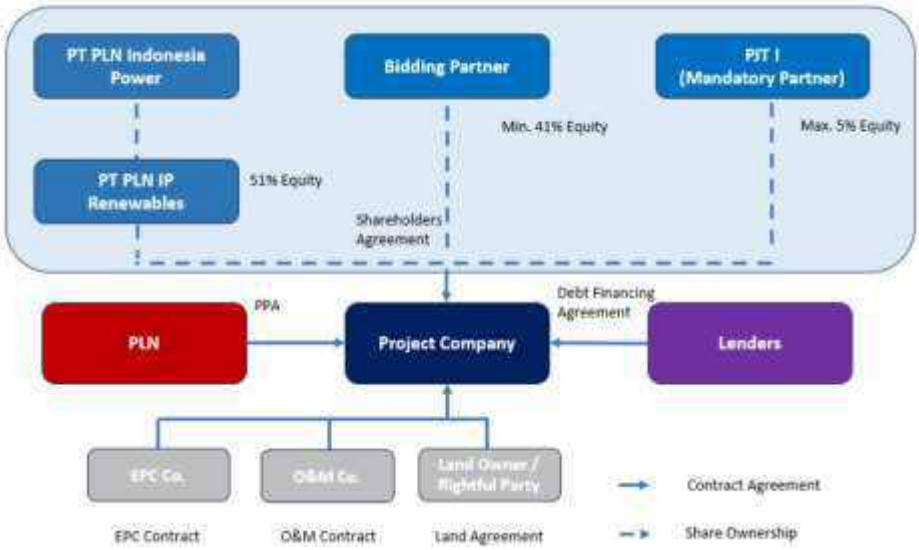

Timeline PLTS Apung Sutami

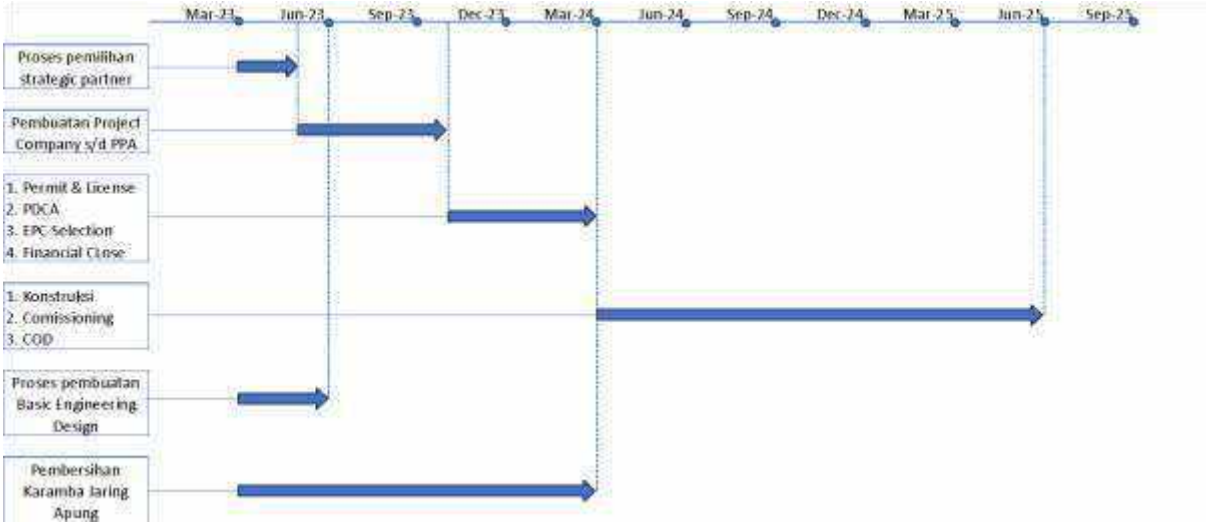

Timeline PLTS Apung Wonogiri dan Kedungombo

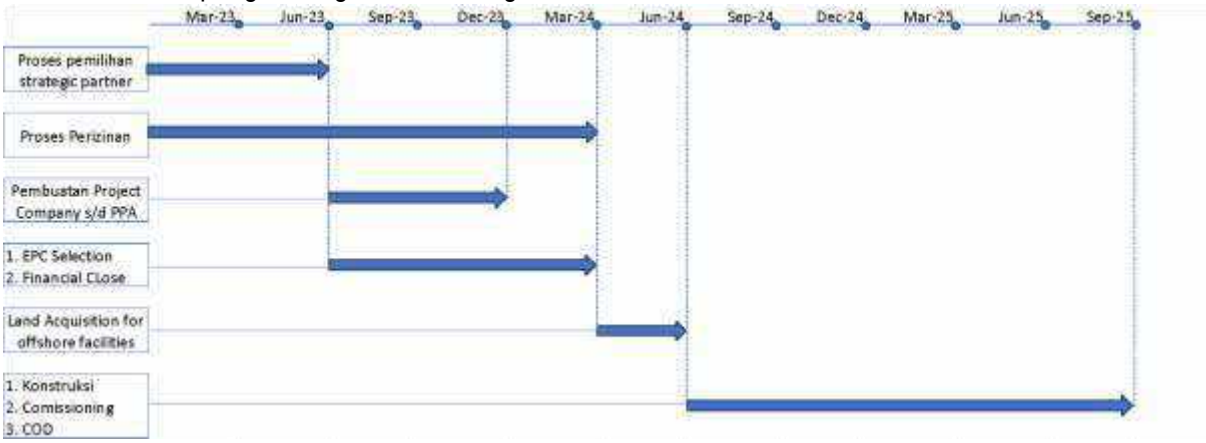

Sebagaimana skema Investasi proyek yang telah disampaikan sebelumnya, PJT I bersama pemenang lelang dan Anak Perusahaan PLN akan membentuk Project Company untuk mengembangkan PLTS Apung. Dalam prosesnya, akan dilakukan proses penyertaan yang pada tahapannya akan melalui persetujuan Menteri BUMN sebagai Pemilik modal.

Pada tahun 2024, seluruh proyek masuk dalam tahap financial close sehingga proses penyertaan selesai di tahun 2024 dengan nilai sebagai berikut:

(x Rp 1000)

	Sutami	Kedungombo	Wonogiri
Total Project Cost	1.588.000.000	1.340.000.000	1.417.000.000
Equity = (30% Equity) x (5% share) x TPC	23.820.000	20.100.000	21.255.000

Catatan: *(Kurs Rp 14.400/USD)*

Pemenuhan APS sebagai berikut:

1. **Fungsi Sumber Daya Manusia**
   a. Dalam rangka upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja secara berkelanjutan, PJT I menargetkan produktivitas Karyawan pada tahun 2024 lebih tinggi daripada tahun 2023. Untuk itu PJT I akan berupaya untuk mencapai target pendapatan usaha yang ditetapkan dalam RKAP 2024.
   b. Pengembangan Talenta Penerapan Manajemen Talenta di PJT I telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 0002/PRT/DRUT/III/2021 tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Perusahaan Umum Jasa Tirta I. Manajemen Talenta di PJT I bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada talenta terbaik Perusahaan dalam mempersiapkan kesinambungan suksesi kepemimpinan di lingkungan Perusahaan. Pelaksanaan manajemen talenta menyangkut hal-hal seperti berikut: *Talent Development*, *Career Path*, *Job Grading*, *Performance Management*.
   c. PJT I melaksanakan Program Perputaran Talenta (*Talent Mobility*) pada Induk dan Anak Perusahaan dan akan mengutamakan talenta-talenta terbaik untuk diikutsertakan dalam program perputaran talenta tesebut.
   d. Program/Kegiatan untuk Penyandang Disabilitas
      1) Realisasi jumlah Karyawan dengan status penyandang disabilitas di PJT I pada tahun 2023 sebanyak 8 orang atau sebesar 2,12% dari total Karyawan sebanyak 377 orang (total Karyawan di tahun 2023). Dengan memperhatikan persentase kewajiban dimana perusahaan diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga penyandang disabilitas sebesar 2%, maka jumlah Karyawan penyandang disabilitas di dalam perusahaan minimal 8 orang.
      2) Dalam penyusunan *blueprint* untuk program dan kegiatan bagi Karyawan penyandang disabilitas, Perusahaan memenuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang mendukung kegiatan para Karyawan penyandang disabilitas di lingkungan kantor dan lokasi kerja Perusahaan. Ketentuan-ketentuan yang dijadikan acuan diantaranya yaitu:
         i. Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
         ii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
         iii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Detail *blueprint* adalah sebagaimana berikut:

Rencana aksi periode tahun 2024 untuk Karyawan penyandang disabilitas adalah penempatan pada berbagai tingkat jabatan sesuai dengan Pedoman Pembinaan Karir Karyawan PJT I dan memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan karir melalui pelatihan dan penugasan dari Perusahaan. Karyawan penyandang disabilitas mendapatkan hak kesejahteraan yang sama dengan Karyawan yang bukan penyandang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. PJT I juga memberikan fasilitas kemudahan dalam aksesibilitas bagi karyawan penyandang disabilitas antara lain jalur ramah disabilitas, dan penempatan ruangan untuk akses kursi roda. Karyawan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja sebagai mana ketentuan Perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

e. Dalam rangka memastikan kuantitas dan kualitas data pada *Portal Human Capital* Kementerian BUMN dan Dashboard Human Capital Information System Forum Human Capital Indonesia, PJT I telah melakukan pemutakhiran data sepanjang tahun 2023. Untuk periode tahun 2024, PJT I berkomitmen untuk tetap melakukan pemenuhan data pada kedua portal tersebut termasuk data dari Anak Perusahaan PJT I serta data talenta PJT I. Pemenuhan data kuantitas dan kualitas data dimaksud juga merupakan salah satu *Key Performance Indicator* bagi Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia dalam RKAP tahun 2024.

f. Indikator pengembangan talenta ditetapkan dalam KPI Direksi Kolegial tahun 2024 dengan target rasio talenta perempuan dalam *Nominated Talent* BUMN sebesar 10% dan rasio talenta muda usia ≤ 42 tahun dalam *Nominated Talent* BUMN sebesar 10%. Dalam upaya pemenuhan terhadap target tersebut akan dilakukan penguatan dalam hal *leadership* dan pelaksanaan proses *coaching* dan *mentoring* terhadap talenta-talenta PJT I.

g. Seluruh Insan BUMN (Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN) menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan dalam rangka menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai perbedaan dan kesetaraan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendorong kinerja, pertumbuhan dan keberlangsungan perusahaan. PJT I telah berkomitmen untuk mengimplementasikan *Respectful Workplace Policy* sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/04/2022 tentang Kebijakan Berprilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

h. Pelaksanaan Human Capital Maturity Assessment telah dilakukan oleh Kementerian BUMN melalui FHCI pada tahun 2023. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, PJT I berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil asesmen tersebut sebagai upaya peningkatan pengelolaan di bidang sumber daya manusia.

i. PJT I berkomitmen untuk melakukan pengelolaan praktik bisnis yang berkelanjutan, menyeimbangkan antara kepentingan Perusahaan dengan kesejahteraan Karyawan, serta membangun hubungan industrial yang harmonis, termasuk di antaranya pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama yang telah disetujuai antara Perusahaan dan Ikatan Karyawan Perusahaan Umum Jasa Tirta I (IKAJATI).

j. PJT I berkomitmen untuk tetap melakukan implementasi AKHLAK *Culture Journey* sebagaimana Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-115/MBU/05/2022 tentang Pedoman Implementasi Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia BUMN sesuai tahapan yang telah dicapai.

2. Fungsi Hukum

a. Penanganan Piutang BJPSDA dan/atau PPN atas BJPSDA

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air **(UU 17/2019**), yang dipergunakan sebagai dasar dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Dalam perjalanannya, UU 17/2019 telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**UU 6/2023**). Salah satu ketentuan dalam UU 17/2019 jo UU 6/2023 adalah terkait penugasan sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan pengelolaan SDA. Disamping itu, dalam UU 17/2019 jo UU 6/203 juga mengatur terkait kewajiban bagi pengguna SDA dalam membayar Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) atas penggunaan

SDA yang telah dilakukan. Atas penggunaan BJPSDA tersebut, pengguna SDA juga memiliki kewajiban untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas BJPSDA.

Perusahaan Umum Jasa Tirta I (PJT I) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diganti terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2010 tentang PJT I (PP 46/2010), merupakan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan sebagian tugas pengelolaan SDA. Dalam melaksanakan penugasan tersebut, PJT I diberi kewenangan untuk memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) PP 46/2010.

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, terdapat beberapa pengguna SDA untuk kebutuhan usaha yang berada di wilayah kerja PJT I, yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran BJPSDA maupun PPN atas BJPSDA. Permasalahan tersebut antara lain:

No	Isu Hukum	Pihak Terlibat	Target Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
1	Piutang BJPSDA dan PPN atas BJPSDA PDAM Kabupaten Ngawi sejak tahun 2009 sd 2019 senilai Rp.4.255.663.173,-	a. PJT I b. PDAM Ngawi	Maksimal/paling lama 25 tahun	a. Telah ditetapkan Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw pada tanggal 30 November 2022 dengan isi putusan untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian. b. Pasca Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Ngw antara Perum Jasa Tirta I dengan Perumdam Kabupaten Ngawi, progress Pembayaran Piutang BJPSDA per September 2023 sebesar Rp. 90.000.000,00. Total Piutang BJPSDA yang belum terbayar senilai Rp. 4.165.663.173,00.

No	Isu Hukum	Pihak Terlibat	Target Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
2	Piutang selisih tarif BJPSDA dan PPN atas BJPSDA PDAM Surya Sembada Kota Surabaya (PDAM KS)	a. PJT I b. PDAM KS	Semester II Tahun 2023	a. Telah dilakukan Audiensi dengan Tim Auditoriat VII.D BPK RI, pada tanggal 04 Juli 2023 dengan kesimpulan bahwa PDAM SS dan PJT I akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait Pergub 61/2010 dan Pergub 68/2017 b. PJT I akan menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk menagihkan PPN BJPSDA dan BJPSDA PDAM SS dengan tarif 120% dari izin yang ditetapkan apabila meter air tidak/belum dipasang di lokasi pengambilan air/ intake. c. Pada tanggal 30 Agustus 2023 telah dilakukan Rapat Fasilitasi Penerapan Pemasangan Meter Air Sesuai Pergub Jatim 68/2017 yang dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas PUSDA Jatim dengan kesimpulan PDAM KS akan membuat kajian teknis terkait dengan penempatan alat

No	Isu Hukum	Pihak Terlibat	Target Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
				ukur/meter air yang tidak ditempatkan di titik pengambilan / intake sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 pada Pergub Jatim 68/2017
3	Piutang BJPSDA dan PPN atas BJPSDA PDAM Kabupaten Demak	a. PJT I b. PDAM Kabupaten Demak	Semester II Tahun 2023	a. Pada tanggal 18 Juli 2023 telah dilakukan FGD Perizinan SDA dan BJPSDA di Wilayah Jratunseluna dengan narasumber dari Kementerian PUPR, BBWS Pemali Juana, BPKP Provinsi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. b. Perjanjian Pembayaran BJPSDA tahun 2023 telah ditandatangani dan telah dilakukan pembayaran BJPSDA secara rutin untuk 8 Intake. c. Terhadap negosiasi perjanjian pembayaran tunggakan BJPSDA dalam proses pembahasan lebih lanjut..

No	Isu Hukum	Pihak Terlibat	Target Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
4	Piutang BJPSDA dan PPN atas BJPSDA PDAM Kota Semarang	a. PJT I b. PDAM Kota Semarang	Semester II Tahun 2023	a. Pada tanggal 26 Desember 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Sungai Kreo antara PJT I dan PDAM Semarang. b. Terhadap pembayaran BJPSDA untuk Intake Pucang Gading dan Kali Garang dengan PDAM Kota Semarang masih dalam proses negosiasi. d. PDAM Kota Semarang berkirim surat nomor 545.2/62 tanggal 27 Juli 2023 perihal Perizinan SIPPA Terkendala Kewajiban BJPSDA yang menyampaikan bahwa PDAM Kota Semarang berkenan merealisasikan pembayaran BJPSDA untuk Intake Garang dan Pucang Gading dengan syarat pembangunan Kolam Prased.

No	Isu Hukum	Pihak Terlibat	Target Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
5	Piutang BJPSDA dan PPN atas BJPSDA PDAM Kota Salatiga	a. PJT I b. PDAM Kota Salatiga	Semester II Tahun 2023	a. PJT I dan PDAM Kota Salatiga menandatangani Perjanjian Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Nomor 0004/PK/DJA IV/XII/2022, Nomor 690/718.1/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dimana perjanjian ini berlaku sejak bulan Januari 2023 sampai dengan tidak dilakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. b. Terhadap piutang pembayaran BJPSDA periode 2020-2022 telah dilakukan pertemuan pada tanggal 21 Agustus 2023 dimana dalam pertemuan tersebut PDAM Salatiga menyampaikan bersedia membayar kewajiban BJPSDA untuk periode 2020-2022 dengan mekanisme diangsur selama 5 tahun. Detail pelaksanaan

No	Isu Hukum	Pihak Terlibat	Target Waktu Penyelesaian	Tindak Lanjut
				pembayaran akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri.

b. Tindak Lanjut

PJT I terus berupaya untuk melakukan penyelesaian permasalahan piutang BJPSDA dan PPN atas BJPSDA melalui upaya non litigasi dan litigasi.

3. Fungsi Teknologi Informasi

a. *Master Plan* Teknologi Informasi

Master Plan Teknologi Informasi Tahun 2022- 2026 PJT I telah ditetapkan dengan KPTS Direksi PJT I No. 0049/KPTS/DRUT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Tahun 2022-2026 PJT I.

Master Plan TI PJT I telah mengakomodir hasil asesmen IT *Maturity Level*, INDI 4.0, dan kebijakan Danareksa dengan *roadmap* inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

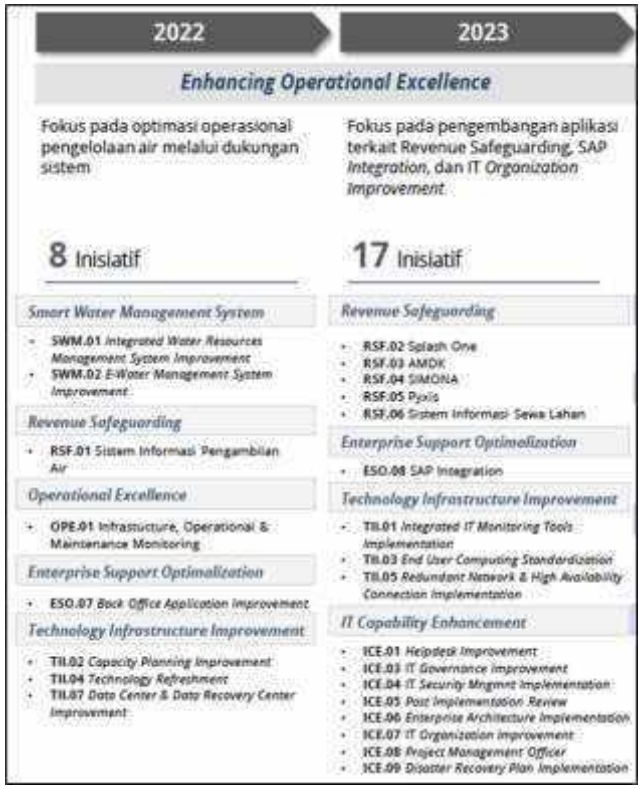

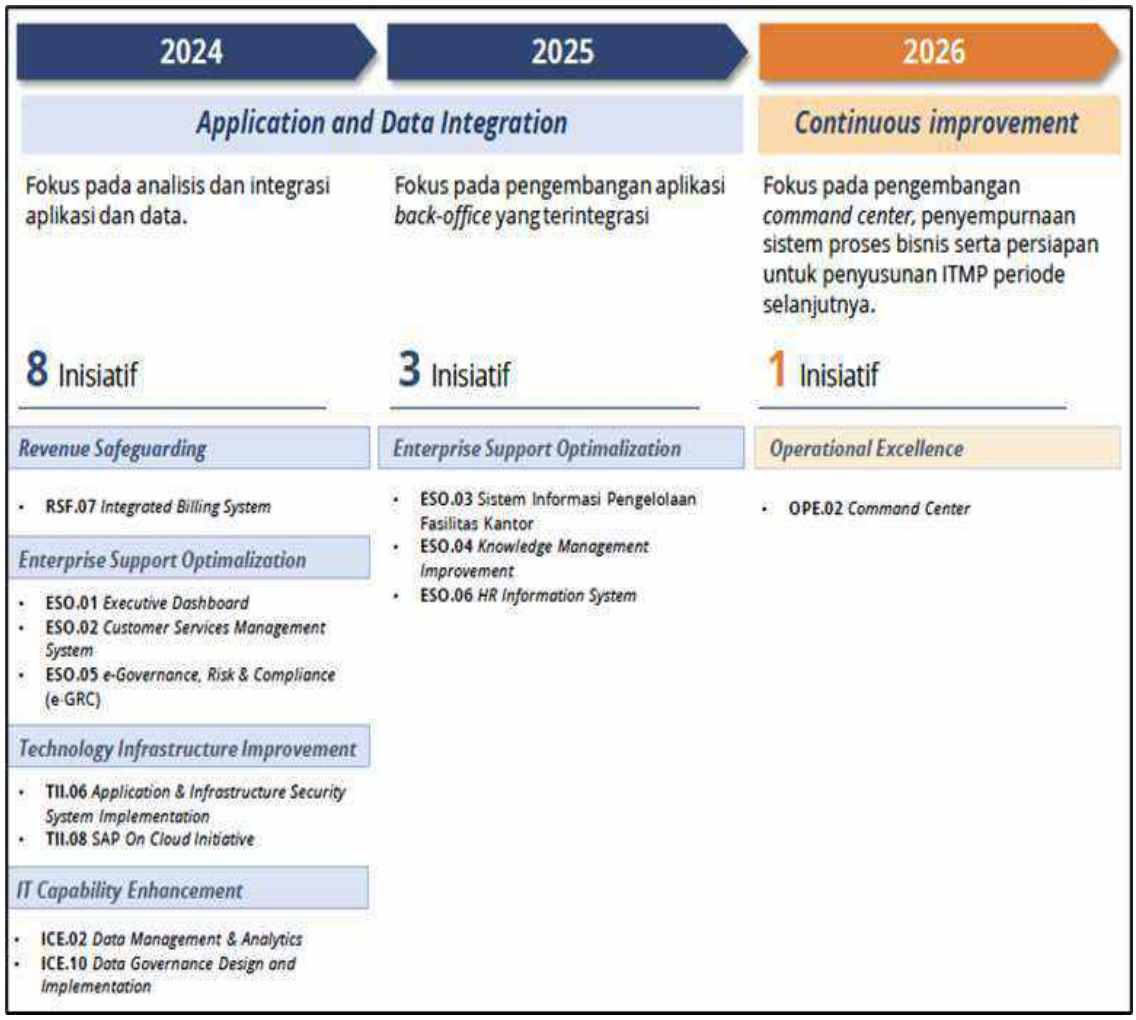

Dari inisiatif-inisiatif di atas terdapat inisiatif yang perlu dilaksanakan di tahun 2024 antara lain:

1. Integrasi *Billing System* untuk mempermudah monitoring tagihan dan mempermudah proses pembayaran tagihan;
2. Pengembangan Sistem *Dashboard* (visualisasi data) sehingga dapat menyajikan informasi mengenai KPI perusahaan, analisis keuangan, proyeksi keuangan perusahaan serta performa seluruh lini bisnis;
3. Penyediaan sistem yang mendukung pelayanan pelanggan secara keseluruhan yang terdiri dari sistem pelayanan pelanggan untuk menyampaikan keluhan dan saran untuk peningkatan layanan perusahaan serta mengakomodasi survei kepuasaan pelanggan;
4. Peningkatan tata kelola perusahaan melalui penyediaan sistem e-GRC yang dapat mendukung kegiatan identifikasi, penilaian, pemantauan, dan evaluasi di lingkup tata kelola, risiko, audit, *policy, legal*, dan *compliance* perusahaan;
5. Implementasi sistem keamanan untuk seluruh aplikasi dan infrastruktur (*firewall* terpisah dan penerapan DMZ), perangkat *endpoint*, dan *patch management*, serta persiapan untuk implementasi ISO 27001;

6. Kajian terkait dengan evaluasi penggunaan Aplikasi SAP yang meliputi evaluasi atas penggunaan server pada Aplikasi SAP serta kajian terkait penggunaan SAP *On Cloud* untuk mendukung proses bisnis perusahaan;
7. Integrasi antar sistem di perusahaan untuk kebutuhan analisis data, penyusunan laporan, visualisasi dashboard yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan;
8. Implementasi *Enterprise Architecture* (melanjutkan inisiatif di tahun 2023);
9. Peningkatan kapabilitas Aplikasi *Helpdesk* yang mendukung kegiatan pelaporan, pencatatan, pengalokasian *resource* TI untuk isu-isu dan permintaan terkait dengan solusi TI di perusahaan, serta proses monitoring penyelesaian tiket oleh user (melanjutkan inisiatif di tahun 2023);
10. Peningkatan jaringan lokal perusahaan (melanjutkan inisiatif di tahun sebelumnya); dan
11. Standarisasi perangkat *end user computing* (EUC).

b. Asesmen Tingkat Maturitas Teknologi Informasi (IT *Maturity Level*)

Asesmen IT *Maturity Level* di PJT I dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan referensi Surat Menteri BUMN Nomor S-122/DSI.MBU/05/2021 perihal Pedoman Pelaksanaan Asesmen IT *Maturity Level*.

Kegiatan asesmen dilaksanakan dengan menggunakan *Framework* COBIT 2019 dengan dukungan Assessor konsultan independen (*Multimatics*) dan selesai dilaksanakan pada Desember 2021 dengan capaian **Level 3.09** (*Defined Level*, dari skala 5,00) dengan rincian kapabilitas sebagai berikut:

No	Domain	Process	Name	Rating					Capability Level
				1	2	3	4	5	
1.	Evaluate, Direct, Monitor (EDM)	EDM02	Ensured Benefits Delivery	Pass	Fully	Fully	Fully	Fully	5
2.		EDM04	Ensured Resource Optimization	Pass	Fully	Fully	Fully		4
3.	Align, Plan, Organize (APO)	APO02	Managed Strategy	Pass	Fully	Fully	Fully		4
4.		APO03	Managed Enterprise Architecture	Pass	Fully	NA			2
5.		APO06	Managed Budget and Costs	Pass	Fully	Largely			3
6.		APO07	Managed Human Resources	Pass	Fully	Fully	Fully		4
7.		APO08	Managed Relationships	Pass	Fully	Fully	Partially		3
8.		APO13	Managed Security	Pass	Partially				1
9.	Build, Acquire, Implement (BAI)	BAI01	Managed Programs	Pass	Fully	Fully	Fully	NA	4
10.		BAI02	Managed Requirements Definition	Pass	Fully	Largely			3
11.		BAI03	Managed Solutions Identification and Build	Pass	Largely				2
12.		BAI05	Managed Organizational Change	Pass	Fully	Fully	Largely		4
13.		BAI06	Managed IT Changes	Pass	Fully	Largely			3
14.		BAI07	Managed IT Change Acceptance and Transitioning	Pass	Largely				2
15.		BAI09	Managed Assets	Pass	Fully	Largely			3
16.		BAI10	Managed Configuration	Pass	Fully	Largely			3
17.		BAI11	Managed Projects	Pass	Fully	Largely			3
18.	Deliver, Service, Support (DSS)	DSS01	Managed Operations	Pass	Fully	Fully	Partially		3
19.		DSS02	Managed Service Requests and Incidents	Pass	Fully	Largely			3
20.		DSS03	Managed Problems	Pass	Fully	Fully	Fully	Fully	5
21.		DSS04	Managed Continuity	Pass	Partially				1
22.	Monitor, Evaluate, Assess (MEA)	MEA01	Managed Performance and Conformance Monitoring	Pass	Fully	Fully	Partially		3
23.		MEA02	Managed System of Internal Control	Pass	Pass	Largely			3

Laporan telah dikirimkan melalui surat dinas Direksi PJT I kepada Danareksa Nomor 0176/UM/DKPM/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Penyampaian Pelaksanaan Pemenuhan Aspirasi Pemegang Saham (APS) Fungsi Kepemimpinan Teknologi dan surat

dinas Direksi PJT I kepada Kementerian BUMN Nomor 0177/UM/DKPM/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Penyampaian Pelaksanaan Pemenuhan Aspirasi Pemegang Saham Fungsi Kepemimpinan Teknologi.

Nilai/ level kapabilitas di atas telah sesuai dengan standar yang ditetapkan pada APS sebesar 3,00. Namun demikian masih terdapat beberapa rekomendasi perbaikan (*improvement*) yang perlu/dapat dilakukan. Beberapa proses yang capaian tingkat kapabilitas cukup rendah dan/atau perlu dilakukan perbaikan antara lain:

a) APO13 *Managed Security*.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi di atas, tahun 2023 akan dilaksanakan asesmen terkait kondisi Manajemen Keamanan Informasi sebagai tahap persiapan sertifikasi ISO 27001 yang direncanakan akan dipenuhi pada 2024.

b) DSS 04 *Managed Continuity*

Tindak lanjut rekomendasi di atas, direncanakan akan dipenuhi di 2024 dengan reviu dan perbaikan tata Kelola Teknologi Informasi yang berlaku.

c) APO 03 *Managed Enterprise Architecture*

Rekomendasi tersebut telah mulai ditindaklanjuti dengan koordinasi dengan konsultan penyedia jasa untuk menyiapkan dokumen perencanaan. *Implementasi Enterprise Architecture* sebagai bentuk pendetailan *Architecture* yang telah tertuang di Rencana Induk Teknologi Informasi 2022-2026 direncanakan dimulai di akhir 2023 dan dilanjutkan pada 2024.

d) BAI 03 *Managed Solutions Identification and Build*

Tindak lanjut atas rekomendasi di atas akan dilaksanakan bersamaan dengan Implementasi *Enterprise Architecture* yang akan dilaksanakan pada akhir 2023 hingga 2024.

1. Assessment *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index* (INDI 4.0)

Kegiatan Asesmen *Indonesia Industri 4.0 Readiness Index* (INDI) Perum Jasa Tirta I dilaksanakan dengan dukungan Asesor dari Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian.

PJT I melakukan *Self Assessment* atau pengisian mandiri kuesioner INDI 4.0 melalui aplikasi online SINDI (sindi4.kemenperin.go.id). Pada tanggal 3 – 8 November 2021 telah dilaksanakan verifikasi Self Assessment untuk menilai perusahaan melalui pengumpulan bukti/evidence dan pengisian kesesuaian standar penilaian yang telah ditetapkan. Hasil Validasi Asesmen INDI 4.0 Perum Jasa Tirta 1 ditetapkan oleh Badan berdasarkan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui surat dinas nomor B/1721/BSKJI/B4T/MS/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 menyatakan bahwa Tim Komite menetapkan Hasil Validasi Asesmen INDI 4.0 Perum Jasa Tirta I mempunyai nilai 2,48. Nilai skor tersebut masuk pada level 2 yang mempunyai rentang nilai 1,50 – 2,50 dengan kategori Kesiapan Sedang.

Selanjutnya guna pemenuhan target skor INDI 4.0 sebesar 3,5 pada tahun 2024 sesuai arahan Kementerian BUMN, disusun *Roadmap* pemenuhan Gap INDI 4.0 serta implementasi pemenuhan yang disampaikan melalui Memo Dinas Nomor: 0004/MD/MUPMRT/X/2022 dengan proyeksi sebagai berikut:

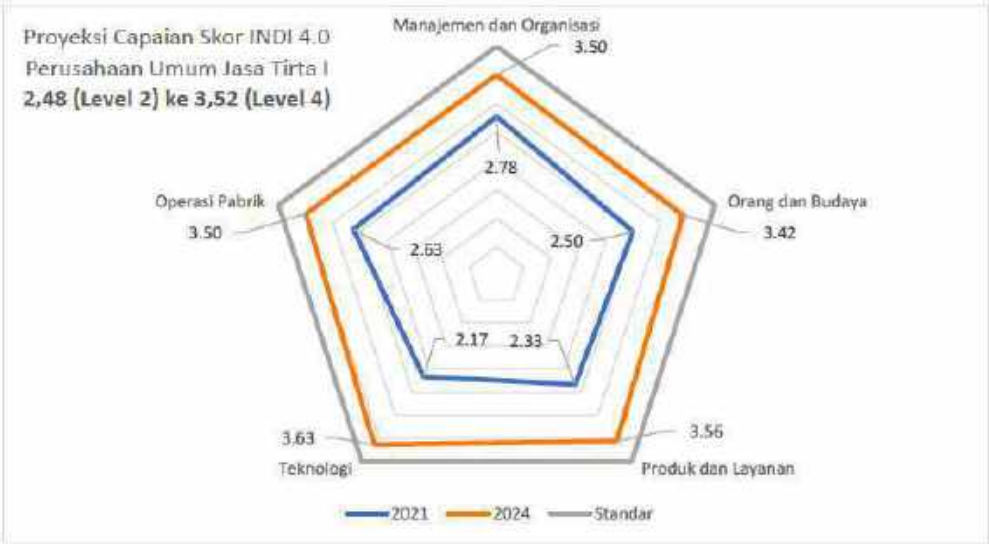

Road Map Pemenuhan Gap INDI 4.0 Perusahaan Umum Jasa Tirta I menargetkan pencapaian pada nilai 3,52 di level 4 yaitu Perum Jasa Tirta I sudah menerapkan sebagian besar konsep Industry 4.0 pada sistem produksinya melalui beberapa upaya rencana strategi yang diperlukan dengan melibatkan semua unsur organisasi. Rencana-rencana yang terkait Teknologi Informasi telah diakomodir dalam *Master Plan* Teknologi Informasi Tahun 2022-2026, sedangkan rencana lainnya direncanakan sesuai *roadmap* berikut:

Pilar	Tahun				Skala Prioritas		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
INDI 4.0	**2,48**	**2,64**	**3,05**	**3,52**			
Manajemen dan Organisasi	**2,78**	**2,78**	**3,06**	**3,50**	Rendah	Sedang	Sedang
Strategi dan Kepimpinan	2,33	2,33	2,67	3,00	Rendah	Sedang	Sedang
Investasi untuk Indi 4.0	3,50	3,50	3,50	4,00	Rendah	Rendah	Tinggi
Kebijakan Inovasi	2,50	2,50	3,00	3,50	Rendah	Tinggi	Tinggi
Orang dan Budaya	**2,50**	**2,58**	**3,00**	**3,42**	Rendah	Sedang	Sedang
Budaya	2,50	2,75	3,00	3,25	Sedang	Sedang	Sedang
Keterbukaan terhadap Perubahan	2,50	2,50	3,00	3,50	Rendah	Tinggi	Tinggi
Pengembangan Kompetensi	2,50	2,50	3,00	3,50	Rendah	Tinggi	Tinggi
Produk dan Layanan	**2,33**	**2,67**	**3,11**	**3,56**	Sedang	Sedang	Sedang
Kustomisasi Produk	2,00	2,50	3,00	3,50	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Layanan Berbasis Data	3,00	3,00	3,33	3,67	Rendah	Sedang	Sedang
Produk Cerdas	2,00	2,50	3,00	3,50	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Teknologi	**2,17**	**2,54**	**3,08**	**3,63**	Sedang	Tinggi	Tinggi
Keamanan Cyber	1,67	2,67	3,33	4,00	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Konektivitas	2,50	3,00	3,50	4,00	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Mesin Cerdas	2,00	2,00	2,50	3,00	Rendah	Tinggi	Tinggi
Digitalisasi	2,50	2,50	3,00	3,50	Rendah	Tinggi	Tinggi
Operasi Pabrik	**2,63**	**2,63**	**3,00**	**3,50**	Rendah	Sedang	Tinggi
Penyimpanan dan Sharing Data	3,00	3,00	3,00	3,50	Rendah	Rendah	Tinggi
Rantai Pasok dan Logistik Cerdas	2,50	2,50	3,00	3,50	Rendah	Tinggi	Tinggi
Proses yang Otonom	2,50	2,50	3,00	3,50	Rendah	Tinggi	Tinggi
Sistem Perawatan Cerdas	2,50	2,50	3,00	3,50	Rendah	Tinggi	Tinggi

Dari *roadmap* di atas terdapat sebagian besar kegiatan dengan prioritas tinggi yang perlu disiapkan anggarannya dan dilaksanakan pada 2024, antara lain:

1) Investasi 4.0, pada tahun 2024 melakukan Investasi >5M dan melakukan monitoring dan evaluasi di bidang lain pada semua pilar INDI 4.0 berikut dengan Bussines Impact Analysis (BIA);
2) Kebijakan Inovasi, Pada tahun 2024, melakukan beberapa inovasi pada semua pilar INDI 4.0 dan/ atau Melakukan evaluasi KPI dan meningkatkan kinerja Tim Transformasi;
3) Keterbukaan terhadap Perubahan, pada tahun 2024 membuat media penerapan inovasi teknologi dari karyawan dan mengadopsi perubahan teknologi dan sistem baru;
4) Pengembangan kompetensi, pada tahun 2024 meningkatkan SDM pada Kepemimpinan Era Digital dan/atau Meningkatkan sharing knowledge pada SDM pada Kepemimpinan Era Digital;

5) Kustomisasi produk, pada tahun 2024 meningkatkan produk layanan kustom yang diberikan kepada pelanggan mencapai 51-75%;
6) Produk cerdas, pada tahun 2024 hasil pengembangan terhadap produk/ layanan (jasa) dengan menggunakan teknologi cerdas seperti dengan *Machine Learning*, AI, dan sejenisnya dapat di pantau melalui internet;
7) Keamanan *Cyber*, pada tahun 2024 melakukan *Assement Security Cyber* dengan capaian nilai maturity level 4 dan memiliki sistem cyber security untuk departemen/ bagian IT dan beberapa bagian OT perusahaan dan melakukan proses pengajuan ISO 27001;
8) Konektivitas, pada tahun 2024 menambahkan fitur-fitur pada sistem yang sudah ada secara bertahap untuk memantau data yang secara transparan, *realtime* dan terintegrasi;
9) Mesin Cerdas, pada tahun 2024 menyematan 16 mesin/ sistem/ sub sistem/ teknologi cerdas maupun penggunaan yang memberikan impak positif terhadap proses bisnis perusahaan juga bisa mengakomodir adanya kolaborasi baik antara manusia dan mesin, atau kolaborasi antar mesin/ sistem;
10) Digitalisasi, pada tahun 2024 menambahkan implementasi produk digital hingga tercapai 100% untuk beberapa divisi/ proses bisnis yang ada, produk/ jasa yang diberikan, maupun dalam proses pengambilan keputusan;
11) Penyimpanan dan *Sharing Data*, pada tahun 2024 meningkatkan sistem yang sudah dijadikan sebagai rekomendasi optimum dalam pengambilan keputusan dapat diakses oleh stakeholder yang terotorisasi;
12) Rantai Pasok dan Logistik Cerdas, pada tahun 2024 meningkatkan teknologi/ sistem yang digunakan untuk mendukung rantai pasok cerdas sebanyak 7 unit secara terintegrasi dan *realtime*;
13) Proses yang otonom, pada tahun 2024 meningkatkan proses otomasi (*shopfloor* maupun *office*) hingga 75% dari proses/ kegiatan bisnis terutama terhadap *pain point* yang dimiliki oleh perusahaan dengan tetap memperhatikan impak yang dihasilkan terhadap otomatisasi tersebut. Proses otomasi digunakan secara terus menerus dan berkesinambungan;
14) Sistem perawatan cerdas, Pada tahun 2024 menerapkan sistem perawatan prediktif untuk mesin/ teknologi/ aplikasi yang digunakan, dan secara *real time* mampu memonitor kondisinya.

2. Pengembangan Budaya Inovasi, Kerja sama antar BUMN, dan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi

   Saat ini terdapat kegiatan yang sedang berjalan antara lain:

   1) Upgrade layanan *e-Office* yang disediakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) terintegrasi dengan *Digital Signature* PERURI; dan

2) Implementasi DRC untuk sistem ERP-SAP bekerja sama dengan PT. Sigma Cipta Caraka, anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero);

Sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain:

1) Implementasi ERP-SAP anak perusahaan PJT I (PT. JTE) yang direncanakan bekerja sama dengan PT. Sigma Cipta Caraka; dan
2) Penggunaan IT *Share Service* akan menyesuaikan program dan rencana implementasi layanan dari Danareksa. IT *Shared Service* yang diharapkan meliputi: Aplikasi e-GRC, SIEM, LMS, dan Anaplan.
3) Potensi optimasi AI di *Hydroinformatic System* PJT I bersama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.

4. Fungsi Keuangan

a. Laporan Keuangan Segmentasi (Komersial dan PSO)

Perum Jasa Tirta I tidak memiliki penugasan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, sehingga tidak memiliki dana *Public Service Obligation* (PSO) dan tidak menyusun Laporan Keuangan segmentasi berdasarkan segmen komersial dan segmen PSO.

b. Opini Auditor – Wajar Tanpa Pengecualian

Perum Jasa Tirta I memprogramkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perum Jasa Tirta I dan Entitas Anak Tahun Buku 2023.

Opini auditor merupakan pernyataan formal yang dibuat oleh auditor mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Ketentuan terkait opini auditor ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SA 700 tentang “Perumusan Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan”.

Untuk menyimpulkan suatu opini, auditor mengacu pada paragraf 11 SA 700 bahwa auditor harus telah memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji, baik karena kecurangan atau kesalahan. Kesimpulan itu harus didasarkan pada bukti audit yang kuat dan cukup telah diperoleh dan apakah kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi tidak bernilai material. Ada lima opini yang dapat diberikan oleh auditor berdasarkan audit atas laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (*Unqualified Opinion With Explanatory*

Language), Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Tidak wajar (*Adverse Opinion*) dan Tidak memberikan opini (*Disclaimer Opinion*).

Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Laporan keuangan lengkap
- Bukti audit yang dibutuhkan lengkap
- Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja
- Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten
- Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan (*going concern*).

Opini audit merupakan suatu simbol kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan keandalan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan. Opini audit penting dalam kaitannya dengan citra perusahaan di mata para pengguna laporan keuangan, diantaranya para pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam RKAP 2024, menunjukkan target laporan keuangan Perum Jasa Tirta I tahun buku 2023 harus disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku dan terbebas dari salah saji material, sehingga Laporan Keuangan dapat diandalkan untuk digunakan lebih lanjut bagi pemangku kepentingan dalam penentuan keputusan.

c. Audit Laporan Keuangan

Audit Laporan Keuangan Perum Jasa Tirta I Tahun Buku 2023 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sesuai penunjukan dalam Surat Menteri BUMN Nomor S-344/MBU/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perum Jasa Tirta I Tahun Buku 2022. Lingkup kegiatan audit terdiri dari Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), Perikatan Keyakinan Terbatas atas Laporan Penilaian *Key Performance Indicator* (KPI), Audit Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Intern, serta *Management Letter* PJT I dan

Entitas Anak. Laporan Keuangan *Audited* Tahun Buku 2023 akan diselesaikan dan diunggah melalui Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN selambat-lambatnya tanggal 15 April 2024.

d. *Audit Upon Procedure* (AUP)

Penerapan Prosedur yang Disepakati (*Audit Upon Procedures*) terhadap Paket Informasi (*Information Package)* Laporan Keuangan Perum Jasa Tirta I Tahun 2023 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dalam rangka persiapan penyusunan laporan keuangan agregasian Badan Usaha Milik Negara oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

i) Melakukan pencocokan atas pemetaan *Chart of Accounts* (COA) di level GL Perum Jasa Tirta I dengan COA level GL Kementerian BUMN.

ii) Melakukan pencocokan atas pemetaan COA di level GL BUMN dengan COA *level* Laporan Keuangan/ *Financial Statement* Perum Jasa Tirta I.

iii) Melakukan pencocokan atas angka-angka yang diisikan pada *information package* BUMN dengan laporan keuangan Perum Jasa Tirta I yang telah diaudit.

AUP dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik terhadap Paket Informasi (*Information Package*) Laporan Keuangan Perum Jasa Tirta I dalam rangka persiapan penyusunan laporan keuangan agregasian badan usaha milik negara oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

AUP dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak menerima Laporan Keuangan Audited Perusahaan dan data terkait *information package* yang diperlukan baik dari Perusahaan maupun dari Kementerian BUMN. Laporan AUP Tahun Buku 2023 akan diselesaikan dan diunggah melalui Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN selambat-lambatnya tanggal 30 April 2024.

e. *Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization* (EBITDA)

Nilai EBITDA pada RKAP 2024 sebesar Rp133,90 miliar naik sebesar 33,76% dibandingkan prognosa 2023 sebesar Rp100,10 miliar.

EBITDA yang semakin besar dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan profitabilitas yang semakin baik.

EBITDA merupakan laba usaha dimana komponen depresiasi dan amortisasi ditambahkan kembali. Oleh karena itu, EBITDA seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasional dan sebagai tolaok ukur perbandingan profitabilitas antar perusahaan

dan industri. EBITDA menghilangkan efek pembiayaan dan pengeluaran modal. EBITDA sering digunakan oleh investor, pemilik perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan nilai sebuah bisnis, dan berfokus pada hasil keuangan, dari keputusan sejumlah kegiatan.

Perhitungan EBITDA adalah sebagai berikut:

EBITDA = Laba Operasi + (Biaya Penyusutan/Amortisasi + Keuntungan (Kerugian) *Forex* + Laba Entitas Asosiasi dan *Joint Venture*)

EBITDA RKAP 2024 = Rp79,80 miliar + 54,10 miliar

= Rp133,90 miliar

f. Cash Flow from Operation (CFO*)*

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi/CFO pada RKAP 2024 sebesar Rp179,28 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 4.560,1,80% dibandingkan CFO prognosa 2023 sebesar Rp3,93 miliar.

Berdasarkan PSAK 2, Aktivitas Operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan, CFO merupakan bagian dari arus kas perusahaan yang mewakili jumlah uang tunai yang dihasilkan atau dipakai perusahaan dari aktivitasnya sepanjang periode. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup dan menunjukkan kemampuannya untuk melakukan aktivitas operasional.

Kenaikan atau penurunan arus kas operasi dapat dianalisis lebih jauh dengan melihat perubahan dalam aset operasi lancar dan kewajiban operasi lancar. Sehingga mengetahui alasan kenaikkan atau penurunan arus kas operasi, kenaikan dalam aset operasi berarti penggunaan kas dan ditunjukkan dengan nilai perubahan kas yang yang negatif dan sebaliknya. Sedangkan kenaikan dalam kewajiban operasi lancar berarti arus kas masuk dan ditunjukkan dengan arus kas yang positif dan sebaliknya

CFO RKAP 2024 positif mengindikasikan pertumbuhan skala bisnis yang berimbang dengan pengendalian biaya, dan pengelolaan modal kerja dari kegiatan utama perusahaan.

CFO RKAP 2024 meningkat dibandingkan prognosa 2023, antara lain karena adanya kenaikan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan kas pelanggan karena kenaikan layanan jasa air.

g. Net Profit

Net profit RKAP 2024 adalah sebesar Rp70,62 miliar, naik sebesar 40,10% dibandingkan Prognosa 2023 sebesar Rp50,41 miliar.

Net profit dihitung dari total pendapatan dikurangi *cost of good sold*, pendapatan dan biaya operasi, pendapatan dan biaya non-operasi, serta pajak, pada tahun berjalan. Total pendapatan adalah pendapatan dari kegiatan atau aktivitas utama Perusahaan pada tahun berjalan, yang terdiri dari pendapatan usaha SDA dan usaha non SDA.

Nilai *net profit* perusahaan merupakan salah satu ukuran terbaik keberhasilan bisnis dan matrik utama dalam analisis kondisi keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena net profit mewakili uang yang tersisa setelah pengeluaran dibayarkan tidak termasuk pendapatan dan biaya non usaha. dapat menunjukkan keuntungan yang sebenarnya - berapa banyak uang yang dimiliki di akhir periode.

Net Profit dihitung dengan menggunakan rumus:

Net Profit	=	Total Pendapatan - Total Beban - Pajak
Total Pendapatan	=	Pendapatan Usaha + Pendapatan Keuangan + Pendapatan Lain-Lain
	=	Rp 777,80 miliar + Rp15,63 miliar + Rp2,15 miliar
	=	Rp795,58 miliar
Total Beban	=	Beban Usaha + Beban Keuangan + Beban Lain-Lain
	=	Rp698,00 miliar + Rp1,97 miliar + Rp6,14 miliar
	=	Rp706,11 miliar
Pajak Penghasilan	=	Rp18,85 miliar
Net Profit RKAP 2024	=	Rp795,58 miliar – Rp706,11 miliar – Rp18,85 miliar
	=	Rp70,62 miliar

h. Dividen

PJT I tidak menganggarkan pembagian *dividen* dalam RKAP 2024.

Perum Jasa Tirta I sebagai BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) 100% modalnya adalah milik pemerintah, berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Dividen merupakan bagian dari keuntungan dan laba ditahan yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan laba dan mengakumulasi laba ditahan, laba tersebut dapat diinvestasikan kembali dalam bisnis atau dibayarkan kepada pemegang saham sebagai *dividen*.

Dalam tahun buku 2024 diasumsikan tidak ada penyetoran *dividen* atas Laba Tahun Buku 2023, berdasarkan referensi penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan Konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2022 yang seluruhnya ditetapkan sebagai Laba Ditahan, berdasarkan surat Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor S-433/MBU/06/2023 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perum Jasa Tirta I Tahun Buku 2022.

i. ROIC vs WACC

Indikator Penciptaan Nilai Ekonomis RKAP 2024, ROIC sebesar 6,97% dengan WACC sebesar 5,38% sehingga (ROIC – WACC) dalam RKAP 2024 sebesar 1,59%, sama dengan prognosa 2023 sebesar 1,59%.

Pengukuran Pengembalian atas investasi yang dilakukan biasanya menggunakan 2 macam pengukuran, yaitu Pengembalian Modal yang Diinvestasikan (*Return on Invested Capital*, ROIC) dan Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital*, WACC)

ROIC merupakan pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah uang yang dihasilkan perusahaan dari modal yang diinvestasikan di dalamnya. Keputusan untuk beberapa alternatif investasi dengan risiko yang sama, maka perusahaan akan memilih investasi dengan ROIC tertinggi. ROIC dihitung dengan rumus berikut:

ROIC	= Laba Bersih : *Invested Capital*
Laba Bersih	= Laba Tahun Berjalan + Biaya Bunga
Invested Capital	= Hutang Pendanaan + Modal
ROIC RKAP 2024	=(Rp70,66 M+Rp1,61 M) : (Rp1.036,56 M)
	= 6,97%

Dalam rumus ini, laba bersih tahun berjalan dihitung dengan mengurangkan pendapatan dan biaya selama tahun berjalan. Oleh karena itu, laba bersih dapat memberikan ukuran pendapatan perusahaan setelah memperhitungkan kewajiban bunga dan pajaknya.

Biaya modal rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital*, WACC) merupakan biaya modal rata-rata perusahaan dari semua sumber, termasuk saham biasa, saham preferen, obligasi, dan bentuk utang lainnya. WACC menjadi standar perusahaan ketika membuat keputusan investasi dalam proyek baru atau menumbuhkan bisnis. Proyek tersebut harus menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi dari WACC untuk memenuhi ekspektasi pengembalian pemegang saham, kreditur, serta penyedia modal lainnya. WACC dihitung dengan menggunakan rumus:

$$WACC = \left[\frac{Hutang\,pendanaan}{invested\,capital} x\,effective\,cost\,of\,debt\right] + \left[\frac{Modal}{invested\,capital} x\,cost\,of\,equity\right]$$

WACC RKAP 2024:

Hutang pendanaan = Rp27,07 miliar

Modal = Rp1.009,49 miliar

Invested Capital = Rp1.036,56 miliar

Effective Cost of Debt = 2,45%

Cost of Equity = 5,45%

$$\left\{\frac{27{,}07}{1.036{,}56} \times 2{,}45\%\right\} + \left\{\frac{1.009{,}49}{1.036{,}56} \times 5{,}45\%\right\} = 5{,}37\%$$

ROIC-WACC RKAP 2024 = 6,97% - 5,37% = **1,60%**

Karena WACC adalah biaya rata-rata setelah pajak dari modal perusahaan, maka seringkali WACC dan ROIC diperbandingkan. Umumnya, jika atas suatu investasi nilai ROIC lebih besar dari WACC, maka investasi tersebut dianggap mampu menciptakan nilai dalam bisnis. Namun demikian, karakteristik industri dan *nature* bisnis suatu perusahaan dapat berpengaruh terhadap nilai ROIC-WACC.

Pada prognosa 2023, nilai ROIC-WACC sebesar **1,59%**, nilai ROIC lebih besar daripada biaya modal. (WACC) karena hutang pendanaan sebagai sumber dana operasional dan investasi yang diproyeksikan diterima di akhir tahun sudah dapat memberikan penghasilan.

Nilai ROIC-WACC RKAP 2024 tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan prognosa 2023 karena adanya peningkatan beban bunga pinjaman eksternal yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan laba bersih yang diterima atas aktivitas pendanaan tersebut. Hal ini disebabkan proyek investasi PLTS Koba yang menggunakan dana pinjaman baru menghasilkan pendapatan di bulan Desember 2024.

j. *Interest Bearing Debt to* EBITDA

Interest Bearing Debt to EBITDA RKAP 2024 sebesar **0,46 kali**.

Interest bearing debt menunjukkan nilai hutang yang memiliki bunga dan EBITDA merupakan pendapatan bersih dimana komponen bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi ditambahkan kembali. Rasio perbandingan kedua aspek tersebut menunjukkan

berapa besar hutang yang diperoleh perusahaan dan pengembalian yang telah diperoleh yang dicerminkan dari besaran riil kinerja perusahaan pada suatu periode.

Kriteria *Interest Bearing* to EBITDA maksimal **2,3 kali**. *Interest Bearing to Invested capital* RKAP 2024 sebesar 0,46 kali telah memenuhi kriteria.

Bila dibandingkan dengan nilai *Interest Bearing to* EBITDA pada Prognosa 2023 yaitu sebesar 0,30 kali, karena adanya peningkatan hutang pendanaan dibandingkan peningkatan EBITDA yang diperoleh selama tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya perolehan pinjaman di pertengahan tahun 2024 untuk proyek investasi pada PLTS Koba sedangkan pendapatan dari proyek tersebut diprogramkan diperoleh di bulan Desember 2024.

k. *Interest Bearing Debt to Invested Capital*

Rasio *Interest Bearing Debt to Invested Capital* RKAP 2024 sebesar **5,58%**.

Interest bearing debt menunjukkan nilai hutang yang memiliki bunga, biasanya atas hutang ini digunakan perusahaan untuk membayar suatu investasi. Sedangkan *invested capital* menunjukkan nilai investasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Rasio perbandingan kedua aspek tersebut menunjukkan berapa besar hutang yang diperoleh perusahaan dan yang telah digunakan untuk investasi.

Kriteria *Interest Bearing to Invested capital Financing debt to Invested Capital* **maksimal 45%**. *Interest Bearing to Invested capital* RKAP 2024 sebesar 5,58%**,** lebih ditinggi dibandingkan Prognosa 2023 yaitu sebesar 2,97%, karena adanya peningkatan hutang pendanaan dibandingkan peningkatan *Invested Capital* yang diperoleh sampai tahun 2024.

l. Pendapatan Usaha

Berdasarkan RKAP 2024, PJT I menganggarkan pendapatan usaha sebesar Rp777,80 miliar. Pendapatan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 6 didefinisikan sebagai aliran masuk berupa peningkatan aset suatu perusahaan dan/atau penyelesaian kewajiban yang berasal dari produksi barang hingga pengirimannya, menyewakan jasa, dan aktivitas lain yang merupakan operasi utama perusahaan. Pendapatan seringkali dimaknai sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik.

Angka pendapatan perusahaan bisa diperoleh dari berbagai macam kegiatan bisnis. Di PJT I, perusahaan memperoleh pendapatan usaha dari dua sektor, yaitu pengelolaan SDA dan Non SDA.

Pendapatan pengusahaan sumber daya air meliputi penerimaan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dari pengelolaan sumber daya air untuk pembangkitan energi listrik (PLTA), penyediaan air baku untuk PDAM, dan penyediaan air baku untuk Industri. Sedangkan Pendapatan pengusahaan non sumber daya air meliputi kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, antara lain pariwisata, jasa konstruksi dan sewa peralatan, jasa konsultansi dan diklat, laboratorium lingkungan, jasa pelayanan air minum (SPAM), Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), pengembangan energi dari pembangkitan listrik tenaga air/ mikro hidro oleh anak perusahaan, serta pendayagunaan aset perusahaan lainnya.

Pendapatan merupakan komponen dasar dalam pengukuran kualitas perusahaan. Contohnya saja untuk ketika menganalisis laba kotor yakni pendapatan usaha dikurangi beban usaha, atau juga menganalisa rasio keuangan seperti persentase laba kotor yaitu laba kotor dibagi pendapatan usaha. Rasio ini digunakan untuk menganalisa seberapa efisien bisnis dalam mengelola operasinya.

m. Beban Usaha

PJT I menganggarkan Beban Usaha pada RKAP 2024 sebesar Rp698,00 miliar, naik 28,3% dari prognosa 2023 sebesar Rp543,96 miliar. Beban dimaknai sebagai arus keluar bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode dimana perusahaan memproduksi dan menyerahkan barang, memberikan jasa atau melaksanakan aktivitas lain yang merupakan operasi pokok perusahaan.

Beban usaha di PJT I merupakan beban inti untuk memelihara dan memperoleh pendapatan perusahaan secara langsung. Nilai beban usaha diperoleh dari pengeluaran yang diperuntukkan khusus untuk setiap pendapatan perusahaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai beban usaha adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memelihara dan memperoleh pendapatan dan untuk menjalankan aktivitas perusahaan dalam upaya mempertahankan dan menghasilkan pendapatan, karena pendapatan pada umumnya merupakan sumber pembiayaan utama kegiatan perusahaan.

n. BOPO

PJT I menganggarkan BOPO sebesar 89,74% pada RKAP 2024. BOPO tersebut dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

BOPO: Beban Operasional (Beban Usaha) / Pendapatan Operasional (Pendapatan Usaha)

BOPO digunakan untuk mengetahui seberapa besar beban yang dikeluarkan untuk memperoleh sejumlah penghasilan pada periode tertentu.

o. Investasi

a. Investasi merupakan penyerahan suatu aset atau barang yang diberikan dengan tujuan menghasilkan pendapatan atau peningkatan nilai. Investasi sendiri berkaitan erat dengan risiko, dimana semakin tinggi risiko akan semakin besar pengembalian yang didapatkan.

b. Ada dua cara untuk mendapatkan pengembalian investasi, yaitu dari pembayaran berkelanjutan yang dikeluarkan oleh investasi atau melalui apresiasi nilai aset. Investasi berisiko tinggi cenderung menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi bagi investor, meskipun investasi ini juga dapat mengakibatkan hilangnya sebagian atau seluruh jumlah yang diinvestasikan.

c. Di PJT I sendiri investasi dianggap sebagai Investasi barang modal (*capital expenditure*) yaitu merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau untuk menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang. Investasi di PJT I terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Investasi pengembalian fungsi/ penggantian/baru, meliputi pembelian tanah dan bangunan kantor, rehabilitasi gedung dan perbaikan kantor, prasarana dan sarana, pengembangan IT serta peralatan keamaan bendungan diantaranya pengadaan *Cutter Suction Dredger*.

2) Investasi pengembangan, yaitu pengembangan SPAM, laboratorium, AMDK, Unit Bisnis Konstruksi dan Peralatan, PLTA/PLTM dan Pariwisata

3) Investasi penyertaan, yaitu penyerahan modal kerja pada Anak Perusahaan PT. Jasa Tirta Energi serta penyertaan untuk pengembangan di bidang EBT.

d. Rincian Investasi RKAP 2024 sebagai berikut:

- Investasi Pengembalian Fungsi / Penggantian/ baru Rp189,43 miliar
- Investasi Pengembangan sebesar Rp135,18 miliar

- Investasi Penyertaan sebesar Rp87,00 miliar

5. Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan

a) Salah satu Fungsi Kepatuhan adalah melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal seperti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan KAP. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut disusun setiap triwulan sebagai salah satu bahan masukan Laporan Manajemen Triwulanan.

b) PJT I akan melakukan stress testing setiap triwulan atas target-target utama 2024 dan menyesuaikan kembali daftar risiko utama apabila terdapat deviasi signifikan.

c) PJT I akan melaporkan hasil penanganan risiko utama setiap triwulan yang menjadi bagian dari laporan manajemen triwulanan sebagai bab tersendiri, yang memuat:

1. Hasil penanganan risiko yang menggambarkan penurunan terjadinya dampak dan kemungkinan atas suatu risiko.
2. Pemutakhiran daftar risiko utama pada bab manajemen risiko untuk proyeksi triwulan berikutnya hingga akhir tahun (apabila diperlukan).

BAB VIII
RENCANA KERJA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwa Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi. Sejalan dengan hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan anggaran dasar dan Keputusan Menteri, dan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Selanjutnya sesuai Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Dengan demikian, Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan perusahaan harus melaksanakan ketentuan perundang-undangan, memiliki integritas dan kompetensi, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I senantiasa akan terus meningkatkan upaya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi terhadap pengelolaan Perum Jasa Tirta I. Dengan adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas tersebut diharapkan akan lebih mendorong Perum Jasa Tirta I untuk dapat mewujudkan visi dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai pedoman atau pegangan bagi setiap anggota Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk komitmen dan tekad Dewan Pengawas untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam pengawasan pengelolaan

perusahaan yang disusun dengan mempertimbangkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

B. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan anggaran dasar dan keputusan Menteri, dan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, sesuai Pasal 61 PP Nomor 46 Tahun 2010 Dewan Pengawas berwenang untuk:

1. Melihat buku, surat serta dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah;
8. Membentuk Komite lain selain Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan Menteri.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kewajiban Dewan Pengawas sesuai Pasal 62 PP Nomor 46 Tahun 2010 adalah:

1. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan perusahaan;
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP serta RKAP yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai RJPP serta RKAP;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan;
5. Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada Menteri mengenai laporan tahunan, apabila diminta;
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
9. Membentuk Komite Audit;
10. Mengusulkan auditor eksternal kepada Menteri;
11. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas dan menyimpan salinannya;
12. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Menteri; dan
13. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan Menteri.

Sementara itu sesuai Pasal 36 PP Nomor 46 Tahun 2010, Dewan Pengawas juga berwenang memberikan persetujuan atas perbuatan Direksi sebagai berikut :

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO), dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Pengawas;

4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

C. Struktur Organisasi Dewan Pengawas

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN, susunan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	No. SK	Tanggal SK
Suprianto	Ketua	SK-229/MBU/10/2022	13 Oktober 2022
Muhammad Mahfud Faozi	Anggota	SK-250/MBU/07/2020	21 Juli 2020
Anita Ariyani	Anggota	SK-171/MBU/08/2022	9 Agustus 2022

Dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Dewan Pengawas dibantu oleh 2 orang Anggota Komite Audit dan GCG serta 2 orang Anggota Komite Risiko sebagai perangkat organ Dewan Pengawas. Sedangkan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas yang bersifat administratif, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas dan Staf Dewan Pengawas. Selain itu juga terdapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang keseluruhan anggotanya berasal dari anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I.

D. Rencana Kerja Dewan Pengawas

Dalam rangka mendukung implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan perusahaan, maka rencana kerja Dewan Pengawas tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai berikut:

1. Pembagian Kerja Dewan Pengawas

Dalam rangka efektivitas tugas dan fungsi Dewan Pengawas maka Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas sebagai berikut:

Nama	Bidang Kerja
Suprianto	Mengkoordinir dan membidangi seluruh wilayah penugasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Ketua Dewan Pengawas, disamping juga menjalankan tugas mengkoordinir dan membidangi seluruh

Nama	Bidang Kerja
	wilayah di bidang Nominasi dan Remunerasi dalam lingkup sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
M. Mahfud Faozi	Mengkoordinir dan membidangi seluruh wilayah penugasan dalam lingkup sebagai Ketua Komite Audit dan GCG merangkap pelaksana tugas Ketua Komite Audit dan GCG, dalam tugas pokok dan fungsi sebagai anggota Dewan Pengawas. Selain itu juga menjabat sebagai Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi.
Anita Aryani	Mengkoordinir dan membidangi seluruh wilayah penugasan dalam lingkup sebagai Ketua Komite Risiko merangkap pelaksana tugas Ketua Komite Risiko, dalam tugas pokok dan fungsi sebagai anggota Dewan Pengawas. Selain itu juga menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Rencana Kerja

(1) Rencana kegiatan Dewan Pengawas secara umum adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemahaman Dewan Pengawas terhadap lingkungan bisnis dan kinerja perusahaan secara menyeluruh.

b. Melakukan evaluasi terhadap progres capaian kinerja perusahaan selama tahun 2024 dengan memperhatikan keputusan dan arahan Menteri BUMN selaku Pemilik Modal.

c. Melakukan kunjungan kerja ke unit-unit perusahaan, sekaligus mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan RKAP Tahun 2024 dan RPB Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023.

d. Membahas laporan hasil audit KAP sebagai bahan masukan pada saat RPB Laporan Tahunan Tahun Buku 2023.

e. Melakukan telaah dan evaluasi atas laporan keuangan dan pelaksanaan laporan audit oleh KAP serta penyampaian laporan kepada Pemilik Modal.

f. Melakukan telaah dan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan.

g. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025.

(2) Rencana kerja Dewan Pengawas berdasarkan bidang tugas masing-masing Direktorat di tahun 2024 sebagai berikut :

a. Bidang Keuangan

Melakukan pengawasan, telaah dan evaluasi atas :

1) Penyusunan laporan keuangan tahunan perusahaan tahun buku 2023 dan pelaksanaan audit oleh eksternal auditor (KAP).
2) Kinerja KAP dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2023, serta mengusulkan KAP yang akan mengaudit laporan keuangan periode berikutnya, termasuk besaran biaya audit kepada Pemilik Modal.
3) Efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Perngawasan Intern (SPI) selama tahun 2024.
4) Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulanan, khususnya yang berkaitan dengan bidang keuangan.
5) Kebijakan keuangan berkaitan dengan pelaksanaan investasi baik rutin maupun non rutin.
6) Draft RJPP yang disusun dan disampaikan Direksi.
7) Konsep RKAP 2025 yang disusun oleh Direksi, khususnya yang berkaitan dengan bidang keuangan.

b. Bidang Operasional

1) Mengawasi pelaksanaan pelayanan air baku dan produktivitas sumber daya air.
2) Mengawasi pencapaian produksi air baku untuk PLTA, PDAM dan industri.
3) Mengikuti kebijakan Pemerintah dan memantau realisasi pelaksanaan kegiatan O&P.
4) Memantau progres penanganan manajemen risiko perusahaan khususnya terkait aspek keamanan bendungan.
5) Mengawasi program peningkatan pelayanan secara terus menerus yang didukung oleh sistem, cara kerja dan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi.
6) Memantau pencapaian target tahun 2024 melalui pengawasan terhadap:
   a) Penerapan tarif sesuai asumsi RKAP tahun 2024.
   b) Pelaksanaan pekerjaan O&P sesuai dengan target.
   c) Perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana SDA.

c. Bidang SDM dan Umum

Melakukan pengawasan, telaah dan evaluasi atas :

1) Struktur organisasi sesuai kebutuhan perusahaan.
2) Peningkatan kualitas SDM dan produktivitas kerja.

3) Kebijakan nominasi dan remunerasi pengurus perusahaan.
4) Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi dan pemberlakuan tarif BJPSDA serta perijinan.
5) Pengawasan atas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

d. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Melakukan pengawasan, telaah dan evaluasi atas :

1) Rencana pengembangan usaha dan investasinya.
2) Diversifikasi usaha di bidang non SDA.
3) Pemantauan dan pembinaan Anak Perusahaan.
4) Kerjasama operasional dengan BUMN lainnya.

(3) Rencana kerja Dewan Pengawas dalam rangka Menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG)

a. Kebijakan Sistem Teknologi Informasi

Melakukan monitoring dan pelaksanaan teknologi informasi secara berkala dan setiap tahun untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pelaksanaan, hasil, dan tujuan teknologi informasi.

b. Kebijakan Mutu dan Pelayanan

Melakukan pengawasan, telaah dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan air baku dan industri pada konsumen serta pengendalian mutu produk dan layanan perusahaan.

c. Telaah pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewas, antara lain melalui:

1) Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengaduan.
2) Mengawasi tindak lanjut manajemen atas pengaduan tersebut dengan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan SOP perusahaan serta informasi penting yang diperlukan dalam penyelesaian pengaduan tersebut.

d. Kebijakan Manajemen Risiko

Dewan Pengawas melakukan telaah dan evaluasi mengenai:

1) Kebijakan manajemen risiko perusahaan.
2) Efektivitas penerapan manajemen risiko perusahaan.

e. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
   1) Melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan *Talent Management System* perusahaan.
   2) Melakukan telaah dan evaluasi atas kebijakan nominasi.
   3) Melakukan telaah dan evaluasi atas usulan remunerasi dari Direksi.
   4) Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak;
   5) Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Direksi;
   6) Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
   7) Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan Kepala SPI yang diajukan oleh Direksi.
f. Kebijakan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
   1) Melakukan telaah atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan informasi yang diberikan oleh Direksi melalui pembahasan laporan keuangan triwulan dengan manajemen ataupun Auditor eksternal.
   2) Dewan Pengawas menyampaikan secara tertulis kepada Direksi atau dalam rapat Dewan Pengawas dan Direksi atas hasil telaah serta saran atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
g. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaannya
   1) Melakukan telaah atas kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya dengan menggunakan informasi yang diberikan oleh Direksi atau hasil pengawasan auditor internal dan eksternal atau hasil evaluasi/monitoring anggota Dewan Pengawas dan organnya.
   2) Menyampaikan secara tertulis kepada Direksi atau dalam rapat Dewan Pengawas dan Direksi atas hasil telaah serta saran atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.
h. Pembahasan Kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
i. Melakukan monitoring kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan seluruh perjanjian komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

j. Kebijakan lainnya antara lain pemantauan penerapan GCG, telaah atas pedoman pengendalian gratifikasi, serta reviu berkala atas pedoman *Whistle Blowing System* (WBS).

(4) Untuk pelaksanaan rencana kerja sebagaimana diuraikan di atas, Dewan Pengawas merencanakan rangkaian kegiatan/aktivitas sebagai berikut:

a) Kunjungan Kerja ke Unit-unit Usaha Perum Jasa Tirta I

Pada tahun 2024 direncanakan kunjungan kerja Dewan Pengawas ke Unit- unit Usaha, lokasi bendungan/waduk, proyek investasi, serta Anak Perusahaan yang akan dilakukan sebanyak 4 kali atau setiap triwulan. Kunjungan kerja Dewan Pengawas ini juga akan didampingi oleh Sekretaris Dewas Pengawas, Komite Audit & GCG, serta Komite Risiko.

b) Rapat Internal Dewan Pengawas

Rapat Internal Dewan Pengawas dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi kinerja bulanan Perum Jasa Tirta I yang dilakukan di Jakarta, Malang atau di kota lainnya baik secara *online* maupun *offline*. Rapat rencananya dilaksanakan minimal 12 kali dalam 1 tahun.

c) Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi

Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi difokuskan untuk membahas capaian kinerja bulanan dan hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian. Bilamana diperlukan, Dewan Pengawas dapat menugaskan Komite Audit & GCG dan Komite Risiko untuk melakukan klarifikasi atau peninjauan lapangan terhadap hal-hal yang membutuhkan pengamatan khusus. Selain itu rapat bersama Dewan Pengawas dengan Direksi yang bersifat insidentil akan dilaksanakan apabila terdapat hal-hal yang strategis atau dirasa perlu untuk dibahas sesuai kondisi perusahaan.

d) Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Menghadiri dan menyampaikan pendapat Dewan Pengawas dalam forum RPB Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2023 dan RPB Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Jasa Tirta I Tahun 2025.

e) Mengikuti Program Pelatihan/Seminar/Workshop Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Pemahaman Dewan Pengawas

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang terkait

dengan tugas pengawasannya sesuai dengan bidang usaha masing-masing BUMN. Aktivitas ini akan dilakukan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan, urgensi dan kebutuhan Dewan Pengawas.

f) Kegiatan Khusus (*event*)

Mengikuti kegiatan khusus baik yang diselenggarakan sendiri oleh perusahaan atau berdasarkan undangan yang diterima dari pihak-pihak eksternal terkait. Pelaksanaan kegiatan khusus tersebut mengingat ada yang sifatnya adalah pendampingan kepada Direksi, maka pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketersediaan waktu masing- masing Anggota Dewan Pengawas.

E. Rapat Dewan Pengawas

1. Jenis Rapat Dewan Pengawas
   a. Rapat Internal Dewan Pengawas, yaitu rapat yang dihadiri oleh Dewan Pengawas dan organ penunjang, yaitu Komite Audit & GCG, Komite Risiko dan Sekretariat Dewan Pengawas.
   b. Rapat Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi, yaitu rapat yang dihadiri Dewan Pengawas dan Direksi serta perangkat Dewan Pengawas dan Pejabat serta Staf PJT I bilamana diperlukan.
2. Rapat Dewan Pengawas

   Ketentuan mengenai rapat dewan pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

   a. Segala keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
   b. Dalam setiap rapat Dewan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat Dewan Pengawas yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan Anggota Dewan Pengawas jika ada.
   c. Asli risalah rapat Dewan Pengawas disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Pengawas menyimpan salinannya.
   d. Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 1 kali setiap bulan, dalam rapat tersebut Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.
   e. Selain rapat sebagaimana dimaksud pada butir e Dewan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Ketua Dewan Pengawas, diusulkan oleh

paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pengawas, atau atas permintaan tertulis dari Menteri dengan menyebutkan hal-hal yang dibicarakan.

f. Rapat Dewan Pengawas dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

g. Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Pengawas atau wakilnya.

h. Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang Anggota Dewas hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Pengawas lainnya.

i. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas.

j. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas tidak melakukan penunjukkan, salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh dan di antara anggota Dewan Pengawas yang ada, berwenang untuk memimpin rapat Dewan Pengawas.

k. Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada butir j tidak dilakukan, anggota Dewan Pengawas yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas yang memimpin rapat Dewan Pengawas.

l. Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang dari anggota Dewan Pengawas tersebut yang tertua dalam usia berwenang memimpin rapat Dewan Pengawas.

m. Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

n. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

o. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Pengawas yang diwakilinya.

p. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai tanggung jawab setiap anggota Dewan Pengawas.

q. Suara blanko atau abstain dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Sedangkan suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

F. Program Kerja Dewan Pengawas

Timeline Rencana Kerja Tahunan Dewan Pengawas tahun 2024 disusun dalam bentuk *Schedule* Program Kerja Tahunan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

1. Rapat Dewan Pengawas dan Direksi

   Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengawas dengan Direksi difokuskan untuk membahas kinerja bulanan dan hal-hal yang perlu mendapat penyelesaian segera. Bilamana diperlukan, Dewan Pengawas dapat menugaskan Komite Audit dan atau Komite Manajemen Risiko untuk melakukan klarifikasi atau melakukan pemeriksaan khusus atau peninjauan ke lapangan terhadap hal-hal yang membutuhkan pengamatan khusus.

   Rapat bersama Dewan Pengawas dengan Direksi yang bersifat insidentil akan dilaksanakan apabila terdapat hal-hal yang strategis atau dirasakan perlu untuk dibahas sesuai kondisi perusahaan. Agenda kegiatan rapat Dewan Pengawas dan Direksi.

2. Kunjungan Kerja Dewan Pengawas

   Dalam tahun 2024 direncanakan Kunjungan Kerja Dewan Pengawas ke Unit-unit Usaha dan Anak Perusahaan akan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Kunjungan Kerja ini akan didampingi oleh Sekretaris Dewas Pengawas, Komite Audit, Komite Risiko dan salah seorang pejabat dari Kantor Direksi Perum Jasa Tirta I.

3. Peningkatan Kapasitas Dewan Pengawas

   Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan kompetensi yang terkait dengan tugas pengawasannya sesuai dengan bidang usaha masing-masing BUMN dimana yang bersangkutan bertugas sebagaimana Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-9/MBU/09/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Aktivitas ini akan dilakukan tergantung urgensi dan kebutuhan Dewan Pengawas.

G. Rencana Anggaran Biaya Dewan Pengawas

Seluruh kebutuhan biaya yang diperlukan untuk kegiatan operasional Dewan Pengawas, Komite Audit dan GCG, Komite Risiko, dan Sekretariat Dewan Pengawas tertuang dalam

anggaran Dewan Pengawas dan menjadi beban Perum Jasa Tirta I di tahun 2024 dengan rincian usulan sebagai berikut:

No	Biaya	Jumlah (Rp)
1	Honorarium dan Tunjangan	3.636.540.000
2	Perjalanan Dinas & Kunjungan Kerja	1.377.000.000
3	Training/Seminar Luar Negeri	191.250.000
4	Training/Seminar Dalam Negeri	319.500.000
5	Biaya lain-lain	49.000.000
	Jumlah	5.573.290.000

H. *Key Performance Indicator* Dewan Pengawas

Indikator Kinerja Kunci atau *Key Performance Indicator* (KPI) Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I Tahun 2024 adalah sebagai berikut**:**

NO	Program Kerja	KPI	Bobot
I	**Aspek Pengawasan & Pengarahan**		**55**
	1. Menyelenggarakan Rapat Internal Dewan Pengawas.	12 kali	15
	2. Memberi nasehat/saran dan usulan serta menyampaikan reviu/analisis kinerja perusahaan dalam rapat Gabungan Dewas-Direksi	12 kali	15
	3. Memberikan rekomendasi/persetujuan atas Aksi Korporasi yang diusulkan oleh Direksi.	100%	5
	4. Review terhadap hasil pelaksanaan Audit Tahun Buku 2023 oleh KAP.	1 Dok	10
	5. Monitoring Kinerja Proyek dan Kunjungan Kerja Lapangan	4 Kali	10
II	**Aspek Pelaporan**		**35**
	6. Menyusun dan menyampaikaan Rencana Kerja Tahunan	1 kali	13
	7. Menyampaikan laporan/tanggapan/saran kepada Menteri BUMN selaku Pemilik Modal	3 Dok	10
	8. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Tahun Buku 2023	1 kali	12
III	**Aspek Dinamis**		**10**
	9. Peningkatan Kompetensi Dewas	2 kali	10
	Jumlah		**100**

Keterangan:

1. Penilaian realisasi terhadap target, maksimal sesuai dengan bobot.
2. Kriteria:
   a. Skor > 90% s.d. 100%, kriteria nilai Sangat Baik;

b. Skor > 80% s.d. 90%, kriteria nilai Baik;
c. Skor > 60% s.d. 80%, kriteria nilai Cukup;
d. Skor > 50% s.d. 60%, kriteria nilai Kurang;
e. Skor ≤ 50%, kriteria nilai Sangat Kurang.

RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PENGAWAS PJT I TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Jadwal	Indikator	Target 2024
1	Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan	1. Perolehan skor asessment penerapan GCG minimal 85% dari praktik terbaik	1. Rapat Rutin Dewan Pengawas (Internal dan dengan Direksi - Rapat Internal Dewan Pengawas - Rapat Gabungan dengan Direksi	 1 kali setiap bulan 1 kali setiap bulan	 % kehadiran/tahun % kehadiran/tahun	 90% 90%
2	Memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan usaha perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan	2. Terlaksananya fungsi pengawasan Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar 3. Meningkatnya pemahaman Dewan Pengawas atas kondisi perusahaan 4. Terlaksananya saran maupun arahan Dewan Pengawas oleh manajemen	1. Melakukan kunjungan kerja lapangan 2. Memberikan tanggapan laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan 3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2023 kepada Pemilik Modal 4. Memberikan persetujuan kepada Direksi yang terkait pengelolaan perusahaan sesuai kewenangan Dewan Pengawas 5. Memberikan pengarahan kepada jajaran manajemen dalam penyusunan RKAP 2025 6. Menghadiri Training/Seminar/ Konferensi baik di dalam maupun di luar negeri	Setiap triwulan 4 kali setiap tahun 1 kali setiap tahun Insidentil 1 kali setiap tahun insidentil	Frekuensi kunjungan/ tahun Jumlah kegiatan Tenggat waktu pelaporan sesuai ketentuan Tenggat waktu proses persetujuan Jumlah kegiatan Frekuensi keikutsertaan	4 kali 4 kali 4 bulan setelah tahun buku berakhir 15 hari setelah usulan masuk dan dokumen lengkap 1 kali 2 kali
			7. Mengadakan studi banding mengenai industri pengairan - Dalam Negeri	 Insidentil	 Frekuensi keikutsertaan	 1 kali

No	Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Jadwal	Indikator	Target 2024
			- Luar Negeri	Insidentil	Frekuensi keikutsertaan	1 kali
			8. Memberikan tanggapan dan rekomendasi terhadap usulan RKAP 2024	1 kali setiap tahun	Jumlah kegiatan	Paling lambat 30 November 2024
			9. Menghadiri Rapat Pembahasan Bersama	1 kali setiap tahun	Frekuensi kehadiran	1 kali
			- Pengesahan Laporan Keuangan (*audited*)	1 kali setiap tahun	Frekuensi kehadiran	1 kali
			- Pengesahan RKAP			

TIMELINE KEGIATAN DEWAN PENGAWAS TAHUN 2024

Bulan	Agenda	Minggu Ke-			
		I	II	III	IV
Januari	Rapat Internal Dewas Rapat Gabungan dengan Direksi : - Evaluasi Laporan Manajemen (LM) Desember 2023 - Pengesahan RKAP Tahun 2024				
Februari	Rapat Internal Dewas dan Kunjungan Kerja Lapangan Rapat Gabungan dengan Direksi : - Evaluasi LM Januari 2024 - Evaluasi LM Tahun 2023 (*audited*)				
Maret	Rapat Internal Dewas Rapat Gabungan dengan Direksi : - Evaluasi LM Februari 2024 - RPB LM Tahun 2023 Audited (dengan KBUMN)				
April	Rapat Internal Dewas Rapat Gabungan dengan Direksi : - Evaluasi LM Triwulan I 2024 - Progress report pending matters s/d Triwulan I 2024				
Mei	Rapat Internal Dewas dan Kunjungan Kerja Lapangan Rapat Gabungan dengan Direksi : - Evaluasi LM April 2024 Mengikuti Training/Seminar (dalam atau luar negeri)				
Juni	Rapat Internal Dewas Rapat Gabungan dengan Direksi : - Evaluasi LM Mei 2024				
Juli	Rapat Internal Dewas dan Kunjungan Kerja Lapangan Rapat Gabungan dengan Direksi : - Evaluasi LM SMT I 2024 - Progress report pending matters s/d Triwulan II 2024				
Agustus	Rapat Internal Dewas Rapat Gabungan dengan Direksi : - Evaluasi LM Juli 2024 Mengikuti Training/Seminar (dalam atau luar negeri)				
September	Rapat Internal Dewas Rapat Gabungan dengan Direksi : - Pembahasan Draft Awal RKAP 2025 - Evaluasi LM Agustus 2024 Penyusunan RKA Dewas Tahun 2025				
Oktober	Rapat Internal Dewas dan Kunjungan Kerja Lapangan Rapat Gabungan dengan Direksi : - Evaluasi LM Triwulan III 2024 & pending matters - Pembahasan Finalisasi RKAP 2025				
November	Rapat Internal Dewas Rapat Gabungan dengan Direksi : - Pembahasan Kinerja Prognosa Tahun 2024 - Evaluasi LM Oktober 2024				
Desember	Rapat Internal Dewas dan Kunjungan Kerja Lapangan Rapat dengan KAP - Rapat finalisasi Laporan KAP Rapat Gabungan dengan Direksi : - Evaluasi LM November 2024				

ANGGARAN DEWAN PENGAWAS TAHUN 2024

Uraian	Norma	Anggaran 2024
I. Honorarium dan Tunjangan Dewan Pengawas dan Organ		
1 Honorarium		
- Ketua Dewas	1 orang x 12 Bln x Rp	594,000,000
- Anggota Dewas	2 orang x 12 Bln x Rp	1,069,200,000
- Sekretaris Dewas	1 orang x 12 Bln x Rp	198,000,000
- Komite Dewas	4 orang x 12 Bln x Rp	1,056,000,000
- Staf Dewas	1 orang x 12 Bln x Rp	96,000,000
2. Tunjangan Transportasi	*Sub Jumlah (I.1)*	*3,013,200,000*
- Ketua Dewas	1 orang x 12 Bln x Rp	118,800,000
- Anggota Dewas	2 orang x 12 Bln x Rp	213,840,000
- Sekretaris Dewas	1 orang x 12 Bln x Rp	39,600,000
3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan	*Sub Jumlah (I.2)*	*372,240,000*
- Ketua Dewas	1 orang x 1 Bln x Rp	49,500,000
- Anggota Dewas	2 orang x 1 Bln x Rp	89,100,000
- Sekretaris Dewas	1 orang x 1 Bln x Rp	16,500,000
- Staf Dewas	1 orang x 1 Bln x Rp	8,000,000
- Komite Dewas	4 orang x 1 Bln x Rp	88,000,000
	Sub Jumlah (I.3)	*251,100,000*
	Jumlah (I)	***3,636,540,000***
II. Perjalanan Dinas/Kunjungan Kerja		
1 Tiket Pesawat Jakarta-Wilayah Kerja		
- Ketua Dewas	12 x 1 orang x Rp	60,000,000
- Anggota Dewas	12 x 2 orang x Rp	120,000,000
- Sekretaris Dewas	12 x 1 orang x Rp	60,000,000
- Komite Dewas	12 x 4 orang x Rp	240,000,000
- Staf Dewas	12 x 1 orang x Rp	60,000,000
	Jumlah (II.1)	*540,000,000*
2 Biaya Hotel		
- Ketua Dewas	12 x 1 orang x 2 malam x Rp	60,000,000
- Anggota Dewas	12 x 2 orang x 2 malam x Rp	120,000,000
- Sekretaris Dewas	12 x 1 orang x 2 malam x Rp	48,000,000
- Komite Dewas	12 x 4 orang x 2 malam x Rp	192,000,000
- Staf Dewas	12 x 1 orang x 2 malam x Rp	48,000,000
	Jumlah (II.2)	*468,000,000*
3. Uang Harian		
- Ketua Dewas	12 x 1 orang x 3 Hr x Rp	54,000,000
- Anggota Dewas	12 x 2 orang x 3 Hr x Rp	108,000,000
- Sekretaris Dewas	12 x 1 orang x 3 Hr x Rp	36,000,000
- Komite Dewas	12 x 4 orang x 3 Hr x Rp	144,000,000
- Staf Dewas	12 x 1 orang x 3 Hr x Rp	27,000,000
	Jumlah (II.3)	*369,000,000*
	Jumlah (II)	***1,377,000,000***
III Seminar Luar Negeri		
1 Tiket Pesawat	1 x 3 orang x $ 1750 x Rp	78,750,000
2 Uang Harian (5 hr, Incl. Hotel + Sewa Mobil)		
- Ketua Dewas	1 x 1 orang x $ 2500 x Rp	37,500,000
- Anggota Dewas	1 x 2 orang x $ 2500 x Rp	75,000,000
	Jumlah (III)	***191,250,000***
IV Seminar Dalam Negeri		
1 Tiket Pesawat		
- Dewas	2 x 3 orang x Rp	30,000,000
- Sekretaris Dewas dan Staf	2 x 2 orang x Rp	20,000,000
- Komite Dewas	2 x 4 orang x Rp	40,000,000
2 Uang Harian		
- Ketua Dewas	2 x 1 orang x 3 Hr x Rp	9,000,000
- Anggota Dewas	2 x 2 orang x 3 Hr x Rp	18,000,000
- Sekretaris Dewas	2 x 1 orang x 3 Hr x Rp	6,000,000
- Komite Dewas	2 x 4 orang x 3 Hr x Rp	24,000,000
- Staf Dewas	2 x 1 orang x 3 Hr x Rp	4,500,000
3 Sewa Kamar Hotel		
- Ketua Dewas	2 x 1 orang x 2 malam x Rp	10,000,000
- Anggota Dewas	2 x 2 orang x 2 malam x Rp	20,000,000
- Sekretaris Dewas	2 x 1 orang x 2 malam x Rp	8,000,000
- Komite Dewas	2 x 4 orang x 2 malam x Rp	32,000,000
- Staf Dewas	2 x 1 orang x 2 malam x Rp	8,000,000
	2 x 9 orang x Rp	90,000,000
	Jumlah (IV)	***319,500,000***

Uraian	Norma	Anggaran 2024
V Biaya Lain-lain		
1 Biaya pengobatan Dewan Pengawas	Sebesar pemakaian (at cost)	
2 Pakaian Kerja Dewas & Organ	9 orang x 1 Rp	18,000,000
3 Pembelian ATK		
- Biaya Pembelian Laptop	1 unit x 1 Rp.	25,000,000
4 Biaya Sosial Dewan Pengawas	12 Bln x 1 Rp.	6,000,000
	Jumlah (V)	***49,000,000***
TOTAL ANGGARAN		**5,573,290,000**

b. Struktur Organisasi Direksi

Susunan Direksi per Juni 2023 berdasarkan Kepmen BUMN dan Dewan Pengawas, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, yaitu:

Nama	Jabatan	No. SK	Tanggal SK
Fahmi Hidayat	Direktur Utama	SK-114/MBU/06/2023	6 Juni 2023
Milfan Rantawi	Direktur Operasional	SK-419/MBU/12/2021	29 Desember 2021
Mukhamad Taufiq	Direktur Keuangan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko	SK-419/MBU/12/2021	29 Desember 2021

JADWAL KEGIATAN RAPAT DIREKSI PJT I TAHUN 2024

Bulan	Agenda	Minggu ke-				Ket.
		I	II	III	IV	
Januari	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewan Pengawas (Dewas)				■	
	❖ Rapat Koordinasi Manajerial (RKM)			■		19 Januari 2024
	❖ Rapat Tinjauan Manajemen Pusat (RTMP)				■	
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	
Februari	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewas				■	
	❖ RKM			■		19 Februari 2024
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	
Maret	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewas				■	
	❖ RKM			■		19 Maret 2024
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	
April	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewas				■	
	❖ RKM			■		19 April 2024
	❖ RTMP				■	
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	
Mei	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewas				■	
	❖ RKM			■		17 Mei 2024
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	
Juni	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewas				■	
	❖ RKM			■		19 Juni 2024
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	
Juli	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewas				■	
	❖ RKM			■		19 Juli 2024
	❖ RTMP				■	
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	
Agustus	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewas				■	
	❖ RKM			■		19 Agustus 2024
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	
September	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewas				■	
	❖ RKM			■		19 September 2024
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	
Oktober	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewas				■	
	❖ RKM			■		18 Oktober 2024
	❖ RTMP				■	
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	
Nopember	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewas				■	
	❖ RKM			■		19 Nopember 2024
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	
Desember	❖ Rapat Internal Direksi	■				
	❖ Rapat Gabungan dengan Dewas				■	
	❖ RKM			■		19 Desember 2024
	❖ *lain-lain (sesuai kebutuhan)*	■	■	■	■	

Malang, 18 September 2023
Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Direktur Utama

FAHMI HIDAYAT

BAB IX
PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

A. Kebijakan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL)

Dalam proses penyaluran Program TJSL, Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (**PJT I**) berpedoman pada *Good Corporate Governance* (**GCG**), ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, komunikasi program serta pelaporan pertanggungjawaban program.

Pelaksanaan dan penyajian Program TJSL PJT I mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (**BUMN**);
2. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
3. Peraturan Direksi PJT I Nomor 0009/PRT/DRUT/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PJT I;
4. Surat Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (”Kerjasama Program PUMK”);
5. Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/3/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program TJSL BUMN;
6. Peraturan Direksi PJT I Nomor 0004/PRT/DRUT/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program TJSL PJT I;
7. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024;
8. Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-277/MBU/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Dan/Atau Pembiayaan Syariah Bermasalah Pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di BUMN;
9. Surat Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor S-134/DSI.MBU/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penyajian Rencana Kerja dan Anggaran TJSL Tahun 2024.

PJT I akan melaksanakan Aspirasi Pemegang Saham sebagaimana surat Menteri BUMN Nomor S-491/MBU/09/2023 tanggal 29 September 2023 hal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2024, antara lain:

1. PJT I menjalankan Program TJSL Tahun 2024 dengan fokus pada 3 (tiga) bidang yaitu: Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan UMK.
2. Perencanaan Program TJSL PJT I memperhatikan identifikasi risiko Perusahaan dan mengakomodir risiko yang dapat diatasi dengan strategi TJSL.
3. Perencanaan Program TJSL PJT I mencakup ruang lingkup Program TJSL yang terdiri dari 7 (tujuh) Subjek Inti (ref: SNI ISO 26000:2010) yaitu Tata Kelola Organisasi, Hak Asasi Manusia, Praktik Perburuhan, Lingkungan, Praktik Operasi Yang Adil, Isu Konsumen. Pelibatan dan Pengembangan Komunitas.
4. Perencanaan Program TJSL PJT I secara konsisten melaksanakan transformasi TJSL meliputi fokus pada dampak, peningkatan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kolaborasi dan *engagement karyawan*.
5. Perencanaan Program TJSL PJT I mengoptimalkan penyaluran dana Program Pendanaan UMK melalui BRI serta memberikan pembinaan terhadap UMK. PJT I tetap mengupayakan pelaksanaan penagihan dan penyelesaian piutang bermasalah Pendanaan UMK.
6. PJT I akan berupaya memenuhi 5 (lima) indikator *Key Performance Indicators* (KPI) Tahun 2024 yang menjadi target kinerja Program TJSL dengan sebaik-baiknya.

B. Program TJSL

Program TJSL BUMN adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti BUMN terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan;
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan;
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan; dan

4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:

1. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
2. Lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
3. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
4. Hukum dan Tata Kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Program TJSL BUMN dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjamin pelaksanaan dan pencapaian keberhasilan Program TJSL sesuai dengan prioritas dan/atau pencapaian dari tujuan Program TJSL yang berpedoman pada rencana kerja.

Program TJSL meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengawasan; dan
4. Pelaporan.

Sasaran Program TJSL adalah kepada stakeholder atau pemangku kepentingan agar proses operasional perusahaan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat kepada perusahaan dan masyarakat, serta secara berdampingan dengan kesuksesan perusahaan.

Program TJSL juga membantu kelancaran operasional bisnis perusahaan dan nilai-nilai dari semua pemangku kepentingan, yang terdiri dari pelanggan, pemasok barang dan jasa, lembaga/institusi terkait, karyawan serta masyarakat yang ada di sekitar wilayah kerja perusahaan. Selain hal tersebut, Program TJSL juga mendukung keberlanjutan bisnis PJT I.

Manfaat Program TJSL bagi perusahaan antara lain:

1. Sebagai bagian dari manajemen risiko dan dampak perusahaan;
2. Membina hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan;

3. Meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan;
4. Memperbaiki citra, mutu dan produktivitas perusahaan;
5. Meningkatkan pendapatan perusahaan;
6. Meningkatkan loyalitas pelanggan.

Dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (**RKA**) Program TJSL, PJT I memperhatikan:

1. Dampak dan risiko dari aktivitas perusahaan;
2. Kebutuhan dan peluang bisnis yang timbul;
3. Keunggulan dan kearifan lokal;
4. Keberlangsungan dan dampak yang diharapkan;
5. Berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan; dan
6. Penciptaan nilai bersama (perusahaan dan masyarakat).

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (**TPB**) antara lain:

NO.	TPB
1.	Tanpa Kemiskinan
2.	Tanpa Kelaparan
3.	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4.	Pendidikan Berkualitas
5.	Kesetaraan Gender
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak
7.	Energi Bersih dan Terjangkau
8.	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur
10.	Berkurangnya Kesenjangan
11.	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
12.	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13.	Penanganan Perubahan Iklim
14.	Ekosistem Lautan
15.	Ekosistem Daratan
16.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Adapun 4 (empat) pilar TPB adalah sebagai berikut:

NO.	PILAR TPB
1.	Pilar Pembangunan Sosial
2.	Pilar Pembangunan Ekonomi
3.	Pilar Pembangunan Lingkungan
4.	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Berikut korelasi antara 4 (empat) pilar TPB dengan TPB:

NO.	PILAR TPB	KORELASI
1.	Pilar Pembangunan Sosial	TPB No. 1, 2, 3, 4 dan 5
2.	Pilar Pembangunan Ekonomi	TPB No. 7, 8, 9, 10 dan 17
3.	Pilar Pembangunan Lingkungan	TPB No. 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
4.	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	TPB No. 16

C. Kondisi Umum

1. Strategi perusahaan.

Strategi yang diterapkan perusahaan, antara lain:

a. Strategi dalam pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi:
   1) Menjaga arus kas (CFO) perusahaan, EBITDA dan *Net Profit Margin* (NPM).
   2) Melakukan belanja operasional (OPEX) dan kegiatan investasi (CAPEX) dengan lebih selektif dan seksama berdasarkan skala prioritas.
   3) Melakukan koordinasi dan meminta dukungan Kementerian BUMN dan PT Danareksa (Persero) turut berperan dalam upaya penyesuaian tarif yang berlaku dan penetapan tarif untuk kelompok pengguna baru.
   4) Peningkatan dana investasi dari sumber dana internal perusahaan melalui perolehan laba.
   5) *Strengthening* perusahaan dalam bidang Jasa Air melalui pengembangan wilayah kerja.

b. Strategi dalam pencapaian Kinerja Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) adalah Nilai Prestasi 100:
   1) Pengawasan dan pengendalian tata kelola perusahaan.
   2) Penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen risiko, serta peningkatan kinerja usaha pada seluruh wilayah kerja perusahaan.

c. Strategi dalam pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengelolaan infrastruktur tertentu yang diberikan penugasannya secara khusus atas kebijakan dari PUPR:
   1) Mempertahankan kinerja sistem keamanan bendungan dalam kondisi baik.
   2) Adaptasi perusahaan terhadap mekanisme BJPSDA sebagai PNBP sesuai PP nomor 21 Tahun 2023 perihal Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
   3) Penguatan sinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan SDA melalui penyusunan pembagian peran dan tugas (*Clear Cut*) dengan BBWS/BWS terkait.
   4) Konservasi SDA guna peningkatan keseimbangan hidrologi di wilayah kerja perusahaan.
   5) Melakukan tata kelola air yang mengutamakan kelestarian lingkungan.
d. Strategi dalam pembinaan atas pemanfaatan air yang berizin dan pemungutan BJPSDA di seluruh wilayah kerja perusahaan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan perizinan pemakaian air yang berlaku:
   1) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada pemanfaat utama, dalam rangka memahami kewajiban pembayaran BJPSDA atas pemanfaatan air permukaan yang telah diperoleh.
   2) Melakukan koordinasi dengan meminta dukungan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN dalam menyelesaikan masalah pembayaran kewajiban BJPSDA.
   3) Melakukan pemantauan volume pemanfaatan air sesuai dengan izin yang ditetapkan.
e. Strategi dalam peningkatan pendapatan dan profitabilitas bisnis Non SDA:
   1) Pengusahaan atas optimasi sumber daya non sumber daya air sehingga ada pertumbuhan portofolio bisnis yang telah ada dan penambahan portofolio.
   2) Penguatan kapabilitas korporasi dalam penyediaan air minum melalui bisnis SPAM.
   3) Peningkatan pendapatan Non SDA melalui pengembangan bisnis kepada anak perusahaan JTE.
   4) Pengelolaan dan pengembangan WWTP sebagai bisnis Non SDA serta untuk memenuhi kelas baku mutu air baku.
   5) Diperlukan *roadmap* pengembangan EBT PJT I.

2. Risiko perusahaan terkait TJSL.

Risiko perusahaan terkait TJSL antara lain:

No.	Risiko Perusahaan	Penyebab Risiko	Rencana Perlakuan Risiko dengan Program TJSL
1.	Kegagalan pencapaian profil sedimen	Laju sedimentasi yang tinggi karena perubahan tata guna lahan dan kerusakan DAS	a. Pelaksanaan Program Perlindungan DAS melalui kegiatan penghijauan dan pemeliharaan tanaman di wilayah kerja PJT I. b. Pelaksanaan Program Sumur Resapan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Rembang. c. Pelaksanaan Program Pelestarian Mata Air di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba. d. Pelaksanaan Program Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Air di hulu Bendungan Wonogiri.
2.	Ketidakseimbangan ekosistem akuatik di waduk	a. Pencemaran air yang berdampak negatif pada kehidupan akuatik. b. Perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global mempengaruhi keseimbangan ekosistem akuatik di waduk.	Pelaksanaan Program Perlindungan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati melalui: a. Penebaran bibit ikan di waduk/telaga yang dikelola PJT I antara lain: - 80.000 ekor di Waduk Bening. - 100.000 ekor di Waduk Wonogiri.

No.	Risiko Perusahaan	Penyebab Risiko	Rencana Perlakuan Risiko dengan Program TJSL
		c. *Overfishing* atau penangkapan ikan secara berlebihan.	- 25.000 ekor di Waduk Mulur. - 25.000 ekor di Waduk Delingan. - 30.000 ekor di Telaga Ngebel. - 50.000 ekor di Bendungan Kedungombo. - 10.000 ekor di Bendung Sidorejo. - 10.000 ekor di Bendung Klambu. - 50.000 ekor di Bendung Jelok. - 10.000 ekor di Bendungan Sempor. - 15.000 ekor di Bendungan Wadaslintang. - 10.000 ekor di Bendung Pejengkolan. b. Pemantauan keanekaragaman hayati sekitar Waduk Wonogiri.
3.	Penurunan *cash flow* perusahaan	Inventaris nota atau bukti transaksi tidak baik	Pelaksanaan Program Pengembangan SDM melalui pemberian pelatihan keuangan kepada karyawan perusahaan

No.	Risiko Perusahaan	Penyebab Risiko	Rencana Perlakuan Risiko dengan Program TJSL
4.	Kegagalan penyelesaian pekerjaan PJPSDA	Meningkatnya jumlah paket pengadaan OP Berkala Kontraktual yang signifikan terhadap tahun sebelumnya	Pelaksanaan Program Pengembangan SDM melalui pemberian pelatihan pengadaan barang dan jasa kepada karyawan pengelola pengadaan agar meningkat kapasitas dan kompetensinya
5.	Kegagalan/Keruntuhan Bendungan Sutami	Adanya keruntuhan bendungan akibat retakan di puncak bendungan dan kerusakan infrastruktur yang dipicu adanya kebocoran *waterway* PLTA Sutami	a. Pelaksanaan Program Pengembangan SDM melalui pemberian pelatihan kepada petugas OP Bendungan terkait Pedoman OP yang berlaku. b. Pelaksanaan Program Inspeksi Besar Bendungan.
6.	Kerugian yang disebabkan adanya penyuapan pada lingkup Penagihan BJPSDA, Pengadaan Barang dan Jasa, Penerimaan Karyawan dan Program TJSL	a. Kurangnya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan. b. Tidak dilaksanakannya uji kelayakan pada kegiatan dan personil.	Pelaksanaan Program Penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (**SMAP**) melalui pelaksanaan internal audit ISO 37001:2016 pada lingkup Penagihan BJPSDA, Pengadaan Barang dan Jasa, Penerimaan Karyawan dan Program TJSL.
7.	Kegagalan proses dan kerugian akibat terjadinya ketidaksesuaian mutu produk dan jasa	Perusahaan tidak mengimplementasikan ISO 9001:2015 dengan baik.	Pelaksanaan Program Penguatan ISO 9001:2015 melalui pelaksanaan internal audit ISO 9001:2015 pada seluruh unit kerja di PJT I.

No.	Risiko Perusahaan	Penyebab Risiko	Rencana Perlakuan Risiko dengan Program TJSL
8.	Kerugian yang disebabkan adanya banjir di wilayah kerja perusahaan	Instrumen pemantauan tingkat air dan curah hujan yang dimiliki tidak akurat sehingga tidak mengetahui adanya peringatan dini banjir serta tingkat kelebatan curah hujan.	Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Inovatif melalui peremajaan *Automatic Water level Recorder* (**AWLR**) dan *Automatic Rain Recorder* (**ARR**) serta *Upgrading Smart Water Management System* (**SWMS**)

3. Area inti/*core subject* atas TJSL

Program TJSL BUMN mengacu ISO 26000 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Adapun 7 (tujuh) subjek inti dalam ISO 26000 antara lain:

a. Tata Kelola Organisasi: proses dan struktur pengambilan keputusan;

b. Hak Asasi Manusia: uji tuntas, situasi berisiko hak asasi manusia, menghindari persekongkolan, menyelesaikan pengaduan, diskriminasi dan kelompok rentan, hak sipil dan politik, prinsip dan hak dasar di tempat kerja dan hak ekonomi, sosial dan budaya;

c. Praktik Perburuhan: pekerjaan dan hubungan kerja, kondisi kerja dan perlindungan sosial, dialog sosial, kesehatan dan keselamatan kerja dan pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan di tempat kerja;

d. Lingkungan: pencegahan pencemaran, penggunaan sumber daya berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, keanekaragaman hayati dan pemulihan habitat asli;

e. Praktik Operasi yang Adil: anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab, persaingan usaha yang adil, mendorong tanggung jawab sosial dalam rantai nilai dan menghargai hak kepemilikan;

f. Isu Konsumen: pemasaran yang adil, informasi faktual dan obyektif serta praktik kontraktual yang adil, melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen, konsumsi berkelanjutan, layanan, dukungan serta penyelesaian keluhan dan perselisihan konsumen, perlindungan data dan privasi konsumen, akses ke pelayanan dasar dan edukasi dan kepedulian;

g. Pelibatan dan Pengembangan Komunitas: pelibatan dalam komunitas, pendidikan dan kebudayaan, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan, pengembangan dan akses teknologi, penciptaan pendapatan dan kemakmuran, kesehatan dan investasi sosial.

Pada subjek inti Tata Kelola Organisasi, tahun 2024 PJT I akan melakukan pemantauan atas penerapan GCG, asesmen GCG dan pelaksanaan tindak lanjut hasil asesmen GCG dengan anggaran sebesar Rp100.000.000.

Pada subjek inti Hak Asasi Manusia, tahun 2024 PJT I akan melaksanakan kegiatan pelatihan *Women Leadership* dengan anggaran sebesar Rp50.000.000 yang bertujuan agar 10% dari *nominated talent* merupakan karyawan perempuan.

Pada subjek inti Praktik Perburuhan, tahun 2024 PJT I akan melakukan penyediaan peralatan K3/APD agar tidak terjadi kecelakaan akibat kerja (*zero accident*) dengan anggaran sebesar Rp100.000.000 serta melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi bagi karyawan dengan target realisasi biaya sebesar 95% dari Biaya Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi dan besaran anggaran adalah Rp2.900.000.000.

Pada subjek inti Lingkungan, tahun 2024 PJT I akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan penghijauan (penanaman 317.500 batang pohon) dan pemeliharaan tanaman (90.200 batang pohon) di wilayah kerja PJT I dengan total anggaran masing-masing sebesar Rp9.139.331.000 dan Rp6.654.543.500.
b. Penebaran bibit ikan sebanyak 415.000 ekor di waduk/telaga yang dikelola PJT I dengan total anggaran sebesar Rp265.940.000 dan pemantauan keanekaragaman hayati sekitar Waduk Wonogiri dengan anggaran sebesar Rp70.000.000.
c. Pelaksanaan pemantauan pengukuran lingkungan kerja secara rutin (1 tahun sekali) dengan anggaran sebesar Rp300.000.000.
d. Pelaksanaan pemantauan, pengukuran dan evaluasi kualitas air dengan menyampaikan laporan hasil kualitas air triwulanan maupun kondisi khusus (kejadian pencemaran) dengan anggaran sebesar Rp4.093.406.300.
e. Pelaksanaan pemantauan, pengukuran, evaluasi dan monitoring keamanan tubuh bendungan serta asistensi kepada Balai Teknik Bendungan melalui diskusi teknis, sidang teknis dan sidang pleno keamanan bendungan dengan anggaran sebesar Rp500.000.000.

Pada subjek inti Praktik Operasi yang Adil, tahun 2024 PJT I akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Internal audit ISO 9001:2015 kepada seluruh unit di PJT I untuk mengkaji dan mengevaluasi keandalan dan kesehatan sistem pengendalian internal serta memastikan kepatuhan terhadap standar, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp130.000.000.
b. Internal audit ISO 37001:2016 kepada unit terkait di PJT I yang membantu memberikan jaminan kepada manajemen bahwa perusahaan telah melaksanakan praktek kontrol anti suap yang baik dan diakui secara internasional dengan anggaran sebesar Rp70.000.000.

Pada subjek inti Isu Konsumen, tahun 2024 PJT I akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Peremajaan 4 unit *Automatic Water Level Recorder* (**AWLR**) WS Brantas yang bermanfaat sebagai alat pemantauan tingkat air yang akurat, peringatan dini banjir, pengelolaan sumber daya air, pengembangan infrastruktur dan pemantauan perubahan cuaca dengan anggaran sebesar Rp300.000.000.
b. Peremajaan 4 unit *Automatic Rain Recorder* (**ARR**) WS Brantas yang digunakan untuk mencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya dengan satuan milimeter (mm) yang hasil pengukurannya dapat diperoleh setiap hari atau mingguan dengan anggaran sebesar Rp260.000.000.
c. *Upgrading Smart Water Management System* (**SWMS**) yang bermanfaat menyediakan data real time otomatik kondisi sumber daya air dan lingkungan serta prakiraan kondisi cuaca dan iklim dengan anggaran sebesar Rp350.000.000.

Pada subjek inti Pelibatan dan Pengembangan Komunitas, tahun 2024 PJT I akan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (**IPAL**) Biogas di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang, paket makanan tambahan, vitamin, obat-obatan untuk pencegahan stunting di Kabupaten Tulungagung, pelaksanaan program pelatihan dan uji sertifikasi guru di Kabupaten Tulungagung, pembangunan jamban di wilayah kerja PJT I, pelatihan usaha dan alat produksi bagi masyarakat miskin Ekstrem di Kabupaten Trenggalek, pembuatan penerangan jalan umum di Kota Surabaya, penyediaan ruang publik di Kota Surabaya, pengadaan pompa air di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang, pengadaan suplai air bersih pada daerah terdampak bencana kekeringan di WS Bengawan Solo, pembuatan Instalasi Pemanenan Air Hujan (**IPAH**) dan sumur resapan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Rembang, pengadaan alat bagi pembudidaya ikan, penanaman pohon sekitar mata air di Kabupaten Samosir dan Kabupaten

Toba, pengendalian sampah di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba dan Kota Semarang, sarana ibadah di wilayah kerja PJT I, kegiatan pemanfaatan eceng gondok bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja PJT I, pembangunan sumur resapan di hulu Bendungan Wonogiri, bantuan dana pendidikan bagi pelajar berprestasi di wilayah kerja PJT I, kegiatan pembinaan UMK melalui pelatihan/sertifikasi UMK, program sembako murah bagi masyarakat kurang mampu/miskin ekstrem dan bantuan bencana alam untuk kejadian bencana di seluruh Indonesia serta pemberian pinjaman kepada usaha mikro dan usaha kecil melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (**BRI**) dengan total anggaran sebesar Rp1.729.000.000.

Adapun Program TJSL Tahun 2024 secara ringkas sebagai berikut:

No.	Subjek Inti	Program
1.	Tata Kelola Organisasi	Program pelaksanaan GCG PJT I.
2.	Hak Asasi Manusia	Program peningkatan jumlah perempuan dalam *nominated talent*.
3.	Praktik Perburuhan	1. *Zero Accident Program* 2. Program Pengembangan SDM
4.	Lingkungan	1. Program perlindungan Daerah Aliran Sungai (**DAS**) 2. Program perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati. 3. Program pemantauan kualitas lingkungan kerja. 4. Program pemantauan kualitas air. 5. Inspeksi Besar Bendungan.
5.	Praktik Operasi yang Adil	1. Program Penguatan ISO 9001:2015. 2. Program Penguatan ISO 37001:2016.
6.	Isu Konsumen	Program Pengembangan Teknologi Inovatif
7.	Pelibatan dan Pengembangan Komunitas	1. Program IPAL Biogas di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dan di sekitar Sungai Konto Kabupaten Malang. 2. Program pencegahan *stunting* di Kabupaten Tulungagung. 3. Program Sertifikasi Guru Non ASN. 4. Program jambanisasi di wilayah kerja PJT I.

No.	Subjek Inti	Program
		5. Program pemberdayaan bagi masyakarat miskin ekstrem di Kabupaten Trenggalek. 6. Program penerangan jalan umum di Kota Surabaya. 7. Program bantuan penyediaan ruang publik. 8. Program pengairan bagi petani di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang. 9. Program penanganan bencana kekeringan di WS Bengawan Solo. 10. Program IPAH dan sumur resapan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Rembang. 11. Program pelestarian mata air di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba. 12. Program pemberdayaan pembudidaya ikan. 13. Program bantuan tong sampah di Kabupaten Toba dan Kabupaten Simalungun. 14. Program sarana ibadah di wilayah kerja PJT I. 15. Program sumur resapan dan sanitasi. 16. Program pengendalian sampah di kawasan Pasar Porsea Kabupaten Toba dan Saluran Klambu Kota Semarang. 17. Program susur sungai. 18. Program pengendalian eceng gondok. 19. Program lingkungan pengelolaan sumber daya air di hulu Bendungan Wonogiri. 20. Program dana pendidikan. 21. Program literasi pendidikan. 22. Program pembinaan UMK. 23. Program sembako murah. 24. Program sertifikasi UMK.

No.	Subjek Inti	Program
		25. Program bencana alam. 26. Program pendanaan UMK PJT I.

4. Isu eksternal yang terkait TJSL serta pemangku kepentingan yang terlibat.

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
1.	Ancaman Krisis Air Bersih di Indonesia pada tahun 2045	Tidak menentunya musim membuat siklus air di bumi berubah sehingga kekeringan berkepanjangan terjadi di sejumlah wilayah. Selain disebabkan perubahan iklim, krisis air juga dipicu oleh meningkatnya kebutuhan air yang tidak diimbangi dengan upaya penyediaan suplai	a. Pelaksanaan Program Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Air di hulu Bendungan Wonogiri (Kolaborasi BUMN). b. Pelaksanaan Program IPAH dan Sumur Resapan di Kabupaten Boyolali. c. Pelaksanaan Program IPAH dan	a. Kementerian BUMN. b. PJT I. c. BUMN terkait. d. Pemerintah desa terkait. e. Masyarakat terkait. f. Media.

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
		air secara berkelanjutan. Perlu dilakukan upaya konservasi air untuk menjaga ketersediaan air di masa depan, diantaranya melalui pembuatan instalasi pemanenan air hujan dan sumur resapan air.	Sumur Resapan di Kabupaten Semarang. d. Pelaksanaan Program IPAH dan Sumur Resapan di Kabupaten Rembang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemberian bantuan pembuatan IPAH dan sumur resapan di Desa Sedayu Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dan Kabupaten Rembang serta pembuatan sumur resapan di hulu Bendungan Wonogiri.	
2.	Ancaman perubahan iklim	Perubahan iklim berkontribusi pada beberapa hal,	a. Pelaksanaan Program Pelestarian Mata	a. PJT I. b. Dinas terkait di Kabupaten Toba

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
		diantaranya: perubahan suhu secara temporal, perubahan perilaku debit mata air, dan perubahan sifat fisik dan kimia mata air. Selain itu faktor antropogenik berupa perubahan penggunaan lahan, termasuk penggundulan hutan dan urbanisasi, dapat menyebabkan berkurangnya infiltrasi air, yang mempengaruhi pengisian Kembali akuifer dan mata air. Oleh karena itu diperlukan strategi konservasi mata air sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dan mampu menjamin kelestarian hasil air	Air di Kabupaten Samosir. b. Pelaksanaan Program Pelestarian Mata Air di Kabupaten Toba. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemberian bantuan kegiatan penanaman pohon sekitar mata air di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba.	dan Kabupaten Samosir. c. Masyarakat di Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir.

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
		(kualitas, kuantitas, distribusi secara temporal).		
3.	Ancaman El Nino sampai 2024	El Nino yang dimulai pada Juni 2023 membuat cuaca di banyak wilayah Indonesia lebih kering dan mengalami panas. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekeringan di beberapa wilayah kerja PJT I.	a. Pelaksanaan Program Pengairan bagi petani di Kabupaten Kediri melalui pemberian bantuan pengadaan pompa air untuk Gabungan Himpungan Petani Pemakai Air (**HIPPA**) Turi Makmur pada musim kemarau di Kecamatan Papar, Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri. b. Pelaksanaan Program Pengairan bagi petani di Kabupaten	a. PJT I. b. Gabungan HIPPA Turi Makmur. c. Gabungan HIPPA Sumber Barokah Jaya. d. BPBD di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Ngawi, Blora, Bojonegoro dan Lamongan. e. Masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Ngawi, Blora, Bojonegoro dan Lamongan

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
			Jombang melalui pemberian bantuan pengadaan pompa air untuk HIPPA Sumber Barokah Jaya pada musim kemarau di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. c. Pelaksanaan Program Penanganan Bencana Kekeringan di WS Bengawan Solo melalui pemberian bantuan pengadaan suplai air bersih pada daerah terdampak bencana kekeringan di WS Bengawan Solo (Kabupaten Wonogiri,	

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
			Sukoharjo, Sragen, Ngawi, Blora, Bojonegoro dan Lamongan).	
4.	Permasalahan sampah di Indonesia yang belum teratasi	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi salah satu faktor penyebab masalah sampah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kebiasaan hidup dan budaya masyarakat di Indonesia. Sampah sendiri dinilai sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat yang harus dibuang, sementara masyarakat sendiri tidak memikirkan bagaimana cara penanganan	a. Pelaksanaan Program Pengendalian Sampah di Kota Parapat. Kegiatan dilakukan melalui pemberian bantuan pengadaan tong sampah di pusat wisata Kota Parapat mengingat jumlah tong sampah yang ada belum mencukupi serta mendukung Danau Toba sebagai salah satu dari 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Super Prioritas. b. Program Pengendalian	a. PJT I. b. Dinas terkait di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba dan Kota Semarang. c. Para pegiat sampah terkait. d. SMAN 1 Narumonda Kecamatan Siantar Kabupaten Toba. e. Masyarakat terkait.

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
		sampah. Selain itu, rendahnya manajemen sampah dan kurangnya tempat pembuangan sampah juga mengakibatkan masalah sampah terus meningkat.	Sampah di kawasan Pasar Porsea Kabupaten Toba. Kegiatan dilakukan melalui pembuatan 1 Bank Sampah di kawasan Pasar Porsea Kabupaten Toba. c. Program Pengendalian Sampah Saluran Klambu Kota Semarang. Kegiatan dilakukan melalui pembuatan 1 Bank Sampah di Kota Semarang. d. Program Pengendalian Sampah di Kabupaten Toba. Kegiatan dilakukan melalui pemberian bantuan tong sampah di SMAN 1 Narumonda Kecamatan Siantar	

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
			Kabupaten Toba karena sampah saat ini dibuang ke pekarangan dan lahan kosong kemudian dilakukan pembakaran.	
5.	*Blooming* eceng gondok	Terjadinya fenomena *blooming* eceng gondok pada Danau Rawa Pening di Provinsi Jawa Tengah. Penyebabnya terkait dengan kondisi lingkungan, termasuk tingginya kandungan nutrisi dalam air. Oleh karena itu, upaya pengelolaan berkelanjutan sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dari *blooming* eceng gondok dan	Pelaksanaan Program Pengendalian Eceng Gondok melalui pemberian bantuan kegiatan pemanfaatan eceng gondok menjadi produk yang memiliki nilai jual bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja Perusahaan.	a. PJT I. b. Pemerintah desa terkait. c. Masyarakat di sekitar Danau Rawa Pening.

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
		melindungi keanekaragaman hayati perairan.		
6.	Meningkatnya permasalahan pencemaran air sungai	Di aliran Sungai Song yang mengarah ke Waduk Wonorejo dan di aliran Sungai Konto yang mengarah ke Waduk Selorejo ditemukan limbah kotoran sapi yang dibuang oleh peternak sapi.	a. Pelaksanaan Program IPAL Biogas di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. b. Pelaksanaan Program IPAL Biogas di sekitar Sungai Konto Kabupaten Malang. Program ini ditujukan untuk menjaga kebersihan Sungai Song dan Sungai Konto serta mencegah pencemaran air dari limbah kotoran sapi, membantu warga dalam penyediaan fasilitas pengolahan limbah kotoran sapi menjadi biogas dan	a. PJT I. b. Peternak sapi di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. c. Peternak sapi di sekitar Sungai Konto Kabupaten Malang. d. Pemerintah Desa di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. e. Pemerintah Desa di sekitar Sungai Konto Kabupaten Malang.

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
			pupuk organik serta mengurangi polusi udara dari limbah kotoran sapi.	
7.	Meningkatnya jumlah kasus *stunting* di Indonesia	Presiden Republik Indonesia menginstruksikan untuk menurunkan angka *stunting* menjadi 14% di tahun 2024. Saat ini, angka *stunting* di Kabupaten Tulungagung masih berada di angka 17,2%. Menurut kerangka "The Conceptual Framework of the Determinans of Child Undernutrition" dan "The Underlying Drivers of Malnutrition", *stunting* pada anak terjadi karena 2 faktor yaitu langsung dan tidak	Pelaksanaan Program Pencegahan *Stunting* di Desa Besuki Kecamatan Besuki dan Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung melalui pemberian bantuan penyediaan paket suplemen, makanan tambahan, vitamin, obat-obatan, pemeriksaan posyandu dan penyuluhan kesehatan untuk membantu pencegahan *stunting* secara langsung.	a. PJT I. b. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. c. Pemerintah Desa Besuki Kecamatan Besuki dan Pemerintah Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. d. Masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Besuki dan Desa Kedungcangkring Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
		langsung. Penyebab *stunting* secara langsung mencakup masalah kurangnya asupan gizi serta penyakit infeksi, sedangkan penyebab *stunting* secara tidak langsung mencakup masalah lingkungan sosial, lingkungan kesehatan, lingkungan pemukiman dan ketahanan pangan.		
8.	Profesionalisme guru yang belum memadai	Adapun latar belakangnya antara lain: a. Banyaknya guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh karena sebagian guru masih melakukan pekerjaan sambilan sehingga tidak	Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru Non ASN melalui pemberian bantuan pelaksanaan Program Pelatihan dan Uji Sertifikasi Guru di Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan	a. PJT I. b. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. c. Guru Non ASN di Kabupaten Tulungagung.

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
		memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. b. Belum ada standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara maju. c. Adanya perguruan tinggi swasta yang mencetak guru setengah jadi atau asal jadi, sehingga menyebabkan banyaknya guru yang tidak patuh kepada etika profesinya. d. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak	apabila telah lulus sertifikasi, guru dianggap pantas dan layak diberikan tunjangan profesi yang diharapkan dapat menjaga kualitas maupun meningkatkan kompetensi dirinya.	

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
		dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi.		
9.	Masih dijumpai kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di sungai yang dilakukan masyarakat	Adapun latar belakangnya antara lain: a. Masyarakat masih menganggap perilaku hidup bersih dan sehat merupakan urusan pribadi yang tidak terlalu penting. b. Masyarakat menganggap membangun jamban mahal dan lebih nyaman di sungai, ladang, sawah atau parit.	a. Pelaksanaan Program Jambanisasi melalui pemberian bantuan pembangunan jamban di sekitar wilayah kerja Sub Divisi Jasa ASA I/3 untuk mengurangi limbah domestik rumah tangga yang masuk mencemari badan sungai terutama Sungai Parit Agung/Ngrowo yang berada di sekitar area Pumping Station. b. Pelaksanaan Program	a. PJT I. b. Pemerintah desa terkait. c. Masyarakat terkait.

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
			Jambanisasi di Kabupaten Kebumen melalui pemberian bantuan pembangunan jamban di Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.	
10.	Kemiskinan Ekstrem di Indonesia	Ditemukan masyarakat miskin ekstrem di salah satu wilayah kerja PJT I yaitu Kabupaten Trenggalek. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal,	a. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Trenggalek melalui pemberian bantuan pelatihan usaha dan alat produksi bagi masyarakat miskin Ekstrem di Kabupaten Trenggalek. b. Pelaksanaan Program Sembako murah bagi	a. PJT I. b. BUMN. c. Institusi Pendidikan. d. Dinas terkait. e. Masyarakat miskin ekstrem.

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
		pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Adapun program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dapat dilakukan adalah program dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan	masyarakat miskin ekstrem.	

No.	Isu Eksternal	Latar Belakang	Uraian Peran TJSL	Pemangku Kepentingan yang terlibat
		kapasitas ekonominya.		

Berdasarkan beberapa ilustrasi rencana perlakuan risiko perusahaan serta pemecahan isu eksternal melalui Program TJSL, dapat disimpulkan *stakeholder* utama TJSL antara lain:

***Key* Partner:**

1. Kementerian BUMN.
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
3. Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
4. Lembaga (BUMN, institusi pendidikan, BUMNDes dst).
5. Masyarakat sekitar wilayah kerja perusahaan (Komunitas dan UMKM).
6. Media

***Key Resources*:**

Karyawan PJT I.

D. Kinerja Program TJSL Sampai Dengan Prognosa Tahun 2023

1. Prognosa Program TJSL Tahun 2023

Prognosa Program TJSL Tahun 2023 sebesar Rp2.243.778.323 atau 88,09% dari RKA 2023 yang terdiri dari:

a. Prognosa Program TJSL Non Pendanaan UMK Tahun 2023 yang dijalankan di unit Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat/*Community Involvement and Development* (**CID**) (Sub Divisi Pengelolaan TJSL) bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKA perusahaan Tahun 2023 sebesar Rp1.235.000.000 atau 100% dari RKA 2023.

b. Prognosa Program TJSL Non Pendanaan UMK Tahun 2022 yang dijalankan di luar unit CID (Sub Divisi Regulasi Perjanjian dan GCG) yaitu Pelaksanaan Program GCG PJT I Tahun 2023 bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKA perusahaan Tahun 2023 sebesar Rp100.000.000 atau 100% dari RKA 2023.

c. Prognosa Program TJSL Pendanaan UMK Tahun 2023 yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK Tahun 2023 yang akan disalurkan melalui kerja

sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp908.778.323 atau 74,98% dari RKA 2023.

Prognosa Program TJSL Tahun 2023 Per Pilar dan TPB untuk CID (Program TJSL Pendanaan UMK dan Non Pendanaan UMK) serta Non CID diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	TPB	RKA 2023 (Rp)	Prognosa 2023 (Rp)	% Prognosa thd RKA
A.	**PILAR SOSIAL**	**242.000.000**	**310.677.500**	**128,38**
1.	TPB 1			
2.	TPB 2			
3.	TPB 3	50.000.000	107.875.000	215,75
4.	TPB 4	192.000.000	202.802.500	105,63
5.	TPB 5			
B.	**PILAR EKONOMI**	**1.477.500.000**	**1.159.278.323**	**78,46**
1.	TPB 7			
2.	TPB 8	1.477.500.000	1.159.278.323	78,46
3.	TPB 9			
4.	TPB 10			
5.	TPB 17			
C.	**PILAR LINGKUNGAN**	**727.500.000**	**673.822.500**	**93,31**
1.	TPB 6	462.500.000	444.700.000	96,15
2.	TPB 11	30.000.000	45.647.500	152,16
3.	TPB 12			
4.	TPB 13	235.000.000	183.475.000	78,07
5.	TPB 14			
6.	TPB 15			
D.	**PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100,00**
1.	TPB 16	100.000.000	100.000.000	100,00
TOTAL		**2.547.000.000**	**2.243.778.323**	**88,09**

Prognosa Program TJSL Tahun 2023 Per Pilar dan TPB untuk CID (Program TJSL Pendanaan UMK dan Non Pendanaan UMK) diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No.	TPB	RKA 2023 (Rp)	Prognosa 2023 (Rp)	% Prognosa thd RKA
A.	**PILAR SOSIAL**	**242.000.000**	**310.677.500**	**128,38**
1.	TPB 1			
2.	TPB 2			
3.	TPB 3	50.000.000	107.875.000	215,75
4.	TPB 4	192.000.000	202.802.500	105,63
5.	TPB 5			
B.	**PILAR EKONOMI**	**1.477.500.000**	**1.159.278.323**	**78,46**
1.	TPB 7			
2.	TPB 8	1.477.500.000	1.159.278.323	78,46
3.	TPB 9			
4.	TPB 10			
5.	TPB 17			
C.	**PILAR LINGKUNGAN**	**727.500.000**	**673.822.500**	**93,31**
1.	TPB 6	462.500.000	444.700.000	96,15
2.	TPB 11	30.000.000	45.647.500	152,16
3.	TPB 12			
4.	TPB 13	235.000.000	183.475.000	78,07
5.	TPB 14			
6.	TPB 15			
D.	**PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA**			
1.	TPB 16			
TOTAL		**2.447.000.000**	**2.143.778.323**	**87,61**

2. Prognosa Program TJSL Non Pendanaan UMK Tahun 2023

Prognosa Program TJSL Non Pendanaan UMK Tahun 2023 pada program prioritas sebagai berikut:

a. Program Prioritas di Bidang Pendidikan Tahun 2023

No.	Program di Bidang Pendidikan	TPB	RKA 2023 (Rp)	Prognosa 2023 (Rp)
1.	Program Fasilitas Pendidikan	4	10.000.000	10.000.000
2.	Program Pemberian Beasiswa	4	25.000.000	25.000.000
3.	Program Sertifikasi Tenaga Pendidik	4	13.000.000	13.000.000
4.	Program Literasi Pendidikan	4	20.000.000	30.802.500
5.	Program Kolaborasi Bantuan Pendidikan	4	124.000.000	124.000.000
Total			**192.000.000**	**202.802.500**

Berikut rincian prognosa Program Prioritas di Bidang Pendidikan Tahun 2023:

1) **Program Fasilitas Pendidikan**

Program pemberian fasilitas pendidikan diberikan kepada Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Ngablak yang berada di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Bantuan yang diberikan PJT I berupa 1 (satu) unit PC senilai Rp10.000.000. Bantuan ini bertujuan untuk memudahkan proses belajar mengajar dan menunjang pengerjaan administrasi sekolah.

2) **Program Pemberian Beasiswa**

Program pemberian beasiswa rencana diberikan kepada pelajar jenjang SD – SMU berprestasi di Kabupaten Toba pada triwulan IV Tahun 2023 senilai Rp25.000.000.

3) **Program Sertifikasi Tenaga Pendidik**

Pelaksanaan program sertifikasi tenaga pendidik rencana diberikan melalui bantuan *reimburse* sertifikasi guru kepada guru di Kabupaten Trenggalek sebesar Rp13.000.000 pada triwulan IV Tahun 2023.

4) **Program Literasi Pendidikan**

Program literasi pendidikan telah dilaksanakan melalui kegiatan:

a) Pelaksanaan Program Anjungan Belajar Mandiri Holding BUMN Danareksa. Program ini merupakan program bersama Holding Danareksa. Pelaksanaan program dilakukan dengan menempatkan mesin EduBP (produk PT Balai Pustaka) di lokasi strategis dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Holding Danareksa selain juga literasi sastra. Program ini juga dimaksudkan untuk peningkatan *brand awareness* atas Holding BUMN

Danareksa dan menjaring potensi bisnis anggota Holding Danareksa. PJT I berkontribusi pada program ini sebesar Rp11.100.000.

b) Pelaksanaan Program Revitalisasi Taman Bacaan Sekolah (**TBS**) di Kabupaten Samosir. PJT I bekerjasama dengan PT Balai Pustaka melakukan revitalisasi TBS di SD Negeri 33 Tanjung Bunga Kabupaten Samosir melalui penambahan koleksi sumber bacaan sebanyak 250 eksemplar senilai Rp19.702.500 agar pelajar SD Negeri 33 semakin antusias untuk mengunjungi TBS.

5) Program Kolaborasi Bantuan Pendidikan

Program kolaborasi bantuan pendidikan adalah pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan untuk masyarakat melalui webinar, voucher aplikasi pijar mahir dan dukungan dana penggantian paket pulsa/paket data yang bekerjasama dengan Yayasan BUMN Untuk Indonesia. Sehubungan program tersebut, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Yayasan BUMN Untuk Indonesia dengan PJT I tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pendidikan Kewirausahaan ("Program Pendidikan Kewirausahaan") Nomor 001/MOU/PU/YB-02/IV/2023 dan Nomor 0003/PK/DOPS/IV/2023 tanggal 5 April 2023. Dukungan yang diberikan PJT I kepada Yayasan BUMN Untuk Indonesia untuk mendukung program tersebut sebesar Rp124.000.000.

b. Program Prioritas di Bidang Lingkungan Tahun 2023

No.	Program di Bidang Lingkungan	TPB	RKA 2023 (Rp)	Prognosa 2023 (Rp)
1.	Program Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (**IPAL**) Biogas di Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung	6	30.000.000	30.000.000
2.	Program Pembangunan IPAL Komunal di Kec. Jumantono dan Kec. Matesih Kab. Karanganyar	6	100.000.000	70.000.000
3.	Program Pelestarian Mata Air di Desa Klodan dan Desa Blongko Kec. Ngetos Kab. Nganjuk	13	30.000.000	30.000.000

No.	Program di Bidang Lingkungan	TPB	RKA 2023 (Rp)	Prognosa 2023 (Rp)
4.	Program Pembangunan Sumur Resapan di Kab. Cilacap dan Kab. Purwokerto	13	60.000.000	55.000.000
5.	Program Pembangunan Sumur Resapan di Kec. Boyolangu dan Kab. Tulungagung	13	30.000.000	30.000.000
6.	Program Pelestarian Mata Air di Kabupaten Karanganyar	13	20.000.000	20.000.000
7.	Program Pengelolaan Sampah di area green belt Waduk Wonogiri	6	50.000.000	40.210.000
Total			**320.000.000**	**275.210.000**

Berikut rincian prognosa Program Prioritas di Bidang Lingkungan Tahun 2023:

1. **Program Pembangunan IPAL Biogas di Kec. Pagerwojo Kab. Tulungagung**

   Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dan meminimalisir pencemaran air lewat limbah/kotoran sapi di Kali Song, diperlukan pembuatan IPAL biogas. PJT I memberikan bantuan senilai Rp30.000.000 untuk pembangunan IPAL Biogas di 3 (tiga) titik. Pembuatan IPAL Biogas skala rumah tangga di Desa Gambiran diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi warga Desa Gambiran.

2. **Program Pembangunan IPAL Komunal di Kec. Jumantono dan Kec. Matesih Kab. Karanganyar**

   Program pembangunan IPAL Komunal dilaksanakan di Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Program Pembangunan IPAL komunal ini dimaksudkan agar limbah dari produksi batik kelompok batik Giri Wastra Pura dapat dikelola dengan baik dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan di Desa Girilayu teriutama di area sekitar rumah produksi batik. PJT I memberikan dukungan pada program ini sebesar Rp70.000.000.

3. **Program Pelestarian Mata Air di Desa Klodan dan Desa Blongko Kec. Ngetos Kab. Nganjuk**

Program pelestarian mata air dilaksanakan melalui pemupukan dan penyulaman tanaman yang mati pada program lanjutan konservasi air PJT I Tahun 2022 untuk menjaga bibit pohon yang ditanam tetap dalam pertumbuhan dan kondisi yang baik serta penanaman alpukat sebanyak 1000 batang serta sosialisasi kepada warga agar tidak mengambil bibit yang ada di lokasi konservasi. Pada kegiatan ini PJT I bekerjasama dengan Perkumpulan Pelestari Kawasan Wilis (**PERKAWIS**) untuk melaksanakan program tersebut dengan kontribusi sebesar Rp30.000.000.

4. **Program Pembangunan Sumur Resapan di Kab. Cilacap dan Kab. Purwokerto**

   Pelaksanaan program pembangunan sumur resapan sebanyak 5 unit di Kelurahan Karangtalun Kabupaten Cilacap (sekitar Sungai Donan Kabupaten Cilacap) untuk meningkatkan laju resapan air hujan, mengurangi potensi genangan air dan meningkatkan cadangan air tanah dan 5 unit di Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Purwokerto (DAS Serayu Sub DAS Logawa) agar keberadaan kawasan dapat dipertahankan dengan melaksanakan upaya adaptasi yaitu melaksanakan pengendalian kekeringan, banjir dan longsor melalui pembuatan sumur resapan air hujan dengan bantuan sebesar Rp55.000.000.

5. **Program Pembangunan Sumur Resapan di Kec. Boyolangu dan Kab. Tulungagung**

   Program sumur resapan sebanyak 4 (empat) unit rencana dilaksanakan di wilayah hulu DAS Ngrowo Ngasinan untuk meningkatkan laju infiltrasi air hujan sehingga *base flow* sungai saat musim kemarau terjaga dan akan dilaksanakan pada November 2023 dengan bantuan sebesar Rp30.000.000.

6. **Program Pelestarian Mata Air di Kabupaten Karanganyar**

   Program pelestarian mata air rencana dilaksanakan melalui penanaman 2000 bibit tanaman di sekitar mata air PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar pada triwulan IV Tahun 2023 dengan bantuan sebesar Rp20.000.000.

7. **Program Pengelolaan Sampah di area *green belt* Waduk Wonogiri**

   Program pengelolaan sampah di area *green belt* Waduk Wonogiri dilaksanakan melalui pemberian kontainer ukuran 6 m^3 sebanyak 1 (satu) unit sebagai wadah penampung residu dari kegiatan pengolahan sampah yang dibutuhkan oleh TPS3R eksisting di Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro dengan bantuan sebesar Rp40.210.000.

c. Program Prioritas di Bidang Pengembangan UMK Tahun 2023

No.	Program di Bidang Pengembangan UMK	TPB	RKA 2023 (Rp)	Prognosa 2023 (Rp)
1.	Program Pemberian Alat Pertanian	8	52.500.000	52.500.000
2.	Program Pemberian Hewan Ternak	8	13.000.000	13.000.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Green Belt Waduk Wonogiri	8	100.000.000	100.000.000
4.	Program Pelatihan UMK	8	50.000.000	50.000.000
5.	Program Sertifikasi UMK	8	50.000.000	30.000.000
Total			**265.500.000**	**245.500.000**

Berikut rincian prognosa Program Prioritas di Bidang Pengembangan UMK Tahun 2023:

1. Program Pemberian Alat Pertanian

Program Pemberian Alat Pertanian dilaksanakan melalui:

a. Pemberian bantuan 1 (satu) unit pompa air dan 1 (satu) unit hand traktor kepada Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri senilai Rp22.500.000. Desa Gampeng merupakan wilayah administrasi Bendung Gerak Waru Turi di Kabupaten Kediri. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat di lingkungan Desa Gampeng sebagai salah satu wilayah kerja PJT I sekaligus mendukung peningkatan program kerja Pemerintah Desa Gampeng.

b. Pemberian bantuan 1 (satu) unit hand traktor untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat serta mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan kepada Kelompok Tani Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro pada triwulan III Tahun 2023 dengan bantuan sebesar Rp15.000.000.

c. Rencana pemberian bantuan 1 (satu) unit hand traktor di Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen agar pengolahan sawah menjadi lebih cepat pada triwulan IV Tahun 2023 dengan bantuan sebesar Rp15.000.000.

2. Program Pemberian Hewan Ternak

Program pemberian hewan ternak berupa 6 ekor kambing jawa randu dan 1 ekor kambing belegon super betina kepada Desa Pengkol Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo senilai Rp13.000.000. Program ini bertujuan membantu mengembangkan usaha Kelompok Ternak Mendo Miri Makmur dalam hal penggemukan hewan kambing.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar *Green Belt* Waduk Wonogiri**

   Program pemberdayaan masyarakat sekitar *green belt* Waduk Wonogiri dilaksanakan melalui pemberian bantuan alat pengolahan kopi kepada Kelompok Tani Girimanik II di Dusun Ngrapah Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, pemberian bantuan alat pengolahan kopi kepada Kelompok Tani Hutan Tani Asli 2 di Desa Girimulyo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dan pemberian bantuan sarana produksi pengembangan budidaya lebah madu kepada Kelompok Tani Kapuan Makmur di Kelurahan Puloharjo Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dengan nilai bantuan sebesar Rp100.000.000. Kelompok tani tersebut berada di Sub DAS Keduang atau *Catchment Area* Waduk Gajah Mungkur (2 kelompok tani) dan *Green Belt* Waduk Gajah Mungkur (1 kelompok tani). Pemilihan kelompok tersebut berdasarkan rekomendasi dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah XI Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. PJT I mengharapkan bantuan tersebut mendukung UMK dalam produksi kopi dan madu serta pada jangka panjang dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat Kabupaten Wonogiri.

4. **Program Pelatihan UMK**

   Program pelatihan UMK telah dilaksanakan pada akhir triwulan III Tahun 2023 kepada 35 UMK melalui pemberian pelatihan oleh PaDi UMKM dengan materi *Seller Business Matching* PaDi UMKM, Persyaratan dan Peluang Pasar Ekspor Produk UMK serta Komunikasi Bisnis dengan kontribusi bantuan kegiatan sebesar Rp50.000.000.

5. **Program Sertifikasi UMK**

   Program sertifikasi UMK berupa sertifikasi halal rencana dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2023 dengan kontribusi bantuan sebesar Rp30.000.000. Kegiatan sertifikasi halal direncanakan dilaksanakan berkolaborasi bersama BUMN Holding Danareksa dan bekerjasama dengan PT Sucofindo. PJT I mengusulkan 3 UMK untuk mengikuti kegiatan sertifikasi halal tersebut.

d. Program TJSL yang berkomitmen mendukung bisnis inti dan menciptakan *Creating Shared Value* (CSV) bagi perusahaan

No.	Program CSV	TPB	RKA 2023 (Rp)	Prognosa 2023 (Rp)
1.	Program Pelestarian Mata Air di Desa Klodan dan Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk	6	30.000.000	30.000.000
2.	Program Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purwokerto	13	60.000.000	55.000.000
Total			**90.000.000**	**85.000.000**

Berikut rincian prognosa Program CSV Tahun 2023:

1. **Program Pelestarian Mata Air di Desa Klodan dan Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk**

   Program pelestarian mata air dilaksanakan melalui pemupukan dan penyulaman tanaman yang mati pada program lanjutan konservasi air PJT I Tahun 2022 untuk menjaga bibit pohon yang ditanam tetap dalam pertumbuhan dan kondisi yang baik serta penanaman alpukat sebanyak 1000 batang serta sosialisasi kepada warga agar tidak mengambil bibit yang ada di lokasi konservasi. Pada kegiatan ini PJT I bekerjasama dengan PERKAWIS untuk melaksanakan program tersebut dengan kontribusi sebesar Rp30.000.000.

2. **Program Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purwokerto**

   Pelaksanaan program pembangunan sumur resapan sebanyak 5 unit di Kelurahan Karangtalun Kabupaten Cilacap (sekitar Sungai Donan Kabupaten Cilacap) untuk meningkatkan laju resapan air hujan, mengurangi potensi genangan air dan meningkatkan cadangan air tanah dan 5 unit di Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Purwokerto (DAS Serayu Sub DAS Logawa) agar keberadaan kawasan dapat dipertahankan dengan melaksanakan upaya adaptasi yaitu melaksanakan pengendalian kekeringan, banjir dan longsor melalui pembuatan sumur resapan air hujan dengan bantuan sebesar Rp55.000.000.

3. Prognosa Program TJSL Pendanaan UMK Tahun 2023

Prognosa Program TJSL Pendanaan UMK Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Prognosa penyaluran dana Program TJSL Pendanaan UMK Tahun 2023 direncanakan disalurkan melalui kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp908.778.323 atau 74,98% dari RKA 2023.

b. Prognosa piutang Tahun 2023 sebesar Rp1.505.305.813 atau 85,57% dari RKA 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	RKA 2023 (Rp)	Prognosa 2023 (Rp)
Lancar	437.928.748	40.192.393
Kurang Lancar	270.485.403	122.092.785
Diragukan	103.042.058	137.354.383
Macet	476.569.519	1.205.666.252
Total	**1.288.025.728**	**1.505.305.813**

c. Terdapat piutang bermasalah pada prognosa 2023 sebesar Rp797.540.531 atau 88,78% dari RKA 2023 yang merupakan piutang macet yang telah diupayakan pemulihan, namun belum dapat dipulihkan.

d. Adapun efektivitas dan kolektibilitas prognosa Program TJSL Pendanaan UMK Tahun 2023 sebagai berikut:

Tingkat efektivitas penyerapan dana

Tingkat penyaluran	>90	85 s/d 90	85 s/d 85	<80
Skor	3	2	1	0

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \text{ x } 100\ \%$$

Tingkat kolektibilitas

Tingkat pengembalian	>70	40 s/d 70	10 s/d 40	<10
Skor	3	2	1	0

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \text{ x } 100\ \%$$

No.	Uraian	RKA 2023	Prognosa 2023

1.	Efektivitas	100,00%	100,00%
2.	Kolektibilitas	51,75%	11,03%

e. Prognosa Mitra Binaan *outstanding* pada Tahun 2023 sebanyak 338 Mitra Binaan atau 89,35% dari RKA 2023.

f. Jumlah Mitra Binaan naik kelas pada Tahun 2023 diperkirakan sebanyak 6 MB.

g. Sampai dengan bulan September Tahun 2023, PJT I memiliki pencatatan Angsuran Belum Teridentifikasi sebesar Rp23.154.000. Apabila sampai dengan akhir periode pembukuan Angsuran Belum Teridentifikasi tersebut masih belum dapat diidentifikasi, maka Angsuran Belum Teridentifikasi tersebut akan diperlakukan sesuai surat Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Nomor S-179/DSI.MBU/09/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Penatausahaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) terkait Angsuran Belum Teridentifikasi.

4. Prognosa Kinerja Program TJSL Tahun 2023

Menunjuk Risalah Rapat Pembahasan RKA Program TJSL Tahun 2023 PJT I nomor RIS-09/DSI.MBU.B/12/2022 tanggal 20 Desember 2022, KPI Tahun 2023 yang menjadi target kinerja Program TJSL PJT I:

No.	Indikator	Target	Bobot
1.	Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan metode *Social Return on Investment* (SROI)	3 program	20%
2.	Menetapkan kebijakan *levelling* unit kerja TJSL menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut	BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian	20%
3.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan pengisian system informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN	7 periode	20%
4.	Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program	3 program	20%

No.	Indikator	Target	Bobot
	TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program		
5.	Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL	250 karyawan	20%

Adapun prognosa kinerja Program TJSL PJT I Tahun 2023:

No.	Indikator	Capaian	Bobot
1.	Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan metode *Social Return on Investment* (SROI)	3 program	20%
2.	Menetapkan kebijakan *levelling* unit kerja TJSL menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut	BOD-3	20%
3.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan pengisian system informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN	7 Periode (Lengkap dan tepat waktu)	20%
4.	Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program	4 program	20%
5.	Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL	250 karyawan	20%

Berikut uraian prognosa kinerja Program TJSL PJT I Tahun 2023.

1. **Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan metode SROI**

   Pengukuran terhadap program TJSL antara lain:

   a. Program Pelestarian Mata Air di Desa Klodan dan Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Nilai SROI diperoleh sebesar 6,71.

b. Program Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biogas di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Nilai SROI diperoleh sebesar 1,29.

c. Program Pembangunan IPAL Komunal di Kecamatan Jumantono dan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Nilai SROI diperoleh sebesar 3,84.

2. **Menetapkan kebijakan *levelling* unit kerja TJSL menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut**

   Sesuai surat Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN nomor S-82/DSI.MBU/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 hal Permintaan Penyampaian Kajian Kebijakan *Levelling* Unit Kerja TJSL, salah satu indikator yang ditetapkan dalam KPI Program TJSL BUMN Tahun 2023 adalah peningkatan tata Kelola dengan menetapkan kebijakan *levelling* unit kerja TJSL menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut. Saat ini *levelling* unit kerja TJSL PJT I berada pada posisi BOD-3. Sehubungan hal tersebut, telah disusun kajian kebijakan *levelling* unit kerja TJSL PJT I oleh konsultan independen yaitu PT Magnet Solusi Integra dengan hasil kajian kebijakan *levelling* unit kerja TJSL PJT I adalah Level sesuai dengan Kajian yaitu BOD-3. Kajian tersebut telah dikirimkan melalui email: asdep.tjsl@gmail.com tanggal 30 Juni 2023.

3. **Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN**

   Pelaporan Triwulan IV Tahun 2022, Audited Tahun 2022, Triwulan I Tahun 2023 dan Triwulan II Tahun 2023 telah dilaksanakan melalui portal TJSL Kementerian BUMN (tjsl.bumn.go.id) secara lengkap dan tepat waktu masing-masing pada tanggal 17 Januari 2023, 10 April 2023, 29 April 2023 dan 27 Juli 2023.

   Pelaporan Triwulan III Tahun 2023, RKA Tahun 2024 dan Prognosa Tahun 2023 rencana akan disampaikan melalui portal TJSL Kementerian BUMN atau alamat email yang ditentukan oleh Kementerian BUMN secara lengkap dan tepat waktu maksimal pada tanggal 31 Oktober 2023.

4. **Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program**

   Program TJSL yang dilaksanakan secara kolaborasi antara lain:

   1. Program kolaborasi pada bidang pengembangan UMK

Adapun program kolaborasi pada bidang pengembangan UMK yang akan dilaksanakan adalah Program Sertifikasi Halal bersama BUMN Holding Danareksa bekerjasama dengan PT Sucofindo. PJT I mengusulkan 3 UMK untuk mengikuti sertifikasi halal dengan kontribusi sebesar Rp30.000.000.

2. Program kolaborasi pada bidang pendidikan

   Adapun program kolaborasi pada bidang pendidikan yang telah dilaksanakan antara lain:

   a. Pelaksanaan Program Anjungan Belajar Mandiri Holding BUMN Danareksa. Program ini merupakan program bersama Holding Danareksa. Pelaksanaan program dilakukan dengan menempatkan mesin EduBP (produk PT Balai Pustaka) di lokasi strategis dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Holding Danareksa selain juga literasi sastra. Program ini juga dimaksudkan untuk peningkatan *brand awareness* atas Holding BUMN Danareksa dan menjaring potensi bisnis anggota Holding Danareksa. PJT I berkontribusi pada program ini sebesar Rp11.100.000.

   b. Pelaksanaan Program Revitalisasi TBS di Kabupaten Samosir. PJT I bekerjasama dengan PT Balai Pustaka melakukan revitalisasi TBS di SD Negeri 33 Tanjung Bunga Kabupaten Samosir melalui penambahan koleksi sumber bacaan sebanyak 250 eksemplar senilai Rp19.702.500 agar pelajar SD Negeri 33 semakin antusias untuk mengunjungi TBS.

3. Program kolaborasi pada bidang lingkungan

   Adapun program kolaborasi pada bidang lingkungan yang akan dilaksanakan adalah Program Penghijauan di Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang bekerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani (**PNM**) Cabang Malang. Lokasi penghijauan rencana dilaksanakan di Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang karena masuk dalam wilayah DAS Brantas Hulu yang kondisinya kritis dan terdapat UMK di desa tersebut yang mendapatkan pinjaman dana dari PT PNM Cabang Malang. Kegiatan penghijauan meliputi penanaman 500 batang durian, 500 batang mangga, 1000 batang alpukat, 500 batang sukun, 1000 batang sengon, 1000 batang suren dan 500 batang balsa. Selain itu terdapat kegiatan penyulaman, penyuluhan dan pemeliharaan. PJT I berkontribusi pada kegiatan tersebut sebesar Rp72.392.000.

5. Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL

Prognosa jumlah karyawan PJT I yang melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan Tahun 2023 sebanyak 250 karyawan atau 100% dari yang ditargetkan yaitu 250 karyawan sebagaimana tercantum dalam Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSL Tahun 2023 Nomor RIS-09/DSI.MBU.B/12/2022 tanggal 20 Desember 2022. Sampai dengan September 2023, jenis kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh karyawan PJT I adalah kegiatan bersama masyarakat bersifat sosial lainnya (39,47%), di urutan kedua adalah kerja bakti (23,680%) dan di urutan ketiga adalah kegiatan pemberian bantuan (20,53%). Provinsi Jawa Timur menjadi lokasi mayoritas kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan karyawan PJT I per 30 September 2023 (83,16%).

Diagram 1 Persentase Jumlah Karyawan yang telah melaksanakan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kegiatan Per 30 September 2023

Diagram 2 Persentase Jumlah Karyawan yang telah melaksanakan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Berdasarkan Lokasi Kegiatan Per 30 September 2023

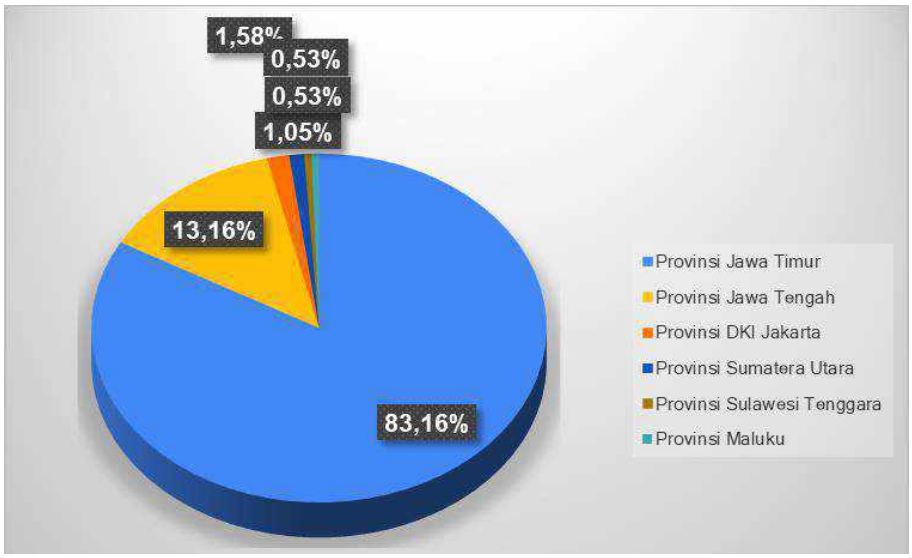

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh karyawan PJT I antara lain kerja bakti, konservasi lingkungan, pemberian bantuan, pengelolaan sampah, penggalangan dana dan kegiatan bersama masyarakat bersifat sosial lainnya.

E. Proyeksi Kinerja Program TJSL Tahun 2024

Berdasarkan risiko perusahaan dan isu eksternal yang akan di mitigasi dengan strategi TJSL serta memenuhi 7 (tujuh) subjek inti dalam ISO 26000, maka TPB prioritas PJT I adalah sebagai berikut:

1. TPB Nomor 2 : Tanpa Kelaparan;
2. TPB Nomor 4 : Pendidikan Berkualitas;
3. TPB Nomor 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
4. TPB Nomor 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
5. TPB Nomor 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak;
6. TPB Nomor 11 : Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan;
7. TPB Nomor 15 : Ekosistem Daratan;
8. TPB Nomor 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh.

Anggaran keseluruhan Program TJSL yang dilaksanakan PJT I sebagaimana tabel berikut:

NO.	TPB	RKA Tahun 2023 (Rp)	Prognosa Tahun 2023 (Rp)	RKA Tahun 2024 (Rp)	Persentase	
					RKA 2024 / RKA 2023	RKA 2024 / Prognosa 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
1	PILAR SOSIAL	242,000,000	310,677,500	3,137,500,000	1296.49%	1009.89%
2	PILAR EKONOMI	1,477,500,000	1,159,278,323	1,950,000,000	131.98%	168.21%
3	PILAR LINGKUNGAN	727,500,000	673,822,500	21,624,720,800	2972.47%	3209.26%
4	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	100,000,000	100,000,000	300,000,000	300.00%	300.00%
TOTAL		2,547,000,000	2,243,778,323	27,012,220,800	1060.55%	1203.87%

Keterangan:

RKA 2024 keseluruhan mencapai 1060,55% terhadap RKA 2023 dan mencapai 1203,87% terhadap Prognosa 2023 karena pada RKA 2023 belum terdapat pengungkapan (disclosure) Program TJSL yang melaksanakan Subjek Inti Hak Asasi Manusia, Praktik Perburuhan, Lingkungan, Praktik Operasi yang Adil dan Isu Konsumen. Pada realisasinya, tahun 2023 PJT I telah melaksanakan Program TJSL tersebut.

RKA Program TJSL Tahun 2024 sebesar Rp27.012.220.800 atau 1203,87% dari Prognosa 2023 yang terdiri dari:

a. RKA Program TJSL Non Pendanaan UMK Tahun 2024 yang dijalankan di unit CID (Sub Divisi Pengelolaan TJSL) bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada laporan RKA perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp1.279.000.000 atau 103,56% dari Prognosa 2023 dan menjalankan TPB No. 2, 4, 6, 8 dan 11.

b. RKA Program TJSL Non Pendanaan UMK Tahun 2024 yang dijalankan di luar unit CID antara lain:

   1) Divisi Hukum yaitu Program Pelaksanaan GCG PJT I bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Divisi Hukum pada laporan RKA Perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000 atau 100,00% dari Prognosa 2023 dan menjalankan TPB No. 16.

   2) Divisi Jasa ASA I yaitu Program Perlindungan Daerah Aliran Sungai (**DAS**) bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Divisi Jasa ASA I pada laporan RKA Perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp895.000.000 dan menjalankan TPB No. 6.

   3) Divisi Jasa ASA II yaitu Program Perlindungan DAS, Program Perlindungan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya

Divisi Jasa ASA II pada laporan RKA Perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp500.940.000 dan menjalankan TPB No. 6 dan 15.

4) Divisi Jasa ASA III yaitu Program Perlindungan DAS, Program Perlindungan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Divisi Jasa ASA III pada laporan RKA Perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp813.500.000 dan menjalankan TPB No. 6 dan 15.
5) Divisi Jasa ASA IV yaitu Program Perlindungan DAS, Program Perlindungan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Divisi Jasa ASA IV pada laporan RKA Perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp3.984.487.000 dan menjalankan TPB No. 6 dan 15.
6) Divisi Jasa ASA V yaitu Program Perlindungan DAS, Program Perlindungan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Divisi Jasa ASA V pada laporan RKA Perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp9.935.887.500 dan menjalankan TPB No. 6 dan 15.
7) Divisi Manajemen Risiko dan Kinerja yaitu Program pemantauan kualitas lingkungan kerja, Program pemantauan kualitas air, Inspeksi Besar Bendungan, Program Penguatan ISO 9001:2015, Program Penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (**SMAP**), *Zero Accident Program* bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Divisi Manajemen Risiko dan Kinerja pada laporan RKA Perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp5.193.406.300 dan menjalankan TPB No. 6, 8 dan 16.
8) Divisi Teknologi Informasi yaitu Program Pengembangan Teknologi Inovatif bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Divisi Teknologi Informasi pada laporan RKA Perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp910.000.000 dan menjalankan TPB No. 9.
9) Divisi Sumber Daya Manusia yaitu Program peningkatan jumlah perempuan dalam *nominated talent* dan Program Pengembangan SDM yang diperhitungkan sebagai biaya Divisi Sumber Daya Manusia pada laporan RKA Perusahaan Tahun 2024 sebesar Rp2.950.000.000 dan menjalankan TPB No. 4.

c. RKA Program TJSL Pendanaan UMK Tahun 2024 yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK Tahun 2024 yang akan disalurkan melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp450.000.000 atau 49,52% dari Prognosa 2023 dan menjalankan TPB No. 8.

Anggaran Program TJSL – CID Non Pendanaan UMK Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

NO.	TPB	RKA Tahun 2023 (Rp)	Prognosa Tahun 2023 (Rp)	RKA Tahun 2024 (Rp)	Persentase	
					RKA 2024 / RKA 2023	RKA 2024 / Prognosa 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
1	PILAR SOSIAL	242,000,000	310,677,500	187,500,000	77.48%	60.35%
2	PILAR EKONOMI	265,500,000	250,500,000	190,000,000	71.56%	75.85%
3	PILAR LINGKUNGAN	727,500,000	673,822,500	901,500,000	123.92%	133.79%
4	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA					
TOTAL		1,235,000,000	1,235,000,000	1,279,000,000	103.56%	103.56%

Uraian sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Ruang Lingkup ISO 26000 (Holistic Integrated Approach)	Nama Program	Nomor TPB	Uraian Program	Capaian Kuantitatif	Anggaran Program (Rp)
1	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program IPAL Biogas di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung	6	Pemberian bantuan pembuatan biogas dari kotoran hewan ternak sapi di wilayah Kecamatan Pagerwojo yang dapat mempengaruhi kualitas air yang masuk kedalam Waduk Wonorejo dikarenakan beberapa tempat kotoran hewan ternak masih dibuang kedalam aliran sungai.	Terlaksana pemberian bantuan pembuatan 2 IPAL Biogas di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung	30,000,000
2	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Tulungagung	2	Pemberian bantuan penyediaan paket suplemen, makanan tambahan, vitamin, obat-obatan, pemeriksaan posyandu dan penyuluhan kesehatan di Desa Besuki Kecamatan Besuki, Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung	Terlaksana pemberian bantuan penyediaan paket suplemen, makanan tambahan, vitamin, obat-obatan, pemeriksaan posyandu dan penyuluhan kesehatan di Desa Besuki Kecamatan Besuki, Desa Kedungcangkring, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung 1 kali	25,000,000
3	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Sertifikasi Guru Non ASN	4	Pemberian bantuan pelaksanaan Program Pelatihan dan Uji Sertifikasi Guru di Kabupaten Tulungagung	Terlaksana pemberian bantuan pelaksanaan Program Pelatihan Sertifikasi dan Uji Sertifikasi Guru kepada 6 guru di Kabupaten Tulungagung	30,000,000
4	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Jambanisasi di sekitar wilayah kerja Sub Divisi Jasa ASA I/3	6	Pemberian bantuan pembangunan jamban di sekitar wilayah kerja Sub Divisi Jasa ASA I/3 untuk mengurangi limbah domestik rumah tangga yang masuk mencemari badan sungai terutama Sungai Parit Agung/Ngrowo yang berada di sekitar area Pumping Station	Terlaksana pemberian bantuan pembangunan 5 unit jamban di sekitar wilayah kerja Sub Divisi Jasa ASA I/3	25,000,000
5	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pemberdayaan Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Trenggalek	8	Pemberian bantuan pelatihan usaha dan alat produksi bagi masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Trenggalek	Terlaksana pemberian bantuan pelatihan usaha dan alat produksi bagi 10 masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Trenggalek	50,000,000

No.	Ruang Lingkup ISO 26000 (Holistic Integrated Approach)	Nama Program	Nomor TPB	Uraian Program	Capaian Kuantitatif	Anggaran Program (Rp)
6	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Penerangan Jalan Umum di Kota Surabaya	11	Pemberian bantuan pembuatan penerangan jalan umum pinggir pagar yang berbatasan dengan sempadan Kali Surabaya di Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya	Terlaksana pemberian bantuan pembuatan 10 unit tiang lampu di Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya	7,000,000
7	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pengembangan Banana Park di Kota Surabaya	11	Pemberian bantuan penyediaan ruang publik yaitu taman, kolam dan sumber listrik dari energi terbarukan berupa solar sel di Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya	Terlaksana pemberian bantuan penyediaan ruang publik di Kelurahan Warugunung Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya 1 kali	10,000,000
8	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pengairan Bagi Petani di Kabupaten Kediri	2	Pemberian bantuan pengadaan pompa air untuk Gabungan Himpungan Petani Pemakai Air (**HIPPA**) Turi Makmur pada musim kemarau di Kecamatan Papar, Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri	Terlaksana pemberian bantuan pengadaan 1 unit pompa air untuk Gabungan HIPPA Turi Makmur di Kecamatan Papar, Kecamatan Gampengrejo dan Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri	7,500,000
9	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pengairan Bagi Petani di Kabupaten Jombang	2	Pemberian bantuan pengadaan pompa air untuk Gabungan HIPPA Sumber Barokah Jaya pada musim kemarau di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang	Terlaksana pemberian bantuan pengadaan 2 unit pompa air untuk Gabungan HIPPA Sumber Barokah Jaya di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang	15,000,000
10	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Penanganan Bencana Kekeringan di WS Bengawan Solo	11	Pemberian bantuan pengadaan suplai air bersih pada daerah terdampak bencana kekeringan di WS Bengawan Solo	Terlaksana pemberian bantuan pengadaan suplai air bersih sebanyak @4000-6000 liter di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Sragen, Ngawi, Blora, Bojonegoro dan Lamongan 1 kali	20,000,000

No.	Ruang Lingkup ISO 26000 (Holistic Integrated Approach)	Nama Program	Nomor TPB	Uraian Program	Capaian Kuantitatif	Anggaran Program (Rp)
11	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Instalasi Pemanenan Air Hujan (**IPAH**) dan Sumur Resapan di Kabupaten Boyolali	6	Pemberian bantuan pembuatan IPAH dan sumur resapan di Desa Sedayu Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali	Terlaksana pemberian bantuan pembuatan 1 IPAH dan 2 sumur resapan di Desa Sedayu Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali	30,000,000
12	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Instalasi Pemanenan Air Hujan (**IPAH**) dan Sumur Resapan di Kabupaten Semarang	6	Pemberian bantuan pembuatan IPAH dan sumur resapan di Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang	Terlaksana pemberian bantuan pembuatan 1 IPAH dan 2 sumur resapan di Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang	30,000,000
13	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	8	Pemberian bantuan pengadaan alat bagi pembudidaya ikan	Terlaksana pemberian bantuan pengadaan 1 alat pembudidaya ikan	10,000,000
14	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Instalasi Pemanenan Air Hujan (**IPAH**) dan Sumur Resapan di Kabupaten Rembang	6	Pemberian bantuan pembuatan IPAH dan sumur resapan di Kabupaten Rembang	Terlaksana pemberian bantuan pembuatan 1 IPAH dan 2 sumur resapan di Kabupaten Rembang	30,000,000
15	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Jambanisasi di Kabupaten Kebumen	6	Pemberian bantuan pembangunan jamban di Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	Terlaksana pemberian bantuan pembangunan jamban sebanyak 5 unit di Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen	25,000,000
16	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pelestarian Mata Air di Kabupaten Samosir	6	Pemberian bantuan kegiatan penanaman pohon sekitar mata air di Kabupaten Samosir	Terlaksana pemberian bantuan penanaman 625 bibit pohon di Kabupaten Samosir	50,000,000

No.	Ruang Lingkup ISO 26000 (Holistic Integrated Approach)	Nama Program	Nomor TPB	Uraian Program	Capaian Kuantitatif	Anggaran Program (Rp)
17	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pengendalian Sampah di Kabupaten Toba	11	Pemberian bantuan tong sampah di SMAN 1 Narumonda Kecamatan Siantar Kabupaten Toba karena sampah saat ini dibuang ke pekarangan dan lahan kosong kemudian dilakukan pembakaran	Terlaksana pemberian bantuan tong sampah di SMAN 1 Narumonda 1 kali	5,000,000
18	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pengendalian Sampah di Kota Parapat	11	Pemberian bantuan pengadaan tong sampah di pusat wisata Kota Parapat mengingat jumlah tong sampah yang ada belum mencukupi serta mendukung Danau Toba sebagai salah satu dari 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Super Prioritas	Terlaksana pemberian bantuan pengadaan 20 unit tong sampah di Kota Parapat	15,000,000
19	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Sarana Ibadah di Kota Parapat	11	Pemberian bantuan pembangunan perbaikan Masjid Raya Taqwa Kota Parapat	Terlaksana pemberian bantuan pembangunan perbaikan Masjid Raya Taqwa Kota Parapat sebanyak 1 kali	5,000,000
20	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pelestarian Mata Air di Kabupaten Toba	6	Pemberian bantuan kegiatan penanaman pohon sekitar mata air di Kabupaten Toba	Terlaksana pemberian bantuan kegiatan penanaman 375 bibit pohon di Kabupaten Toba	30,000,000
21	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Sarana Ibadah di Kota Pematang Siantar	11	Pemberian bantuan pembangunan Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar	Terlaksana pemberian bantuan pembangunan Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar sebanyak 1 kali	5,000,000
22	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Sarana Ibadah di Resort Balige Kabupaten Toba	11	Pemberian bantuan pembangunan Gereja GKPI Aek Bolon Resort Balige Kabupaten Toba	Terlaksana pemberian bantuan pembangunan Gereja GKPI Aek Bolon Resort Balige Kabupaten Toba sebanyak 1 kali	5,000,000
23	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Sarana Ibadah di Resort Porsea Kota Kabupaten Toba	11	Pemberian bantuan pembangunan HKBP Resort Porsea Kota Kabupaten Toba	Terlaksana pemberian bantuan pembangunan HKBP Resort Porsea Kota Kabupaten Toba sebanyak 1 kali	5,000,000

No.	Ruang Lingkup ISO 26000 (Holistic Integrated Approach)	Nama Program	Nomor TPB	Uraian Program	Capaian Kuantitatif	Anggaran Program (Rp)
24	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (**IPAL**) Biogas di sekitar Sungai Konto Kabupaten Malang	6	Pemberian bantuan pembangunan IPAL Biogas dari kotoran hewan ternak sapi di area sekitar Sungai Konto agar tidak mempengaruhi kualitas air yang masuk ke Waduk Selorejo dikarenakan beberapa tempat kotoran hewan ternak masih dibuang ke dalam aliran sungai	Terlaksana pemberian bantuan pembangunan 5 IPAL Biogas di Kabupaten Malang	50,000,000
25	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Sumur Resapan dan Sanitasi	6	Pemberian bantuan pembuatan sumur resapan dan sanitasi di sekitar wilayah kerja perusahaan (DJA II dan DJA III)	Terlaksana pemberian bantuan pembuatan sumur resapan dan sanitasi di sekitar wilayah kerja perusahaan (DJA II dan DJA III) 1 kali	50,000,000
26	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pengendalian Sampah di kawasan Pasar Porsea Kabupaten Toba	11	Pemberian bantuan kegiatan pengendalian sampah di kawasan Pasar Porsea Kabupaten Toba	Terlaksana pemberian bantuan kegiatan pengendalian sampah di kawasan Pasar Porsea Kabupaten Toba 1 kali	50,000,000
27	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pengendalian Sampah Saluran Klambu Kota Semarang	11	Pemberian bantuan kegiatan pengendalian sampah Saluran Klambu Kota Semarang	Terlaksana pemberian bantuan kegiatan pengendalian sampah Saluran Klambu Kota Semarang 1 kali	40,000,000
28	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Susur Sungai Kali Surabaya	6	Pemberian bantuan pelaksanaan kegiatan Susur Sungai Kali Surabaya	Terlaksana pemberian bantuan pelaksanaan kegiatan Susur Sungai Kali Surabaya 1 kali	40,000,000
29	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pengendalian Eceng Gondok	6	Pemberian bantuan kegiatan pemanfaatan eceng gondok bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan	Terlaksana pemberian bantuan kegiatan pemanfaatan eceng gondok bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja perusahaan 1 kali	44,500,000
30	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Kolaborasi BUMN di bidang Lingkungan	6	Pelaksanaan program lingkungan pengelolaan sumber daya air melalui program konservasi sipil teknis di hulu Bendungan Wonogiri dan kegiatan lingkungan lainnya	Terlaksana kegiatan kolaborasi BUMN di bidang Lingkungan 1 kali	250,000,000

No.	Ruang Lingkup ISO 26000 (Holistic Integrated Approach)	Nama Program	Nomor TPB	Uraian Program	Capaian Kuantitatif	Anggaran Program (Rp)
31	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Dana Pendidikan	4	Pemberian bantuan dana pendidikan bagi pelajar jenjang SD - Perguruan Tinggi berprestasi di wilayah kerja perusahaan	Terlaksana pemberian bantuan dana pendidikan kepada pelajar jenjang SD - Perguruan Tinggi berprestasi di wilayah kerja perusahaan 1 kali	35,000,000
32	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Kolaborasi BUMN di bidang Pendidikan	4	Pelaksanaan kegiatan kolaborasi BUMN di bidang pendidikan	Terlaksana kegiatan kolaborasi BUMN di bidang Pendidikan 1 kali	25,000,000
33	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Pembinaan UMK	8	Pelaksanaan pembinaan UMK melalui pelatihan/ sertifikasi UMK	Terlaksana program pembinaan UMK 1 kali	80,000,000
34	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Sembako Murah	2	Pelaksanaan program sembako murah bagi masyarakat kurang mampu	Terlaksana program sembako murah bagi masyarakat kurang mampu 1 kali	50,000,000
35	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Kolaborasi BUMN di bidang Pengembangan UMK	8	Pelaksanaan kegiatan kolaborasi BUMN di bidang Pengembangan UMK	Terlaksana kegiatan kolaborasi BUMN di bidang Pengembangan UMK 1 kali	50,000,000
36	Pelibatan dan pengembangan masyarakat	Program Bencana Alam	11	Pemberian bantuan bencana alam untuk kejadian bencana di seluruh Indonesia	Terlaksana pemberian bantuan bencana alam untuk kejadian bencana alam di seluruh Indonesia 1 kali	50,000,000
JUMLAH						**1,279,000,000**

Anggaran Program TJSL - Non CID Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

NO.	TPB	RKA Tahun 2023 (Rp)	Prognosa Tahun 2023 (Rp)	RKA Tahun 2024 (Rp)	Persentase	
					RKA 2024 / RKA 2023	RKA 2024 / Prognosa 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
1	PILAR SOSIAL			2,950,000,000		
2	PILAR EKONOMI			1,310,000,000		
3	PILAR LINGKUNGAN			20,723,220,800		
4	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	100,000,000	100,000,000	300,000,000	300.00%	300.00%
TOTAL		100,000,000	100,000,000	25,283,220,800	25283.22%	25283.22%

Uraian sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Ruang Lingkup ISO 26000 (Holistic Integrated Approach)	Nama Program	Nomor TPB	Uraian Program	Capaian Kuantitatif	Anggaran Program (Rp)
1	Tata Kelola Organisasi	Program Pelaksanaan GCG PJT I	16	Melakukan pemantauan atas penerapan GCG, asesmen GCG dan pelaksanaan tindak lanjut hasil asesmen GCG	Terlaksana kegiatan GCG 1 kali	100,000,000
2	Lingkungan	Program Perlindungan Daerah Aliran Sungai (**DAS**)	6	Pelaksanaan kegiatan penghijauan di wilayah kerja PJT I	1. 35.000 batang di Divisi Jasa ASA I (**DJA I**) 2. 30.000 batang di DJA II 3. 37.000 batang di DJA III 4. 213.500 batang di DJA IV 5. Lumpsum dan 2000 batang di DJA V 6. Monitoring dan evaluasi kegiatan penghijauan di 4 kabupaten (DJA V)	9,139,331,000

No.	Ruang Lingkup ISO 26000 (Holistic Integrated Approach)	Nama Program	Nomor TPB	Uraian Program	Capaian Kuantitatif	Anggaran Program (Rp)
			6	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tanaman di wilayah kerja PJT I	1. 30.000 batang di DJA I 2. 42.500 batang di DJA III 3. 9.700 batang di DJA IV 4. 1.050 ha dan 8000 batang pemeliharaan tanaman di DJA V	6,654,543,500
3	Lingkungan	Program Perlindungan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati	15	Penebaran bibit ikan di waduk/telaga yang dikelola PJT I	1. 80.000 ekor di Waduk Bening 2. 100.000 ekor di Waduk Wonogiri 3. 25.000 ekor di Waduk Mulur 4. 25.000 ekor di Waduk Delingan 5. 30.000 ekor di Telaga Ngebel 6. 50.000 ekor di Bendungan Kedungombo 7. 10.000 ekor di Bendung Sidorejo 8. 10.000 ekor di Bendung Klambu 9. 50.000 ekor di Bendung Jelok 10. 10.000 ekor di Bendungan Sempor 11. 15.000 ekor di Bendungan Wadaslintang 12. 10.000 ekor di Bendung Pejengkolan	265,940,000
			15	Pemantauan keanekaragaman hayati sekitar Waduk Wonogiri	Terlaksana kegiatan pemantauan keanekaragaman hayati sekitar Waduk Wonogiri 1 kali	70,000,000
4	Lingkungan	Program pemantauan kualitas lingkungan kerja	8	Pelaksanaan pemantauan pengukuran lingkungan kerja	Terlaksana pemantauan pengukuran lingkungan kerja secara rutin (1 tahun sekali)	300,000,000
5	Lingkungan	Program pemantauan kualitas air	6	Pelaksanaan pemantauan, pengukuran dan evaluasi kualitas air	Penyampaian laporan hasil kualitas air triwulanan maupun kondisi khusus (kejadian pencemaran)	4,093,406,300
6	Lingkungan	Inspeksi Besar Bendungan	6	Pelaksanaan pemantauan, pengukuran, evaluasi dan monitoring keamanan tubuh bendungan serta asistensi kepada Balai Teknik Bendungan	Pelaksanaan diskusi teknis, sidang teknis, dan sidang pleno keamanan bendungan bersama Balai Teknik Bendungan	500,000,000
7	Praktik Operasi yang Adil	Program Penguatan ISO 9001:2015	16	Pelaksanaan Internal Audit ISO 9001:2015	Seluruh unit di PJT I telah dilaksanakan Audit ISO 9001:2015	130,000,000

No.	Ruang Lingkup ISO 26000 (Holistic Integrated Approach)	Nama Program	Nomor TPB	Uraian Program	Capaian Kuantitatif	Anggaran Program (Rp)
8	Praktik Operasi yang Adil	Program Penguatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	16	Pelaksanaan Internal Audit ISO 37001:2016	Seluruh unit di PJT I yang terkait telah dilaksanakan Audit ISO 37001:2016	70,000,000
9	Praktik Perburuhan	*Zero Accident Program*	8	Penyediaan peralatan K3/APD	Tidak terjadi kecelakaan akibat kerja (*zero accident*)	100,000,000
10	Isu Konsumen	Program Pengembangan Teknologi Inovatif	9	Peremajaan *Automatic Water Level Recorder* (AWLR) WS Brantas	4 unit AWLR	300,000,000
			9	Peremajaan *Automatic Rain Recorder* (**ARR**) WS Brantas	4 unit ARR	260,000,000
			9	*Upgrading Smart Water Management System* (**SWMS**)	Terlaksananya *upgrading* SWMS	350,000,000
11	Hak Asasi Manusia	Program peningkatan jumlah perempuan dalam *nominated talent*	4	Pelatihan *Women Leadership*	Sebanyak 10% dari nominated talent merupakan karyawan perempuan	50,000,000
12	Praktik Perburuhan	Program Pengembangan SDM	4	Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi	Realisasi biaya 95% dari Biaya Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi	2,900,000,000
JUMLAH						**25,283,220,800**

Program Prioritas Pendidikan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Program	RKA Tahun 2024 (Rp)	Target Output
1.	Program Sertifikasi Guru Non ASN	30.000.000	6 guru
2.	Program Dana Pendidikan	35.000.000	35 orang
3.	Program Literasi Pendidikan	25.000.000	250 buku
Total		**90.000.000**	

Rincian kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. Program Sertifikasi Guru Non ASN.

   Pemberian bantuan pelaksanaan Program Pelatihan dan Uji Sertifikasi Guru kepada 6 guru di Kabupaten Tulungagung.

2. Program Dana Pendidikan.

   Pemberian bantuan dana pendidikan kepada pelajar jenjang SD - Perguruan Tinggi berprestasi di wilayah kerja PJT I sebanyak 35 orang.

3. Program Literasi Pendidikan.

   Pemberian bantuan 250 buku kepada 1 lembaga pendidikan di wilayah kerja PJT I.

Program Prioritas Lingkungan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Program	RKA Tahun 2024 (Rp)	Target Output
1.	Program IPAL Biogas di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dan sekitar Sungai Konto Kabupaten Malang	80.000.000	7 IPAL Biogas
2.	Program Jambanisasi	50.000.000	10 unit jamban
3.	Program Instalasi Pemanenan Air Hujan (**IPAH**) dan Sumur Resapan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Rembang	90.000.000	3 IPAH dan 6 Sumur Resapan
4.	Program Pelestarian Mata Air di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba	80.000.000	1000 bibit
5.	Program Sumur Resapan di sekitar Kali Tengah	50.000.000	6 Sumur Resapan

No.	Nama Program	RKA Tahun 2024 (Rp)	Target Output
6.	Program Pengendalian Sampah di Kawasan Pasar Porsea Kabupaten Toba	50.000.000	1 Bank Sampah
7.	Program Pengendalian Sampah Saluran Klambu Kota Semarang	40.000.000	1 Bank Sampah
8.	Program Pengendalian Eceng Gondok	44.500.000	1 kegiatan pemberdayaan masyarakat
9.	Program Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Air di hulu Bendungan Wonogiri	250.000.000	30 sumur resapan
Total		**734.500.000**	

Rincian kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. Program IPAL Biogas di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

   Pemberian bantuan pembuatan 2 IPAL Biogas di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung dan 5 IPAL Biogas di sekitar Sungai Konto Kabupaten Malang .
2. Program Jambanisasi.

   Pemberian bantuan pembangunan 5 unit jamban di sekitar wilayah kerja Sub Divisi Jasa ASA I/3 dan 5 unit jamban di Desa Sempor Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.
3. Program IPAH dan Sumur Resapan di Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Rembang.

   Pemberian bantuan pembuatan 1 IPAH dan 2 sumur resapan di Desa Sedayu Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali, 1 IPAH dan 2 sumur resapan di Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang serta 1 IPAH dan 2 sumur resapan di Kabupaten Rembang.
4. Program Pelestarian Mata Air di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba.

   Pemberian bantuan kegiatan penanaman pohon di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba dengan total 1000 bibit pohon.
5. Program Sumur Resapan di sekitar Kali Tengah.

   Pemberian bantuan pembuatan 6 sumur resapan di sekitar Kali Tengah.
6. Program Pengendalian Sampah di kawasan Pasar Porsea Kabupaten Toba.

   Pemberian bantuan pembangunan 1 bank sampah di kawasan Pasar Porsea Kabupaten Toba.

7. Program Pengendalian Sampah Saluran Klambu Kota Semarang.
   Pemberian bantuan pembangunan 1 bank sampah di Kota Semarang.
8. Program Pengendalian Eceng Gondok.
   Pemberian bantuan 1 kegiatan pemberdayaan masyarakat agar eceng gondok menjadi produk yang memiliki nilai jual bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja Perusahaan.
9. Program Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Air di hulu Bendungan Wonogiri.
   Pemberian bantuan pembuatan 30 sumur resapan di hulu Bendungan Wonogiri.

Program Prioritas Pengembangan UMK Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Program	RKA Tahun 2024 (Rp)	Target Output
1.	Program Pemberdayaan Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Trenggalek	50.000.000	10 orang
2.	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	10.000.000	1 alat pembudidaya ikan
3.	Program Pembinaan UMK	80.000.000	50 Mitra Binaan
4.	Program Sertifikasi UMK	50.000.000	10 Mitra Binaan
Total		**190.000.000**	

Rincian kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. Program Pemberdayaan Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Trenggalek.
   Pemberian bantuan pelatihan usaha dan alat produksi bagi 10 masyarakat miskin Ekstrem di Kabupaten Trenggalek.
2. Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan.
   Pemberian bantuan pengadaan 1 alat pembudidaya ikan.
3. Program Pembinaan UMK
   Pelaksanaan pembinaan UMK melalui pelatihan kepada 50 Mitra Binaan.
4. Program Sertifikasi UMK
   Pelaksanaan kegiatan sertifikasi kepada 10 Mitra Binaan.

F. Dokumentasi Kegiatan Program Prioritas Program TJSL Prognosa Tahun 2023

Dokumentasi kegiatan Program Prioritas Program TJSL yang telah dilaksanakan dalam Prognosa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pemberian Bantuan Komputer TK Dharma Wanita Ngablak
di Desa Ngablak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro

Pemberian Bantuan Revitalisasi Taman Bacaan Sekolah
di SD 33 Tanjung Bunga Kabupaten Samosir bekerjasama dengan PT. Balai Pustaka

Pemberian Bantuan Pembangunan IPAL Biogas
di Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung

Pemberian Bantuan Pembangunan IPAL kepada Kelompok Batik Giri Wastra Pura

Pemberian bantuan pengadaan tempat sampah dan peralatan pertanian di Desa Gampengrejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri

Pemberian Bantuan Kambing kepada Kelompok Tani Mendo Miri Makmur Desa Pengkol Kecamatan Nguter - Kab. Sukoharjo

Pemberian Bantuan Konservasi Sumber Air Gumitir di Kabupaten Nganjuk

Pemberian Bantuan Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan Kopi dan Sarana Produksi Budidaya Lebah Madu di Kabupaten Wonogiri

Pelatihan Mitra Binaan Perum Jasa Tirta I

G. Kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (PUMK)

Laporan Keuangan PUMK adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan yang disajikan secara komparatif sebagaimana tabel berikut:

Laporan Aktivitas yang disajikan secara komparatif sebagaimana tabel berikut:

Uraian	RKA Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Tahun 2024 RKA	Persentase	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (1)	(5) = (3) : (2)
ASET					
Aset lancar					
Kas	-	-	-		
Piutang pinjaman mitra binaan - bersih (Setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang)	343,323,730	279,105,682	221,786,438	64.60%	79.46%
Piutang jasa administrasi	-	-	-		
Jumlah aset lancar	**343,323,730**	**279,105,682**	**221,786,438**	**64.60%**	**79.46%**
Aset tidak lancar					
Aset lain-lain	-	-	-		
Piutang Jangka Panjang	3,112,000,000	2,808,778,323	3,258,778,323	104.72%	116.02%
Jumlah aset tidak lancar	**3,112,000,000**	**2,808,778,323**	**3,258,778,323**	**104.72%**	**116.02%**
JUMLAH ASET	**3,455,323,730**	**3,087,884,005**	**3,480,564,761**	**100.73%**	**112.72%**
LIABILITAS DAN ASET NETO					
Kelebihan Pembayaran Angsuran	-	-	-		
Angsuran belum teridentifikasi	-	-	-		
JUMLAH LIABILITAS	-	-	-		
ASET NETO					
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	3,492,145,674	3,107,582,005	3,116,853,308	89.25%	100.30%
JUMLAH ASET NETO	**3,492,145,674**	**3,107,582,005**	**3,116,853,308**	**89.25%**	**100.30%**
JUMLAH ASET NETO DAN LIABILITAS	**3,492,145,674**	**3,107,582,005**	**3,116,853,308**	**89.25%**	**100.30%**

Laporan Arus Kas yang disajikan secara komparatif sebagaimana tabel berikut:

Uraian	RKA Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Tahun 2024 RKA	Persentase	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (1)	(5) = (3) : (2)
AKTIVITAS OPERASI					
Pengembalian pinjaman mitra binaan	1,170,000,000	752,182,218	428,000,000	36.58%	56.90%
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	39,000,000	27,012,274	21,700,000	55.64%	80.33%
Pendapatan bunga atau jasa giro	3,000,000	1,609,416	1,800,000	60.00%	111.84%
Angsuran Belum teridentifikasi	-	-	-		
Pendapatan (beban) lain-lain	-	66,847,200	(1,200,000)		-1.80%
Penyaluran pinjaman kemitraan	-	-	-		
Penyaluran melalui Kolaborasi BUMN	(1,212,000,000)	(908,778,323)	(450,000,000)	37.13%	49.52%
Beban administrasi dan umum	-	2,077,488	(300,000)		-14.44%
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	**-**	**(59,049,727)**	**-**		**0.00%**
AKTIVITAS PENDANAAN					
Aktivitas Bersih Terikat berakhir Pembatasannya					
Hibah Pelimpahan Dana kepada BRI	-				
Kas neto diperoleh (digunakan) dari aktivitas pendan	**-**				
Kenaikan (penurunan) neto dalam kas	**-**	**(59,049,727)**	**-**		**0.00%**
Kas awal tahun	-	59,049,727	-		0.00%
Kas akhir tahun	**-**	**-**	**-**		

Kualitas Piutang yang disajikan secara komparatif sebagaimana tabel berikut:

Uraian	RKA Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	RKA Tahun 2024	Persentase (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (1)	(5) = (3) : (2)
Lancar	437,928,748	40,192,393	19,336,116	4.42%	48.11%
Kurang Lancar	270,485,403	122,092,785	38,672,233	14.30%	31.67%
Diragukan	103,042,058	137,354,383	58,008,349	56.30%	42.23%
Macet	476,569,519	1,205,666,252	850,789,115	178.52%	70.57%
Total	**1,288,025,728**	**1,505,305,813**	**966,805,813**	**75.06%**	**64.23%**

Penjelasan terkait piutang bermasalah sebagaimana tabel berikut:

Uraian	RKA Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	RKA Tahun 2024	Persentase (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (1)	(5) = (3) : (2)
Bermasalah	708,264,331	797,540,531	724,235,513	102.25%	90.81%
Total	**708,264,331**	**797,540,531**	**724,235,513**	**102.25%**	**90.81%**

Prognosa piutang bermasalah Program Pendanaan UMK PJT I Tahun 2023 sebesar Rp797.540.531 (193 Mitra Binaan). Menindaklanjuti Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-277/MBU/10/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Dan/Atau Pembiayaan Syariah Bermasalah Pada Program Pendanaan UMK di BUMN, proyeksi atas penghapusan piutang bermasalah tahun 2024 adalah sebesar Rp73.305.018. Proyeksi tersebut merupakan Mitra Binaan yang telah dinyatakan meninggal dunia.

H. UMK Binaan PJT I

Mitra Binaan eksisting PJT I s.d. Triwulan III Tahun 2023 berjumlah 361 Mitra Binaan dan belum termasuk Mitra Binaan bermasalah berjumlah 193 Mitra Binaan. Jenis usaha 554 Mitra Binaan tersebut bermacam-macam, antara lain: 146 Mitra Binaan sektor usaha industri; 125 Mitra Binaan sektor usaha perdagangan; 26 Mitra Binaan sektor usaha pertanian; 20 Mitra Binaan sektor usaha peternakan; 15 Mitra Binaan sektor usaha perkebunan; 2 Mitra Binaan sektor usaha perikanan, 26 Mitra Binaan sektor usaha jasa serta 1 Mitra Binaan lain-lain.

Mitra Binaan PJT I yang diperoleh dari penyaluran dana Program Pendanaan UMK melalui BRI s.d. Triwulan III Tahun 2023 berjumlah 47 Mitra Binaan dengan kualitas piutang 100% lancar. Jenis usaha 47 Mitra Binaan tersebut bermacam-macam, antara lain: 22 Mitra Binaan sektor usaha perdagangan; 9 Mitra Binaan sektor usaha pertanian; 6 Mitra Binaan sektor usaha peternakan; 1 Mitra Binaan sektor usaha perkebunan; 4 Mitra Binaan sektor usaha perikanan, 5 Mitra Binaan sektor usaha jasa.

Jumlah MB naik kelas pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 6 MB.

I. Pembinaan Dan Monitoring UMK

1. Pembinaan UMK

PJT I melakukan pembinaan kepada UMK Binaan baik UMK Binaan eksisting maupun UMK Binaan yang mendapatkan penyaluran dana Program TJSL Pendanaan UMK dari BRI. Pada Prognosa Tahun 2023, PJT I melakukan pembinaan kepada UMK Binaan melalui kegiatan antara lain:

a. Mengikutsertakan 5 Mitra Binaan dalam kegiatan Pameran Surabaya Great Expo yang dilaksanakan tanggal 16-20 Agustus 2023 di Grand City Surabaya.
b. Memberikan pelatihan kepada 35 Mitra Binaan dengan materi pelatihan Persyaratan dan Peluang Pasar Ekspor Produk UMKM, *Seller Business Matching* PaDi UMKM di Lingkungan PJT I dan Komunikasi Bisnis di Surabaya.
c. Mengikutsertakan 4 Mitra Binaan dalam kegiatan BUMN – UMKM Solo Great Sale 2023 yang dilaksanakan tanggal 19-22 Oktober 2023 di Paragon Mall Solo.
d. Memberikan bantuan sertifikasi halal kepada 3 Mitra Binaan industri kulit bekerjasama dengan PT Sucofindo.
e. Memberikan pelatihan kepada Mitra Binaan dari sektor usaha pertanian dan peternakan.

Sedangkan pada Tahun 2024, PJT I tetap akan melakukan pembinaan kepada UMK Binaan melalui kegiatan pameran, pelatihan dan sertifikasi yang dibutuhkan Mitra Binaan.

2. Monitoring UMK

Monitoring UMK yang dilakukan PJT I antara lain meliputi:

a. Monitoring pembayaran angsuran Mitra Binaan setiap bulan;
b. Melakukan penagihan dan kunjungan kepada Mitra Binaan;
c. Mengirimkan surat teguran kepada Mitra Binaan;
d. Melakukan *rescheduling* perjanjian pinjaman Mitra Binaan;
e. Melakukan koordinasi dengan internal (Divisi Hukum) sehubungan Mitra Binaan yang bermasalah;
f. Memindahkan piutang MB ke dalam kategori piutang bermasalah (bila ada);
g. Memantau dashboard PUMK BRI sehubungan penyaluran dana Program TJSL Pendanaan UMK PJT I;
h. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BRI sehubungan data-data Mitra Binaan yang mendapatkan penyaluran dana Program TJSL Pendanaan UMK melalui BRI untuk kemudian dapat dilakukan pembinaan.
i. Mengusulkan nama-nama Mitra Binaan kepada BRI untuk mendapatkan penyaluran dana Program Pendanaan UMK PJT I.

J. Progres Hapus Buku Dan Hapus Tagih Atas Pendanaan UMK Bermasalah

Berikut Progres Hapus Buku dan Hapus Tagih atas Pendanaan UMK Bermasalah Tahun 2024:

Uraian	RKA Tahun 2023	Prognosa Tahun 2023	Mutasi		RKA Tahun 2024	Persentase (%)	
			Penambahan	Penghapusan			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) : (1)	(7) = (5) : (2)
Bermasalah	708,264,331	797,540,531	-	73,305,018	724,235,513	102.25%	90.81%
Total	**708,264,331**	**797,540,531**	**-**	**73,305,018**	**724,235,513**	**102.25%**	**90.81%**

Pada tahun 2024 dianggarkan atas hapus buku dan hapus tagih sebesar Rp73.305.018 kepada 14 Mitra Binaan yang telah **meninggal dunia** dengan total piutang bersih sebesar Rp73.305.018 dan diproyeksikan tidak adanya penambahan piutang bermasalah. Hapus buku dan hapus tagih atas piutang bermasalah yang dimiliki oleh TJSL PJT I akan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing Mitra Binaan. Terhadap sisa jumlah Mitra Binaan bermasalah akan dilakukan upaya kunjungan dan penagihan terlebih dahulu.

K. Target KPI Program TJSL Tahun 2024

Target KPI Program TJSL Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Indikator	Target	Bobot	Keterangan	
1.	Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan menggunakan metode *Social Return On Investment* (SROI).	3 program (salah 1 program CSV)	20%	Program IPAL Biogas di Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung	
				Program Pengendalian Sampah Saluran Klambu Kota Semarang	Program CSV
				Program Pengendalian Eceng Gondok	Program CSV
2.	Menetapkan Kebijakan levelling fungsi yang membidangi Sustainability/ESG setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut	BOD-1	20%	Penyesuaian fungsi Sustainability/ESG pada pejabat setingkat BOD-1	
3.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan	Laporan TW I Laporan TW II Laporan TW III Laporan Audited 2023	20%	4(empat) laporan yang lengkap dan tepat waktu paling lambat 1 bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir	

No.	Indikator	Target	Bobot	Keterangan	
	pengisian sistem informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN				
4.	Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program	3 program	20%	Program Literasi Pendidikan	Prioritas Pendidikan
				Program Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Air	Prirotas Lingkungan
				Program Pengembangan UMK	Prioritas Pengembangan UMK
5.	Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL	356 Orang	20%	Seluruh karyawan tetap tercatat di Desember 2023	

Metode perhitungan realisasi pencapaian KPI Program TJSL Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Pengukuran Dampak

1) Rumus: $\frac{\text{Jumlah program yang diukur dampaknya dengan metode SROI}}{\text{3 program}}$

2) Definisi:

– SROI adalah metode penilaian finansial sederhana terhadap nilai sosial ekonomi yang membandingkan antara manfaat yang akan diterima dari sebuah proyek dengan besaran investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan manfaat tersebut dalam periode waktu tertentu.

– Manfaat yang diukur minimal dengan indikator penghematan sumber daya yang digunakan perusahaan ataupun peningkatan profit/laba perusahaan.

– Program yang diukur dampaknya dengan metode SROI, dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain yang berkompeten.

b. Kebijakan levelling fungsi yang membidangi Sustainability/ESG setingkat BOD-1

1) Penilaian terkait dengan adanya tugas dan fungsi yang membidangi *sustainability*/ESG sebagai berikut:

Skor	BOD-1	BOD-2	BOD-3	>BOD-3
	100%	75%	50%	0

2) Bukti kebijakan *levelling* fungsi yang membidangi *Sustainability*/ESG dapat berupa:

– Uraian tugas dan fungsi terkait *sustainability*/ESG yang tercantum pada tupoksi pejabat BOD-1, BOD-2 dan BOD-3; atau

– Adanya kajian terkait levelling fungsi *sustainability*/ESG.

Bukti dimaksud agar disampaikan paling lambat 30 Juni 2024 (skor menjadi 0 bila melampaui batas waktu penyampaian dimaksud).

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

1) Daftar Penilaian:

Skor	Lengkap dan Tepat Waktu	Lengkap	Tepat Waktu	Tidak Lengkap dan Tidak Tepat Waktu
	100%	50%	50%	0

2) Keterangan:

– Pelaporan Program TJSL yang valid, lengkap dan tepat waktu adalah jika BUMN telah memenuhi pengisian seluruh menu di setiap periode TW I 2024, TW II 2024, TW III 2024 dan Audited 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN dan/atau ketentuan yang berlaku.

– Ketersediaan data informasi yang lengkap dibutuhkan dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan Program TJSL. Untuk itu, keberadaan sistem informasi melalui portal TJSL menjadi bagian penting sebagai *tools* untuk mengevaluasi dan memonitor.

d. Peningkatan Kolaborasi

a. Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah program kolaborasi dengan partisipan perusahaan}}{\text{3 program kolaborasi}}$$

b. Definisi:

Masing-masing minimal 1 (satu) program kolaborasi pada setiap bidang prioritas (pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK). Dengan kolaborasi, diharapkan bisa mengeskalasi dampak yang didapatkan dari Program TJSL, sehingga perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak terkait.

e. Peningkatan Keterlibatan Karyawan

1) Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah karyawan tetap yang terlibat dalam program sosial kemasyarakatan}}{\text{Jumlah karyawan tetap perusahaan}}$$

2) Keterangan:

- Karyawan tetap BUMN (baik karyawan yang ditugaskan untuk menangani TJSL maupun di luar yang menangani TJSL), agar terlibat dan berpartisipasi aktif dalam minimal 1 kegiatan sosial kemasyarakatan baik yang berasal dari Program TJSL perusahaan maupun dari luar perusahaan.
- Bukti keterlibatan dapat berupa laporan kegiatan dan juga dokumentasi kegiatan.
- Setiap karyawan agar terlibat aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, baik di sekitar perusahaan maupun di sekitar area tempat tinggalnya dalam rangka menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

f. Atas realisasi pencapaian KPI Program TJSL Tahun 2024 digolongkan menjadi:

Skor	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang Baik
	>90%	81%-90%	71%-80%	<70%

- TJSL yang valid, lengkap dan tepat waktu adalah jika BUMN telah memenuhi pengisian seluruh menu di setiap periode TW I 2024, TW II 2024, TW III 2024 dan Audited 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN dan/atau ketentuan yang berlaku.
- Ketersediaan data informasi yang lengkap dibutuhkan dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan Program TJSL. Untuk itu, keberadaan sistem informasi

melalui portal TJSL menjadi bagian penting sebagai *tools* untuk mengevaluasi dan memonitor.

g. Peningkatan Kolaborasi

a. Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah program kolaborasi dengan partisipan perusahaan}}{\text{3 program kolaborasi}}$$

b. Definisi:

Masing-masing minimal 1 (satu) program kolaborasi pada setiap bidang prioritas (pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK). Dengan kolaborasi, diharapkan bisa mengeskalasi dampak yang didapatkan dari Program TJSL, sehingga perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak terkait.

h. Peningkatan Keterlibatan Karyawan

a. Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah karyawan tetap yang terlibat dalam program sosial kemasyarakatan}}{\text{Jumlah karyawan tetap perusahaan}}$$

b. Keterangan:

- Karyawan tetap BUMN (baik karyawan yang ditugaskan untuk menangani TJSL maupun di luar yang menangani TJSL), agar terlibat dan berpartisipasi aktif dalam minimal 1 kegiatan sosial kemasyarakatan baik yang berasal dari Program TJSL perusahaan maupun dari luar perusahaan.
- Bukti keterlibatan dapat berupa laporan kegiatan dan juga dokumentasi kegiatan.
- Setiap karyawan agar terlibat aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, baik di sekitar perusahaan maupun di sekitar area tempat tinggalnya dalam rangka menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

c. Atas realisasi pencapaian KPI Program TJSL Tahun 2024 digolongkan menjadi:

Skor	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang Baik
	>90%	81%-90%	71%-80%	<70%

BAB X
PENUTUP

A. Pencapaian Prognosa 2023

Prognosa pencapaian RKAP 2023 konsolidasian, secara ringkas adalah sebagai berikut

1. Pendapatan usaha sebesar Rp594,22 miliar atau 110,90% terhadap RKAP 2023.
2. Beban usaha pengelolaan sebesar Rp543,96 miliar atau 111,56% terhadap RKAP 2023.
3. Laba setelah pajak sebesar Rp50,41 miliar atau 110,26% terhadap RKAP 2023.

B. Sasaran RKAP Tahun 2024

Sasaran RKAP 2024 konsolidasian, secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 777,80 miliar atau 110,90% dari RKAP 2023, 126,54% dari realisasi audited 2022 dan 130,89% dari prognosa 2023.
2. Beban usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 698,00 miliar atau 111,56% dari RKAP 2023, 134,65% dari realisasi audited 2022 dan 128,32% dari prognosa 2023.
3. Laba bersih tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 70,62 miliar atau 110,26% dari RKAP 2023, 94,37% dari realisasi audited 2022 dan 140,10% dari prognosa 2023.
4. Kegiatan investasi dan penyertaan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 411,605 miliar atau 81,95% dari RKAP 2023 dan 260,43% dari prognosa 2023.

C. Hal-hal lain yang memerlukan perhatian

1. Masa transisi 2 (dua) tahun atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana PJT I sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP (MIP), memerlukan atensi dan upaya khusus untuk penyesuaian tata kelola perusahaan.
2. Pengembangan bisnis Non Sumber Daya Air (Non SDA) meliputi pengembangan SPAM, EBT dan lainnya yang memanfaatkan aset/BMN yang diserah operasikan/dikelola oleh PJT I memerlukan dukungan Pemerintah.
3. Rencana penarikan BJPSDA pada Aset Bendungan Non PUPR diantaranya PLTA Timo, PLTA garung, PLTA Mrica, PLTA Tulis dan PLTA KTH Ketenger memerlukan penguatan dari Kementerian PUPR dan BUMN.

4. Upaya usulan penyesuaian tarif BJPSDA pada tahun 2024 untuk pemanfaat PLTA, PDAM dan Industri di Wilayah Propinsi Jatim untuk meningkatkan kegiatan O&P memerlukan dukungan berbagai pihak. Diperlukan koordinasi intensif dengan Kementerian PUPR, Kementerian BUMN maupun Tim Evaluasi Tarif.
5. Realisasi pendapatan dari PT Inalum atas sisa tagihan tahun 2016-2020 dan sisa tagihan tahun 2021-2022.
6. Target penambahan pendapatan BJPSDA sektor PDAM dari PDAM Kota Semarang (Kali Garang dan Kali Babon).
7. Upaya peningkatan penyerapan Investasi 2024.
8. Peningkatan sektor usaha PT JTE untuk pencapaian target laba di tahun 2024.

D. Hal-hal lain yang perlu mendapatkan keputusan

1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024.
2. Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan Tahun 2024.

Lampiran I

PROYEKSI LAYANAN AIR BAKU
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I
TAHUN 2023 DAN RKAP 2024

NO	URAIAN	SAT	RKAP 2023	PROGNOSA 2023	RKAP 2024	% RKAP 2024 THD	
						RKAP 2023	PROGNOSA 2023
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
	LAYANAN JASA AIR						
1	**LISTRIK**	**Juta kWh**	**6,947.01**	**6,400.68**	**7,162.91**	**103.11%**	**111.91%**
	a. WS Brantas	Juta kWh	1,250.00	1,137.31	1,288.85	103.11%	113.32%
	b. WS Bengawan Solo	Juta kWh	85.00	81.14	87.39	102.81%	107.70%
	c. WS Serayu Bogowonto	Juta kWh	114.00	104.45	227.64	199.68%	217.94%
	d. WS Jratunseluna	Juta kWh	208.01	168.62	548.70	263.79%	325.41%
	e. WS Toba Asahan	Juta kWh	5,290.00	4,909.16	5,010.33	94.71%	102.06%
2	**PDAM**	**Juta m3**	**599.71**	**578.62**	**630.33**	**105.10%**	**108.94%**
	a. Prop. Jawa Timur	Juta m3	510.00	486.47	516.11	101.20%	106.09%
	1) WS Brantas	Juta m3	457.19	432.18	463.12	101.30%	107.16%
	2) WS Bengawan Solo	Juta m3	52.81	54.29	52.99	100.34%	97.61%
	b. Prop. Jawa Tengah						
	1) WS Bengawan Solo	Juta m3	17.85	19.82	20.32	113.84%	102.51%
	2) WS Serayu Bogowonto	Juta m3	9.71	10.50	9.70	99.85%	92.37%
	3) WS Jratunseluna	Juta m3	59.99	61.83	83.48	139.14%	135.00%
	c. WS Toba Asahan	Juta m3	2.16	-	0.73	33.73%	-
3	**INDUSTRI**	**Juta m3**	**519.23**	**467.36**	**491.03**	**94.57%**	**105.06%**
	a. Prop. Jawa Timur	Juta m3	206.31	199.64	209.01	101.31%	104.70%
	1) WS Brantas	Juta m3	157.19	154.45	164.13	104.41%	106.27%
	2) WS Bengawan Solo	Juta m3	49.12	45.19	44.88	91.36%	99.31%
	b. Prop. Jawa Tengah						
	1) WS Bengawan Solo	Juta m3	6.00	3.36	3.58	59.67%	106.52%
	2) WS Serayu Bogowonto	Juta m3	288.70	246.88	261.07	90.43%	105.75%
	3) WS Jratunseluna	Juta m3	5.42	5.34	4.92	90.78%	92.11%
	c. WS Toba Asahan	Juta m3	12.80	12.14	12.45	97.28%	102.56%

Lampiran II

PROYEKSI LABA/RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF (KONSOLIDASIAN)
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I DAN ENTITAS ANAK
TAHUN 2023 DAN RKAP 2024

dalam jutaan rupiah

NO	URAIAN	RKAP 2023	PROGNOSA 2023	RKAP 2024	% RKAP 2024 THD	
					RKAP 2023	PROGNOSA 2023
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
I	**KEGIATAN USAHA**					
A	**PENDAPATAN USAHA (juta Rp)**	**701,355.94**	**594,219.57**	**777,798.53**	**110.90%**	**130.89%**
1.	PENGUSAHAAN SDA	568,981.45	510,836.20	648,691.27	114.01%	126.99%
2.	PENGUSAHAAN NON SDA	132,374.49	83,383.37	129,107.26	97.53%	154.84%
B	**BEBAN USAHA (juta Rp)**	**625,690.63**	**543,963.59**	**698,000.45**	**111.56%**	**128.32%**
1.	USAHA PENGELOLAAN SDA	503,968.69	456,349.96	578,008.89	114.69%	126.66%
2.	USAHA PENGELOLAAN NON SDA	121,721.94	87,613.63	119,991.57	98.58%	136.96%
C	**LABA/RUGI USAHA**	**75,665.31**	**50,255.98**	**79,798.08**	**105.46%**	**158.78%**
D	**PENDAPATAN/(BEBAN) KEUANGAN BERSIH**	**6,798.51**	**18,769.47**	**13,657.11**	**200.88%**	**72.76%**
E	**PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH**	**(3,488.02)**	**(4,339.30)**	**(3,987.82)**	**114.33%**	**91.90%**
F	**LABA/RUGI SEBELUM PAJAK**	**78,975.80**	**64,686.16**	**89,467.37**	**113.28%**	**138.31%**
G	**PAJAK PENGHASILAN**	**14,930.00**	**14,280.00**	**18,850.00**	**126.26%**	**132.00%**
H	**LABA/RUGI BERSIH**	**64,045.80**	**50,406.16**	**70,617.37**	**110.26%**	**140.10%**

Lampiran III

PROYEKSI PENDAPATAN USAHA (KONSOLIDASIAN)
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I DAN ENTITAS ANAK
TAHUN 2023 DAN RKAP 2024

dalam jutaan rupiah

NO	URAIAN	RKAP 2023	PROGNOSA 2023	RKAP 2024	% RKAP 2024 THD	
					RKAP 2023	PROGNOSA 2023
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
A	PENDAPATAN	701,355.94	594,219.57	777,798.53	110.90%	130.89%
1.	**PENDAPATAN PENGELOLAAN SDA**	**568,981.45**	**510,836.20**	**648,691.27**	**114.01%**	**126.99%**
	a. Jasa Air PLTA	395,253.78	345,075.77	464,083.09	117.41%	134.49%
	b. Jasa Air PDAM	77,182.92	74,563.25	79,351.93	102.81%	106.42%
	c. Jasa Air Industri	96,544.75	91,197.18	105,256.25	109.02%	115.42%
2.	**PENDAPATAN PENGELOLAAN NON SDA**	**132,374.49**	**83,383.37**	**129,107.26**	**97.53%**	**154.84%**
	a. PLTM	7,828.20	5,380.12	7,503.56	95.85%	139.47%
	b. Pengembangan EBT	29,688.18	12,971.30	20,819.80	70.13%	160.51%
	c. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4,212.04	4,359.68	13,847.34	328.76%	317.62%
	d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	6,607.50	4,234.94	6,711.00	101.57%	158.47%
	e. Pariwisata	15,880.00	14,039.52	16,200.00	102.02%	115.39%
	f. Konstruksi & Peralatan	50,877.03	25,214.39	47,740.55	93.84%	189.34%
	g. Laboratorium Lingkungan	14,541.37	9,410.00	10,989.57	75.57%	116.79%
	h. Pemanfaatan Lahan	2,490.17	7,527.53	4,695.44	188.56%	62.38%
	i. Konsultansi & Diklat	250.00	245.90	280.00	112.00%	113.87%
	j. SWMS	-	-	320.00	-	-

Lampiran IV

PROYEKSI BEBAN USAHA & LABA/RUGI USAHA (KONSOLIDASIAN)
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I DAN ENTITAS ANAK
TAHUN 2023 DAN RKAP 2024

dalam jutaan rupiah

NO	URAIAN	RKAP 2023	PROGNOSA 2023	RKAP 2024	% RKAP 2024 THD	
					RKAP 2023	PROGNOSA 2023
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
B	BEBAN USAHA	625,690.63	543,963.59	698,000.45	111.56%	128.32%
1	USAHA PENGELOLAAN SDA	503,968.69	456,349.96	578,008.89	114.69%	126.66%
	a. Beban Pengelolaan SDA	**315,802.46**	**274,756.27**	**378,956.15**	**120.00%**	**137.92%**
	1). Biaya Perencanaan	31,550.00	25,239.50	43,677.22	138.44%	173.05%
	2). Biaya Konservasi SDA	14,200.00	6,478.67	22,473.87	158.27%	346.89%
	3). Biaya Pembangunan Sarana & Prasarana SDA	1,600.00	304.08	9,750.00	609.38%	3206.44%
	4). Biaya O&P Sumber Air, Sarana dan Prasarana SDA	224,872.14	196,609.83	252,570.19	112.32%	128.46%
	5). Biaya Sistem Informasi, Monitoring Evaluasi & Pemberdayaan Masyarakat	6,600.00	7,691.46	9,558.04	144.82%	124.27%
	6). Biaya Penyusutan	36,980.32	38,432.74	40,926.83	110.67%	106.49%
	b. Beban Overhead	**182,267.23**	**178,045.77**	**193,843.13**	**106.35%**	**108.87%**
	1). Biaya Pegawai	131,575.85	128,260.84	141,199.64	107.31%	110.09%
	2). Biaya Direksi-Dewas-Komite	13,009.09	12,484.09	13,962.36	107.33%	111.84%
	3). Biaya Jasa Produksi	10,500.00	10,483.00	10,900.00	103.81%	103.98%
	4). Biaya Tantiem	3,000.00	3,800.00	3,800.00	126.67%	100.00%
	5). Biaya Perjalanan Dinas	6,500.00	7,815.83	8,639.48	132.92%	110.54%
	6). Biaya Umum	7,900.20	7,906.81	8,210.74	103.93%	103.84%
	7). Biaya Pemasaran	1,432.09	2,377.85	3,190.40	222.78%	134.17%
	8). Biaya Penelitian & Pengembangan	8,350.00	4,917.36	3,940.51	47.19%	80.13%
	c. Beban Lainnya	**5,899.00**	**3,547.92**	**5,209.60**	**88.31%**	**146.84%**
	1). Beban Pendampingan Hukum	1,500.00	1,567.58	2,660.00	177.33%	169.69%
	2). Beban Audit KAP	750.00	750.00	750.00	100.00%	100.00%
	3). Beban Pengurusan Aset	3,000.00	-	900.00	30.00%	-
	4). Beban Jasa Profesional	205.00	1,230.34	454.60	221.76%	36.95%
	5). Beban Shared Service Fee	444.00	-	445.00	100.23%	-
2	BIAYA PENGELOLAAN NON SDA	121,721.94	87,613.63	119,991.57	98.58%	136.96%
	a. Biaya Pengelolaan Non SDA	**101,624.34**	**68,544.49**	**96,213.86**	**94.68%**	**140.37%**
	1). Biaya Operasional	89,165.98	57,131.13	83,157.53	93.26%	145.56%
	2). Biaya Penyusutan	12,458.36	11,413.36	13,056.33	104.80%	114.40%
	b. Beban Overhead Non SDA	**19,888.60**	**18,610.90**	**23,038.71**	**115.84%**	**123.79%**
	1). Biaya Pegawai (termasuk Direksi & Komisaris	16,029.97	15,374.80	19,067.96	118.95%	124.02%
	2). Biaya Jasa Produksi	752.07	675.15	829.00	110.23%	122.79%
	3). Biaya Tantiem Entitas Anak	300.00	-	261.38	87.13%	-
	4). Biaya Perjalanan Dinas	1,238.68	845.43	1,211.85	97.83%	143.34%
	5). Biaya Umum	915.40	1,217.46	1,166.26	127.40%	95.79%
	6). Biaya Pemasaran	652.48	498.06	502.26	76.98%	100.84%
	c. Beban Lainnya	**209.00**	**458.24**	**739.00**	**353.59%**	**161.27%**
	1). Beban Pendampingan Hukum					
	2). Beban Audit KAP	209.00	340.07	498.00	238.28%	146.44%
	3). Beban Izin Lisensi		118.17	241.00	-	203.94%
C	LABA/RUGI USAHA	75,665.31	50,255.98	79,798.08	105.46%	158.78%
D	PENDAPATAN/(BEBAN) KEUANGAN BERSIH	6,798.51	18,769.47	13,657.11	200.88%	72.76%
	a. Pendapatan Keuangan	12,317.50	19,136.41	15,632.40	126.91%	81.69%
	b. Beban Keuangan	(5,518.99)	(366.93)	(1,975.29)	35.79%	538.32%
E	PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH	(3,488.02)	(4,339.30)	(3,987.82)	114.33%	91.90%
	a. Pendapatan lain-lain	2,180.00	1,964.83	2,152.00	-	109.53%
	b. Beban Lain-lain	(5,668.02)	(6,304.12)	(6,139.82)	108.32%	97.39%

Lampiran V

PROYEKSI LAPORAN POSISI KEUANGAN (KONSOLIDASIAN)
PERUM JASA TIRTA I DAN ENTITAS ANAK
TAHUN 2023 DAN RKAP 2024

(dalam jutaan rupiah)

	U R A I A N	RKAP 2023	PROGNOSA 2023	RKAP 2024
1	2	3	4	5
ASET				
A	**ASET LANCAR**			
1	Kas dan Setara Kas	224,249.13	415,488.90	369,991.31
2	Piutang	61,700.37	141,074.01	148,955.58
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(41,598.13)	(54,100.51)	(55,209.83)
4	Tagihan Bruto Pemberi Kerja	538.18	28,610.41	22,351.97
5	Pendapatan Yang Akan Diterima (PYAD)	56,157.08	152,663.08	147,447.35
6	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PYAD	(1,741.60)	(2,085.99)	(2,085.99)
7	Piutang Lain-lain	169.11	26.99	26.99
8	Pajak Dibayar Dimuka	15,100.15	5,883.64	14,151.83
9	Piutang Pajak	-	-	-
10	Persediaan - Bersih	2,650.91	3,734.18	3,752.85
11	Uang Muka Kerja	635.93	-	-
12	Pembayaran dimuka	4,259.59	23,109.44	10,905.49
13	Aset Lancar Lainnya	4,550.00	-	-
	JUMLAH ASET LANCAR	**326,670.73**	**714,404.14**	**660,287.54**
B	**ASET TIDAK LANCAR**			
1	Investasi pada Entitas Asosiasi	-	2,529.94	570.08
2	Investasi Jangka Panjang Lainnya	65,000.00	16,500.00	57,000.00
3	Aset Tetap	800,183.14	447,439.59	668,850.87
4	Aset Hak Guna - Bersih	11,664.32	2,054.84	1,664.92
5	Aset Tak Berwujud	10,948.92	8,413.70	18,527.38
6	Properti Investasi	42.16	844.04	802.04
7	Aset Pajak Tangguhan	13,984.28	25,452.47	17,874.17
8	Aset Lain-lain - Bersih	193.16	1,017.80	977.80
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**902,015.98**	**504,252.38**	**766,267.27**
	TOTAL ASET	**1,228,686.71**	**1,218,656.52**	**1,426,554.81**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
A	**LIABILITAS JANGKA PENDEK**			
1	Utang Usaha	83,430.43	73,301.14	154,761.81
2	Pendapatan Diterima Dimuka	3,913.24	13,900.67	11,507.32
3	Utang Pajak	10,899.27	12,783.20	16,152.48
4	Beban Akrual	28,799.82	88,939.95	108,533.40
5	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	7,262.54	42,363.22	6,462.41
6	Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Jangka Pendek	2,418.65	2,860.55	1,092.45
	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	**136,723.94**	**234,148.72**	**298,509.86**
B	**LIABILITAS JANGKA PANJANG**			
1	Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	11,705.64	10,037.12	12,684.62
2	Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Jangka	46,242.71	252.85	70,606.54
	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	**57,948.35**	**10,289.97**	**83,291.16**
	JUMLAH LIABILITAS	**194,672.29**	**244,438.69**	**381,801.03**
C	**EKUITAS**			
1	Modal	31,701.25	31,701.25	31,701.25
2	Tambahan Modal Disetor	4,185.90	4,185.90	4,185.90
3	Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Bers	8,260.33	8,387.85	8,675.74
4	Surplus Revaluasi Aset	63,263.89	-	-
5	Saldo Laba	924,700.72	928,264.48	998,491.57
6	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Indu	1,032,112.08	972,539.48	1,043,054.45
7	Kepentingan Non Pengendali	1,902.34	1,678.35	1,699.34
	JUMLAH EKUITAS	**1,034,014.42**	**974,217.83**	**1,044,753.79**
	TOTAL LIABILITAS & EKUITAS	**1,228,686.71**	**1,218,656.52**	**1,426,554.81**

PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIANAN
PERUM JASA TIRTA I DAN ENTITAS ANAK
TAHUN 2023 DAN RKAP 2024

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	RKAP 2023	PROGNOSA 2023	RKAP 2024
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari Pelanggan	643,285.26	538,729.78	685,659.53
Penerimaan dari Pendapatan bunga	478.50	718.50	478.50
Penerimaan lain-lain	1,066.20	3,523.11	2,044.08
Penerimaan titipan pajak	6,927.63	41,103.55	44,621.48
Pembayaran kas kepada pemasok	(315,656.37)	(323,854.26)	(266,474.18)
Pembayaran kas kepada pegawai	(157,903.07)	(160,549.06)	(172,233.44)
Pembayaran pajak	(93,067.82)	(93,083.26)	(104,409.89)
Pembayaran biaya operasi lainnya	(5,609.06)	(339.22)	(6,092.39)
Pembayaran lain-lain	(5,250.00)	(2,317.58)	(4,310.00)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**74,271.26**	**3,931.56**	**179,283.69**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Kas Penjualan Aset	2,000.00	-	1,550.00
Penambahan Investasi Jangka Panjang	-	-	16,500.00
Penerimaan Bunga	11,839.00	21,082.72	15,153.90
Penerimaan Aktivitas Investasi Lainnya	-	5,000.00	1,959.85
Pengeluaran Kas untuk Perolehan Aset	(385,289.03)	(157,178.66)	(252,934.37)
Pengeluaran Kas untuk Investasi Jangka Panjang	(42,000.00)	(3,000.00)	(57,000.00)
Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Investasi Lainnya	(40,000.00)	-	-
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(453,450.03)**	**(134,095.95)**	**(274,770.62)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kas Masuk Aktivitas Pendanaan			
Penambahan Hutang, Kredit dan Pinjaman	95,000.00	12,400.00	53,282.08
Penambahan Ekuitas	40,000.00	-	-
Penerimaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	500.00	5.00	-
Penerimaan Aktivitas pendanaan lainnya	137.18	144.04	21,151.24
Pembayaran Hutang, Kredit dan Pinjaman	-	-	(21,041.66)
Pembayaran Bunga	(5,482.92)	(1,454.52)	(1,939.22)
Pengeluaran Kas untuk Perolehan Aset Hak Guna	-	(2,614.51)	(184.09)
Pembayaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(1,235.00)	(1,235.00)	(1,279.00)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**128,919.26**	**7,245.01**	**49,989.34**
KENAIKAN / (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	**(250,259.51)**	**(122,919.38)**	**(45,497.59)**
Kas dan Setara Kas Awal	**474,508.65**	**538,408.28**	**415,488.90**
Kas Kecil	283.13	321.10	388.01
Cek	-	-	-
Giro	65,225.52	33,737.17	29,600.89
Investasi / Instrumen Keuangan Lainnya	409,000.00	504,350.00	385,500.00
Kas dan Setara Kas Akhir	**224,249.13**	**415,488.90**	**369,991.31**
Kas Kecil	283.13	388.01	238.01
Cek	-	-	-
Giro	64,966.00	29,600.89	53,253.30
Investasi / Instrumen Keuangan Lainnya	159,000.00	385,500.00	316,500.00

Lampiran VII

PROYEKSI PIUTANG MENURUT UMUR KONSOLIDASIAN
PERUM JASA TIRTA I DAN ENTITAS ANAK
TAHUN 2023 DAN RKAP 2024

dalam jutaan rupiah

NO.	U R A I A N	RKAP TAHUN 2023				PROGNOSA 2023				RKAP TAHUN 2024			
		< 6 bln	6-12 bln	> 12 bln	Jumlah	< 6 bln	6-12 bln	> 12 bln	Jumlah	< 6 bln	6-12 bln	> 12 bln	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PIUTANG USAHA												
1	**PIUTANG JASA AIR**												
a.	PLTA	11,700.26	5.87	7.90	**11,714.03**	46,359.62	-	-	**46,359.62**	53,313.56	-	-	**53,313.56**
b.	PDAM	11,012.40	2,433.83	25,540.46	**38,986.69**	8,241.58	2,932.49	30,914.68	**42,088.76**	7,458.46	2,951.32	40,096.72	**50,506.51**
c.	INDUSTRI	3,111.24	478.66	4.86	**3,594.76**	6,211.93	54.06	466.82	**6,732.81**	7,097.21	402.96	372.54	**7,872.71**
2	**PIUTANG JASA NON AIR**												
a.	PERALATAN	-	-	1,434.99	**1,434.99**	-	-	412.51	**412.51**	-	-	412.51	**412.51**
b.	KONSULTANSI, DIKLAT	25.00		238.91	**263.91**	25.00	-	248.91	**273.91**	35.00	-	238.91	**273.91**
c.	AMDK	479.19	479.78	1,084.23	**2,043.20**	479.19	479.78	1,084.23	**2,043.20**	364.67	388.32	1,007.01	**1,760.00**
d	SPAM	399.59	4.17	122.95	**526.71**	399.59	4.17	122.95	**526.71**	310.17	193.83	-	**504.00**
e	PARIWISATA	10.00	-	640.49	**650.49**	10.00	-	663.98	**673.98**	15.00	-	642.83	**657.83**
f	LKA	312.86	18.48	536.58	**867.92**	426.35	1.32	572.20	**999.87**	773.67	2.40	298.24	**1,074.30**
g	SEWA LAHAN	15.75	-	-	**15.75**	47.25	-	-	**47.25**	15.75	-	-	**15.75**
h	USAHA LAINNYA	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
	JUMLAH PIUTANG USAHA 1+2	**27,066.29**	**3,420.80**	**29,611.38**	**60,098.46**	**62,200.52**	**3,471.83**	**34,486.27**	**100,158.61**	**69,383.50**	**3,938.83**	**43,068.75**	**116,391.08**
3	**PT JASA TIRTA ENERGI**	**1,340.41**	**159.17**	**102.32**	**1,601.90**	**8,842.74**	**7,065.21**	**14,130.42**	**30,038.37**	**8,766.69**	**7,000.02**	**14,000.04**	**29,766.75**
a.	JASA ENERGI PLTM LODAGUNG	-	-	-	**-**	600.00			**600.00**	600.00			**600.00**
b.	KONSTRUKSI EBT	445.78	-	-	**445.78**	5,887.67			**5,887.67**	5,833.35			**5,833.35**
c.	JASA KONSTRUKSI DAN PERALATAN	894.64	159.17	102.32	**1,156.13**	2,355.07	7,065.21	14,130.42	**23,550.70**	2,333.34	7,000.02	14,000.04	**23,333.40**
	JUMLAH PIUTANG USAHA 1+2+3	**28,406.70**	**3,579.97**	**29,713.69**	**61,700.37**	**71,043.26**	**10,537.03**	**48,616.69**	**130,196.98**	**78,150.19**	**10,938.85**	**57,068.79**	**146,157.83**
	PIUTANG LAIN-LAIN	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**

Lampiran VIII

PROYEKSI PENGELUARAN PERUSAHAAN KEPADA NEGARA
PERUM JASA TIRTA I

dalam jutaan rupiah

NO	U R A I A N	RKAP 2023			PROGNOSA 2023			RKAP 2024			Keterangan
		Kewajiban	Penyetoran	Selisih	Kewajiban	Penyetoran	Selisih	Kewajiban	Penyetoran	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pajak Pusat										
A	PPh										
	a. Pajak Penghasilan Badan (psl. 25 & 29)	9,037.55	5,379.38	3,658.17	14,280.00	6,381.47	7,898.53	18,850.00	7,273.46	11,576.54	
	b. Pajak Penghasilan Final (4)	1,949.25	1,786.81	162.44	1,589.22	1,456.78	132.43	2,222.30	2,037.11	185.19	
	c. Pajak Penghasilan Perorangan (21)	12,100.04	11,091.70	1,008.34	11,739.27	10,761.00	978.27	16,415.75	15,047.77	1,367.98	
	d. PPh 23 (WAPU)	1,766.78	1,619.54	147.23	1,442.02	1,321.85	120.17	2,016.46	1,848.42	168.04	
	e. PPh 22	848.18	777.50	70.68	1,173.73	1,075.92	97.81	1,641.29	1,504.52	136.77	
	f. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	PPN										
	a. PPN Barang & Jasa	70,225.21	64,372.80	5,852.41	44,882.59	41,142.37	3,740.22	62,182.53	57,000.65	5,181.88	
	b. Pajak Penjualan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Lainnya/ Bea Meterai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C	Bea Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D	Dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E	Pajak Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	Pungutan :										
	a. Iuran Tetap (Landrent)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Iuran Prod (Royalty)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	Daerah										
	a. Pajak Kendaraan	143.56	143.56	-	153.13	153.13	-	160.78	160.78	-	
	b. Pajak Bumi Bangunan	554.05	554.05	-	590.98	590.98	-	620.53	620.53	-	
	c. Pajak Daerah Lainnya	10,857.27	10,857.27	-	9,135.61	9,135.61	-	10,207.10	10,207.10	-	
	JUMLAH	**107,481.88**	**96,582.60**	**10,899.27**	**84,986.54**	**72,019.11**	**12,967.43**	**114,316.74**	**95,700.34**	**18,616.40**	

PROYEKSI PERUBAHAN PERSONALIA
TAHUN 2023 DAN 2024

NO	STATUS PEGAWAI DAN TINGKAT PENDIDIKAN	RKAP TAHUN 2023						PROGNOSA TAHUN 2023						RKAP TAHUN 2024					
		AWAL	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		AKHIR	AWAL	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		AKHIR	AWAL	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		AKHIR
		TAHUN	REKRUTMEN	PERUBAHAN STATUS	PURNA	PERUBAHAN STATUS	TAHUN	TAHUN	REKRUTMEN	PERUBAHAN STATUS	PURNA	PERUBAHAN STATUS	TAHUN	TAHUN	REKRUTMEN	PERUBAHAN STATUS	PURNA	PERUBAHAN STATUS	TAHUN
1	KARYAWAN & CALKAR																		
	1.1. Teknik																		
	a. S3, S2	20	-	1	2	-	**19**	19			1		**18**	18	-	-	1	-	**17**
	b. S1, D4	58	-	9	1	1	**65**	57		4			**61**	61	-	7	-	-	**68**
	c. D3,D2,D1	10	-	2	-	1	**11**	10					**10**	10	-	-	-	-	**10**
	d. <=SLTA	183	-	2	4	-	**181**	183			7		**176**	176	-	-	9	-	**167**
	Jumlah 1.1	271	-	14	7	2	**276**	269	-	4	8	-	**265**	265	-	7	10	-	**262**
	1.2. Non Teknik																		
	a. S3, S2	1	-	-	1	-	**-**	1					**1**	1	-	-	-	-	**1**
	b. S1, D4	31	-	5	-	-	**36**	31		4	2		**33**	33	-	6	-	-	**39**
	c. D3,D2,D1	-	-	-	-	-	**-**	-		1			**1**	1	-	-	-	-	**1**
	d. <= SLTA	74	-	-	7	-	**67**	74			4		**70**	70	-	-	2	-	**68**
	Jumlah 1.2	106	-	5	8	-	**103**	106	-	5	6	-	**105**	105	-	6	2	-	**109**
	Jumlah 1	377	-	19	15	2	**379**	375	-	9	14	-	**370**	370	-	13	12	-	**371**
2	Karyawan Percobaan / MPK																		
	2.1. Teknik																		
	a. S3, S2	-	-	-	-	-	**-**	-	-				**-**	-	-	-	-	-	**-**
	b. S1, D4	10	15	-	-	9	**16**	10	7		1	4	**12**	12	8	-	-	7	**13**
	c. D3,D2,D1	1	-	-	-	1	**-**	-	-				**-**	-	-	-	-	-	**-**
	d. <= SLTA	2	23	-	-	2	**23**	2	20				**22**	22	9	-	-	-	**31**
	Jumlah 2.1	13	38	-	-	12	**39**	12	27	-	1	4	**34**	34	17	-	-	7	**44**
	2.2. Non Teknik																		
	a. S3, S2	-	-	-	-	-	**-**	-					**-**	-	-	-	-	-	**-**
	b. S1, D4	6	8	-	-	5	**9**	5	6			4	**7**	7	1	-	-	6	**2**
	c. D3,D2,D1	-	-	-	-	-	**-**	1	-			1	**-**	-	-	-	-	-	**-**
	d. <= SLTA	-	12	-	-	-	**12**	-	13				**13**	13	2	-	-	-	**15**
	Jumlah 2.2	6	20	-	-	5	**21**	6	19	-	-	5	**20**	20	3	-	-	6	**17**
	Jumlah 2	19	58	-	-	17	**60**	18	46	-	1	9	**54**	54	20	-	-	13	**61**
	Jumlah (1 + 2)	**396**	**58**	**19**	**15**	**19**	**439**	**393**	**46**	**9**	**15**	**9**	**424**	**424**	**20**	**13**	**12**	**13**	**432**

PROYEKSI PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN 2024

(dalam Ribuan Rp)

NO.	JENIS PROGRAM PENGEMBANGAN	REAL TAHUN 2022		RKAPT TAHUN 2023		PROGNOSA TAHUN 2023		RKAP TAHUN 2024		WAKTU		KET.
		JUMLAH KEPESERTAAN	BIAYA (Rp)	JUMLAH KEPESERTAAN	BIAYA (Rp)	JUMLAH KEPESERTAAN	BIAYA (Rp)	JUMLAH KEPESERTAAN	BIAYA (Rp)	MULAI	AKHIR	
I.	**PENGEMBANGAN MANAJEMEN**	**873**	**624,840**	**221**	**535,000**	**390**	**1,120,000**	**310**	**860,000**			
1	Manajemen Keuangan	713	209,800	80	150,000	175	45,000	150	200,000	TW. I	TW. IV	
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	44	148,901	75	135,000	50	125,000	50	200,000	TW. I	TW. IV	
3	Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan	42	56,244	10	50,000	5	50,000	10	110,000	TW. I	TW. IV	
4	Manajemen Risiko	24	58,099	6	50,000	70	550,000	50	225,000	TW. I	TW. IV	
5	Manajemen Umum	50	151,796	50	150,000	90	350,000	50	125,000	TW. I	TW. IV	
II.	**PENINGKATAN KETERAMPILAN**	**737**	**449,951**	**220**	**510,000**	**530**	**453,000**	**445**	**680,000**			
1	Bidang Teknik	269	131,197	150	250,000	250	150,000	250	150,000	TW. I	TW. IV	
2	Bidang Administrasi	29	10,200	5	30,000	5	3,000	5	50,000	TW. I	TW. IV	
3	Bidang Informasi	362	96,503	10	75,000	60	25,000	20	130,000	TW. I	TW. IV	
4	Bidang Pengawasan	8	16,534	5	55,000	15	50,000	20	100,000	TW. I	TW. IV	
5	Bidang K3	69	195,516	50	100,000	200	225,000	150	250,000	TW. I	TW. IV	
III.	**PENINGKATAN PENDIDIKAN**	**-**	**5,000**	**10**	**168,000**	**8**	**120,000**	**11**	**345,000**			
1	D-3									TW. I	TW. IV	
2	S-1			3	60,000	2	50,000	5	175,000	TW. I	TW. IV	
3	S-2 / Pendidikan Profesi		5,000	7	108,000	6	70,000	6	170,000	TW. I	TW. IV	
4	S-3									TW. I	TW. IV	
IV.	**PENINGKATAN WAWASAN DAN SEMINAR**	**1,692**	**88,259**	**505**	**110,000**	**1,405**	**120,000**	**255**	**195,000**			
1	Dalam Negeri	1689	88,259	500	50,000	1400	120,000	250	95,000	TW. I	TW. IV	
2	Luar Negeri	3	-	5	60,000	5	-	5	100,000	TW. I	TW. IV	
V.	**REKRUTMEN**		**226,527**		**250,000**		**200,000**		**100,000**	TW. I	TW. IV	
VI.	**LAIN-LAIN**		**895,295**		**927,000**		**450,000**		**559,000**			
1	Knowledge Sharing, Asesmen dll		549,185		487,000		250,000		319,000	TW. I	TW. IV	
2	Biaya Proyek SDM Bersama Klaster Danareksa		173,003		350,000		200,000		150,000			
3	International Short Course		83,017		90,000		-		90,000	TW. I	TW. IV	
4	Studi Roadmap SDM		90,090									
		3,302	**2,289,872**	**956**	**2,500,000**	**2,333**	**2,463,000**	**1,021**	**2,739,000**			

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
PROGNOSA TAHUN 2023
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I DAN ENTITAS ANAK

NO.	PARAMETER KPI	ESGC	88 PS	BOBOT RKAP 2023	SATUAN	PROGNOSA 2023		CAPAIAN (%)	CAPAIAN MAX (%)	POLARITAS	SKOR
						RKAP	REALISASI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100	11	12	13=11*5/100
I	**NILAI EKONOMI & SOSIAL UNTUK INDONESIA**			**48.0**							**50.20**
a	**EKONOMI/FINANSIAL**										
	1 EBITDA	C	-	7.0	Rp miliar	125.10	100.10	80.02	80.02	Maximize	5.60
	2 ROIC - WACC	C	-	5.0	%	0.99	1.59	161.52	110.00	Maximize	5.50
	3 Debt Service Ratio										
	a. Interest Bearing DEBT to EBITDA	G	-	5.0	kali	1.31	0.30	157.02	110.00	Minimize	5.50
	b. Interest Bearing DEBT to Invested Capital	G	-	5.0	%	13.71	2.97	159.11	110.00	Minimize	5.50
b	**OPERASIONAL**										
	1 Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA	G	-	5.0	Skor	Baik Sekali	Baik Sekali	87.43	100.00	Maximize	5.00
	2 Kinerja Sistem Keamanan Bendungan	G	-	8.0	Skor	Baik	Baik	91.76	110.00	Maximize	8.80
c	**SOSIAL**										
	1 Pelayanan Publik										
	a. Pelayanan Air Baku untuk Irigasi	S	-	8.0	Juta m^3	2,690	2,690.00	100.00	110.00	Maximize	8.80
	b. Pengelolaan Lingkungan (Daya Rusak Air dan Konservas	E	-	5.0	Skor	Baik Sekali	Baik Sekali	156.25	110.00	Maximize	5.50
II	**INOVASI MODEL BISNIS**			**11.0**							**11.0**
	1 Pelaksanaan Rencana Inbreng Tahap 2 ke Danareksa	G	Ya	5.0	Waktu	Triwulan IV	Triwulan IV	100.00	100.00	Minimize	5.00
	2 Implementasi Indonesia Water Fund (IWF)	C	-	6.0	Jumlah	1	1	100.00	100.00	Maximize	6.00
III	**KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI**			**14.0**							**14.00**
	1 Pengembangan Teknologi Informasi										
	a. Integrasi ke ERP Danareksa	G	-	4.0	Waktu	Triwulan IV	Triwulan IV	100.0	100.0	Minimize	4.00
	b. Pengembangan E-GRC untuk modul internal audit	G	-	4.0	Waktu	Triwulan IV	Triwulan IV	100.0	100.0	Minimize	4.00
	2 Pemenuhan Standardisasi Pengelolaan IT	G	-	6.0	Waktu	Triwulan IV	Triwulan IV	100.0	100.0	Minimize	6.00
IV	**PENINGKATAN INVESTASI**			**11.0**							**8.40**
	1 Penyerapan Investasi (Rutin dan Non Rutin)	C	-	6.0	Rp miliar	192.64	157.89	81.96	90.00	Maximize	5.40
	2 Penguatan Bisnis Entitas Anak	G	-	5.0	Skor	Baik sekali	Buruk	-	60.00	Maximize	3.00
V	**PENGEMBANGAN TALENTA**			**16.0**							**10.60**
	1 Penguatan Kualitas Personil dalam Organ Pengelola Risiko	G	-	6.0	%	66.67	81.25	122	110	Maximize	6.60
	2 Pencapaian Penyelesaian Transformasi HC sesuai dengan Roadmap SDM 2023	G	-	4.0	Skala	Basic Practice	Basic Practise	100	100	Maximize	4.00
	3 Pengembangan Talenta						-				
	a. % Nominasi Talenta Wanita	S	-	3.0	%	10.00	-	-	-	Maximize	-
	b. % Nominasi Talenta Muda <= 42 tahun	S	-	3.0	%	10.00	-	-	-	Maximize	-
	TOTAL BOBOT PERSPEKTIF I s/d V			**100.0**							**94.20**

Lampiran XII

***KEY PERFORMANCE INDICATORS* (KPI) RKAP TAHUN 2024**
PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA I

NO.	PARAMETER KPI	ESGC	Satuan	Target RKAP 2024	Polaritas	Bobot		
						Sub		Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**NILAI EKONOMI & SOSIAL UNTUK INDONESIA**							50.0
I.1	**FINANSIAL**							
	1. EBITDA	C	Rp miliar	**133.9**	Maximize	8.0		
	2. Cash From Operation (CFO)	C	Rp miliar	**179.28**	Maximize	7.0		
	3. Net Profit Margin	C	%	**9,08**	Maximize	7.0		
I.2	**OPERASIONAL**							
	1. Assessment River Basin Organization (RBO)	G		**3,8**	Maximize	5.0		
	2. Kinerja Sistem Keamanan Bendungan	G	%	**91.92**	Maximize	6.0		
	3. Proses Penerbitan Jumlah Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (SIPSDA)	G	Jumlah	**11**	Maximize	5.0		
I.3	**SOSIAL**							
	1. Penyaluran Air Baku untuk Irigasi	E	Juta m^3	**2,759.00**	Maximize	6.0		
	2. Realisasi Biaya untuk Kegiatan Konservasi	E	Rp miliar	**20.23**	Maximize	6.0		
II	**INOVASI MODEL BISNIS**							15.0
	1. Optimalisasi Aset SPAM	C	Rp miliar	**2,69**	Maximize	5.0		
	2. Optimalisasi Aset Tidak Produktif	C	%	**29.85**	Maximize	5.0		
	3. Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	C	%	**100**	Maximize	5.0		
III	**KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI**							13.0
	1. Implementasi ERP	G	Waktu	**TW IV**	Minimize	7.0		
	2. Standardisasi dan Optimalisasi Water Meter	G	Jumlah	**5**	Minimize	6.0		
IV	**PENINGKATAN INVESTASI**							12.0
	1. Prosentase Penyerapan Investasi	C	Rp Miliar	**205.8**	Maximize	6.0		
	2. Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Air	C	Waktu	**TW IV**	Maximize	6.0		
V	**PENGEMBANGAN TALENTA**							10.0
	1. Rasio Perempuan dalam Nominated Talent	S	%	**10**	Maximize	3.0		
	2. Rasio Talenta Muda (<= 42 tahun) dalam Nominated Talent	S	%	**10**	Maximize	3.0		
	3. Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	S	%	**90**	Maximize	4.0		
	Total Bobot							**100.0**

INVESTASI / PENYERTAAN TAHUN 2024

dalam jutaan rupiah

NO.	URAIAN	RKAP 2023			PROGNOSA 2023			RKAP 2024			% RKAP 2024 KONSOL THD		Carry Over	Sumber Dana
		INDUK	ANAK	KONSOL	INDUK	ANAK	KONSOL	INDUK	ANAK	KONSOL	RKAP 2023 KONSOL	PROGNOSA 2023 KONSOL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11/5	13=11/8	14	15
I.	**INVESTASI PENGEMBALIAN FUNGSI / PENGGANTIAN / BARU**													
	a. Tanah	-	-	-	7,166.70	-	7,166.70	4,200.00	-	4,200.00	0.00%	0.00%	-	Internal
	b. Bangunan & Gedung (Fasilitas)	9,384.00	-	9,384.00	3,560.91		3,560.91	48,421.96	-	48,421.96	516.01%	1359.82%	4,823.53	Internal
	c. Prasarana dan Sarana SDA	12,421.52	-	12,421.52	8,146.85		8,146.85	13,582.45		13,582.45	109.35%	166.72%	2,942.45	Internal
	d. Peralatan mesin	133,531.51	1,937.50	135,469.01	68,607.90	-	68,607.90	83,705.69	1,933.60	85,639.29	63.22%	124.82%	65,589.69	Internal
	e. Peralatan kantor	582.00	-	582.00	756.95		756.95	1,685.59		1,685.59	289.62%	222.68%	-	Internal
	f. Peralatan umum	1,535.00	-	1,535.00	4,140.74		4,140.74	3,664.08		3,664.08	238.70%	88.49%	704.63	Internal
	g. Pengembangan IT	6,383.50	-	6,383.50	3,534.13		3,534.13	16,940.33	619.76	17,560.09	275.09%	496.87%	7,200.67	Internal
	h. Peralatan Kemanan Bendungan	-	-	-	-	-	-	11,074.87	-	11,074.87	0.00%	0.00%	2,244.86	Internal
	i. Project Management Consultant (PMC)	-	-	-	-	-	-	3,600.55	-	3,600.55	0.00%	0.00%	-	Internal
	TOTAL I	**163,837.53**	**1,937.50**	**165,775.03**	**95,914.18**	**-**	**95,914.18**	**186,875.51**	**2,553.36**	**189,428.87**	**114.27%**	**197.50%**	**83,505.83**	
II	**INVESTASI PENGEMBANGAN**													
	Pengembangan Jasa Non Air Baku													
	a. Pengembangan SPAM	86,139.00	-	86,139.00	61,506.22		61,506.22	28,260.48		28,260.48	32.81%	45.95%	16,060.48	Internal
	b. Pengembangan Pariwisata	500.00	-	500.00	248.00		248.00	3,982.50		3,982.50	796.50%	1605.85%	-	Internal
	c. Pengembangan Laboratorium	6,875.00	-	6,875.00	377.62		377.62	2,467.05		2,467.05	35.88%	653.31%	497.94	Internal
	d. Pengembangan PLTA/PLTM	-	126,000.00	126,000.00	-	-	-	-	99,816.40	99,816.40	79.22%	-		Internal dan Eksternal
	e. Aset Biologis	-	-	-			-	650.00		650.00	-	-	-	Internal
	TOTAL II	**93,514.00**	**126,000.00**	**219,514.00**	**62,131.85**	**-**	**62,131.85**	**35,360.03**	**99,816.40**	**135,176.43**	**61.58%**	**217.56%**	**16,558.42**	
III	**PENYERTAAN**													
	a. Penyertaan Modal Anak Perusahaan	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00		40,000.00	100.00%	-		Internal
	b. EBT Jawa Lokasi I	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-		-	-	-		Internal
	c. Penyediaan Air Baku Industri GRR Pertamina Tuban	5,000.00	-	5,000.00	-		-	-		-	-	-		Internal
	d. PLTS Apung Sutami	16,000.00	-	16,000.00	-		-	16,000.00		16,000.00	100.00%	-		Internal
	e. PLTS Apung Wonogiri	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	15,000.00		15,000.00	93.75%	-		Internal
	f. PLTS Apung Kedungombo	-	-	-	-	-	-	15,000.00		15,000.00	-	-		Internal
	g. Penyiapan Lahan Data center	-	-	-	-	-	-	1,000.00		1,000.00	-	-		Internal
	TOTAL III	**77,000.00**	**40,000.00**	**117,000.00**	**-**	**-**	**-**	**87,000.00**	**-**	**87,000.00**	**74.36%**	-	**-**	
	TOTAL I + II + III	**334,351.53**	**167,937.50**	**502,289.03**	**158,046.03**	**-**	**158,046.03**	**309,235.54**	**102,369.76**	**411,605.30**	**81.95%**	**260.43%**	**100,064.25**	

PROGRAM KONSERVASI TAHUN 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	RKAP 2024			TOTAL	KET.
		VOLUME		BIAYA (x10^3 Rp)	BIAYA (x10^3 Rp)	
1	2	3		4	5	6
I	**PENGHIJAUAN/VEGETASI**					
A	**Divisi Jasa ASA I**					
1	Internal	35,000	btg	17.00	595,000	
2	Eksternal					
	Penghijauan	65,000	btg	20.00	1,300,000	
	Pembibitan & Penanaman Kabupaten Tulungagung (SDJA I/3)	10,000	btg	5.00	50,000	
	SUB TOTAL PENGHIJAUAN DJA I	**110,000**	**btg**		**1,945,000**	
B	**Divisi Jasa ASA II**					
1	Internal	30,000	btg	15.00	450,000	
2	Eksternal	-	btg	-	-	
	SUB TOTAL PENGHIJAUAN DJA II	**30,000**	**btg**		**450,000**	
C	**Divisi Jasa ASA III**					
1	Internal	37,000	btg		376,000	
a	Penghijauan di Sub Divisi ASA III/1	20,000	btg	12.00	240,000	
b	Penghijauan di Sub Divisi ASA III/2	17,000	btg	8.00	136,000	
c	Penghijauan di Sub Divisi ASA III/3	-	btg	0.00	-	
2	Eksternal	7,500	btg		75,000	
a	Penghijauan di Sub Divisi ASA III/1	7,500	btg	10.00	75,000	
b	Penghijauan di Sub Divisi ASA III/2	-	btg	0.00	-	
c	Penghijauan di Sub Divisi ASA III/3	-	btg	0.00	-	
	SUB TOTAL PENGHIJAUAN DJA III	**44,500**	**btg**		**451,000**	
D	**Divisi Jasa ASA IV**					
1	Internal	213,500	btg	173	4,533,330	
a	Penghijauan di Sub Divisi ASA IV/1	11,000	btg	166	409,680	
	Penghijauan DAS Serang	2,000	btg	20.80	41,600	
	Penghijauan di Greenbelt Rawa Pening	1,000	btg	35.00	35,000	
	Penghijauan di Greenbelt & Hulu Bd Sidorejo	1,000	btg	21.42	21,420	
	Penghijauan di Bendung Klambu	2,000	btg	43.33	86,660	
	Penghijauan Mata Air Hulu Salatiga & Boyolali	5,000	btg	45.00	225,000	
b	Penghijauan di Sub Divisi ASA IV/2	202,500	btg	7.00	4,123,650	
	greenbelt Wadaslintang & Pejengkolan	1,500	btg	65.52	98,280	
	greenbelt Sempor	500	btg	25.00	12,500	
	Bendung Pejengkolan	500	btg	25.74	12,870	
	DAS Donan	100,000	btg	5.00	500,000	
	Hulu Bend. Mrica	100,000	btg	35.00	3,500,000	
2	Eksternal		btg	-	-	
	SUB TOTAL PENGHIJAUAN DJA IV	**213,500**	**btg**		**4,533,330**	
E	**Divisi Jasa ASA V**					
1	Internal	50,000	btg		2,480,000	
	Sub Div Jasa ASA V/1	48,000	btg	50.00	2,400,000	
	Sub Div Jasa ASA V/2	2,000	btg	40.00	80,000	
2	Eksternal		btg	-	-	
	SUB TOTAL PENGHIJAUAN DJA V	**50,000**	**btg**		**2,480,000**	
	TOTAL PENGHIJAUAN / VEGETASI	**448,000**	**btg**		**9,859,330**	
II	**PEMELIHARAAN TANAMAN**					
A	**Divisi Jasa ASA I**					
	SUB TOTAL PEMELIHARAAN ASA I	30,000	btg	10.00	300,000	
B	**Divisi Jasa ASA II**					
	SUB TOTAL PEMELIHARAAN ASA II	-	btg	-	-	
C	**Divisi Jasa ASA III**					
a	Pemeliharaan di Sub Divisi ASA III/1	20,000	btg	6.50	130,000	
b	Penghijauan di Sub Divisi ASA III/2	17,000	btg	5.00	85,000	
c	Penghijauan di Sub Divisi ASA III/3	5,000	btg	7.50	37,500	
	SUB TOTAL PEMELIHARAAN ASA III	42,000	btg	19.00	252,500	
D	**Divisi Jasa ASA IV**					
a	Sub Divisi ASA IV/1	5,000	btg	7.00	35,000	
b	Sub Divisi ASA IV/2	4,700	btg		59,016	
	Tanaman Greenbelt Sempor	1,000	btg	14.40	14,400	
	Tanaman Greenbelt Pejengkolan	500	btg	9.36	4,680	
	Tanaman Greenbelt Wadaslintang	3,200	btg	12.48	39,936	
	SUB TOTAL PEMELIHARAAN ASA IV	9,700	btg		94,016	
E	**Divisi Jasa ASA V**					
	Sub Divisi ASA V/1	72,000	btg	72.50	5,220,000	
	Sub Divisi ASA V/2	8,000	btg	78.00	156,000	
	Pemeliharaan Tanaman P1	2,000	btg	40.00	80,000	
	Pemeliharaan Tanaman P3	2,000	btg	15.00	30,000	
	Pemeliharaan Tanaman P6	2,000	btg	13.00	26,000	
	Pemeliharaan Tanaman P9	2,000	btg	10.00	20,000	
	SUB TOTAL PEMELIHARAAN ASA V	80,000	btg		5,376,000	
	TOTAL II PEMELIHARAAN	**161,700**			**6,022,516**	
	TOTAL DANA KONSERVASI				**15,881,846**	

PROGRAM KERJA TAHUN 2024
DIREKTUR UTAMA

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
1	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha dan investasi a. Pendapatan usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 777,798 miliar. b. Beban usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.698,000 miliar. c. Laba bersih tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 70,617 miliar. d. Kegiatan investasi dan penyertaan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 411,605 miliar.	a. Menjaga arus kas (CFO) perusahaan, EBITDA dan *net profit margin.*	a. Dukungan bagi peningkatan pendapatan untuk pengusahaan SDA dan pengusahaan non SDA melalui pengembangan usaha	1. Meningkatkan tingkat kolektibilitas sehingga piutang usaha menjadi kas yang mendukung keberlanjutan (sustainability) Perusahaan.					Cash Flow Operasional (CFO) positif	Direktorat Operasional ; Direktorat Keuangan, Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
				2. Penarikan BJPSDA dari pengguna air yang belum membayar BJPSDA di wilayah sungai yang dikelola termasuk PLTA aset Non PUPR diantaranya PLTA Timo, Garung, Mrica, Tulis, Ketenger					Pertumbuhan pendapatan SDA	
				3. Optimalisasi pengusahaan SDA melalui penjaringan pemanfaat baru melalui OP yang memadai					Pertumbuhan pendapatan SDA	
				4. Melakukan penagihan secara rutin pada seluruh pemanfaat air permukaan (AP) dan melakukan komunikasi/kunjungan Pelanggan					Cash Flow Operasional (CFO) positif	
		b. Melakukan belanja operasional (OPEX) dan kegiatan investasi (CAPEX) dengan lebih selektif dan seksama berdasarkan skala prioritas.		1. Mengoptimalkan pembelanjaan CAPEX sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku					Realisasi dan penyerapan OPEX dan CAPEX	Direktorat Operasional ; Direktorat Keuangan, Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
				2. Mengutamakan sinergi dalam pembelanjaan CAPEX dengan holding Danareksa sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku					Realisasi dan penyerapan OPEX dan CAPEX	
				3. Pengoptimalan penyelesaian PJPSDA dengan Prime User					PJPSDA terealisasi sesuai jadwal	
				4. Pelaksanaan pekerjaan Disbursement (piutang PJPSDA 2016-2020 dan sisa tagihan 2021-2022) PT. Inalum dapat tercapai sesuai target					Pekerjaan Disbursement (piutang PJPSDA 2016-2020) PT. Inalum dapat tercapai sesuai Target	
				5. Penguatan tata kelola Sumber Daya Air melalui pembuatan aplikasi AKNOP sebagai tools untuk update kondisi sarana dan prasarana SDA					Implementasi aplikasi AKNOP	
				6. Pengembangan PLTS					Pertumbuhan pendapatan non SDA dari PLTS	
		c. Melakukan penyesuaian tarif Industri di WS Brantas dan WS Bengawan Solo di Provinsi Jawa Timur dan koordinasi serta meminta dukungan Kementerian BUMN dan PT Danareksa (Persero) turut berperan dalam upaya penyesuaian tarif yang berlaku dan penetapan tarif untuk kelompok pengguna baru. (Sesuai strategi RJPP 2023-2027)		1. Memberikan dukungan terhadap penyusunan peraturan terkait perhitungan tarif BJPSDA					Peningkatan jumlah pelanggan berizin dan adanya tarif BJPSDA untuk pengguna baru	Direktorat Keuangan, Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
				2. Usulan penyesuaian tarif BJPSDA bagi Industri pada WS Brantas dan WS Bengawan Solo di Provinsi Jawa Timur					Target kepuasan pelanggan terpenuhi	
		d. Peningkatan dana investasi dari sumber dana internal Perusahaan melalui perolehan laba.		Menyampaikan rencana pelaksanaan kebijakan/ketentuan yang akan ditetapkan Holding Danareksa khususnya mengenai koordinasi rencana investasi Anggota Holding.					Investasi dengan kerjasama anggota holding terealisasi	Direktorat Operasional ; Direktorat Keuangan, Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
		e. Strengthening perusahaan dalam bidang Jasa Air melalui pengembangan wilayah kerja		1. Melakukan Koordinasi dan meminta dukungan Kementerian PUPR untuk rencana pengembangan wilayah kerja					Dukungan Pemerintah untuk Pengembangan wilayah terealisasi	Direktorat Operasional
				2. Penyusunan konsep tarif BJPSDA untuk WS. Bali penida, WS Pompengan Larona dan WS Batam-Bintan					Konsep tarif BJPSDA selesai	

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
2	Target Pencapaian Kinerja Manajemen berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) adalah Nilai Prestasi 100.	a. Pengawasan dan pengendalian tata kelola Perusahaan.		1. Penerapan sistem Manajemen Mutu, Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance (GCG) secara menyeluruh di semua Direktorat					Terlaksananya kegiatan dengan penerapan sistem Manajemen Mutu, Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance (GCG)	Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan,Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
				2. Penguatan pengendalian internal dengan kajian rencana penerapan ICOFR					Kajian rencana penerapan ICOFR selesai	
		b. Penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen risiko, serta peningkatan kinerja usaha pada seluruh wilayah kerja Perusahaan.		1. Alokasi sumberdaya, organisasi dan dana untuk mengembangkan kesatuan sistem manajemen mutu, sistem tata kelola perusahaan dan peningkatan kinerja usaha secara menyeluruh pada seluruh wilayah kerja Perusahaan					Kegiatan rehabilitasi lahan terlaksana sesuai program	Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan,Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
				2. Kegiatan Monitoring & Evaluasi atas kegiatan OP, Konservasi dan Investasi					Kegiatan Monitoring & Evaluasi berjalan sesuai pedoman	
3	Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia, termasuk pengelolaan infrastruktur tertentu yang diberikan penugasannnya secara khusus atas kebijakan dari PUPR.	a. Mempertahankan kinerja sistem keamanan bendungan dalam kondisi baik	Pengawasan dan pengendalian tata kelola Perusahaan melalui penerapan sistem Manajemen Mutu dan Good Corporate Governance	1. Melakukan kegiatan OP dan investasi instrumentasi monitoring keamanan bendungan, pemantauan dan evaluasi keamanan bendungan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan					Kegiatan OP dan investasi instrumentasi monitoring keamanan bendungan, pemantauan dan evaluasi keamanan bendungan berjalan sesuai target	SP, SPI, Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
				2. Perencanaan tindakan rehabilitasi Bendungan Sutami					Tindakan rehabilitasi Bendungan Sutami selesai direncanakan.	
				3. Penambahan peralatan monitoring keamanan bendungan					Investasi peralatan monitoring keamanan bendungan terelasasi.	
		b. Adaptasi perusahaan terhadap mekanisme BJPSDA sebagai PNBP sesuai PP. 21 Tahun 2024 Perihal Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.		1. Melakukan koordinasi aktif kepada stakeholder terkait serta memberikan masukan terhadap rencana penerbitan peraturan pendukungnya					Koordinasi kepada stakeholder berjalan sesuai rencana	SP, SPI, Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
				2. Melakukan penyesuaian prosedur dan alur proses operasional terhadap ketentuan yang ada					Penyesuaian prosedur dan alur proses operasional selesai dilakukan	
		c. Penguatan sinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan SDA melalui penyusunan pembagian peran dan tugas (Clear Cut) dengan BBWS/BWS terkait		1. Melaksanakan identifikasi kondisi sarana prasarana sungai (walkthrough) bersama instansi terkait untuk optimalisasi kegiatan O&P					Identifikasi kondisi sarana prasarana sungai (walkthrough) bersama instansi terkait selesai dilakukan	SP, SPI, Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
				2. Melaksanakan koordinasi intensif secara berkala sesuai kebutuhan untuk perkuatan decission support masing-masing instansi					Koordinasii terlaksana sesuai program.	
				3. Melakukan sharing data/informasi telemetri dalam upaya mendukung kesiapsiagaan siaga banjir dan musim kemarau					Koordinasii terlaksana sesuai program.	
		d. Konservasi SDA guna peningkatan keseimbangan hidrologi di wilayah kerja Perusahaan. (Sesuai strategi RJPP 2023-2027)		Melaksanakan kegiatan konservasi SDA di wilayah kerja Perusahaan berupa konservasi vegetatif maupun penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat untuk penguatan sumberdaya manusia yang berbasis lingkungan					Kegiatan terlaksana sesuai program	SP, SPI, Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
		e. Melakukan tata kelola air yang mengutamakan kelestarian lingkungan		1. Menginisiasi pengelolaan WWTP secara terintegrasi untuk pengembangan bidang sanitasi khususnya pengelolaan limbah					Program terlaksana sesuai jadwal.	SP, SPI, Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
				2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pengelolaan limbah					Kapasitas SDM terpenuhi.	
				3. Melaksanakan kegiatan patroli air dengan instansi terkait					Kegiatan patroli air terlaksana sesuai jadwal.	
4	Pembinaan atas pemanfaatan air yang berizin dan pemungutan BJPSDA di seluruh wilayah kerja Perusahaan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan perizinan pemakaian air yang berlaku.	a. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada pemanfaat utama, dalam rangka memahami kewajiban pembayaran BJPSDA atas pemanfaatan air permukaan yang telah diperoleh.		1. Meningkatkan peran tim pembinaan pelanggan melalui kunjungan / komunikasi dengan pelanggan					Kegiatan terlaksana sesuai jadwal.	Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
				2. Mendorong pemanfaat untuk memiliki SIPSDA melalui kegiatan sosialisasi dan/helpdesk bersinergi dengan BBWS/BWS setempat					Pemanfaat memiliki SIPSDA.	
		b. Melakukan koordinasi dengan meminta dukungan Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN dalam menyelesaikan masalah pembayaran kewajiban BJPSDA.		Melakukan komunikasi intensif ke Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN					Kegiatan terlaksana sesuai program	Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko
		c. Melakukan pemantauan volume pemanfaatan air sesuai dengan izin yang ditetapkan		Mengintegrasikan water meter yang ada di intake pemanfaat ke SWMS					Water meter terintegrasi ke SWMS.	Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan Pengelolaan Sumberdaya dan Manajemen Risiko

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
5	Peningkatan pendapatan dan profitabilitas bisnis Non SDA.	a. Pengusahaan atas optimasi sumber daya non sumber daya air sehingga ada pertumbuhan portofolio bisnis yang telah ada dan penambahan portofolio.		1. Melakukan sinergi penggunaan advisory Danareksa untuk penguatan lini bisnis					Kegiatan terlaksana sesuai program.	Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan dan Pengelolaan Sumberdaya
				2. Pengembangan bisnis perusahaan melalui inisiasi bisnis Data Center					Inisiasi bisnis data center selesai.	
				3 Mencari partner sinergi dengan pihak lain dalam kerangka business to business dalam usaha kemitraan serta dalam pengembangan usaha.					Menemukan partner sinergi pengembahngan usaha.	
				4. Pengembangan bisnis di bidang SPAM secara terseleksi melalui mekanisme yang sesuai peraturan perundangan & pendanaan.					Pengembangan bisnis terlaksana sesuai rencana.	
				5. Peningkatan pendapatan Non SDA melalui optimasi aset perusahaan berupa sewa lahan, alat berat, aset tak berwujud, dll					Pertumbuhan pendapatan non SDA.	
		b. Penguatan kapabilitas korporasi dalam penyediaan air minum melalui bisnis SPAM (Sesuai strategi RJPP 2023-2027)		1. Meningkatkan utilisasi pendanaan alternatif (melalui IWF) untuk pelaksanaan pengembangan SPAM Kota Malang Tahap II					Koordinasi terlaksana sesuai program.	Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan dan Pengelolaan Sumberdaya
				2. Optimasi operasional Kota Malang					Pertumbuhan pendapatan non SDA dari SPAM Bango Kota Malang	
		c. Peningkatkan pendapatan Non SDA melalui pengembangan bisnis. (Sesuai strategi RJPP 2023-2027)		1 Pengembangan PLTS di waduk yang dikelola Perusahaan melalui mekanisme penyediaan listrik yang berlaku di Republik Indonesia.					Kegiatan terlaksana sesuai program.	Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan dan Pengelolaan Sumberdaya
				2. Kemitraan dengan investor dan relasi teknologi dalam perluasan bisnis EBT di dalam wilayah kerja Perusahaan.					Kegiatan terlaksana sesuai program.	
				3. Meningkatkan kapabilitas korporasi dalam pengelolaan proyek.					Kapabilitas meningkat sesuai rencana.	
				4. Melakukan Kajian Right Issue terkait rencana akuisisi dan pengembangan bisnis anak Perusahaan JTE.						
		d. Pengelolaan dan pengembangan WWTP sebagai bisnis Non SDA serta untuk memenuhi kelas baku mutu air baku.		1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan bisnis bidang pengelolaan limbah					Kapasitas SDM meningkat sesuai rencana.	Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan dan Pengelolaan Sumberdaya
				2. Membuat business plan terkait pengembangan WWTP					Bussiness plan WWTP selesai.	
		e. Diperlukan roadmap pengembangan EBT PJT I (Sesuai strategi RJPP 2023-2027)		Menyusun roadmap pengembangan energi baru terbarukan (EBT) khusnya melalui optimalisasi aset di Wilayah Kerja PJT I					Roadmap pengembangan EBT selesai.	Direktorat Operasional, Direktorat Keuangan dan Pengelolaan Sumberdaya

PROGRAM KERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT OPERASIONAL

Bidang : Operasi dan Pemeliharaan (5 WS)

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
1	Pencapaian rencana pendapatan usaha, laba, biaya usaha serta investasi: a. Pendapatan usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 777,798 miliar atau 110,90% dari RKAP 2023, 126,54% dari realisasi audited 2022 dan 130,89% dari prognosa 2023. b. Beban usaha tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 698,000 miliar atau 111,56% dari RKAP 2023, 134,65% dari realisasi audited 2022 dan 128,32% dari prognosa 2023.	a. Peningkatan pendapatan untuk pengusahaan SDA, optimalisasi aset SDA dan non SDA melalui pengembangan usaha secara inovatif b. Menjaring pemanfaat baru di wilayah pengusahaan (include pemanfaat pengguna mata air)	a. Mengembangkan pengusahaan SDA, dan non SDA dan kerjasama untuk seluruh wilayah kerja Perusahaan b. Revitalisasi pengusahaan sumber daya air yang telah ada c. Peningkatan pendapatan pengusahaan SDA melalui kenaikan tarif dan peningkatan produksi/ layanan jasa air d. Peningkatan investasi melalui dana internal dan pihak ketiga e. Menciptakan iklim kondusif untuk pengembangan sistem bisnis berbasis lingkungan (eko-bisnis) dan edukasi para pemangku kepentingan (stakeholders) melalui sistem (stakeholders) melalui sistem konsesional maupun kerjasama	a. Peningkatan pengusahaan SDA antara lain melalui: a.1 Mengenakan Iuran BJPSDA kepada pengguna air yang telah berijin a.2 Penggunaan meter air untuk penetapan volume pemakaian air a.3 Penertiban pemakaian air b. Peningkatan pengusahaan non SDA secara inovatif, antara lain melalui: b.1 kerjasama bagi hasil untuk pemanfaatan lahan c. Peningkatan pengusahaan optimalisasi aset SDA antara lain melalui: c.1 kegiatan ekobisnis melalui usaha wisata lingkungan (eco tourism) c.2 Pelayanan air minum c.3 Penyediaan Listrik kepada PT. PLN					1. Penarikan Iuran BJPSDA terlaksana 2. Penggunaan meter air terlaksana 3. Penertiban terlaksana Target pendapatan dari pengusahaan non SDA terlaksana Target tercapai	Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V, DOB Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V, DOB
2	Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan sesuai penugasan Pemerintah Republik Indonesia.	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan SDA secara efektif dan efisien	Pelaksanaan pemeliharaan bangunan prasarana pengairan sesuai urutan prioritas yang ditetapkan dalam program Pelaksanaan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan SDA dengan penambahan ruang lingkup pengelolaan SDA pada infrastruktur yang belum dilakukan O&P di WS Serayu Bogowonto Pengelolaan alokasi biaya Pengelolaan SDA secara efektif & efisien	Melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan-baik berupa perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan *preventive maintenance, minor repair, emergency maintenance* , pembangunan sarana & prasarana, kegiatan sistem informasi & monitoring evaluasi serta pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan tepat sasaran Merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDA berdasarkan prioritas program berbasis risiko					Kegiatan terlaksana sesuai program Alokasi biaya pengelolaan SDA terserap	Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V, dan DPK Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V, DPK
3	Terjaminnya penyediaan air untuk para pemanfaat sesuai pola yang disepakati melalui tata alokasi air yang mengarah pada keseimbangan layanan untuk seluruh wilayah kerja Perusahaan	a. Meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan melalui peningkatan tata kelola air permukaan b. Dukungan bagi pelestarian lingkungan di seluruh wilayah kerja perusahaan	Penyediaan air baku untuk pemanfaat sesuai pola sebagai bentuk layanan dasar dan pemenuhan tugas pokok Perusahaan Pembuatan Pertimbangan Teknis sesuai peraturan yang berlaku	Tindakan operasional untuk menjamin penyediaan air baku untuk pemanfaat sesuai pola sebagai bentuk layanan dasar dan pemenuhan tugas pokok Perusahaan Kajian teknis untuk penerbitan Pertimbangan Teknis penggunaan lahan untuk bangunan di sempadan sungai secara tepat waktu					Operasional tata kelola air dan Pemeliharaan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku Pertimbangan Teknis terbit tepat waktu	Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V
4	Pemantauan kuantitas air secara tepat waktu untuk seluruh wilayah kerja Perusahaan	Melakukan pengelolaan peralatan monitoring kuantitas air secara optimal	Peningkatan pemeliharaan peralatan monitoring kuantitas air	Melaksanakan pemeliharaan peralatan monitoring kuantitas air serta pencatatan dan pelaporan hasil monitoring kuantitas air yang terintegrasi dalam sistem SWMS					Pemantauan terlaksana sesuai jadual	Manajer Utama Regional I-II, Manajer Utama Perencanaan, Manajemen Risiko, dan Teknologi, Divisi Jasa ASA I - V, DTI
5	Pengendalian banjir bencana hidrometeorologi dengan kesiapsiagaan banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau pada sungai induk	Meningkatkan upaya mitigasi dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan guna pengendalian dampak bencana.	a. Prioritas pemeliharaan rutin dan bekala pada badan dan tampungan air untuk pengendalian banjir b. Pelaksanaan distribusi debit banjir sesuai pedoman yang berlaku	a. Pemeliharaan rutin dan berkala terhadap prasarana pengairan yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem peringatan banjir secara dini pada sungai utama dan anak sungai b. Pemeliharaan tampungan air serta badan air dengan melakukan pengerukan sedimen waduk dan perbaikan check dam c. Mengendalikan debit banjir secara tepat dan taat waktu d. Melaksanakan penyuluhan lingkungan bersama instansi terkait e. Melakukan pengukuran debit dan menyusun kurva H-Q sesuai dengan prosedur yang berlaku f. Menyediakan bahan dan alat material banjir dan/atau kekeringan					Pemeliharaan rutin dan berkala terlaksana sesuai program Pelaksanaan sesuai program Pengendalian dan koordinasi banjir sesuai ketentuan Penyuluhan terlaksana Terbitnya kurva H-Q semua titik pantau AWLR Persediaan alat dan material tersedia	Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
6	Perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait	Mengupayakan kerjasama dengan pihak eksternal dengan mempertimbangkan manfaat maksimal bagi DAS Brantas , DAS Bengawan Solo, DAS Serayu Bogowonto, DAS Jratun Seluna dan DAS Toba Asahan	a. Pelaksanaan kerjasama, pelaporan dan evaluasi b. Kegiatan lain yang terkait dengan konservasi					Program kegiatan perlindungan DAS terlaksana sesuai target, meliputi : penghijauan, sipil teknis, penyuluhan, dan lain-lain	Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V
7	Pengelolaan sistem keamanan bendungan sesuai pedoman yang berlaku		Melakukan kegiatan OP dan investasi instrumentasi monitoring keamanan bendungan, pemantauan dan evaluasi keamanan bendungan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan	a. Melaksanakan dan melaporkan kegiatan pemantauan dan pengukuran sesuai program dan standar yang berlaku					Pemantauan dan pengukuran terlaksanakan dan terlaporkan	Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V
			Perencanaan tindakan rehabilitasi Bendungan Sutami	b. Mengusulkan peralatan kemanan bendungan dalam rencana Investasi					Investasi peralatan bendungan terealisasi	
			Penambahan peralatan monitoring keamanan bendungan	c. Meningkatkan kompetensi dan standardisasi petugas pelaksana sesuai dengan ketentuan					Pelatihan dan sertifikasi petugas terlaksana	Manajer Utama Regional I-II, Divisi Jasa ASA I - V

Bidang Bisnis Strategis

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
1	Tercapainya target pendapatan UB SPAM Tahun 2024	a. Mengoptimalkan pelayanan SPAM Pelanggan baik Sambungan Rumah maupun Sambungan Industri	a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem produksi dan distribusi SPAM ke pelanggan b. Pelaksanaan preventif maintenance disepanjang jaringan distribusi SPAM guna meminimalisir kebocoran air c. Cepat tanggap keluhan pelanggan SPAM	a. Melaksanakan produksi dan distribusi sesuai dengan program yang telah ditetapkan b. Melaksanakan preventif maintenance sesuai dengan program pemeliharaan rutin c. Melaksanakan tindak lanjut keluhan pelanggan sesuai dengan prosedur yang berlaku					a. Pencapaian pendapatan UB SPAM sesuai dengan target RKAP dan RKAPT Tahun 2024 b. Pengelolaan SPAM baik sistem produksi dan distribusi berjalan efektif dan efisien c. Kepuasan pelanggan dan tingkat keluhan pelanggan mengalami penurunan	DOB Sub Div Air Minum UB SPAM
		b. Penguatan legalitas / Perizinan SPAM	Pelaksanaan pengurusan legalitas / perizinan RUMIJA, IMB, UKL-UPL	a. Pengurusan RUMIJA b. Pengurusan perizinan lainnya (IMB, UKL-UPL)					a. Terbitnya Izin RUMIJA b. Perizinan lainnya (IMB, UKL-UPL) terbit	DOB Sub Div Air Minum UB SPAM
		c. Melaksanakan kegiatan pemasaran SPAM terpadu	Pelaksanaan kegiatan pemasaran baik melalui media elektronik, media cetak dan personal selling	a. Melaksanakan kunjungan pelanggan baru dan pelanggan eksisting sesuai jadwal b. Membuat selebaran / brosur SPAM c. Memonitoring efektifitas pelaksanaan program pemasaran yang diterapkan					a. Meningkatnya jumlah pelanggan SPAM baik Sambungan Industri/Niaga maupun Sambungan Rumah b. Suara pelanggan dan keluhan pelanggan SPAM termaintenance dengan baik c. Kepusan pelanggan meningkat d. Website terupdate dan leaflet/brosur pemasaran SPAM tersedia e. penerapan program fee marketing terlaksana sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan	DOB Sub Div Air Minum UB SPAM
		d. Pelaksanaan sinergi Pemerintah/BUMD	Pelaksanaan Sinergi BUMD/ Pemerintah/ Daerah terkait pengembangan / optimalisasi SPAM	a. Melaksanakan koordinasi dengan BUMD/Pemerintah/Daerah sebagai bentuk implementasi sinergi BUMD b. Penyiapan MoU/PKS dan data pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan / persyaratan kerjasama c. Malaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama sebagaimana dimaksud (misalnya rencana sinergi PJT I dengan PDAM Lamongan terkait penjualan air curah)					a. Rencana kerjasama sinergi BUMN/pemerintah/Daerah termonitoring dengan baik (kesiapan dan ketersediaan sumberdaya baik SDM maupun sarana dan prasarana) b. Penandatanganan MOU /PKS Sinergi BUMN di Bidang SPAM c.Pelaksanaan kerjasama di bidang SPAM terlaksana efektif dan efisien serta mampu meningkatkan pendapatan UB SPAM	DOB Sub Div Air Minum UB SPAM

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
2	Pengembangan bisnis di bidang SPAM secara terseleksi melalui mekanisme yang sesuai peraturan perundangan & pendanaan.	Pengembangan Air Bersih SPAM Lamongan dan Kota Malang	a. Kegiatan investasi dilaksanakan sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa serta prosedur yang berlaku	a. Penyiapan dokumen sebagai berikut: - Dokuemn investasi dan data pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses tender / pekerjaan Konstruksi JDU SPAM Brondong - Penyiapan rencana pengembangan SPAM Kota Malang Tahap II					- Dokumen investasi terbit dan memperoleh persetujuan dari tim investasi - Dokumen terbit serta kerjasama telah terjalin dengan Pemkot Malang	DPB Sub Div Air Minum DPK
		Optimasi SPAM WTP Lamongan	b. Pelaksanaan konstruksi jaringan suplesi SPAM Brondong	b. Pelaksanaan konstruksi dan supervisi jaringan suplesi SPAM Brondong mengacu pada dokumen DED dan kurva S yang telah disusun serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP/RKAPT					Pelaksanaan konstruksi dan JDU SPAM Sekaran terlaksana tepat waktu sesuai dengan kurva s dan spesifikasi teknis	DPB Sub Div Air Minum UB SPAM Pihak Vendor
				c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan pihak vendor selama proses konstruksi					terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang efektif terutama selama pelaksanaan konstruksi pekerjaan	DPB Sub Div Air Minum UB SPAM Pihak Vendor
		2. Pengembangan bisnis SPAM Wilayah Baru :	b Kegiatan investasi dilaksanakan sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa serta prosedur yang berlaku	d. Penyiapan dokumen investasi dan data pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses pengadaan investasi (Land Clearing SPAM Karang Binangun)					Dokumen investasi terbit dan memperoleh persetujuan dari tim investasi	DPB Sub Div Air Minum DPK
		a. Konstruksi dan Supervisi Pengembangan SPAM Karangbinangun	c. Pelaksanaan kegiatan penandatangan MOU 4 (empat) pilar untuk SPAM Karangbinangun	e. Penyiapan dokumen MOU 4 (empat) pilar untuk SPAM Karang Binangun					Dokumen MOU 4 (empat) pilar telah di tanda tangani	DPB Sub Div Air Minum UB SPAM Pihak Vendor
			d. Pelaksanaan konstruksi SPAM Karangbinangun	f. Land clearing lahan WTP Karangbinangun					Pelaksanaan land clearing WTP Karangbinangun terlaksana tepat waktu sesuai dengan kurva S dan spesifikasi teknis	DPB Sub Div Air Minum UB SPAM Pihak Vendor
		3. Pengelolaan SPAM secara online/elektronik	Pengembangan pengelolaan SPAM berbasis IT dengan program SPLASH One	a. Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi sistem dari Billing menjadi SPASH One					a. Web Aplikasi Billing Android dan SPASH One terselesaikan sesuai dengan KAK dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan	DPB Sub Div Air Minum UB SPAM
				b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dengan pihak vendor					b. Tenaga SPAM mampu mengaplikasikan SPLASH One	
				c, Melaksanakan pelatihan aplikasi SPLASH One dan penyediaan tenaga maintenance/pendamping dari Pihak vendor selama masa trial dan go life SPLASH One					c. Ketersediaan tenaga maintenance / pendamping selama selama masa trial dan go life SPLASH One	
3	Tercapainya target pendapatan UB AMDK Tahun 2024	Optimalisasi kapasitas produksi	Pelaksanaan produksi all varian AMDK ASA sesuai dengan kapasitas mesin produksi dan kebutuhan pasar	a. Melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi AMDK ASA sesuai program dan jalur dustribusi yang telah diprogramkan					a. Pelaksanaan kegiatan produksi AMDK sesuai dengan program / kebutuhan pasar	DOB Sub Div Air Minum UB AMDK
				b. Melaksanakan pemeliharaan mesin produksi dan aset produksi lainnya secara rutin					b. Mesin produksi mampu menghasilkan kapasitas produksi yang optimal	
				c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi vs program kegiatan produksi					c. Kegiatan monitoring dan evaluasi berjalan sesuai program	
				d. Penyusunan kebutuhan biaya operasional AMDK sesuai skala prioritas (pilihan varian asa pelanggan)					d. Penggunaan biaya OP AMDK sesuai dengan skala prioritas kebutuhan	
		Perluasan pangsa pasar	Melaksanakan perluasan pangsa pasar melalui kegiatan : a. Melaksanakan kegiatan pemasaran b. Sinergi BUMN/Pemerintah/Daerah/Swasta/Ponpes c. Penetapan harga bersaing d. Pemberian reward pelanggan e. Pemetaan potensi pelanggan AMDK	a. Melaksanakan kegiatan Pemasaran yang meliputi : media elektronik/media cetak/personal selling/fee marketing/berpartisipasi aktif dalam event-event internal / eksternal sesuai dengan program					a. Kegiatan pemasaran terlaksana sesuai program dan mampu meningkatkan jumlah pelanggan	DOB Sub Div Air Minum UB AMDK
				b. Menjaring pelanggan baru melalui Melaksanakan kerjasama dan penandatangan MOU dengan BUMN/Pemerintah/Daerah /Swasta sesuai dengan program baik melalui penjualan asa dengan sistem reguler, co branding dan makloon.					b. Terbitnya MOU / PKS dan terlaksananya kerjasama sinergi BUMN/Pemerintah/Daerah /Swasta di bidang AMDK	
				c. Menetapkan harga bersaing melalui pemberian diskon / harga promosi bagi pelanggan baru / eksisting sesuai jumlah order dan sistem pembayarannya					c. Harga produk yang ditetapkan bersaing dipasaran	
				d. Melanjutkan program reward pelanggan sesuai dengan program target penjualan yang ditetapkan					d. Terlaksananya program reward penjualan ke pelanggan sesuai dengan program target penjualan yang ditetapkan	
				e. Melaksanakan pendataan potensi pelanggan dan melaksanakan pemasaran sesuai pemetaan pelanggan					e. Terlaksananya kegiatan pemasaran sesuai dengan pemetaan potensi pelanggan	
		Penguatan legalitas dan standarisasi produk AMDK	Melaksanakan pengurusan perizinan dan standarisasi produk AMDK antara lain SNI dan BPPOM	a. Melaksanakan pengurusan perizinan SNI dan BPPOM sesuai dengan program					a. Perizinan SNI dan BPPOM terbit	DOB Sub Div Air Minum UB AMDK
				b. Meningkatkan koordinasi dengan pihak ekternal (Lembaga Perizinan)					b.Terjalinnya koordinasi dengan lembaga perizinan	

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN				TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6				7	8
		Pengelolaan Pelanggan dan Zero Complain Customer	Mendengarkan suara dan keluhan pelanggan serta menindaklanjuti keluhan pelanggan	a. Melaksanakan kunjungan pelanggan baru / eksisting, temu pelanggan dan survei kepuasan pelanggan b. Melakukan monitoring dan evaluasi standarisasi produk sebelum didistribusikan ke pasar c. Menindaklanjuti keluhan pelanggan (apabila ada) sesuai dengan prosedur (waktu penanganan pelanggan yang ditetapkan)					a. Kegiatan kunjungan pelanggan baru / eksisting, temu pelanggan dan survei kepuasan pelanggan terlaksana sesuai dengan program. b. Produk yang didistribusikan ke pasar sesuai dengan standarisasi produk c. Tindak lanjut keluhan pelanggan diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan Keluhan Pelanggan d. Meningkatnya jumlah pelanggan amdk asa baik pelanggan kerjasama maupun reguler dengan sistem reguler/cobranding dan makloon e. Berkurangnya jumlah komplain pelanggan	DOB Sub Div Air Minum UB AMDK
4	Pengembangan Bisnis AMDK	Inovasi varian produk AMDK ASA	a. Pengembangan inovasi varian AMDK ASA Botol tanpa label (emboss)	a. Menyusun jadwal produksi AMDK ASA tanpa label (emboss) b. Memproduksi produk sesuai kapasitas mesin dan program produksi c. Memasarkan varian asa baru dengan harga bersaing / diskon / promo d. Melaksanakan pemasaran asa media cetak dan media elektronik					a. Produksi AMDK ASA Botol tanpa label (emboss) diproduksi sesuai program b. Kegiatan pemasaran asa botol tanpa label (emboss) terlaksana baik melalui media cetak maupun media elektronik	DOB Sub Div Air Minum UB AMDK
		Perluasan pangsa pasar AMDK	b. Pelaksanaan kerjasama co branding / makloon di luar pangsa pasar eksisting	a. Menjalin kerjasama dengan BUMN, Pemerintah, Daerah, Swasta dengan sistem regular, co branding dan makloon b. Melaksanakan pemasaran dan distribusi AMDK ASA di luar pangsa pasar eksisting					a. Terbitnya kerjasama MOU/PKS dan realisasi pelaksanaan kerjasama dengan sistem regular, co branding dan makloon b.Kegiatan pemasaran dan distribusi asa di luar pangsa pasar eksisting terlaksana sesuai pemetaan potensi pasar	DOB Sub Div Air Minum UB AMDK
		Penguatan produk varian AMDK ASA yang Potensial	c. Mengoptimalkan produksi varian asa yang potensial diterima pasar	Menyusun program produksi AMDK ASA berdasarkan skala prioritas potensi pasar / diminati pelanggan					Melaksanakan produksi dan distribusi AMDK asa sesuai skala prioritas dan kebutuhan pasar yang mempertimbangkan tingkat pencapaian margin laba	DOB Sub Div Air Minum UB AMDK

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN				TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6				7	8
5	Tercapainya target pendapatan UB Laboratorium Lingkungan Tahun 2024	a. Pelaksanaan kegiatan pengambilan dan analisa sampel	a. Proses pengambilan dan analisa sampel dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat waktu	a. Membuat dan melaksanakan program pengambilan sampel sesuai dengan permintaan pelanggan b. Melaksanakan pengambilan dan analisa sampel sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja yang berlaku c. Melaksanakan prosesing registrasi pelanggan mulai penerimaan sampel s.d terbitnya hasil analisa menggunakan aplikasi Sistem Monitoring Analisa Laboratorium (SIMONA) d. Melaksanakan pemeriharaan dan kalibrasi alat sesuai prosedur yang berlaku					a. Kegiatan pengambilan sampel dan analisa sampel terlaksana sesuai dengan program b.Kegiatan analisa sampel terlaksana sesuai dengan prosedur dan standarisasi produk c. Penggunaan aplikasi SIMONA dalam proses registrasi pelanggan d. Pemeriharaan dan kalibrasi alat terlaksanan sesuai program dan prosedur yang berlaku	DOB Sub Div Lab. Lingkungan UB LL
		b. Pelaksanaan kegiatan pemasaran terpadu	b. Pelaksanaan kegiatan pemasaran melaui media elektronik, cetak dan personal selling dengan mengedepankan sinergi BUMN/Pemerintahan/Daerah/Swasta serta pemberian promo/diskon harga sesuai dengan program	a. Melaksanakan kunjungan pelanggan eksisting dan calon pelanggan b. Melaksanakan kerjasama melalui sinergi BUMN/Pememrintah/Daerah/ Swasta c. Memutakhirkan informasi dan ruang lingkup laboratorium lingkungan sebagai media periklanan melalui media sosial d. Menyiapkan brosur/leaflet guna mendukung proses kegiatan pemasaran serta berpartisipasi dalam event-event e. Melaksanakan kegiatan temu pelanggan tahunan guna mengupdate kompetensi Laboratorium Lingkungan PJT I, penyampaian informasi layanan dan menangkap keinginan pelanggan. f. Penyampaian promo/diskon harga pada saat kunjungan dan temu pelanggan serta pemutakhiran informasi melalui media sosial g. Pembuatan Website Laboratorium Lingkungan					a. Kegiatan kunjungan pelanggan eksisting dan calon pelanggan terlaksana sesuai dengan program b. Penandatanganan dan pelaksanaan kerjasama melalui sinergi BUMN/Pememrintah /Daerah/ Swasta c. Media sosial sebagai salah satu media perikalanan telah dimutakhirkan d. Kegiatan pemasaran lab terlaksana melalui keikutsertaan dalam evant / brosur/leaflet e. Kegiatan temu pelanggan terlaksana dan hasilnya tepat sasaran (inovasi produk, penyebaran kuesioner, menangkap keinginan pelanggan) sehingga mampu meningkatkan jumlah pelanggan dan parameter uji pelanggan f. Penyampaian promo / diskon terlaksana g. Pembuatan webiste terlaksana	DOB Sub Div Lab. Lingkungan UB LL
		c. Penetapan harga dan sistem pembayaran yang bersaing	c. Penetapan harga dan sistem pembayaran baik dengan sistem transfer/ cash/ e money / gesek	a. Melaksanakan review tarif analisa laboratorium lingkungan (kondisional) b. Melaksanakan survei harga dan sistem pembayaran ke pesaing / pembanding laboratorium lingkungan c. Pemberian diskon harga / harga promo bagi pelanggan yang loyal / pelanggan baru / yang melakukan kontrak setahun dengan minimal nilai kontrak sesuai program d. Pemberian diskon harga / harga promo bagi pelanggan yang loyal / pelanggan baru / yang melakukan pembayaran secara e money (Qris, dsb) ataupun gesek					1. Hasil review analisa tarif dan usulan tarif baru terbit (kondisional) 2. Pelaksanaan survei harga dan sistem pembayaran pesaing/pembanding terlaksana 3. Pemberian diskon harga/harga promo bagi pelanggan loyal / baru / kontrak terlaksana sesuai ketentuan 4. Pemberian diskon harga/harga promo bagi pelanggan loyal / baru yang melakukan pembayaran secara non tunai (gesek dan e money) terlaksana sesuai ketentuan	DOB Sub Div Lab. Lingkungan UB LL
		d. Pengelolaan Pelanggan dan Zero Complain Customer	d. Menindaklanjuti permintaan pelanggan dan mendengarkan suara serta keluhan pelanggan serta menindaklanjuti keluhan pelanggan	a. Mengagendakan kegiatan temu pelanggan b. Segera menindaklanjuti keluhan pelanggan sesuai dengan prosedur yang berlaku c. Menyebarkan kuesioner dan wawancara langsung kepada pelanggan guna evaluasi kepuasan dan menangkap keinginan / harapan pelanggan d. Pemberian reward / diskon harga kepada pelanggan yang loyal e. Mengagendakan kunjungan pelanggan dan penerapan layanan customer service maksimal 2 x 24 jam terkait follow up permintaan jasa layanan laboratorium					a. Kegiatan temu pelanggan terrlaksana sesuai program b. Keluhan pelanggan ditindaklanjuti dan terselesaikan sesuai prosedur yang berlaku c. Hasil kuesioner kepuasan pelanggan / risalah wawancara pelanggan d. Terlaksananya pemberian reward / diskon harga sesuai ketentuan e. Terbitnya penawaran pelanggan tepat waktu dan meningkatkan jumlah pelanggan melalui follow up calon pelanggan baru	DOB Sub Div Lab. Lingkungan UB LL

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN				TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6				7	8
		e. Penguatan legalitas jasa Laboratorium Lingkungan	e. Pelaksanaan kegiatan Akreditasi, Assesment dan Surveillance Visit ISO 17025 : 2017, Registrasi KLHK PermenLH 23 Tahun 2020 dan SKP PJK3 Kemenaker dilaksanakan tepat waktu	a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan joint Akreditasi / Assessment / Surveillance Visit ISO 17025 : 2017 dan Registrasi KLHK PermenLH 23 Tahun 2020 b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Assessment SKP PJK3 Kemenaker c. Melaksanakan Uji Profesiensi / Uji Banding, Audit Internal ISO 17025 : 2017, dan Rapat Tinjauan Manajemen Laboratorium					a. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan joint Akreditasi / Assessment / Surveillance Visit ISO 17025 : 2017 dan Registrasi KLHK PermenLH 23 Tahun 2020 b. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Assessment SKP PJK3 Kemenaker c. Terlaksananya Uji Profesiensi / Uji Banding, Audit Internal ISO 17025 : 2017, dan Rapat Tinjauan Manajemen Laboratorium	DOB Sub Div Lab. Lingkungan UB LL
6	Pengembangan Bisnis Laboratorium Lingkungan	a. Pengembangan Inovasi Produk	Pengembangan ruang lingkup dan parameter uji laboratorium lingkungan	a. Melaksanakan penambahan ruang lingkup dan parameter uji sesuai dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku dan berdasarkan kegiatan evaluasi kepuasan pelanggan b. Mereview dan menambahkan prosedur / instruksi kerja analisa sesuai dengan penambahan ruang lingkup / parameter baru c. Pelaksanaan Uji Profesiensi / Uji Banding d. Pelaksanaan kegiatan Akreditasi, Assesment dan Surveillance Visit ISO 17025 : 2017 serta Registrasi KLHK PermenLH 23 Tahun 2020 e. Mengupdate media pemasaran yang digunakan laboratorium lingkungan dan melaksanakan telemarketing/ kunjungan pelanggan / blasting informasi media whatsapp guna memperkenalkan ruang lingkup dan parameter baru					a. Penambahan ruang lingkup dan parameter uji baru release b. Prosedur/ Instruksi telah mengakomodir penambahan ruang lingkup / parameter baru c. Terlaksananya Uji Profesiensi / Uji Banding d. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan joint Akreditasi / Assessment / Surveillance Visit ISO 17025 : 2017 dan Registrasi KLHK PermenLH 23 Tahun 2020 e. Terlaksananya kegiatan updating media pemasaran guna memperkenalkan ruang lingkup dan parameter baru	DOB Sub Div Lab. Lingkungan UB LL
		b. Ekspansi pasar laboratorium lingkungan	Pembukaan laboratorium lingkungan baru di parapat	a. Melaksanakan pemetaan potensi pelanggan dan kondisi pesaing di wilayah baru b. Mempersiapkan sumber daya yang meliputi sdm, sarana prasarana serta peralatan/perlengkapan laboratorium lingkungan baik melalui sistem pengadaan barang dan jasa / menggunakan sistem, swakelola c. Menyusun / Mereview dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 : 2017 dan Registrasi KLHK PermenLH 23 Tahun 2020 d. Melaksanaan kegiatan pemasaran melaui media elektronik, cetak dan personal selling dengan mengedepankan sinergi BUMN/Pemerintahan/Daerah/Swasta serta pemberian promo/diskon harga untuk calon pelanggan baru e. Pemberian harga promo / diskon harga guna menjaring pelanggan baru					a. Hasil pemetaan potensi pelanggan di wilayah baru terbit b. Ketersediaan sumber daya yang meliputi sdm, sarana prasarana,peralatan /perlengkapan laboratorium lingkungan c. Penyusunan / review dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 : 2017 dan Registrasi KLHK terlaksana d. Kegiatan pemasaran terlaksana e. Pemberian harga promo / diskon terlaksana	DOB Sub Div Lab. Lingkungan UB LL
		c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan secara online	Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring Analisa (SIMONA) Laboratorium berbasis web Tahap II (sistem user entry khusus analis dan customer monitoring khusus pelanggan) dan pemeliharaan SIMONA Tahap I	a. Mempersiapkan dokumen perencanaan pemeliharaan dan vendor yang ditunjuk b. Melaksanakan masa trial dan go live SIMONA Tahap II serta penyediaan tenaga pendamping dari pihak vendor c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dengan pihak vendor d. Melaksanakan pemeliharaan SIMONA Tahap I dan penyediaan tenaga maintenance/pendamping dari Pihak vendor selama masa pemeliharaan					a. Dokumen perencanaan terbit dan SPK/SPMK telahh ditandatangani kedua belah pihak b. Masa trial dan gol live SIMONA Tahap II terlaksana c. Evaluasi penilaian vendor terlaksana d. Pemeliharaan SIMONA Tahap I terlaksana dan penyediaan tenaga maintenance / pendamping selama selama masa pemeliharaan tersedia	DOB Sub Div Lab. Lingkungan UB LL

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN				TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6				7	8
7	Adanya pertumbuhan pendapatan di Unit Bisnis Pariwisata	Peningkatan pendapatan Unit Bisnis Pariwisata pasca pandemi	a. Kerjasama strategis pengembangan dan pengelolaan usaha pariwisata	a. Kerjasama dengan pihak eksternal yang ahli untuk pengembangan pariwisata b. Kerjasama pengelolaan tenaga pariwisata c. Kerjasama pengembangan teknologi pariwisata (pembayaran digital, sistem pengelolaan digital, sistem keuangan digital dll)					Target Pendapatan tercapai	UB Pariwisata dan Semua Divisi terkait
			b. Meningkatkan pemasaran pariwisata	a. Melaksanakan digital marketing melalui media sosial dengan c. Menjalankan program marketing setiap tahun (sales call, kunjungan pelanggan, promosi, paket wisata) d. Kerjasama paket wisata dengan UMKM dan Desa setempat						
			c. Operasional UB Pariwisata dengan menerapkan standar usaha pariwisata dan berprinsip pada Sapta Pesona	a. Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang operasional UB Pariwisata b. Service excellence dalam pelayanan terhadap pelanggan c. Memperbarui dan memperbaiki fasilitas wisata sehingga layak dan memadai serta sesuai kebutuhan pasar/pelanggan d. Memenuhi standar usaha pariwisata sesuai perizinan OSS						
8	Sustainability Asset di Unit Bisnis Pariwisata	Pemeliharaan dan Perbaikan, serta pengembangan sarana	a. Pemeliharaan rutin	a. Menyusun jadwal pemeliharaan rutin b. Menyusun anggaran atas kegiatan pemeliharaan rutin c. Melakukan pemeliharaan rutin sesuai jadwal yang ada					Aset terpelihara dengan baik	Sub Divisi PATA, Aset dan Jasa Lain
			b. Perbaikan aset melalui kegiatan minor repair (O&P)	a. Melakukan perencanaan perbaikan atas aset yang rusak b. Menyiapkan anggaran untuk perbaikan aset c. Melakukan perbaikan aset sesuai perencanaan yang ada						
			c. Pengembangan sarana dan prasarana	a. Menyusun perencanaan pengembangan sarana dan prasarana b. Menyusun usulan anggaran pengembangan berlaku						
9	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, profesional guna mendukung peningkatan kinerja	Peningkatan kompetensi tenaga di Unit Bisnis	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga Unit Bisnis	a. Menyusun usulan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga Unit Bisnis b. Penyiapan anggaran untuk menunjang pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga					Kompetensi pegawai meningkat	Sub Divisi PATA, Aset dan Jasa Lain, DSDM
				c. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertfikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga Unit Bisnis						
10	Laporan Operasional dan Keuangan Unit Bisnis Tersusun Tepat Waktu	Percepatan penyusunan Laporan Operasional dan Keuangan di tiap Unit Bisnis	Penyusunan laporan dan pengumpulan data dari tiap Unit Bisnis sesuai jadwal yang telah ditetapkan	a. Menyusun jadwal penyusunan laporan operasional dan keuangan b. Pengumpulan data dan dokumen pendukung dari tiap Unit Bisnis sebelum tenggat waktu c. Pelaksanaan penyusunan berdasarkan jadwal yang telah disusun					Laporan Operasional dan Keuangan tersusun tepat waktu	Sub Divisi PATA, Aset dan Jasa Lain dan DAK
11	Kinerja Keuangan Unit Bisnis positif	Mengupayakan kinerja keuangan unit bisnis yang positif	Mengupayakan pencapaian pendapatan dan pengendalian biaya pada tiap Unit Bisnis	a. Mengendalikan biaya dan memantau penggunaan biaya sesuai anggaran yang tersedia b. Menjalankan program untuk meningkatkan pendapatan					Kinerja Keuangan Unit Bisnis positif	Sub Divisi PATA, Aset dan Jasa Lain, DAK
12	Adanya pertumbuhan pendapatan di Unit Bisnis Jasa Konsultansi dan Diklat	Peningkatan pendapatan Unit Bisnis Jasa Konsultansi & Diklat pasca pandemi	a. Pengembangan Jasa Konsultansi dan Diklat	Laboratorium Lingkungan, tetapi juga Smart Water Management dan Pengelolaan SDA b. Penambahan ruang lingkup jasa diklat c. Proses menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK)					Target Pendapatan tercapai	Sub Divisi PATA, Aset dan Jasa Lain
			b. Pelaksanaan Jasa Konsultansi dan Diklat dengan memberdayakan SDM dari internal perusahaan	a. Mengirimkan penawaran diklat pada instansi-instansi yang membutuhkan b. Aktif melakukan pemasaran baik offline maupun online c. Service excellence dalam pelayanan terhadap pelanggan d. Memberdayakan SDM dari internal perusahaan dalam pelaksanaan jasa konsultansi dan diklat e. Pelaksanaan jasa konsultansi dan diklat sesuai program						

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN				TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6				7	8
13	Laporan Operasional dan Keuangan Jasa Konsultansi dan Diklat Tersusun Tepat Waktu	Percepatan penyusunan Laporan Operasional dan Keuangan di Unit Bisnis Jasa Konsultansi dan Diklat	Penyusunan laporan dan pengumpulan data sesuai jadwal yang telah ditetapkan	a. Menyusun jadwal penyusunan laporan operasional dan keuangan b. Pengumpulan data dan dokumen pendukung sebelum tenggat waktu b. Pelaksanaan penyusunan berdasarkan jadwal yang telah disusun					Laporan Operasional dan Keuangan tersusun tepat waktu	Sub Divisi PATA, Aset dan Jasa Lain dan DAK
14	Kinerja Keuangan Unit Bisnis positif	Mengupayakan kinerja keuangan unit bisnis yang positif	Mengupayakan pencapaian pendapatan dan pengendalian biaya pada Unit Bisnis Jasa Konsultansi dan Diklat	a. Mengendalikan biaya dan memantau penggunaan biaya sesuai anggaran yang tersedia b. Menjalankan program untuk meningkatkan pendapatan					Kinerja Keuangan Unit Bisnis positif	Sub Divisi PATA, Aset dan Jasa Lain

PROGRAM KERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT KEUANGAN, PENGELOLAAN SUMBERDAYA DAN MANAJEMEN RISIKO

Bidang: Perencanaan, Manajemen Risiko dan Teknologi

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
1	Operasional Perusahaan berjalan sesuai tata kelola yang telah ditentukan	Sinkronisasi dan koordinasi dalam proses perencanaan dan pemrograman secara proaktif	Pengerahan sumberdaya (tenaga dan alat) untuk proses perencanaan dan pemrograman sesuai mekanisme dan prosedur Perusahaan	a. Terbitnya usulan RKAP 2024 kepada Menteri BUMN & Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2024 b. Pengendalian biaya, pemantauan pendapatan dan kegiatan investasi c. Terbitnya dokumen pelaksanaan teknis pekerjaan operasi dan pemeliharaan sesuai jadual dalam rencana kerja Perusahaan d. Pengendalian pelaksanaan teknis pekerjaan operasi & pemeliharaan sesuai jadual dalam rencana kerja Perusahaan e. Perencanaan teknis dari kegiatan pengembangan jasa air secara konvensional maupun non-konvensional dan jasa non-air baku berbasis aset perusahaan dan kerjasama f. Laporan Tahunan Pengelolaan SDA g. Laporan Evaluasi Perencanaan Teknis					a. Usulan RKAP 2024 terbit tepat waktu b. 12 Laporan bulanan terbit tepat waktu c. Evaluasi berjalan secara sistematis d. Adanya pemantauan biaya dan pendapatan e. Dokumen terbit tepat waktu f. Adanya pengendalian pelaksanaan teknis pekerjaan g. Perencanaan teknis sesuai pedoman pelaksanaan RKAP	Sub Div Perencanaan, DJA, DAK
2	Penguatan (*strengthening*) pengelolaan sumber daya air untuk seluruh wilayah kerja Perusahaan	a. Penyatuan sistem perencanaan dan pemrograman untuk integrasi tata kelola Perusahaan pada seluruh wilayah kerja Perusahaan b. Keterpaduan program dan pelaksanaan dalam kegiatan pengusahaan SDA dan sebagian pengelolaan SDA dengan stakeholders	Komitmen manajerial untuk penyatuan perencanaan dan pengendalian kegiatan Perusahaan pada seluruh wilayah kerja Perusahaan	a. Penyatuan (integrasi) aspek perencanaan teknis (termasuk pengendalian) dan program untuk seluruh wilayah kerja Perusahaan b. Sinkronisasi clear cut kegiatan O&P dengan BBWS di seluruh wilayah kerja Perusahaan c. Penerbitan Pertimbangan Teknis bangunan melintang sungai					Integrasi perencanaan teknis dan program telah tertuang dalam rencana kerja Peursahaan	DPK, DJA
3	Penyusunan Kurva H-V	Melakukan pengumpulan data pendukung dan melakukan perhitungan H-V	Menyusun kurva H-V sesuai dengan prosedur yang berlaku dan terbit tepat waktu	a. Melakukan pengukuran echosounding b. Penyusunan Kurva H-V					Terbitnya kurva H-V semua bendungan	Sub Div. Perencanaan
4	Tercapainya tarif luran BJPSDA yang memadai, transparan, akuntabel dan dapat diterima semua pengguna	Menyusun dan mengusulkan penyesuaian tarif luran BJPSDA	Peningkatan tarif luran BJPSDA (Industri Prop. Jawa Tengah)	a. Mengusulkan tarif luran BJPSDA b. Pembahasan tarif bersama TET c. Konsultasi Publik tarif luran BJPSDA					a. Usulan ke Menteri PUPR terkirim b. Kesepakatan tarif luran BJPSDA c. SK tarif luran BJPSDA terbit	Sub Div. Penelitian
5	Kajian (penelitian) terhadap sumber daya air termasuk pengelolaan infrastruktur serta menelaah metode manajemen dan teknologi yang lebih baik	Optimalisasi potensi sumber daya air di WS Brantas, WS Bengawan Solo, WS Serayu Bogowonto, WS Jratunseluna dan WS Toba Asahan	Melaksanakan kajian/ penelitian mengenai pengembangan manajemen dan teknologi SDA, termasuk pengelolaan infrastruktur SDA	a. Melakukan kajian (penelitian) baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan mitra penelitian. b. Melakukan evaluasi atas hasil kerjasama kajian (penelitian) c. Melaporkan hasil evaluasi kerjasama kajian (penelitian)					a. Kajian/penelitian di bidang pengelolaan SDA terlaksana b. Evaluasi hasil kajian (penelitian) selesai c. Laporan hasil evaluasi kajian (penelitian) selesai	Sub Div. Penelitian
6	Pengelolaan Smart Water Management (SWM) System berkelanjutan	a. Operasi dan pemeliharan peralatan telemetri (kuantitas dan kualitas) dan CCTV	a. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan peralatan sesuai SOP untuk keberlanjutan fungsi	a. Pemeliharaan peralatan setiap triwulan b. Perbaikan peralatan yang mengalami kerusakan					Peralatan berfungsi dengan baik	Sub Div Pengelolaan Informasi, DJA
		b. Kalibrasi dan perbaikan peralatan telemetri	a. Pelaksanaan Kalibrasi dilaksanakan secara internal dan eksternal untuk memastikan validitas data b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perbaikan	a. Melaksanakan kalibrasi peralatan telemetri secara internal dan eksternal b. Mengadakan perbaikan dan pengadaan suku cadang peralatan					a. Data yang dihasilkan tervalidasi b. Peralatan kondisi dalam keadaan baik	Sub Div Pengelolaan Informasi, DJA
		c. Upgrading SWM System sesuai kebutuhan dan kondisi terkini	a. SWM System berfungsi secara berkelanjutan	a. Pengadaan upgrade peralatan telemetri b. Implementasi upgrading system c. Peningkatan kompetensi dan penambahan sumber daya internal					a. Peralatan telemetri tersedia b. Pelatihan dan penambahan tenaga	Sub Div Pengelolaan Informasi, DJA
		d. Kalibrasi Data SWM System	a. Prinsip data Confidentiality, integrity dan availability	a. Monitoring dan kalibrasi data dalam System sesuai SOP b. Updating data supporting (HQ, HV, Forecasting)					Data valid	Sub Div Pengelolaan Informasi, DMRK, DJA
		e. Pengamanan Teknologi dan Sistem Informasi	b. Teknologi dan sistem informasi perusahaan secure	a. Pelaksanaan asesmen keamanan sistem informasi sesuai SOP b. Penetration dan vulnerability test c. Implementasi DRC System pada ERP					a. Pemeriksaan triwulanan terlaksana b. Test terlaksana c. DRC terimplementasi	Sub Div. Pengelolaan Informasi

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
7	Peningkatan Tata Kelola dan Pengelolaan Teknologi Informasi Perusahaan	a. Reviu master plan TI sesuai Enterprise Architecture terbaru b. Penilaian tingkat kematangan TI Perusahaan (*Maturity Level* TI) menggunakan framework COBIT 2019 c. Pemenuhan target nilai INDI 4.0 d. Peningkatan Manajemen Keamanan Informasi	a. Reviu Master Plan IT mempertimbangkan Enterprise *Architecture* dan arahan strategis Danareksa a. Nilai Tingkat *Maturity Level* TI dengan COBIT 2019 minimal 3 a. Perbaikan dan pemenuhan gap (kesenjangan) berdasarkan roadmap guna skor 3,5 di 2024 a. Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	a. Penyusunan Reviu Master Plan IT dan roadmap pemenuhan TI a. Identifikasi gap Maturity Level TI b. Penyusunan Roadmap peningkatan Maturity Level TI a. Implementasi pemenuhan gap berdasar roadmap b. Self assesmen INDI 4.0 a. Pelatihan Awareness Sistem Manajemen Keamanan Informasi ke seluruh karyawan b. Identifikasi gap mengacu ISO 27001 c. Penyusunan Roadmap pemenuhan gap					Reviu terlaksana/Hasil reviu terbit a. Gap teridentifikasi b. Roadmap peningkatan tersusun a. Pemenuhan gap terlaksana b. Self assesment terlaksana a. Pelatihan terlaksana b. Gap teridentifikasi c. Roadmap tersusun	Sub Div. Pengembangan Teknologi & Informasi Sub Div. Pengembangan Teknologi & Informasi Sub Div. Pengembangan Teknologi & Informasi Sub Div. Pengembangan Teknologi & Informasi
8	Peningkatan Kinerja Keamanan Bendungan yang dikelola	a. Sertifikasi ijin operasi infrastruktur dan peningkatan SDM di bidang keamanan infrastruktur b. Peningkatan kualitas dan kuantitas monitoring kondisi keamanan infrastruktur c. Pengembangan sistem monitoring atas kondisi instrumen pemantauan keamanan bendungan c. Pemeriksaan Berkala Kondisi Bendungan setiap tahun oleh Personil Internal Perusahaan	a. Penyiapan SDM yang berkompeten di bidang keamanan infrastruktur melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian b. Menjaga kondisi infrastruktur sesuai perencanaan dengan melakukan optimalisasi kegiatan pemeliharaan dan pemantauan c. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan OP dan Investasi terkait perbaikan sistem peralatan c. Pembagian Personil Pelaksana Pemeriksaan Berkala internal Perusahaan	a. Sertifikasi infrastruktur bendungan yang dikelola sebagai upaya peningkatan status pengelolaan SDA dan Pembaruan Manual OP Infrastruktur secara bertahap b. Usulan pelatihan peningkatan SDM di bidang keamanan infrastruktur secara berkala c. Melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran kondisi infrastruktur secara berkala sesuai SOP yang telah ditetapkan. d. Melakukan evaluasi atas hasil kegiatan pemeriksaan berkala terhadap bendungan e. Menyusun laporan hasil evaluasi keamanan infrastruktur kepada pihak yang berwenang f. Melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan OP dan Investasi terkait kegiatan preventif/ korektif secara bertahap atas instrumen keamanan bendungan sesuai kewenangan					Infrastruktur SDA telah tersertifikasi Kemampuan SDM di bidang keamanan infrastruktur meningkat Pemantauan dan pengukuran kondisi infrastruktur secara berkala dilaksanakan Evaluasi atas hasil kegiatan pemantauan dan pengukuran secara berkala dilaksanakan Hasil evaluasi keamanan infrastruktur telah dilaporkan kepada pihak yang berwenang Program dilaksanakan sesuai jadwal/ ketersediaan anggaran	Sub Divisi Pengendalian Kinerja & Infrastruktur SDA
9	Terlaksananya kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas progres kegiatan Pengusahaan SDA, kegiatan OP dan Investasi	a. Pengumpulan data Progres Pencapaian Produksi dan Pendapatan serta data Progres pekerjaan OP Berkala, Konservasi dan Investasi b. Penyampaian Evaluasi Pencapaian Produksi dan Pendapatan SDA dan Non SDA, Progres Pekerjaan OP Berkala, Konservasi dan Investasi kepada Manajemen dan Unit terkait.	a. Koordinasi dengan unit terkait untuk pengiriman data progres secara tepat waktu b. Mengelola data progres pekerjaan yang masuk di google drive atau aplikasi lainnya	a. Penyusunan laporan bulanan terkait progres pencapaian Produksi dan Pendapatan, kegiatan OP, Konservasi dan investasi b. Penyusunan Estimasi Kinerja Aspek Operasional Perusahaan					Laporan bulanan terbit Laporan Monitoring Progres Kegiatan OP, Konservasi dan Investasi untuk perkiraan pencapaian Kinerja Operasional terbit	Sub Divisi Pengendalian Kinerja & Infrastruktur SDA
10	Tertib administrasi pemantauan status Perijinan Pengusahaan Sumber Daya Air para Pemanfaat di Wilayah Kerja PJT I	Pengumpulan dan *updating* data status perijinan yang dimiliki oleh para pemanfaat air berdasarkan laporan Unit Terkait	a. Menyusun kategori status perijinan pengusahaan Sumber Daya Air. b. Menyampaikan informasi secara berkala kepada Balai Besar Wilayah sungai terkait di wilayah kerja terkait.	Penyusunan laporan Triwulanan kepada Pihak Eksternal					Laporan Status Perijianan terbit secara berkala Triwulanan	Sub Divisi Pengendalian Kinerja & Infrastruktur SDA
11	Terlaksananya dukungan kegiatan strategis perusahaan pada pelaksanaan studi/perencanaan terkait pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air	Penyampaian usulan kegiatan yang relevan dengan Tupoksi Unit dan Kebutuhan Perusahaan atas kegiatan studi/perencanaan	Mengalokasikan sebagian sumber daya unit untuk melaksanakan kegiatan studi/perencanaan terkait pengelolaan infrastruktur SDA	Menyusun dokumen perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengadaan, pengawasan dan pendampingan sesuai kebutuhan.					Kegiatan dilaksanakan sesuai Kerangka Acuan Kerja yang ditetapkan	Sub Divisi Pengendalian Kinerja & Infrastruktur SDA
12	Pengolahan basis data kuantitas dan kualitas air dalam rangka pemberian informasi/ pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku	Melakukan verifikasi dan pemantauan basis dan kuantitas dan kualitas data secara rutin	Pengolahan basis data kuantitas dan kualitas air dalam rangka pemberian informasi/ pelaporan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku	a. Kalibrasi Data Hidrologi dengan bantuan software Aquarius b. Kalibrasi Data Kualitas Air dengan verifikasi /Koordinasi dengan Laboratorium					Kalibrasi data Terlaksana	Sub Divisi Pengendalian Kinerja & Infrastruktur SDA
13	Dukungan Pertimbangan Teknis atas setiap proses Perizinan Pemanfaatan SDA di Wilayah Kerja PJT 1	Pertimbangan Teknis sebagai salah satu prasayarat penerbitan Perizinan SDA	Pelaksanaan regulasi atas penyiapan Pertimbangan Teknis sebagai komponen pertimbangan dalam penerbitan perizinan serta peyampaian kepada regulator perizinan	a. Expose dan tinjauan lapangan atas setiap permohonan perizinan b. Penyiapan Dokumen Pertimbangan Teknis c. Monitoring status perizinan pemanfaat di wilayah kerja PJT 1					a. Proses dapat dilaksanakan sesuai jadwal b. Pertek terbit tepat waktu c. Laporan Monitoring terbit tepat waktu	Sub Divisi Pengendalian Kinerja & Infrastruktur SDA dan DJA

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
14	Penerbitan Rencana Tahunan Operasi Waduk (RTOW) dan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) sebagai acuan operasi waduk dan alokasi	Penyiapan RTOW dan RAAT dengan stakeholder terkait	RTOW dan RAAT dapat ditetapkan tepat waktu	a. Evaluasi realisasi pelaksanaan RTOW dan RAAT sebelumnya b. Analisis ketersediaan musim mendatang c. Penyusunan dan Pembahasan RTOW dan RAAT					a. Hasil Evaluasi tepat waktu b. Hasil Analisis dapat digunakan sebagai support penyusunan RTOW dan RAAT c. Dokumen RTOW dan RAAT menjadi acuan operasional	Sub Divisi Pengendalian Kinerja & Infrastruktur SDA, BBWS, TKPSDA
15	Terlaksananya Evaluasi atas kegiatan Operasional Waduk dan Layanan Air Irigasi pada infrastruktur	Pengumpulan data Operasional Waduk dan Debit Layanan Irigasi dari laporan Unit Terkait	a. Menetapkan batasan standar Operasi Waduk dan Layanan Air Irigasi berdasarkan Rencana Tahunan Operasi	Penyusunan laporan Triwulanan kepada Pihak Eksternal					Laporan Triwulanan Operasional Waduk dan Layanan Air Irigasi terbit	Sub Divisi Pengendalian Kinerja & Infrastruktur SDA
			b. Melakukan perbaikan secara terus menerus dalam hal 1) kelengkapan data, 2) Tertib Administrasi Pelaporan 3). Koordinasi dan komunikasi antar Unit dan Pihak Eksternal terkait lainnya secara intensif							
16	Dukungan Pedoman Siaga Banjir sebagai acuan kegiatan kesiapsiagaan pengendalian banjir	- Inventarisasi serta pengumpulan data sebagai bahan penyusunan PSB - Koordinasi dengan Pihak eksternal (bila diperlukan)	Pedoman Siaga Banjir sebagai acuan kegiatan kesiapsiagaan pengendalian banjir	Penyusunan Pedoman Siaga Banjir PJT 1					Pedoman Siaga Banjir terbit tepat waktu	Sub Divisi Pengendalian Kinerja & Infrastruktur SDA
17	Terlaksananya kegiatan pemantauan kondisi kualitas air di Wilayah Kerja PJT I	- Inventarisasi serta pengumpulan data monitoring kualitas air - Koordinasi dengan Pihak eksternal (bila diperlukan)	Penyampaian laporan atau informasi kepada Pihak Eksternal dan Internal sesuai kebutuhan	Penyusunan Laporan Monitoring Kondisi Kualitas Air Triwulan-an					Laporan monitoring Triwulan-an terkirim	Sub Divisi Pengendalian Kinerja & Infrastruktur SDA
18	Evaluasi terhadap kepatuhan penerapan SMM, tindak lanjut temuan dan memberikan masukan	a. Inventarisasi data/masukan dan permasalahan yang ada terkait penerapan SMM b. Melakukan koordinasi dengan unit terkait agar hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan c. Menyampaikan masukan kepada manajemen secara tepat waktu dan tepat sasaran. c. Melakukan tindak lanjut atas temuan terkait kepatuhan terhadap penerapan sistem & prosedur	Melaksanakan perbaikan dokumen sistem manajemen mutu secara terus menerus dan menyampaikannya secara tertulis	Mengkoordinasikan kegitan Laporan Tinjauan Manajemen Pusat secara periodik dan menyampaikan laporan-laporan seperti : b. Membuat laporan progres tindaklanjut temuan AI terkait DMK c. Membuat laporan analisa efektivitas penerapan SMM d. Membuat laporan hasil evaluasi kecukupan pedoman mutu, prosedur dan instruksi kerja e. Membuat laporan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi kecukupan pedoman mutu, prosedur dan instruksi kerja f. Membuat laporan analisa Produk Tidak Sesuai (PTS) & Kepuasan Pelanggan (KP) g. Membuat laporan Kuisioner Kepuasan Pelanggan					Laporan tindak lanjut terkirim Laporan tindak lanjut terkirim Laporan analisa terkirim laporan evaluasi terkirim Laporan pemantauan terkirim Laporan analisa PTS/KP terbit Laporan terbit	Sub Divisi Manajemen Risiko, Mutu & K3
19	Kesesuaian Pedoman Mutu dan Prosedur/Instruksi	Merevisi dan/atau menyusun pedoman mutu, prosedur	Melakukan revisi dan/atau penyusunan SOP dalam rangka	a. Melakukan revisi pedoman mutu dan prosedur/instruksi kerja b. Menyusun prosedur/instruksi kerja baru c. Melakukan penggabungan prosedur/instruksi kerja					Revisi terbit Prosedur/instruksi kerja baru terbit Penggabungan prosedur/instruksi kerja terbit	Sub Divisi Manajemen Risiko, Mutu & K3
20	Peningkatan pemahaman SMM ISO 9001 : 2015 dan SMK3 di seluruh unit	Usulan pelatihan atau peningkatan *awareness* atas pentingnya SMM ISO dan SMK3	Melaksanakan pembahasan dan sosialisasi bersama unit terkait	a. Melaksanakan pembahasan draft revisi Prosedur/Instruksi Kerja e. Melaksanakan sosialisasi revisi Pedoman Mutu, Prosedur/Instruksi Kerja c. Melaksanakan sosialisasi Prosedur/Instruksi Kerja baru					Pembahasan terlaksana Laporan Evaluasi Penanganan Risiko terbit Rencana penerapan Manajemen Risiko	Sub Divisi Manajemen Risiko, Mutu & K3 Sub Divisi Manajemen Risiko, Mutu & K3
21	Penerapan Manajemen Resiko secara memadai	a. Koordinasi secara intensif antara *Risk Champion* DMRK dengan *Risk Champion Unit-unit* b. Koordinasi secara intensif untuk kegiatan pengumpulan, identifikasi, menganalisa dan evaluasi risiko korporat c. Pelibatan PIC Unit Pemilik Risiko Utama dalam kegiatan pemantauan profil risiko korporat terkait kesesuaian	a. Mendorong peningkatan kualitas organ Manajemen Risiko b. Penyesuaian secara bertahap Pedoman Manajemen Risiko dan atau SOP lainnya yang terkait dengan penerapan c. Penyampaian progres pemenuhan kualitas organ Manajemen Risiko Perusahaan melalui forum Rapat	a. Melakukan pendampingan kepada Unit-unit dalam kegiatan penyusunan dokumen manajemen Risiko Unit sesuai permintaan b. Melakukan pengumpulan dan telaah atas risiko unit yang potensial menjadi risiko korporat. c. Menyusun Profil Risiko Korporat d. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan mitigasi risiko korporat e. Melaksanakan kegiatan pengukuran RMI f. Melaksanakan review Pedoman/SOP terkait implementasi Manajemen Risiko di Perusahaan g. Kerjasama penyusunan E-GRC bersama Unit Terkait					Pembinaan terlaksana Pengumpulan risiko terlaksana Profil Resiko Korporat terbit Pemantauan terlaksana RMI terlaksana RMI terlaksana Aplikasi E-GRC terlaksana	Sub Divisi Manajemen Risiko, Mutu & K3

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
22	Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan	a. Perencanaan kegiatan SMK3 tahunan b. Melaksanakan pemeriksaan konsistensi pelaksanaan/ implementasi K3 c. Kerjasama dan Koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan terkait. d. Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap kinerja K3 perusahaan e. Melakukan koordinasi rutin antara P2K3 dengan PKW	a. Penetapan atas review kebijakan K3 b. Penerapan SMK3 dilakukan bertahap di semua unit c. Usulan alokasi dana untuk pelaksanaan Audit SMK3 oleh Pihak Internal dan eksternal d. Pemantauan Hasil Tindak lanjut Temuan Audit e. Kegiatan *kowledge sharing* terkait penerapan K3	a. Penyusunan program kegiatan P2K3 b. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen K3 dan Rapat P2K3 c. Pelaksanaan simulasi tanggap darurat d. Pelaksanaan Audit Internal/ Eksternal SMK3 e. Menyusun laporan pemantauan progres tindak lanjut temuan AI SMK3 f. Melaksanakan inspeksi peralatan keadaan darurat dan kondisi kerja					Program tersusun Rapat terlaksana Simulasi terlaksana Audit terlaksana Laporan terkirim Inspeksi terlaksana	Sub Divisi Manajemen Risiko, Mutu & K3
				g. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja					Pemantauan dan pengukuran terlaksana	
23	Peningkatan kualitas SDM di lingkungan DMRK	Penugasan pejabata/staf untuk mengikuti pelatihan internal b. Mengajukan usulan pelatihan internal (in house training)	a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	a. Mengikuti pelatihan : a.1 Ahli K3 Umum a.2 Audit Internal ISO 9001: 2015 a.3 Integrated Management System a.4 Risk Assesment a.5 Quality Management Representative a.6 Certified Risk Management Profesional a.7 Sertifikasi Keamanan Bendungan a.8 Perpajakan a.9 Manajemen kuangan untuk personil non keuangan b. Mengikuti studi banding ke perusahaan lain : b.1 Perusahaan yang telah memiliki dan menerapkan E-GRC b.2 Perusahaan yang telah menerapkan Sistem Monitoring Keamanan Infrastruktur secara real time c. Mengajukan usulan *in house training* : c.1 Audit Internal ISO 9001:2015 c.2 Awareness ISO 9001:2015 c.3 Awareness Manajemen Risiko c.4 Awareness SMK3					Pelatihan terlaksana terlaksana Usulan training terkirim	DSDM

Bidang: Sumber Daya Korporat

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
1	Mengusahakan pendapatan dari penempatan dana untuk mendukung investasi dan kegiatan pokok Perusahaan serta memperkecil piutang Perusahaan	a. Portofolio penempatan dana secara optimal b. Meningkatkan pendekatan kepada pemanfaat untuk pembayaran piutang dan melakukan pembinaan pelanggan	a. Penempatan dana diarahkan pada resiko terkecil b. Pendesakan pembayaran kepada pemanfaat perlu ditingkatkan untuk mempercepat arus kas masuk	a. Penempatan dana dalam bentuk tabungan, deposito dan reksadana b. Meningkatkan peran tim pembinaan pelanggan melalui kunjungan / komunikasi dengan pelanggan					a. Investasi dapat tercukup dari pendapatan b. Pendapatan ditempatkan pada portofolio yang aman dengan hasil yang memuaskan	Sub Div. Anggaran Sub Div. Anggaran DJA
2	Laporan Keuangan terbit tepat waktu	Pembinaan kemampuan petugas keuangan, pembukuan dan pelaporan keuangan	Penyelesaian laporan keuangan dan manajemen tepat waktu dengan penerapan sistem ERP SAP manajemen tepat waktu	a. Meningkatkan kecepatan penyelesaian laporan keuangan dan manajemen keakuratan laporan keuangan melalui pelatihan dan pembinaan rutin bidang akuntansi b. Penyempurnaan sistem informasi akuntansi					a. Laporan terbit tepat waktu dan berkualitas Sistem informasi akuntansi teredia sesuai kebutuhan b. Sistem ERP SAP berjalan dengan baik	Sub Div. Akuntansi Manajemen Sub Div. Akuntansi Manajemen
3	Penguatan *(strengthening)* pengelolaan sumber daya air untuk seluruh wilayah kerja Perusahaan	Penerapan sistem ERP SAP di seluruh wilayah kerja dan unit bisnis perusahaan	Memberikan pelatihan yang memadai serta menyediakan fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan	Meningkatkan pelatihan					ERP SAP dapat berjalan dengan baik dan kompetensi pegawai meningkat setelah dilakukan pelatihan	DAK, Unit, DJA

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
4	Tersedianya sumber daya manusia yang	a. Penyusunan formasi dan pelaksanaan rekutmen tenaga	Penyusunan formasi dan pelaksanaan rekrutmen yang	a. Penyusunan jumlah formasi tenaga					Penerimaan tenaga sesuai dengan formasi yang	Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM
		b. Meningkatkan kompetensi karyawan sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan kebutuhan/perkembangan perusahaan yang berdasarkan pada *training need analysis* melalui kegiatan : b.1. Peningkatan Pendidikan b.2 Pelaksanaan Pelatihan b.3. Sertifikasi keahlian & keterampilan b.4 Partisipasi aktif seminar/simposium dalam negeri dan luar negeri b.5 Tranfer knowledge bagi karyawan yang akan Purnabakti b.6 Kegiatan *Knowledge Sharing*	Pelaksanaan peningkatan kompetensi karyawan yang berpedoman pada QP/PJT/07 dan KPTS Direksi tentang Pedoman Peningkatan Pendidikan Karyawan	a. Pelaksanaan peningkatan kompetensi karyawan : a.1. Pelatihan a.2. Pendidikan a.3. Sertifikasi keahlian dan keterampilan b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan seminar/simposium di dalam/luar negeri c. Pelaksanaan *transfer knowledge* bagi karyawan yang akan purnabakti d. Pelaksanaan kegiatan *knowledge sharing*					Kompetensi Karyawan telah meningkat sesuai dengan program pelatihan, pendidikan dan sertifikasi yang dilakukan kompetensi sesuai dengan program Diklat dan kinerja pelatihan tercapai keikutsertaan karyawan dalam kegiatan seminar/simposium sesuai dengan penugasan Kegiatan transfer knowledge terlaksana sesuai dengan program	Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM Seluruh unit kerja Divisi SDM Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM Seluruh unit kerja Vendor / Lembaga Pelatihan
		c. Membangun dan mengembangkan manajemen talenta	Pengelolaan dan pengembangan Karyawan melalui *talent pool* berpedoman pada Peraturan Direksi tentang Manajemen Talenta	a. Persiapan dan penguatan insfrastruktur Manajemen Talenta b. Informasi lengkap tentang Manajemen Talenta dan c. Pengumpulan Talenta (*Talent Identification, Talent* d. *Talent Management Process* (*Talent Development, Talent* e. Evaluasi					Pelaksanaan kegiatan knowledge sharing sesuai	Komite Talenta, PPJS, DSDM Seluruh unit kerja Vendor / Lembaga Asesmen
5	Membangun kapasitas perusahaan dalam memecahkan masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki daya saing tinggi	a. Reviu Struktur Organisasi Perusahaan	Pelaksanaan perubahan struktur organisasi dalam rangka mendukung kesiapan menghadapi perubahan	Perubahan struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas operasional					Struktur Organisasi telah ditetapkan dan diberlakukan	Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM
		b. Fungsi SDM sebagai *business partner*	Membantu Karyawan memiliki ide dan solusi dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan bisnis, memiliki keterampilan berkomunikasi, negosiasi, dan dapat menangani keluhan dengan baik	Memberikan panduan sumber daya manusia dan berkomunikasi dengan orang-orang secara luas untuk membangun ikatan bisnis sebagai salah satu strategi perusahaan					Membangun jembatan antara unit kerja bisnis dan fungsi sumber daya manusia, Lingkungan kerja yang kondusif dan meminimalisir rasa kurang nyaman dari sumber daya manusia	Divisi SDM, Seluruh unit kerja
6	Penguatan pengelolaan sumber daya manusia melalui tindak lanjut hasil Human Capital Maturity Assessment (HCMA)	a. Asesmen terhadap pengelolaan SDM Perusahaan melalui program Human Capital Maturity Assessment oleh KBUMN b. Pemenuhan rekomendasi hasil Human Capital Maturity Asessment	Pelaksanaan Human Capital Maturity Asessment untuk memahamai posisi pengelolaan SDM sesuai ketentuan KBUMN Peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola pengelolaan SDM di Perusahaan	Berperan aktif dalam kegiatan Human Capital Maturity Asessment oleh KBUMN Pelaksanaan rekomendasi hasil Human Capital Maturity Asessment oleh KBUMN					Human Capital Maturity Asessment dapat terlaksana dengan baik dan memperoleh *feedback* untuk pengembangan pengelolaan SDM Rekomendasi hasil Human Capital Maturity Asessment dapat ditindaklanjuti	Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM
7	Peningkatan kompetensi Karyawan melalui program pembelajaran dan pengembangan	Program pembelajaran dan pengembangan sesuai profil kompetensi Karyawan	Penetapan Program pembelajaran dan pengembangan Karyawan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan Karyawan					Kegiatan pembelajaran dan pengembangan Karyawan terlaksana sesuai program	Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM
8	Peningkatan kapasitas Karyawan melalui program perputaran talenta	Perputaran talenta di lingkungan PJT I Grup	Implementasi Pedoman Perputaran Talenta di PJT I Grup	Melaksanakan perputaran talenta Induk di Anak Perusahaan sebagai salah satu mekanisme pembelajaran					Program perputaran talenta terlaksana sesuai pedoman	Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM
9	Peningkatan kapasitas Karyawan melalui program internship di Perusahaan lain	Bekerja sama dengan Perusahaan lain dalam rangka mendukung program internship	Program Internship untuk meningkatan wawasan dan memahami budaya kerja Perusahaan lain	Melaksanakan program internship Karyawan di Perusahaan lain					Program internship terlaksana sesuai pedoman	Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM
10	Pelaksanaan penyesuaian/peningkatan jenjang karier karyawan terlaksana	Pelaksanaan penyesuaian peningkatan jenjang karier karyawan sesuai dengan career planning dan evaluasi kinerja dan kompetensi karyawan	Pelaksanaan jenjang karier karyawan sesuai dengan KPTS Pedoman Penyesuaian Jenjang Karier	a. Updating monitoring data base karyawan yang akan disesuaikan jenjang karirnya b. Pembahasan bersama dengan Pihak Manajemen c. Penerbitan KPTS Penyesuaian/Peningkatan karier					Sistem informasi yang *up to date* dan teruji telah tersusun	DSDM, Panitia Kepegawaian Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM, Sub Div. Administrasi,
11	Tersedianya data base SDM yang *up to date* guna	Pelaksanaan updating data base SDM setiap terjadi	Pelaksanaan Updating data base dan penggunaan ap;ikasi	a. Melaksanakan Updating data base dan demografi SDM setiap b. Penggunaan HCIS					Sistem informasi yang up to date HCIS berjalan	Sub Div. Administrasi, Remunerasi&Kompensasi, DTI Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM, DTI
12	Implementasi Nilai-Nilai Utama Sumber Daya Manusia Perusahaan sesuai tahapan dalam Pedoman (Tahap Penerimaan/Acceptance)	Tahap Penerimaan (*Acceptance*) merupakan tahap dimana	Kegiatan internalisasi dan implementasi, baik menggunakan media komunikasi maupun program-program budaya	Melakukan sosialisasi kepada seluruh tingkatan Karyawan bahwa Budaya AKHLAK telah diterapkan dalam seluruh proses kegiatan Perusahaan.					Karyawan telah memenuhi tiga tingkatan yaitu: Memahami, Menerima dan Memengaruhi.	Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM KEGIATAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	UNSUR TERKAIT
1	2	3	4	5	6				7	8
13	Satisfaction dan Engagement Karyawan terhadap perusahaan meningkat guna mendukung pencapaian produktivitas perusahaan dan motivasi kerja	a. Peningkatan Satisfaction & Engagement Karyawan 1. Memberikan remunerasi dan kompensasi berbasis kinerja	Pelaksanaan remunerasi dan Kompensasi tepat waktu	a. Remunerasi dan kompensasi diberikan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku b. Mereview, memprogram dan mengusulkan perubahan tarif/ besaran remunerasi dan kompensasi sesuai laju inflasi					Pembayaran Remunerasi dan Kompensasi terlaksana sesuai ketentuan. Review & usulan perubahan disetujui.	Sub Divisi Admin, Remunerasi & Kompensasi dan DAK. Sub Divisi Admin, Remunerasi & Kompensasi, DPK, DAK dan Direksi.
		2. Memberikan benefit tambahan berupa jaminan sosial,	a. Mengikutsertakan karyawan pada Badan Penyelenggara b. Menyediakan fasilitas kesehatan dan memberikan jaminan pada karyawan yang mengalami gangguan kesehatan.	Melaksanakan pembayaran iuran sesuai jadwal Membuka fasilitas kesehatan sesuai jam kerja Mereview prosedur klaim biaya kesehatan					Iuran BPJS & DPLK terbayar tepat waktu. Klinik siap menerima pasien Klaim kesehatan terbayar sesuai prosedur.	Sub Divisi Admin, Remunerasi & Kompensasi dan DAK. Sub Divisi Admin, Remunerasi & Kompensasi. Sub Divisi Admin, Remunerasi & Kompensasi.
		3. Memberikan biaya saat karyawan mengadakan perjalanan dinas.	Melaksanakan perhitungan sesuai Pedoman Biaya Perjalanan Dinas	Mereview Prosedur Perjalanan Dinas dan membayar biaya perjalanan dinas.					Biaya perjalanan dinas terbayar sesuai prosedur.	Sub Divisi Admin, Remunerasi & Kompensasi.
		b. Melaksanakan evaluasi Satisfaction & Engagement Karyawan melalui kegiatan survey yang dilaksanakan setiap periode	a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelayanan Divisi Sumber Daya Manusia	a. Melaksanakan *Employee Satisfaction Survey* (ESS) dan *Employee Engagement Survey* (EES)					a. Tersusunnya Laporan Employee Satisfaction Survey (ESS) dan Employee Engagement Survey (EES)	Sub Div. Pengembangan Organisasi & SDM, DTI
14	Daftar Penyedia Perusahaan (DPP)	Koordinasi internal dengan unit terkait dan memberikan informasi kepada para penyedia/vendor	Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait	a. Pembukaan DPP di web e-proc dan evaluasinya; b. Pengumuman DPP					DPP tersusun	DPKU; Penyedia/Vendor
15	Laporan Evaluasi Kinerja Penyedia/Vendor	Evaluasi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di perusahaan	Meningkatkan kecepatan dan ketepatan evaluasi	Pelaksanaan evaluasi semester II tahun sebelumnya maupun semester I tahun berjalan					Laporan evaluasi tersusun	DPKU; Unit Terkait; Vendor
16	Laporan Survei Kepuasan Penyedia Barang & Jasa	Melaksanakan penyebaran data/isisan survey kepada penyedia/vendor	Memastikan survey dilaksanakan tepat waktu	Pelaksanaan survei untuk proses pengadaan tahun 2024					Laporan survei tersusun	DPKU; Penyedia/Vendor
17	Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa	Koordinasi internal DPKU dengan pihak terkait	Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait	a. Penyusunan RUP berdasarkan RKAPT tahun 2024 b. Pengumuman RUP di Web Eprocurement					RUP tersusun dan diumumkan	DPKU, Unit Terkait
18	Proses Tender Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan tender sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan	Memastikan pelaksanan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tepat waktu	a. Penyusunan dokumen tender; b. Pelaksanaan tender melalui Web Eprocurement; c. Pemantauan proses PBJ.					Proses tender berjalan	DPKU, POKJA PBJ
19	Pemantauan Implementasi PaDi UMKM	Koordinasi internal dengan unit terkait	Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait	a. Pemantauan implementasi PaDi UMKM; b. Sosialisasi dan pendampingan implementasi PaDi UMKM;					Implementasi PaDi UMKM berjalan	DPKU, Unit Terkait
20	Pemantauan Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinasi internal dengan unit terkait	Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait	a. Pemantauan Penggunaan PDN dalam PBJ; b. Sosialisasi dan pendampingan Penggunaan PDN di Lingkungan Perusahaan;					Penggunaan PDN berjalan sesuai dengan program	DPKU, Unit Terkait
21	Mengurus sertifikat untuk tanah yang belum ada sertifikatnya baik yang berasal dari PMN, Investasi dan pengadaan lainnya.	Inventarisasi Aset tanah secara phisik dengan pihak Divisi/Unit terkait	Membuat program prioritas aset yang akan dilakukan sertifikasi	a. Inventarisasi Aset yang belum bersertifikat b. Menyusun Prioritas aset yang akan disertifikasi					Program Tersusun	DPKU
22	Balik nama Sertipikat tanah baik yang berasal dari PMN, Investasi dan pengadaan lainnya serta Perpanjangan HGB	a. Inventarisasi Inventarisasi Sertifikat yang belum an. PJT I b. Inventarisasi masa Berlaku HGB Sertifikat yang sudah An. PJT I	a. Membuat daftar sertifikat yang belum dilakukan balik nama b. Membuat daftar masa berlaku HGB dalam sertifikat yang sudah An. PJTI	Melakukan pengajuan pengadaan untuk balik nama dan Perpanjangan HGB					Program tersusun	DPKU
23	Menyusun Buku inventarisasi Barang (BIB)	Melakukan Export data aset dari SAP dan dilakukan pengkoreksian terhadap aset yang kurang sesuai secara kelas aset	memastikan Export dilakukan sesuai jadual	a. Melakukan koordinasi dengan DAK terkait nilai aset b. Dokumen BIB terbit					BIB terbit sesuai Jadual	DPKU; DAK
24	Mengajukan Aset yang akan dihapusbukukan ke Dewas/Direksi (Proses Lelang)	Melakukan Inventarisasi Aset yang sudah dalam kondisi RB, serta nilai buku Rp.1,-	memastikan Inventasisasi ASET Lelang dilakukan sesuai jadual dan berkomunikasi dengan baik dengn unit terkait	a. Inventarisasi Aset kondisi Rusak Berat dan Umur Aset habis b. Koordinasi dengan DAK dan TIM terkait Reclasifikasi Aset					Program Lelang berjalan dan selesai	DPKU; DAK; TIM

RENCANA KERJA TAHUNAN DEWAN PENGAWAS TAHUN 2024

NO	TUJUAN	SASARAN		PROGRAM KEGIATAN		JADWAL	INDIKATOR	TARGET 2024
1	Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan.	1	Perolehan skor asesment penerapan GCG minimal 85% dari praktik terbaik	1	Rapat Rutin Dewan Pengawas (Internal dan dengan Direksi) - Rapat Internal Dewan Pengawas - Rapat Gabungan dengan Direksi	 - 1 kali setiap bulan - 1 kali setiap bulan	 - % kehadiran/tahun - % kehadiran/tahun	 - 90% - 90%
		3	Meningkatnya pemahaman Dewan Pengawas atas kondisi perubahan	3	Memberikan tanggapan laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan	4 kali setiap tahun	Jumlah kegiatan	4 kali
		4	Terlaksananya saran maupun arahan Dewan Pengawas oleh manajemen	4	Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2022 kepada Pemiliik Modal	1 kali setiap tahun	Tenggat waktu pelaporan sesuai ketentuan	4 bulan setelah tahun buku berakhir
				5	Memberikan persetujuan kepada Direksi yang terkait pengelolaan perusahaan sesuai kewenangan Dewan Pengawas	insidentil	Tenggat waktu proses persetujuan	15 hari setelah usulan masuk dan dokumen lengkap
				6	Memberikan pengarahan keapda jajaran manajemen dalam penyusunan RKAP 2025	1 kali setiap tahun	Jumlah kegiatan	1 kali
				7	Menghadiri Seminar/ Konferensi baik di dalam maupun di luar negeri	insidentil	Frekuensi keikutsertaan	2 kali
				8	Mengadakan studi banding mengenai industri pengairan - Dalam Negeri - Luar Negeri	 - insidentil - insidentil	 - Frekuensi keikutsertaan - Frekuensi keikutsertaan	 - 1 kali - 1 kali
				9	Memberikan tanggapan dan rekomendasi terhadap usulan RKAP 2025	1 kali setiap tahun	Jumlah kegiatan	paling lambat 30 November 2024
				10	Menghadiri Rapat Pembahasan Bersama - Pengesahan Laporan Keuangan (audited) - Pengesahan RKAP	 - 1 kali setiap tahun - 1 kali setiap tahun	 - Frekuensi kehadiran - Frekuensi kehadiran	 - 1 kali - 1 kali

Lampiran XVII

AGENDA KEGIATAN DEWAN PENGAWAS TAHUN 2024

Bulan	Agenda	Minggu Ke-			
		I	II	III	IV
Januari	Rapat Internal Dewas				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Evaluasi Laporan Manajemen (LM) Desember 2023				
	- Pengesahan RKAP Tahun 2023				
Februari	Rapat Internal Dewas dan Kunjungan Lapangan				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Evaluasi LM Januari 2024				
	- Evaluasi LM Tahun 2023 (*audited*)				
Maret	Rapat Internal Dewas				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Evaluasi LM Februari 2024				
	- RPB LM Thn 2022 Audited (dengan KBUMN)				
April	Rapat Internal Dewas				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Evaluasi LM Triwulan I 2024				
	- Progress report pending matters s/d Triwulan I 2024				
Mei	Rapat Internal Dewas dan Kunjungan Lapangan				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Evaluasi LM April 2024				
Juni	Mengikuti Seminar (dalam atau luar negeri)				
	Rapat Internal Dewas				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Evaluasi LM Mei 2024				
Juli	Rapat Internal Dewas dan Kunjungan Lapangan				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Evaluasi LM SMT I 2024				
	- Progress report pending matters s/d Triwulan II 2024				
Agustus	Rapat Internal Dewas				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Evaluasi LM Juli 2024				
September	Mengikuti Seminar (dalam atau luar negeri)				
	Rapat Internal Dewas				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Pembahasan Draft Awal RKAP 2025				
	- Evaluasi LM Agustus 2024				
Oktober	Penyusunan RKA Dewas Tahun 2024				
	Rapat Internal Dewas dan Kunjungan Lapangan				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Evaluasi LM Triwulan II 2024				
	- Pembahasan Finalisasi RKAP 2025				
November	Rapat Internal Dewas				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Pembahasan Prognosa RKAP 2024				
	- Evaluasi LM Oktober 2024				
Desember	Rapat Internal Dewas dan Kunjungan Lapangan				
	Rapat dengan KAP				
	- Rapat finalisasi Laporan KAP				
	Rapat Gabungan dengan Direksi:				
	- Evaluasi LM November 2024				

ANGGARAN DEWAN PENGAWAS PJT I TAHUN 2024

Uraian	Norma										Anggaran 2024
I. Honorarium dan Tunjangan Dewan Pengawas dan Organ											
1 Honorarium											
- Ketua Dewas			1	orang	x	12	Bln	x	Rp	49,500,000	594,000,000
- Anggota Dewas			2	orang	x	12	Bln	x	Rp	44,550,000	1,069,200,000
- Sekretaris Dewas			1	orang	x	12	Bln	x	Rp	16,500,000	198,000,000
- Komite Dewas			4	orang	x	12	Bln	x	Rp	22,000,000	1,056,000,000
- Staf Dewas			1	orang	x	12	Bln	x	Rp	8,000,000	96,000,000
	Sub Jumlah (I.1)										*3,013,200,000*
2. Tunjangan Transportasi											
- Ketua Dewas			1	orang	x	12	Bln	x	Rp	9,900,000	118,800,000
- Anggota Dewas			2	orang	x	12	Bln	x	Rp	8,910,000	213,840,000
- Sekretaris Dewas			1	orang	x	12	Bln	x	Rp	3,300,000	39,600,000
	Sub Jumlah (I.2)										*372,240,000*
3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan											
- Ketua Dewas			1	orang	x	1	Bln	x	Rp	49,500,000	49,500,000
- Anggota Dewas			2	orang	x	1	Bln	x	Rp	44,550,000	89,100,000
- Sekretaris Dewas			1	orang	x	1	Bln	x	Rp	16,500,000	16,500,000
- Komite Dewas			4	orang	x	1	Bln	x	Rp	22,000,000	88,000,000
- Staf Dewas			1	orang	x	1	Bln	x	Rp	8,000,000	8,000,000
	Sub Jumlah (I.3)										*251,100,000*
	Jumlah (I)										***3,636,540,000***
II. Perjalanan Dinas/Kunjungan Kerja											
1 Tiket Pesawat Jakarta-Wilayah Kerja											
- Ketua Dewas	12	x	1	orang				x	Rp	5,000,000	60,000,000
- Anggota Dewas	12	x	2	orang				x	Rp	5,000,000	120,000,000
- Sekretaris Dewas	12	x	1	orang				x	Rp	5,000,000	60,000,000
- Komite Dewas	12	x	4	orang				x	Rp	5,000,000	240,000,000
- Staf Dewas	12	x	1	orang				x	Rp	5,000,000	60,000,000
	Jumlah (II.1)										*540,000,000*
2 Biaya Hotel											
- Ketua Dewas	12	x	1	orang	x	2	malam	x	Rp	2,500,000	60,000,000
- Anggota Dewas	12	x	2	orang	x	2	malam	x	Rp	2,500,000	120,000,000
- Sekretaris Dewas	12	x	1	orang	x	2	malam	x	Rp	2,000,000	48,000,000
- Komite Dewas	12	x	4	orang	x	2	malam	x	Rp	2,000,000	192,000,000
- Staf Dewas	12	x	1	orang	x	2	malam	x	Rp	2,000,000	48,000,000
	Jumlah (II.2)										*468,000,000*
3. Uang Harian											
- Ketua Dewas	12	x	1	orang	x	3	Hr	x	Rp	1,500,000	54,000,000
- Anggota Dewas	12	x	2	orang	x	3	Hr	x	Rp	1,500,000	108,000,000
- Sekretaris Dewas	12	x	1	orang	x	3	Hr	x	Rp	1,000,000	36,000,000
- Komite Dewas	12	x	4	orang	x	3	Hr	x	Rp	1,000,000	144,000,000
- Staf Dewas	12	x	1	orang	x	3	Hr	x	Rp	750,000	27,000,000
	Jumlah (II.3)										*369,000,000*
	Jumlah (II)										*1,377,000,000*
III Seminar Luar Negeri											
1 Tiket Pesawat	1	x	3	orang	x	$	1750	x	Rp	15,000	78,750,000
2 Uang Harian (5 hr, Incl. Hotel + Sewa Mobil)											
- Ketua Dewas	1	x	1	orang	x	$	2500	x	Rp	15,000	37,500,000
- Anggota Dewas	1	x	2	orang	x	$	2500	x	Rp	15,000	75,000,000
	Jumlah (III)										***191,250,000***
IV Seminar Dalam Negeri											
1 Tiket Pesawat											
- Dewas	2	x	3	orang				x	Rp	5,000,000	30,000,000
- Sekretaris Dewas dan Staf	2	x	2	orang				x	Rp	5,000,000	20,000,000
- Komite Dewas	2	x	4	orang				x	Rp	5,000,000	40,000,000
2 Uang Harian											
- Ketua Dewas	2	x	1	orang	x	3	Hr	x	Rp	1,500,000	9,000,000
- Anggota Dewas	2	x	2	orang	x	3	Hr	x	Rp	1,500,000	18,000,000
- Sekretaris Dewas	2	x	1	orang	x	3	Hr	x	Rp	1,000,000	6,000,000
- Komite Dewas	2	x	4	orang	x	3	Hr	x	Rp	1,000,000	24,000,000
- Staf Dewas	2	x	1	orang	x	3	Hr	x	Rp	750,000	4,500,000
3 Sewa Kamar Hotel											
- Ketua Dewas	2	x	1	orang	x	2	malam	x	Rp	2,500,000	10,000,000
- Anggota Dewas	2	x	2	orang	x	2	malam	x	Rp	2,500,000	20,000,000
- Sekretaris Dewas	2	x	1	orang	x	2	malam	x	Rp	2,000,000	8,000,000
- Komite Dewas	2	x	4	orang	x	2	malam	x	Rp	2,000,000	32,000,000
- Staf Dewas	2	x	1	orang	x	2	malam	x	Rp	2,000,000	8,000,000
5 Biaya Seminar	2	x	9	orang				x	Rp	5,000,000	90,000,000
	Jumlah (IV)										***319,500,000***
V Biaya Lain-lain Komisaris											
1 Biaya pengobatan Dewan Komisaris	Sebesar pemakaian (at cost)										
2 Pakaian Kerja Dewan Komisaris			9	orang	x	1			Rp.	2,000,000	18,000,000
3 Pembelian ATK											
- Biaya Pembelian Laptop			1	unit	x				Rp.	25,000,000	25,000,000
5 Biaya Sosial Dewas			12	bln	x	1			Rp.	500,000	6,000,000
	Jumlah (V)										***49,000,000***
TOTAL ANGGARAN											**5,573,290,000**